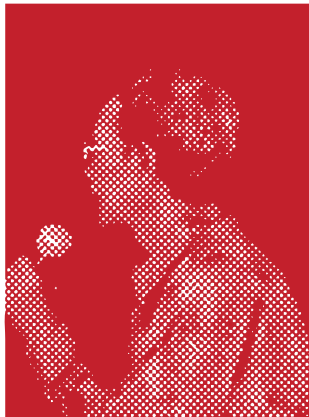
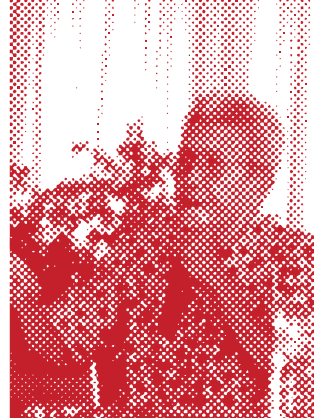
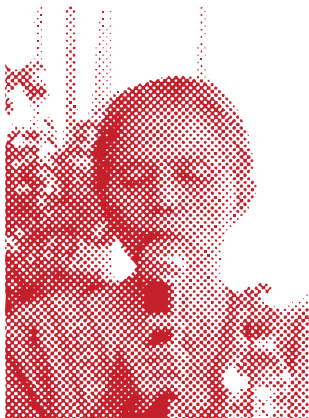
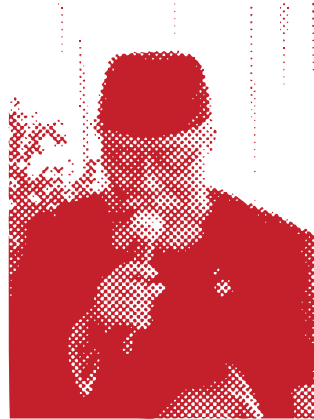
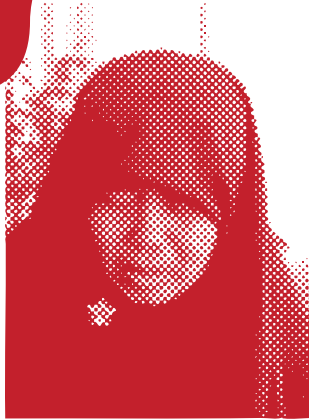


DENGAR KESAKSIAN SOLO





01 GILANG PENGAMEN YANG DIHILANGKAN

Gilang Pengamen Yang Dihilangkan

[Kesaksian Budiarti] V

Budiarti, biasa dipanggil Alfatah lahir 26 Juli 1958. Saat ini tinggal di Bibis Kulon Surakarta. Ia bekerja sebagai penjahit. Anaknya 5 orang, anak pertama Gilang yang ditemukan meninggal dunia setelah diculik dalam masa kerusuhan Mei '98 di Solo. Hingga sekarang Alfatah masih mengalami trauma.

Alfatah memberi kesaksian tentang kasus yang dialami Gilang dalam acara Dengar Kesaksian di Solo, Jawa Tengah:

Anak saya yang hilang namanya Gilang, nama aslinya Nugroho Iskandar, lahir 21 Februari 1977. Gilang itu *drop out* dari sekolah SMA karena terbentur biaya, sering keluar mengamen mencari nafkah, karena ia pengen jadi anak pinter maka sering bergaul dengan mahasiswa. Nggak tahunya di dalam gerakan itu, Gilang diculik tanggal 21 Mei 1998. Aktifitas Gilang, kalau jenuh ngamen

kadang ya buruh bangunan, atau pekerjaan lain, asal dapat uang. Dulu Gilang ikut organisasi PRD (Partai Rakyat Demokrat), terus DRMS (Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta) mahasiswa itu, solidaritas gerakan mahasiswa, sebagai ketua SPI (Serikat Pengamen Indonesia) Surakarta. Kalau di rumah sering bantu ibu, karena saya menjahit, Gilang itu memang punya semangat tinggi kepada keluarga, sehingga salalu mendorong adiknya supaya bersekolah dan bisa berprestasi, jangan seperti dia.

Gilang sebagai tulang punggung keluarga, karena anak yang paling gede, la kalau memberi pengarahannya tidak hanya ngomong tapi juga melakukan untuk memberi contoh. Kalau dirumah ia figur panutan bagi adik - adiknya dan hormat ke orang tua.

Siang itu tanggal 20 Mei, Gilang pulang katanya dari Balai kota ingin tidur sebentar, minta dibangunkan jam 15.00. Katanya mau pergi sama temen mau pergi ke Madiun. Biasanya kalau mau pergi selalu bilang tempatnya, sebab kalau terjadi apa-apa ibu cepet tahu. Gilang bilang pergi 2 hari karena ada yang mau ngajak kerja di Madiun. Ia diberi bekal 30 ribu oleh temannya. Uang itu diberikan ke saya tapi saya tidak mau supaya untuk bekal dia di Madiun

Tanggal 21 Mei pagi Jam 09.00 ada anak kampus cari Gilang menanyakan Gilang. Sore jam 16.00 datang lagi tapi Gilang belum datang. Disitu dia tanya kok belum pulang? Kayak kaget. Saya tidak habis pikir kok anak itu kaget.

Saya bilang kalau Gilang ke Madiun karena

mau dikasih pekerjaan sesuai keahlian Gilang. Temannya bilang pada lainnya mudah-mudahan bukan Gilang ya bu, karena ada kabar tapi jangan sedih dulu.

Ada informasi diketemukan di hutan sana ada sosok seperti Gilang, saya kaget, Kemudian pada paginya ada wartawan yang datang dari Surabaya dan berbagai pelosok sampai penuh, ada yang dari Bali dan luar Jawa.

Selain ada wartawan. Disitu juga ada pengacara Pak Wahyu Teo. Beliau datang ke rumah mengajak Bapaknya ngecek ke Polres Magetan, ternyata betul yang meninggal Gilang.

Sudah dimakamkan, dikatakan kalau Gilang sudah meninggal 3 hari yang lalu, namun sebelum dimakamkan telah divisum. Setelah Pak Wahyu Teo datang ke sana dan mengatakan ada keluarganya. Akhirnya jenasanya Gilang boleh dibawa pulang. Akhirnya 1 minggu kemudian Gilang baru bisa dibawa pulang, dibawa ke alun alun dan dimakamkan di Astana Purwolaya.

Ketika dibuka hanya mukanya saja, mukanya tampak. Cuma dalam visum dokter, ditemukan luka sobek di dada, uluhati atau jantungnya dicongkel, dan luka tembak di dada kiri sampai luka tembus, yang di badannya ada luka tusukan dan tembakan. Esok paginya banyak intel yang datang ke rumah tapi mereka menyamar dan menanyakan masalah atau aktivitas Gilang. Setelah itu banyak yang datang menanyakan Gilang, sampai hampir tiga tahun.

Sebenarnya saya tidak tahu apa penyebabnya

4

Gilang itu diculik, disiksa sampai dibunuh seperti itu, apa kesalahan anak saya, apa yang dilakukan anak saya tidak tahu. Karena yang saya tahu anak itu sehabis ngamen, pulang tidur, memang sering ada teman yang datang ngobrol ngobrol, dan nggak ada obrolan soal politik atau apa. Kata anak mahasiswa, Gilang itu bergabung dengan mahasiswa karena kepengen jadi mahasiswa. Saya juga tidak tahu gerakan apa dan yang dilakukan diluar rumah.

Sebagai orang tua saya tidak terima, Saya selama ini memang sudah mencari keadilan dengan bergabung bersama teman teman, saya ikut organisasi di Jakarta, yaitu IKOHI dan KontraS. Pernah kita juga melakukan, lobi ke DPR, Kejaksaan dan Menkopolhukam dan ke Istana.

Namanya kehilangan anak, itu harta saya yang tak ternilai. Dampaknya saya sampai sekarang jadi trauma, kalau anak saya pergi dan belum pulang maka saya jadi bingung.

Harapan saya kalau pemerintah melindungi rakyat dan menegakkan hukum yang adil dan benar serta menegakkan Pancasila. Jangan cuma orang berduit saja yang bisa dilindungi, hukum itu tidak berlaku bagi yang punya duit, berlaku bagi yang tidak punya duit juga. Saya memang akan terus bergabung dengan teman-teman bahwa kita harus ikut memperjuangkan keadilan. Karena jika tidak berjuang maka bisa terulang kembali.

“Kalau pemerintah tidak bisa menjalankan keadilan, ya harusnya diganti saja. Diganti saja dengan korban pelanggaran HAM.”



02 TALANGSARI OH,
TALANGSARI,
AKU DIBUI

[Kesaksian Sugeng Yulianto]

Sugeng Yulianto biasa dipanggil Yuli, lahir tanggal 14 Juli 1957. Pada tahun 1989, Yuli ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam kasus Talangsari. Selama dalam proses pemeriksaan Yuli mengalami penyiksaan. Ia kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup dan setelah mendapat remisi, dia dibebaskan pada tahun 1999. Yuli dan keluarganya sampai sekarang menderita trauma.

Saya tidak mengetahui tentang Peristiwa Talangsari, karena pada saat terjadi saya baru tinggal satu setengah bulan di Talangsari. Saya tidak paham kronologisnya. Yang saya tahu ada penangkapan Mujahidin yang dipimpin Warsidi. Kemudian ada penyerbuan ke pondok pada 7 Februari 1989. Ketika Peristiwa terjadi, saya sedang dalam perjalanan dari Solo ke Talangsari, setelah 2 hari dari kampung halaman.

Menurut cerita teman satu sel, pada saat kejadian penyerbuan oleh tentara katanya anak-anak yang meninggal 201 orang, yang ditahan banyak, bukan hanya Mujahidin Talangsari, tapi juga ada pembantu rumah tangga dari Palembang, karena tidak bawa KTP ikut ditahan.

Beberapa hari kemudian dilepas, karena tidak terdapat bukti. Masyarakat umum yang ditahan dan diajukan ke pengadilan kira-kira ada 15 orang. Beberapa rumah panggung dibakar, anehnya, perempuan, anak kecil di bakar di rumah panggung, banyak mayat yang luka bakar, gosong. Waktu itu saya ada dilingkup pondok Mujahidin berada di komunitas itu.

Setelah peristiwa, kami cari mobil mau menyelamatkan ibu-ibu dan anak-anak tapi tidak sesuai rencana. Upaya tidak berhasil, lalu kami masuk hutan. Saya ditangkap oleh warga yang berseberangan dengan Ponpes (pondok pesantren). Di sana ada warga yang mendukung pesantren dan ada yang tidak. Jumlah yang ditangkap ada ratusan, bukan hanya pengikut Warsidi tapi juga orang yang tidak punya KTP.

Setelah diseleksi akhirnya yang ditahan 15 orang. Ketika saya sedang menjalani hukuman, dalam benak saya berpikir, saya kan hanya tinggal di komunitas itu, dan tidak tahu apa-apa kok hukuman sama dengan yang terlibat disitu. Saya dipenjarakan di Korem Garuda Hitam.

Saya mengalami kekerasan selama 4 bulan saya disiksa terus, gigi rontok, sehingga sekarang saya ompong. Kaki ditindih kaki kursi. Kuku dicabut dan dilepas semua. Saya ditendangi, sehari 4x, pada tengah malampun saya dibangunkan dan dipukuli. Apa yang saya alami ini juga dialami kawan-kawan semua. Saya disetrum 65 kali, akhirnya akibat strum itu saya jadi lumpuh.

Sampai pada hari ini masih sakit urat, seringkali kambuh dan sering kesemutan, bahkan sampai sekarang masih terapi.

Di dalam penjara Kodim dan Korem, semua petugas ikut melakukan penyiksaan. Selanjutnya menjalani proses persidangan, saya ditahan di LP Rajabasa, Tanjung Karang Lampung dan selama itu saya tak mengalami kekerasan.

Dari persidangan yang melelahkan, saya divonis dengan hukuman seumur hidup. Saya ditanya apa menerima hukuman itu, maka saya menjawabnya, terima kasih atas putusan majelis hakim, kalau dilihat kejam, tapi ingat "*becik ketampik ala ketampa*". Selama proses sidang itu, penasehat hukum tidak membela.

Setelah 10 hari dari hari putusan sidang hukuman itu, ketua majelis meninggal, waktu itu saya di dalam LP Rajabasa, diambil oleh petugas, ditanyai apakah menguna-guna hakim, dan menuduh banyak teman yang masih berkeliaran di luar. Ketika saya menjawab tidak tahu, maka saya terus disetrum, dipecut. Barangkali hakim mengalami serangan jantung. Saya berada di dalam tidak menggerakkan siapapun. Saya dizalimi tidak berdosa dan bersalah, Tuhan itu tidak tidur. Ya itu tadi "*becik ketampik ala ketampa*".

Kemudian saya dipindah ke penjara di Nusa Kambangan, masuk ke LP Besi, Kemudian dipindah ke LP Batu alasannya apa saya juga tidak tahu. Selama di Nusa Kambangan saya tidak pernah mengalami kekerasan, dan tinggal di dalam barak bersama dengan napi kriminal. Saya mencoba mengisi hari dengan baik, setiap pagi saya bekerja mencabuti rumput, sehingga lapangan menjadi bersih. Di sana saya bisa bertani dan beternak.

Atas ketekunan saya mendapat penghargaan karena ide-ide yang positif. Kepala lapas sangat senang. Maka ketika saya mendapatkan kebebasan pada tahun 19 Januari 1999, saya bisa memiliki vespa milik kalapas. Kalau ditanya tentang kerugian saya, ya sangat besar.

Waktu itu Komnas HAM bertanya : saya jawab harta yang dijarah oleh tentara, uang tunai 2. 450.000 dan perhiasan isteri, semua total ada 65 juta rupiah. Kira-kira sekarang sekitar Rp.400 juta. Kebebasan saya dirampas. Waktu itu saya di rumah ditembaki dituduh berontak. Sekarang sudah terbukti kami jadi korban pelanggaran HAM. Bukan pemberontak. Saya direkomendasi mendapat 1,1 M.

Keluarga saya masih trauma, karena pada waktu itu isteri dan anak 3 orang juga ditahan 4 bulan 15 hari. Saat ditahan anak tertua berusia 6 tahun, kedua 3 tahun dan yang bungsu baru lahir, sehingga sedang menyusui. Akibatnya isteri trauma dan selalu ketakutan.

“Kalau membicarakan tentang peristiwa Talangsari di rumah, maka dia tidak senang, bahkan bisa diusir. Isteri juga tidak mau menemui tamu-tamu

“Tentang harapan saya, bahwa rasa dendam itu tidak ada sebagaimana sesuai ajaran Islam, Saya minta hak-hak saya di Masyarakat dipulihkan, Saya berharap kasus Talangsari diselesaikan dan haknya dikembalikan, supaya tidak terulang kembali perbuatan keji di masa yang akan datang. Di Solo ada 11 orang korban Talangsari. Yang ditahan 11 orang, diantaranya Nurdiansyah, Sodikin, Sofyan, Fahrudin, Ponidi, isteri saya dan anak saya 3 orang.”

03

DARI SOBSI
DIBUANG
KE PLANTUNGAN

[Kesaksian Magdalena Kastinah]

Magdalena Kastinah biasa dipanggil Ibu Kastinah lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 14 April 1948. Pada tahun 1964, Kastinah bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta dan kemudian diangkat sebagai ketua serikat buruh. Pada 20 Oktober 1965, saat berusia 17 tahun, Kastinah ditangkap polisi dengan tuduhan anggota Gerwani, bebas pada tahun 1979. Sekarang Kastinah hidup miskin seperti mantan Tapol 1965 lainnya, ia mengharapkan rehabilitasi nama baik dari pemerintah, dipenjara tanpa proses hukum.

Pada tahun 1959 aku menamatkan Sekolah Rakyat, kemudian melanjutkan pendidikan di SKP Mardikanya, ini adalah masa-masa yang menyenangkan dalam hidup aku.

Orang tuaku bukanlah orang kaya, maka biaya sekolah menjadi persoalan bagi kami. Menjelang kelas II, aku mulai bekerja ikut orang, diawali dari Cilacap terus ke Surabaya, dan ke Jakarta. Selama 3 tahun bekerja sebagai pem-

bantu rumah tangga. Ibu sakit-sakitan sehingga aku keluar dan merawat ibu, sambil berjualan rujak. Kemudian aku ke Jakarta ikut bulik, kerja di Pabrik Kaos di daerah Duren Tiga Pasar Minggu, Setelah cukup lama aku bekerja, teman-teman mengajak mendirikan sebuah organisasi serikat buruh. untuk memperbaiki nasib buruh. Serikat Buruh tekstil ini menjadi bagian dari SOBSI, sebuah organisasi yang dilegalkan oleh Presiden Soekarno. Semua buruh di pabrik menjadi anggota SOBSI.

Aku mulai aktif memperjuangkan nasib kawan-kawan. Aku menemui direktur untuk memberitahu tentang berdirinya Serikat Buruh. Karena minimnya gaji, kami mengajukan beberapa tuntutan yaitu, kenaikan gaji, hadiah lebaran, cuti haid, beras tiap bulan 10 kg, poliklinik untuk kesehatan. Karena tuntutan ini tak dipenuhi, maka serikat buruh mengadakan mogok kerja selama 1 jam. Akhirnya setelah negosiasi tuntutan ini dikabulkan perusahaan. Kabar ini sangat menggembirakan bagi kaum buruh. Pada bulan September 1965, aku mesti pulang ke Purwokerto. Karena nenek akan dioperasi. Namun sesampai di sana nenekku telah meninggal dunia.

Pada waktu itu usiaku 17 tahun. Tanggal 20 Oktober 1965, aku ditangkap polisi di rumah dan dibawa ke kantor Polisi di Purwokerto. Sejak hari itu tak pernah pulang lagi. Mendengar penangkapan ini keluargaku tak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Sepanjang waktu aku ditanya dan disuruh mengaku berada di Lubang Buaya dan dituduh sebagai Gerwani. Aku tidak mau mengaku karena memang aku tak pernah berada di sana.

Aku mengakui bahwa aku menjadi ketua serikat buruh dan memperjuangkan nasib kaum buruh. Aku pernah memimpin buruh untuk melakukan tuntutan kepada perusahaan, dan perusahaan pun mengabulkan tuntutan kami.

Setelah 2 minggu aku di pindah ke Semarang di sebuah kantor polisi. Disitu aku ditahan dengan para napi pidana, 1 kamar ada 5 orang. Pas datang pertama kali aku sakit, dibawa ke RS Polisi, setelah diperiksa ada 2 orang polisi datang melakukan pelecehan seksual, memegang (menusuk) kemaluanku, meski tidak lama dia mempermainkan, aku merasa sakit hati. Setiap malam ada kontrolan polisi ke kamar, sambil berteriak, "mana Gerwani?" serunya amat keras. Namun aku diam saja. Satu hari datang polisi mau membebaskan aku, asal mau dikawinkan dengan anaknya. Aku tidak mau, karena takut.

Aku dipindah ke Tahanan Perempuan Bulu Semarang, aku melihat ada 50 orang tahanan yang sepertiku. Kami tinggal dalam barak untuk 50 orang. Pada tahun 1966, Aku dibawa ke Penjara Bukit Duri, Aku diperiksa oleh Papilaya, Sambil memeriksa Papilaya menusuk-nusuk dadaku dengan besi, Kami mendapat makanan beras yang dicampur dengan pasir, dan pecahan gelas, dengan sayur bayam dan kangkung dengan air yang melimpah. Suatu hari aku mengeluh kenapa makan bayem dan kangkung, keluhan ini didengar komandan kami semua dihukum untuk mencabuti rumput.

Pada suatu malam, kami dibawa dengan menggunakan truk, ke Plantungan. Ini kami syukuri karena, berharap disana

kami bisa lebih bebas dan Aku mendapat tempat tidur dekat WC bersama dengan 5 orang. Disitu dijaga komandan bernama Prayoga, ada CPM, kalau ke pasar dikawal.

Aku bertugas mencuci pakaian tentara bersama dengan Mbak Sarbinatun. Kalau malam sang komandan mengetuk pintu, aku takut sekali, aku kunci semua pintu dan berharap Tuhan yang menjaga. Ketika dibawa ke mess bawah, aku lihat Aminah bertugas mencuci, Aminah hamil dan punya anak hingga 2 kali ia melahirkan dan anak siapa kita semua ngga tahu. Setelah ada pemeriksaan di Jakarta, dia mengaku dengan komandan, namun komandan tidak mau mengakui.

Aku dikeluarkan tahun 1979, dibawa ke Yoga. Sempat bekerja di Jogja lalu pulang ke rumah Bapak tiriku Pak Siman. Disana aku bekerja di toko roti Run. Tidak lama di Purwokerto, 6 bulan kemudian aku bertemu dengan suami Drs. Sunardi. Kami pergi ke Semarang kami tinggal disana, ternak ayam, suami memberi les akuntansi dan aku bekerja di tempat Bu Busono sebagai pembantu. Namun terus berhenti jadi pembantu, di sana kami ternak dan membuat peyek. Suamiku itu juga dari Pulau Buru keluar tahun 1978 Golongan A. Begitu kami tidak bisa ngontrak lagi, kami pulang ke Solo. Kami berjualan lotek, awalnya laris, lama-lama tidak laku sehingga modal habis. Suamiku meninggal tanggal 19 September 2012. Sampai saat ini belum bisa bekerja lagi, karena masih ingat suami terus.



“Mendengar penangkapan ini keluargaku tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.”

“Kami mohon dengan sangat, agar pemerintah memperbaiki nasib kita dan supaya sejarah itu bisa diketahui orang banyak.”



[Kesaksian Djasmono Wongso Prawiro]

04

SIKSA, KERJA PAKSA,
PULAU BURU, DAN
ISTERI DIKAWIN ORANG,
TETAP BERJUANG

Djasmono Wongso Prawiro biasa dipanggil Djasmono lahir 9 Desember 1938 di Desa Sumur Gung Kecamatan Palan, Kabupaten Tuban. Tahun 1965, ia menjadi guru dan masuk organisasi PGRI (non) Vak Sentral 1959-1965. Ketika meletus Tragedi 1965, Djasmono ikut ditangkap pada 11 November 1965. Ia ditahan tanpa proses hukum selama 13 tahun di Gresik dan Pulau Buru. Saat ini tinggal di Jebres, Solo, Jawa Tengah.

Pada tanggal 11 November 1965 jam 9 pagi saya ditangkap secara semena-mena oleh polisi Suwono, Kasat, dan Rustamaji. Rustamaji memukul saya pakai kursi sampai kursi remuk, setelah itu kaki kursi dipakai memukul kepala saya, dipukul ada 2 luka yang masih membekas.

Saya diperiksa selama 1 minggu. Setelah tahun 1968 awal saya dipindah ke kantor SKI. Setiap hari saya dipukuli, sedangkan makanan disuplai oleh keluarga. Pada bulan Juni- Juli 1968, saya dikerjakan paksa di Waduk Padasan Kecamatan Kereb Tuban (Jawa Tengah), setelah itu dikembalikan

lagi ke penjara. Pada Februari 1970, Saya dipindahkan ke Gudang Semen Gresik selama 4 bulan 10 hari, dipindah lagi ke penjara di Kodim Pobleng Surabaya selama 10 hari. Setelah itu dibawa langsung ke Nusa Kambangan. Naik kereta dari Stasiun Semut Surabaya. Di penjara Karang tengah Nusakambangan selama 40 hari, lalu dibawa ke Dermaga Sodong, waktu itu 25 September 1970. Di situ ada singkong mentah, lapar dicabut dan dimakan.

Di atas kapal Tongkala diisi 850 orang, Saya mulai sakit, tujuh hari tujuh malam Saya sakit, Saya tidak makan dan tidak diurus, Saya berpikir Saya akan mati, Saya sakit disentri, berak darah 33 kali semalam. Setelah 7 hari sampai di Teluk Namlea, ada perintah semua turun.

Tidak tahu ada mukjizat apa, Saya bangkit langsung turun membawa barang bawaan. Setelah diperintahkan ke Barak Transito, jaraknya 3 km, kita berjalan kaki selama 1,5 jam. Sejenak berhenti saya langsung pingsan, sadar sudah jam 5 sore.

Ada kawan yang diperintahkan mendaftarkan orang yang sakit, ada mantri yang baik mengobati. Mulai 2 Oktober (1970), menginjak kaki di Pulau Buru, Namlea.

Di Dermaga Air Mendidih ada gudang-gudang untuk menyimpan barang disana, sehingga kalau mengambil makan tinggal konvoi. Pulang dari gudang kami jalan kaki menuju unit-unit masing-masing, Jarak sekitar 28 km lewat jalan setapak di tengah hutan, berjalan 2 malam. Pagi hari dikentongi supaya cepat

bangun mencabuti rumput dengan tangan telanjang. Di sana ada jenis rumput kerisan, bentuknya segitiga tajam, kena tangan seperti silet. Banyak kawan-kawan yang tangannya sobek. Kemudian datang alat pertanian pacul, arit, gergaji belah, dan gergaji potong.

Gergaji kayu di lembah, dipotong, lalu dijual komandan. Kita mulai membuka hutan. Kekerasan setiap hari, tapol yang tak tahu petugas lewat dan tidak hormat, maka akan disiksa. Hukuman perorangan dan massal tetap diterapkan.

Tentara dari Ambon itu kejamnya luar biasa, namanya Nyonye. Di unit 7 mencari sumber air yang direncanakan untuk sawah. Tahun 1971 mulai membangun bendungan, ada kekerasan, Hukuman jalan jongkok keliling lapangan, kalau tidak kuat ditendang, ada yang sampai pingsan. Mencetak sawah sampai tahun 1974. Orang – orang tapol bisa makan produksi sendiri. Pada masa konsolidasi makan hanya 200 gram, setelah bisa menanam sawah bisa menikmati beras sendiri pada tahun 1974, untuk unit 7 bisa punya sawah 100 H. Disana komandan barak, kalau mau pergi/ pindah minta sanga, berupa beras, kayu gergajian. Kita disana tidak memiliki uang, kalau kita butuh rokok, sembako dan sabun harus barter.

Setelah tahun 1975, kita tetap mempersiapkan sawah. Datang Unit SST, diberi 14 hektar di unit 7, mereka orang tua dan invalid. Sampai akhir tahun 1978, ada istilah M3, menanam, merawat, dan mencuri. Pada 26 November 1978



saya dipanggil, akan dibebaskan ke pulau Jawa. Naik kapal-kapal kecil menuju Teluk Namlea, naik Kapal Gunung Jati, kapal mewah, naik menuju pulau Jawa.

Diserahterimakan di Gelora Surabaya. Saya melihat orang tangis-tangisan bertemu keluarga. Orang ketemu kangen-kangenan, saya heran kok tidak ada jemputan keluarga.

Saya bertanya pada teman BTI, "kok bisa begitu?" dia bilang, "waktu kamu tinggal isterimu sudah dikawin oleh Dono Dullah yang menangkap kamu.

Sekarang punya anak 2 orang."Kemudian saya tinggal di rumah bude karena ibu sudah meninggal, di daerah Sumur Gung Palang. Akhirnya beberapa waktu saya ditawari menikah dan budhe akan mencarikan jodoh. Setelah pulang dinikahkan dengan isteri saya bernama Ngatilah.

Kerugian saya setelah Tragedi 1965. Saya tidak bisa bekerja kembali, anak saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Keluarga, Paklik dan kakak 3 orang dibunuh, kondisi keluarga berantakan, menjadi keluarga yang memprihatinkan. Isteri diambil orang.

Setelah menikah dengan Ngatilah, karena di desa masih banyak yang menunjukkan kebencian pada saya, terus pindah ke Surakarta.

Isteri saya suruh jualan daun pisang, ganti bakul ayam. Setelah ketemu teman dari Pulau Buru dari Unit 17 dia jadi pemborong, saya dijadikan mandor untuk menunggu proyek-proyek.

Sejak itu isteri membuka warung kelontong, saya kerja di bangunan, dapat menyekolahkan anak. Anak perempuan dari isteri yang sekarang manut sehingga bisa sekolah. Anak lelaki saya agak nakal tetapi tidak selesai sekolah.

Tahun 2004, saya menjadi pimpinan partai Syarikat Indonesia, Tahun 2005 saya ketemu dengan Pak Winarso yang waktu itu menjadi karyawan di Yaphi. Pak Winarso menyarankan untuk membuat organisasi bernama SekBer.

Sekarang posisi saya di SekBer'65 menjadi Wakil Koordinator Umum Sekber '65 tingkat pusat.



05

BERSAMA SEKBER 65
MEMULIHKAN MARTABAT
KEMANUSIAAN

[Kesaksian Sanusi]

*S*anusi lahir pada 15 Oktober 1941 di Kartopuran, Surakarta. Dia pegawai negeri sipil di AURI Surakarta. Ikut dalam organisasi Serikat Buruh Keamanan dan Pertahanan (SBKP), sesuai dengan perintah komandan Pangkalan Panasan. Pada tahun 1970 dia ditahan dan mengalami berbagai macam penyiksaan, di berbagai tempat penahanan termasuk Pulau Nusa Kambangan. Saat ini ia bergabung dengan SEKBER 65 sebagai Sekretaris Umum.

Pada Agustus tahun 1970, Sanusi diinterogasi Pol. AURI Surakarta Ia dipaksa mengaku sebagai anggota PKI, karena menolak maka ia disiksa dengan berbagai macam cara, dipukul, dan disetrum oleh anggota AURI. Dia juga dituduh sebagai anggota Pemuda Rakyat, tetapi ditolak.

Kemudian dia dipindahkan ke penjara di Jl. Slamet Riyadi Solo, disuruh kerjapaksa (1972-1974). Dia tidak boleh ditengok keluarga, kecuali sesudah bekas pemeriksaannya selesai.

Selama di dalam taahanan di kota Solo dia sempat diperbantukan sebagai Tukang ccc Ketik di tempatnya ditahan, di Pol AU, membantu beberapa pekerjaan anggota DPRD Solo. Kemudian dia dipindahkan ke Nusakambangan. Sanusi menceritakan pengalamannya di Nusa Kambangan sebagai berikut:

Kebetulan saya ditempatkan di LP Limus Buntu, jaraknya dari pelabuhan dua km, cukup dekat. Sore hari orang-orang dimasukkan dalam kamp, ditempatkan dalam lima barak. Mendapat jatah makan nasi putih, dan ikan asin. Di sini makan agak baik, tiap pagi mesti apel, menyanyi dan membaca Pancasila. Dibuat grup-grup yaitu : penggajian, kelapa, dan pertanian.

Saya di Limus Buntu selama dua tahun. Kemudian saya dipindah ke kamp Karanganyar yang letaknya jauh sekali, tidur di selembur tikar dan bekerja sesuai dengan grupnya. Saya bekerja di bagian dapur bersama pekerja lain yang memasak.

Lauk pauk disediakan sendiri, yang disediakan ikan asin, kedelai hitam kita buat tempe, gula aren, kalau ada minyak ya untuk goreng. Di dapur ada 4 orang, yang dimasak pagi 30 kg, siang 30 kg untuk makan dua kali. Untuk tambahan makan kita cari sendiri. Kalau musim hujan tanam Padi Gogo, cari sayur dll.

Kamar ada 11 kamar, masing-masing 25 orang jadi masak hampir untuk 300 orang, makan minim memang tidak kelaparan, karena kebutuhan lain kita sediakan sendiri.

Hal penting adalah kedatangan ILC, sebulan sebelumnya diberi beras putih, gula pasir, susu kaleng. Biasa tidur di atas tikar, diberi selembur kasur tipis, kira-kira berjalan sebulan ada Santiaji, diberi pesan kalau PMI datang, katakan jatah makan cukup, tidur baik.

Sebulan kemudian datang tiga PMI langsung ke perkebunan tidak mau dikawal ketemu dengan tapol wawancara sendiri, sesuai dengan pesan bintel maka, makan dan tidur cukup. Tidak berani jujur, karena rasa trauma dan takut pada pembina. Ketika pamitan PMI minta pesan apa yang hendak disampaikan. Ada tapol yang nyeletuk minta bantuan pengobatan. Permulaan tahun 1977 semua tapol didata dan diperiksa kesehatannya.

Tapol punya perkiraan kalau setelah pemeriksaan akan ada pemindahan. Nyatanya benar, setelah enam bulan akhir 1977 sekitar bulan September – November ada pemberangkatan ke Pulau Buru dengan Kapal LST (kapal barang), yang diberangkatkan yang tua.

Sembilan bulan setelah di Pulau Buru sudah ada pembebasan umum, berapa ribu saya tidak tahu, Karena Pulau Buru sudah makmur, seperti *refresing* saja.

Pada 6 Juli 1978 telah terjadi pembebasan. Seperti semula dibawa ke pelabuhan, diberangkatkan pakai truk ada 6 yang ke Solo, menginap semalam, dan dibawa ke Kodim, keluarga sudah menunggu. Dengan berbinar-binar ada isteri, anak, ibu.

Dipesan bahwa pembebasan bukan karena siapa-siapa, tetapi kebaikan pemerintah. Di rumah keluarga lain sudah menunggu, rasanya hati senang, kerena tidak ada yang antipati, ada pemuda-pemuda yang datang.

Keesokannya saya melapor ke RT, lurah, polsek. Saya seminggu tiga kali absen di Koramil. Setelah pembebasan saya tetap melapor ke Kakansospol Solo, setiap bulan dapat undangan ditanya bagaimana tanggapan anak, isteri. Kadang pemanggilan itu mengganggu aktivitas kerja, saya protes, panggilan jangan mendadak.

Panggilan yang terakhir, disuruh tanda tangan, diberi amplop, katanya uang untuk naik becak, tapi amplop tidak saya terima saya kembalikan. Kata teman saya amplop berisi Rp 5000.

Waktu saya bebas, KTP saya 2 kali diberi tanda ET (ex tapol). Dan ditahun 2002, yang seharusnya saya mendapat KTP seumur hidup tapi belum dapat. Baru tahun 2010 baru mendapat KTP Seumur hidup.

“Setelah ketemu teman - teman diajak kumpul, terus ketemu Yaphi mengadvokasi korban, bagaimana harus melangkah. Yaphi memberi pengertian dan pengarahan. Terakhir saya bergabung dengan Sekber’65. Lewat kongres I, Saya diangkat sebagai sekretaris umum 2. Sekber’65 menjadi anggota KKPK.”



06

SISA HIDUPKU MASIH
BERGUNA UNTUK
ORANG LAIN

[Kesaksian Sudiharjo]

Sudiharjo biasa dipanggil Sudi, lahir di Solo pada 16 Juni 1937. Sejak tahun 1962, ia bekerja sebagai PNS di AURI di Panasan, Surakarta. Terlibat aktif dalam Organisasi Pemuda Rakyat (PR) Surakarta. Ia juga menjadi anggota Serikat Buruh KP (SBKP) di tempatnya bekerja. Pada 23 Oktober 1965, ia ditangkap oleh Pol AURI.

Mengalami penyiksaan selama berbulan-bulan di halaman Balaikota Surakarta.. Setelah bebas masih menjalani wajib lapor ke lurah, camat, polisi dan kepolisian. tidak dikutsertakan dalam Pemilu, dipecat dari pekerjaan di AURI dan anak-anaknya tidak bisa memiliki akte kelahiran. Saat ini tinggal di Jagalan RT 01 RW XII Kelurahan Jagalan, Jebres Surakarta Jawa Tengah.

Saya bersekolah di SD Kanisius keluar tahun 1952, terus ke SMP keluar 1955, Waktu itu saya masuk Organisasi Pemuda Rakyat, aktif di organisasi melayani masyarakat. Setiap ada aksi saya terlibat aktif : membuat spanduk, dll. Tahun 1962, saya bekerja di AURI di Panasan sebagai pegawai tetap,

di seksi kesehatan. Pada waktu itu ada kegiatan sukarelawan melawan Malaysia, kegiatan seperti militer.

Saya ikut Serikat Buruh Keamanan dan Pertahanan (SBKP) setiap bulan dipotong gaji untuk organisasi tersebut.

Saya ditangkap bersama rombongan pada 23 Oktober 1965. saya dihajar di lapangan di Balaikota oleh orang AURI. Saya dijemu di lapangan, setiap orang yang lewat pasti memukul, menendang saya. Wajah saya biru bengkak dan biru lebam.

Pada malam hari, rombongan dipindah ke penjara, keadaan badan saya sakit semua, tangan luka. Saya adalah orang pertama masuk penjara di Solo. Teman-teman baru keesokan harinya.

Saya tinggal di Kamar nomor 11 kapasitas untuk 40 orang, tapi saat itu kamar diisi dengan 60 orang. Beberapa bulan saya dipindah ke kamar 12 terus kamar 13, kegiatan di Karantina membaca koran, waktu itu umur saya 37 tahun.

Sebelum di karantina saya dipanggil Denpom, dalam pemeriksaan tidak ada lain pertanyaan kecuali tentang Pemuda Rakyat dan tentang Soekarno. Saya bilang saya pendukung Soekarno.

Pada siang hari saya berjalan dipindah dalam penjara (bebas dari karantina) saya dipekerjaan memperbaiki tanggul di Gading dan Pasar Kliwon.

Selama menjalani kerja bakti membuat tanggul, perlakuan ya biasa, Pagi naik

truk, siang hari pulang masuk penjara. Isteri saya sumber kehidupan saya selama di penjara, waktu ditangkap saya punya dua anak. Selama dikaryakan di dapur saya dapat memberi makanan lebih banyak.

Saya mendapat kebebasan belanja ke Pasar Legi, tidak dikawal, hanya ditemani oleh Pak Waluyo tahanan dari Karanganyar.

Saya bebas pada tahun 1972, setelah bebas harus lapor ke Kelurahan, Kecamatan, Kodim dan Kepolisian. Ada yang aneh dalam surat pembebasan, karena dalam surat pembebasan tertulis pembebasan tahun 1971. Saya masuk dan keluar tahanan lewat pintu penjara. Setelah keluar dari penjara, saya sebenarnya takut untuk keluar.

Namun didorong untuk keluar. Masyarakat cukup menerima saya karena perjuangan saya waktu itu. Hanya anak-anak muda yang nggak paham perjuangan masa lalu.

Saya tetap melayani masyarakat. Tenaga saya masih dibutuhkan. Saya pernah jadi ketua RT pada tahun 1999-2001, saya ditunjuk pak Lurah, karena tidak ada yang mau, kepercayaan menjadi lurah untuk menyelesaikan konflik.

Tahun 2004 -2007 dipercaya menjadi pengurus LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Kepercayaan ini semakin memperkuat keyakinan, bahwa sisa hidupku masih berguna untuk orang lain, dan harus bersemangat untuk memperjuangkan nasib.

Sekarang saya masuk berorganisasi dengan Sekber'65, kebetulan ditunjuk sebagai sekeretaris Solo. Terus ada kawan yang mengajak jualan pakaian, sejak tahun 1983 berjualan pakaian di emper-emper toko.

Saya juga tidak disertakan dalam Pemilu. Saya dipecat dengan tidak terhormat dari AURI. Surat itu diberikan saat saya sedang di penjara. Semua anak saya tidak ada yang memiliki Akta Kelahiran.

“Harapan saya, ada pemulihan nama baik, seperti warga negara yang lain. Ada kejelasan tentang sejarah. Semua keluarga mendukung saya berorganisasi, anak saya 7 orang, semua juga mendukung.”



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Dengar kesaksian di Solo

Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran baru mulai dan sedang melakukan pengumpulan fakta kesaksian pelanggaran HAM di lapangan. Acara ini merupakan langkah awal dari kegiatan tersebut oleh karena itu kami belum dapat memberikan kesimpulan.

Sekalipun demikian hal ini tidak menghambat kami untuk memberikan pandangan kami atas peristiwa ini, Tragedi 65, Talangsari dan 98 adalah tragedi yang menimpa kita sebagai warga negara suatu bangsa, penderitaan, rasa sakit, kesusahan kita rasakan bersama.

Tetapi ketegaran, kekuatan, dan kesaksian yang di ungkapkan oleh ibu Budiarti, ibu Kastinah, bapak Djasmono, bapak Sanusi, bapak Sudiharjo patut menggetarkan hati kita semua, semua ini membuat kita merenung, tercenung bagaimana hal ini terjadi, bagaimana hal ini mungkin kita atasi.

Memang tidak ada sejarah bangsa-bangsa di dunia ini yang tanpa tragedi, siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah selalu jadi perdebatan.



Namun adalah hak warga negara untuk mempertanyakan kebenaran moral dari tragedi sejarah, karena pada dasarnya yang jadi korban kita semua. Yang terjadi fungsi kelembagaan runtuh, rasa percaya antara warga sipil dengan warga sipil, antara pemerintah dengan warga sipil menjadi patah.

Kita tahu berbagai bentuk pelanggaran HAM telah terjadi, antara tahun 1965 hingga sekarang kita pun tahu berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan meski fakta tidak pernah tertuntaskan dengan baik dan jelas.

Dalam hal ini kita perlu merestorasi kehidupan bersama, Upaya tersebut selalu menghadapi kendala karena tidak di dasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan kebutuhan hakiki setiap warga negara, ini dimungkinkan jika kita berpikir dengan bening.

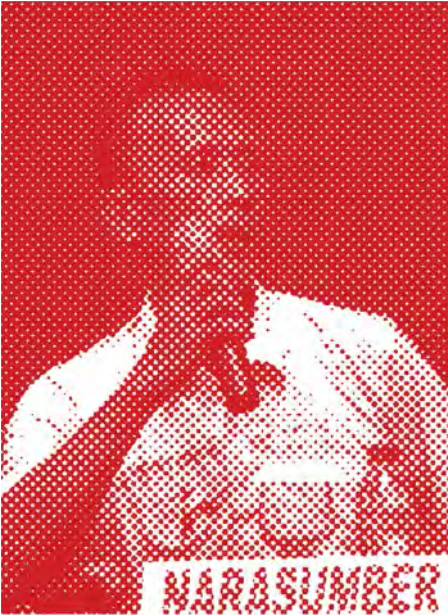
Maka Kami majelis warga merekomendasikan :

Agar ada suatu pengakuan pelanggaran HAM khususnya menyangkut pada kasus yang di bahas pagi ini, dalam hal ini di butuhkan suatu tindakan bukan saja dari aspek yang berbentuk legal hukum sejalan dengan itu dituntut adanya upaya bersama pemulihan rehabilitasi kejiwaan bagi korban dan keluarga korban di lapangan agar dapat menatap masa depan sebagai bangsa sehingga kehidupan kebangsaan akan pulih. Memang kebenaran adalah masa depan.

Majelis Warga :

1. Mohammad Zaelani Tammaka
2. Imam Aziz
3. Abdullah Faishol
4. Vera kartika Giantari
5. Nani Nurrachman





01 DIKULIKONTRAKAN OLEH TENTARA



[Kesaksian Asman Yodjodolo]

Asman Yodjodolo, lahir pada 12 Oktober 1943 di Tompe Sulawesi Tengah. Ia ditangkap tahun 1966, enam bulan sesudah pecah G30S 1965 di Jakarta. Pada waktu itu ia menjadi Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Sulawesi Tengah selain menjadi guru di salah satu SMP. Selama di dalam tahanan ia banyak mendapat siksaan dan mengikuti kerja paksa di beberapa tempat di Palu, ia dibebaskan tahun 1979.

Hanya enam bulan pasca peristiwa berdarah 1965, KAMI dan KAPPI dibawah pimpinan Polisi memasuki Desa Balentuma Kecamatan Sirenja, langsung menangkap saya dengan cara paksa. Saya langsung dibawa ke Pos Polisi Sementara dan langsung diinterogasi, seputar peristiwa G 30.S 1965 di Jakarta

Karena saya tidak memenuhi keinginan si penanya maka dengan dipaksakan dibawah saya ke Donggala, menggunakan Kapal Motor Kayu, di bawah pengawasan ketat KAMI, KAPPI dan Polisi.

Saya langsung dijebloskan ke dalam sel. Saya secara marathon terus menerus diperiksa oleh Pelda Muhsen, mengenai keberadaan senjata yang dikirimkan oleh pimpinan PKI kepada saya.

Karena saya tidak mengakui fitnah itu, maka saya disiksa. Akhirnya Pelda Muhsen digantikan oleh Sertu Piter Lobo. Semua dokumen pribadi saya dirampas di rumah, sehingga saya tidak mempunyai lagi Ijazah dan Surat Pengangkatan sebagai PNS.

Kemudian hanya selang sehari saya langsung dibawa dengan Mobil Polisi ke Palu langsung kedalam Sel Polres di Palu, kemudian dimasukkan ke Penjara di Maesa Palu

Pada saat itu juga sudah mulai terpikir oleh mereka untuk memperkerjakan tahanan yang ratusan orang itu. Maka mulailah kami dipekerjakan di markas-markas tentara terus merambah kebangunan-bangunan pemerintah dan asrama serta rumah-rumah tentara.

Mereka (tentara/mulai mencari-cari proyek) disuruh kami dipekerjakan selama sepuluh tahun lebih demi memperkaya mereka. Diproyek-proyek ini yang nilai kontraknya puluhan juta bahkan ratusan juta Rupiah kami dipekerjakan sepuluh tahun lebih. Kami tiada bedanya dengan Romusha.

Kami dipencar di setiap pekerjaan mereka di seluruh Kota Palu, menyapu jalan, menggali selokan-selokan yang sangat kotor dan bau, kami sudah tidak punya harga diri sama sekali. Kami mandi keringat yang sudah menyatu dengan bau selokan

yang sangat busuk. Hati ini miris dengan kepala ditundukkan mendengar ocehan dan cacian dari mulut-mulut mereka ditambah lagi dengan orang-orang.

Pada akhir 1967 saya bersama beberapa puluh kawan-kawan dikirim ke pegunungan kebun Kopi untuk perbaikan jalan yang rusak. Jalan yang menghubungkan Kota Palu dan Kota Parigi, jalan tersebut rusak berat. Di sana kami bekerja keras sambil menahan dinginya udara pegunungan. Pekerjaan itu ialah menggali Got/parit, menimbun lubang-lubang di tengah-tengah jalan dengan kerikil yang dipikul dari tempat lain tidak memakai mobil.

Membuang tanah longsor hampir setiap hari sebab di sana itu daerah arah utara kota Palu hujannya tinggi dan berada di bawah pengawasan tentara. Di sini kami selama kurang lebih setahun, baru dipindahkan lagi ke jalan jurusan Palu-Kulawi arah selatan Kota Palu.

Disini agak beda dengan pekerjaan di jalan jurusan Palu-Parigi. Di sini kami bekerja di bawah pengawasan langsung kapten Umar Said Kasi I Korem 132 Tadulako. Kami diberi makan bulgur (beras) yang sudah berwarna merah, banyak ulatnya dan sangat bau.

Menjelang kami dikembalikan ke penjara dari pekerjaan di jalan raya jurusan Palu-Kulawi ini, kami disuruh memindahkan jalur Sungai Gumbasa ke kaki gunung karena jembatan Sakidi (Jembatan Gumbasa) rusak akibat dibom oleh PRRI/Permesta. Ini juga pekerjaan yang sangat berat dan berbahaya, sungainya tidak ada pasirnya sama sekali, batu-batunya besar-besar

dan licin. Saya tahu bulgur itu adalah makanan babi atau piaraan mereka karena bulgur itu sangat keras bila ditelan. Itulah yang kami makan setiap hari. Di sini kami berempat, saya Asman, Kaharudin, Yansen dan Max Lumantow, pernah ditembak oleh kapten Umar Said, pelurunya hanya beberapa centimeter di atas kepala kami, kami sangat terkejut dan takut. Hampir saja kami berempat mati di tempat itu. Penyebabnya karena sudah menjelang malam kami belum diberi makan, kami makan sejak kemarin sore, kami sangat lapar. Tapi apa yang terjadi malah kami hanya ditembaki. Di sini seorang teman kami Zamrud diculik dan sampai hari ini tidak kembali. Selanjutnya kami dipekerjakan pada bangunan - bangunan tentara sampai pada proyek-proyek pemerintah. Itulah rutinitas kami hari berganti hari tahun berganti tahun, sampai pada tahun 1978 atau 1979 mulai ada pelepasan.

“Kami diproses tapi tidak pernah dihukum, hanya ditahan karena tidak ada bukti -bukti kesalahan kami.”





02 CUCU BERTANYA,
"DIMANA KUBURNYA
KAKEK?"

[Kesaksian Mariyam Labonu]

Mariyam Labonu, lahir di Palu Desember 1939, istri Abd Dg Maselo, Ketua CDB PKI Sulawesi Tengah. Ia pernah menjadi guru dan berkegiatan di Gerwani, tetapi sejak tahun 1962 sudah tidak aktif karena mempunyai anak. Ia ditahan bulan Februari 1966 dan dibebaskan tahun 1967 tanpa proses hukum, tetapi menjalani wajib lapor. Sekarang tinggal di Palu.

Tahun 1958 saya sudah tamat sekolah langsung mengajar di Donggala, tahun 1960 saya menikah dengan Abd. Rahman Daeng Maselo, kami sama-sama mengajar, saya di Palu dia di Tondo. Tahun 1965 sudah ada CBD (Comite Daerah Besar) PKI di sini, suami saya jadi ketua PKI waktu itu.

Sebagai istri saya juga aktif di Gerwani. Banyak sekali kegiatan Gerwani saat itu bikin kue, dll. Tapi tahun '62 saya sudah ada anak jadi tidak aktif lagi di Gerwani. Hanya suami saya yang aktif di partai. Pada waktu itu dia sudah sibuk, biasa ke Manado, Jakarta sampai pernah ke Cina baurus partai itu.

Sesudah peristiwa tahun '65, suami mulai dikejar-kejar dan dicari-cari orang, dia sudah jarang di rumah. Rumah kami dilempar masyarakat. Nanti bulan Desember saya dengar dia sudah ditahan di Rutan Maesa.

Saya dengar kabar dari teman-temannya kalau mereka itu ditangkap di Parigi. Ada empat orang *dorang*, suamiku, Sunaryo yang Pemuda Rakyat itu, Hairi Ruswanto wakilnya di partai dengan Zamrud yang dari Kayumalue. Selama dia di penjara itu dua kali saya pergi lihat disana.

Jadi ditahan di Jalan Matahari itu satu tahun lebih apalagi kalau anak-anak sakit, Gagar itu mata tinggi. Tidak tahu lagi, kasian bagaimana lagi perasaan. Jadi tiga-tiga anakku dibesarkan disana. Ditahan itu selama satu tahun lebih. Dari '66 sampai '67.

Untuk mengisi waktu selama ditahanan, saya belajar bikin taplak meja, dll. Setelah dibebaskan dilanjut dengan wajib lapor satu minggu dua kali sampai tahun '75, baru satu minggu satu kali lagi sampe '77 atau '78 barangkali. Waktu di penjara itu masih ada jaminan makanan nanti sudah di luar ini yang susah.

Setelah keluar dari tahanan saya hanya bertekad kalau sampai nanti tidak diminta-minta saya kasih tinggal anak-anak saya ini minimal mereka bisa membaca. Pokoknya bisa hidup, bisa makan itu saja dulu, belum ada pikir yang lain-lain.

Waktu saya sudah bebas, suami saya masih di penjara, tapi *dorang* sudah

dipindahkan ke Penjara Donggala. Ada tujuh orang juga barangkali yang ditahan disana.

Saya tidak pernah *pigi* (pergi) *bajenguk* disana karena saya juga ditahan. Terakhir kita ketemu itu dia datang pamit diantar malam-malam ke Jalan Matahari, dia bilang *dorang* sudah mau dikasih pindah ke Donggala. Dari Donggala itu tiga kali dia kirim akan saya surat *bakasih* kabar.

Terakhir itu 3 April 1967. Disurat itu dia tulis kalau mereka ini mogok makan. Karena di sana dilarang menerima pembesuk, jadi mereka meminta supaya dikembalikan ke penjara Maesa. Bulan Mei saya dengar dia sama-sama dengan temannya sudah hilang. Banyak kabar angin. Jadi saya bingung. Tapi saya besarkan hati anak-anak.

Biasa *dorang* dengar juga dari luar ada yang bilang, "Papamu sudah digantung". Jadi saya bilang sama *dorang* jangan didengar. Saya sibuk bikin kue *bacari* makan untuk *kasi* besar anak 3 orang ini. Jadi Gagar dan ade-adenya ini tiap hari satu-satu Loyang besar *dorang* junjung *pigi bajual*. Waktu itu kita tinggal di belakang Untad (Universitas Tadulako). Jadi ada uangnya dipakai makan sehari-hari sebagian ditabung untuk biaya sekolah anak-anak. Kalau semua kue laku senang, tapi biasa juga tidak laku.

Bersyukur banyak orang kasian sama saya, Hanya anak-anak saya di sekolah, *dorang* dicemoh teman-temannya, digara, tapi tidak apa-apa. Saya pesan sama anak-anak jangan didengar kalo ada orang *bagara-gara* (meledak).

Selama ini biasa kalau *dorang* tanya papanya, saya tidak tau juga mau jawab apa. Cuma anak saya yang pertama itu Gagar mungkin dia sudah mengerti.

Baru itu ada lagi kabar dari Pak Bantam yang tentara di Baiya itu. Dia kasih tahu anak saya Gagar itu, dia cerita semua. Dia bilang tidak usah lagi *kamorang* cari-cari papamu, bukan di bawa ke Manado, bukan juga dibawa dengan kapal Rusia, tapi sudah di eksekusi, ditembak.

“Seandainya kehilangan atau misalnya kematian suami itu melalui proses hukum yang berlaku, karena kesalahannya misalnya, saya sangat ikhlas, tapi dengan keadaan seperti ini dimana keadilan itu.”





**[Kesaksian Arham Busura
dan Aminullah]**

03 DIPENJARAKAN
KARENA
MEMPERTAHANKAN
TANAH GARAPAN

Dalam acara dengan kesaksian di Palu, Kasus penangkapan dan penahanan petani Bohotokong diwakili oleh Arham Busura dan Aminullah. Penyampaian testimoni oleh Arham Busura Arham Busura, lahir desa Bohotokong tanggal 10 Desember 1965. Petani penggarap tanah underming yang menderita akibat pelanggaran HAM oleh PT. Anugerah Saritama Abadi.

Saya salah satu korban pelanggaran HAM atau salah satu korban pelanggaran hak atas tanah yang ada di desa Bohotokong ini. Awal terjadinya pelanggaran itu berasal dari pengolahan tanah undernaming bekas hak barat. Kemudian kami mengolah sejak tahun '80 an sampai dengan sekarang. Hal ini berawal adanya informasi bahwa tanah tersebut telah habis masa pakainya pada tanggal 24 Desember 1980. Maka kami rame - rame bikin rapat musyawarah untuk mengolah tanah undernaming.

Tahun 2001 kalau tidak salah, kita bangun sebuah organisasi yaitu Ortabun. Saya termasuk dalam kepengurusan Ortabun, anggota terdiri dari petani Bohotokong. Kami memperjuangkan, supaya jangan kita punya petani ini dirampas dia punya hak, seperti tanah, tanaman yang di atas tanah. Kami juga memperjuangkan hak petani-petani dari luar desa Bohotokong.

Ketika kami sudah menanam, waktu kelapa sudah berbuah, diterbitkan Setifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama perusahaan PT. Anugerah Saritama Abadi milik Theo Nayoan pengusaha besar di Bunta. Jadi kalau kami masuk ke dalam kebun mengambil buah-buah kelapa atau coklat itu dituduh pencurian, masuk di lokasi tanpa seizin pemilik dari perusahaan ini, perusahaan HGU.

Nah itu selalu yang dituduhkan kepada petani. Kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba pengusaha itu masuk yang menggunakan polisi, tentara sehingga saya itu banyak terintimidasi bahkan masuk penjara. Kekerasan yang dilakukan kepada saya pada tanggal 3 April 1992.

Yaitu saya dianiaya di Kantor Polisi dengan alasan pencurian tanah. Saya disuruh melepaskan tanah atau menyerahkan kepada pemiliknya yaitu pengusaha. Tetapi saya tidak mau melepaskan, bahkan dianiaya sama-sama bapak saya bahwa bapak saya juga mencuri tanah undernaming.

Saya tetap bertahan terus walaupun sudah dianiaya, disakiti, diteror, tetap saya tidak mau menyerahkan. Pada tahun 1995, Desember, saya ditangkap dan dipenjarakan, dituduh pencurian dan

penyerobotan tanah. Saya ditahan selama 11 bulan 16 hari. Saya banding, pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, kemudian saya kasasi. Akhirnya putusan kasasi bahwa saya tidak terbukti bersalah karena masalahnya perdata.

Namun di pihak pengusaha dan pemerintah dalam hal ini polisi tidak merasa puas. Tahun 2011, jadi saya ditangkap lagi, dimasukkan ke dalam penjara, diprosesnya itu dari 98 berapa kasus itu. Ada 8 berkas yang harus saya tanda tangani, dari pencurian coklat, pencurian kelapa, dll.

Saya tetap di tahan selama 5 bulan 23 hari. Kemudian putusan Pengadilan Negeri saya tidak bersalah, seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, karena masalahnya perdata.

Dalam kasus Bohotokong ini sebenarnya sudah banyak usaha kami, mendatangi pemerintah, pejabat yang berwenang seperti pertanahan, dan bupati. Minta mereka supaya turun memberikan hak-hak tanah itu kepada kami yang sudah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.

Kami ke Kantor Gubernur. Kami juga langsung ke Komnas HAM Kami tidak tahu kelanjutannya di Komnas HAM. Bahkan teman-teman itu sudah sampai di DPR Pusat di Jakarta. Mereka mengantar surat dan meminta ini dari sana. Apa yang mereka katakan itu bahwa, 'itu kamu punya, itu milik petani. Tetapi tidak pernah ada langkah-langkah untuk mencabut HGU ini atau memberikan hak-hak itu kepada petani.

04 BERMULA DARI
TANAH, KEMUDIAN
MAYAT-MAYAT
BERGELIMPANGAN



[Kesaksian Masrin Toana]

Masrin Toana, mewakili anak korban kasus penangkapan, pembunuhan dan penculikan 8 orang warga desa Toyado - Poso, pada 1 Desember 2001

Saya keluarga dari salah seorang korban penculikan di Desa Toyado. Di saat itu ada delapan orang korban, tiga diantaranya sampai saat ini belum ditemukan jasadnya. Saat terjadi penculikan, kemungkinan besar dikarenakan antara dua komunitas ini saling serang menyerang.

Saat itu Desa Sepe diserang dari pihak Muslim, kami mendengar bahwa ada oknum TNI yang terluka, sehingga mungkin karena ada luapan emosi mereka yang tidak bisa dikendalikan mereka datang ke desa kami mengambil beberapa orang termasuk Bapak saya, Hasim Toana.

Pada saat itu bapak saya sebagai imam. Oknum TNI datang mengambil 8 orang di desa. Kami merasa desa kami sebagai sasaran. Padahal tidak mungkin desa

kami sekecil ini bisa menyerang desa-desa kristen. Mungkin karena mereka kesal dengan temannya yang terluka, sehingga tidak melihat lagi yang penting Muslim.

Posisi kami memang berbatasan langsung, antara kampung Muslim dan Kristen. Pada saat itu kampung-kampung Kristen dijaga oleh tentara, sementara kampung Muslim dijaga oleh brimob atau polisi.

Sebenarnya memanasnya Poso, antara dua kelompok atau dua komunitas ini sepertinya sudah tidak bisa lagi dibendung, sehingga sudah saling menyerang. Desa kami yang pertama kali diserang. Dimana pada saat itu rencananya mereka mau masuk kota tapi mereka tidak mampu menembus. Sehingga luapan kemarahan itu disalurkan di desa kami.

Saat itu saya dengan keluarga lari naik sampan / perahu. Kami lari hanya dengan beberapa baju. Saya dengan tiga orang anak naik sampan menembus pinggir laut Toyado sampai daerah Tambu, Sausu, saya tembus tiga hari tiga malam tidak makan. Tapi dengan pertolongan Allah sehingga kami masih bisa selamat sampai hari ini.

Dari sana kami diangkut oleh salah seorang tokoh dari Palu, Bapak Kyai Abd. Karim Lamasitudju yang menolong kami dari Sausu.

Dia membawa kami ke daerah Tawaeli, di sana kami ditampung di rumahnya, bahkan kami sempat diberikan tanah. Tapi karena kami merasa belum bertahan di sana, karena ada panggilan-panggilan pulang oleh pemerintah desa masing-masing, sebab ada barak sudah dibuat, kami

terpaksa balik ke desa dan menempati barak-barak yang sudah ada.

Saat pulang mulai timbul lagi gejolak-gejolak, mungkin karena pihak sebelah merasa tidak puas, sehingga terjadilah konflik yang berkelanjutan, antara kampung serang menyerang.

Yang pertama diserang adalah Buyung Katedo, mengakibatkan 12 orang meninggal, saat itu Selasa pagi. Selang satu malam desa kami yang diserang lagi. Akhirnya terjadilah serang menyerang. Saat terjadinya peristiwa itu kelompok atau desa kami menyerang ke desa sebelah (Kristen) yang dijaga oleh TNI.

Saat penyerangan itu ada dua atau tiga orang dari oknum tentara yang terluka. Subuh harinya kurang lebih jam tiga subuh saat kami sedang makan sahur, tentara datang ke barak, turun dari mobil langsung mengamuk di sana.

Saat itu yang terakhir makan sahur Papa saya Hasim Toana, dia imam masjid, dengan ada beberapa orang lainnya.

Tentara yang datang dengan tiga mobil dan dua di antaranya mobil sampah. Ada kurang lebih 20 -30 orang, langsung mengamuk, ada orang yang ditembak di tempat. Ada saudara saya, Imran, kami perkirakan sudah meninggal di tempat. Tujuh orang lainnya termasuk bapak saya juga sudah ditembak karena ada bercak darah dan kacamata beliau tertinggal. Kami berharap saat itu bahwa yang diambil ini akan dibawa ke Polres atau ke Kodim, sehingga keesokan harinya kami mengecek bapak saya dan teman-

teman ini, ternyata tidak ada di sana. Salah seorang yang diambil ini bernama Kede berhasil selamat, dia muncul di seputaran Gebang Rejo.

Dia mengatakan bahwa dia lolos setelah dibuang ke Daerah Maliwuko Ranononcu oleh TNI. Besok harinya lagi, salah seorang dari teman yang diambil itu bernama Suaib, mayatnya hanyut di sungai, ditaruh di dalam karung dengan badan sudah terpotong-potong.

Dari delapan orang yang diambil, dua lolos dan tiga yang sudah ketahuan mayatnya, tinggal 3 lagi termasuk bapak saya yang sampai saat ini belum diketahui di mana kuburnya.



“Hendaklah ini menjadi sebuah pelajaranlah bagi mereka itu, bertindak yang wajar jangan sampai melakukan pengambilan paksa sekaligus melakukan pembunuhan, terhadap kita-kita ini yang tidak tahu persoalan.”



TANGGAPAN SAKSI AHLI

Kasus Tanah Bohotokong
Sulawesi Tengah

Oleh : **Noer Fauzi Rahman**
(Direktur Sayogyo Institute)

Bagi saya Kasus Bohotokong adalah salah satu contoh bagaimana konflik agraria terjadi antara penduduk miskin pedesaan dengan badan-badan usaha dalam hal ini perusahaan perkebunan. Dari informasi yang saya peroleh, kasus Bohotokong dimulai oleh pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1997 kepada perusahaan perkebunan PT Saritama Abadi dan sejumlah individu.

Masalah muncul karena dalam tanah-tanah di lokasi HGU ini telah ada hak-hak penduduk sebelumnya, yang didapat dari proses penggarapan tanah yang dulu bekas hak-hak barat yang tidak lagi dipakai oleh pemerintah Indonesia.

Bekas hak barat ini berkenaan dengan perkebunan masa lalu yang terlantar lalu masyarakat menggarapnya. Masalahnya pemberian HGU kepada perusahaan baru pada 1997 membuat hak-hak warga yang telah menggarap di tanah itu hilang.



Masyarakat menolak memberikan begitu saja kepada perusahaan penerima HGU tersebut. Penolakan ini berhadapan dengan hak legal baru yang dipunyai perusahaan ini oleh BPN. Masalahnya muncul ketika perusahaan-perusahaan ini menggunakan kekerasan, intimidasi dan manipulasi sedemikian rupa untuk menghilangkan hak penduduk di atas tanah tersebut. Satu kekeliruan yang terjadi ketika BPN mengasumsikan bahwa di atas tanah-tanah yang diberikan HGU tersebut tidak ada hak warga Negara.

Asusmi ini keliru. Keliru karena kenyataan tidak demikian. Perusahaan yang mendapat HGU itu tentu akan berusaha agar hak-hak warga di dalam areal perkebunan itu hilang bahkan dianggap tidak sah bahkan kalau perlu dilaporkan sebagai pelaku kriminal, seperti yang terjadi dan dialami.

Sementara penduduk mereka berkeinginan agar HGU yang dipegang perusahaan-perusahaan baru itu dianggap tidak sah karena diberikan tanpa persetujuan mereka yang telah memiliki hak sebelumnya. Sepanjang waktu sejak 1997, para penduduk telah mengingatkan kewajiban Negara

untuk melindungi mereka dan untuk mengoreksi kekeliruan BPN memberikan HGU pada perusahaan-perusahaan ini.

Hak Asasi Manusia akan melindungi hak warga Negara yang lemah. Ini adalah instrumen atau alat untuk melindungi mereka yang telah menjadi korban tindakan sewenang-wenang atau tindakan berdasarkan kewenangan dari badan pemerintahan seperti BPN. Adalah kewajiban Negara yang lebih luas untuk melindungi mereka yang telah menjadi korban akibat perlakuan BPN yang memberikan HGU atas tanah-tanah yang telah dihaki penduduk, meskipun mereka belum memiliki bukti-bukti formal.

Bukti-bukti formal adalah masalah administrative, akan tetapi kenyataan mereka telah menduduki tanah itu, menikmati hasil tanam tumbuhnya, itu menunjukkan mereka memiliki hak atas akses yang telah mereka telah nikmati.

Dengan kesempatan testimoni atau kesaksian yang diberikan penduduk, saya berharap agar kesaksian penduduk tersebut diperlakukan sebagai suatu upaya memperlihatkan bahwa penduduk memiliki hak atas tanah tersebut dan terus menerus menolak melepas hak itu atas tanah-tanah yang oleh BPN diberikan HGU.

Penduduk memperjuangkan agar hak mereka dilindungi dan dipulihkan. Perlu ada upaya koreksi dari BPN pemberian HGU diatas tanah yang telah dihaki oleh penduduk dan terus diperjuangkan penduduk sebagai hak mereka. Penduduk Bohotokong seperti

kesaksian mereka tidak akan pernah melepaskan hak mereka, sebaliknya terus menerus memperjuangkan bahwa hak ini hak mereka dan harus dilindungi oleh badan-badan Negara termasuk BPN.

Lebih dari itu, diperlukan satu cara baru dari BPN menjalankan apa yang di dalam literatur dan kebijakan pertanahan disebut land reform yaitu proses pengakuan hak penduduk miskin untuk mendapatkan perlindungan dari Negara melalui pemberian pengakuan hak-hak baru.

Ini penting untuk dijalankan dan ini membuat BPN menjadi bagian dari penyelesaian masalah dan bukan sebaliknya bagian yang menciptakan masalah.

Semoga kebenaran yang disampaikan penduduk melalui kesaksian-kesaksian mereka dapat dihargai dan perlindungan kepada mereka dapat diberikan oleh badan -badan pemerintah.



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Setelah mendengar kesaksian dari para korban pelanggaran berat HAM di Sulawesi Tengah yang telah dilakukan pada hari ini:

1. Sejak pagi hingga sore hari kami semua telah mendengar penderitaan yang terjadi pada saudara-saudara kami korban '65, korban kasus Bohotokong, dan korban konflik Poso.
2. Kami juga mendengar bagaimana mereka pada akhirnya dapat bangkit secara berani untuk dapat terus menjalani kehidupan yang penuh tekanan.
3. Kami juga mendapatkan kenyataan bahwa betapa lemahnya posisi warga masyarakat, di mana alat-alat Negara

gagal untuk memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat, hingga hari ini hampir tidak ada upaya penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan di tanah air kami.

4. Betapa pahitnya realitas pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa lalu. Hal ini harus menjadi pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Beberapa bentuk kekerasan yang diderita oleh masyarakat ternyata begitu bervariasi dan sangat menyakitkan, antara lain:

- Pembunuhan
- Penghilangan paksa
- Wajib Laporan
- Kekerasan seksual
- Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
- Perbudakan atau kerja paksa
- Penyitaan sewenang-wenang atas tanah atau property lainnya
- Relokasi paksa
- Kehilangan pekerjaan, kesempatan pendidikan, atau pensiun, karena diskriminasi

Namun kami juga mendengar bagaimana keberanian para korban untuk menghadapi derita yang berkepanjangan. Solidaritas yang muncul pada warga dan kelompok masyarakat.

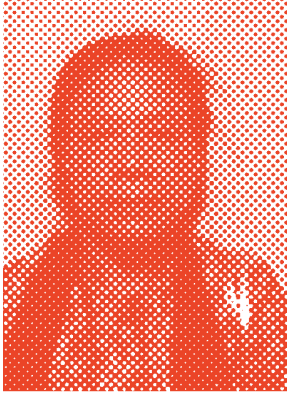
Hal ini menyiratkan bahwa kami merupakan bangsa yang memiliki kekuatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Terkait dengan pelanggaran berat HAM dan tidak adanya perlindungan dari Negara terhadap warganya, ada beberapa hal yang harus dicatat:

1. Hilangnya rasa hormat terhadap martabat kemanusiaan, yang memunculkan perilaku yang jauh dari keadaban,
2. Bahwa keinginan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan, ambisi politik ekonomi dari para pemimpin telah menghancurkan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat.
3. Tidak ada kemauan politik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
4. Lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Negara ini.

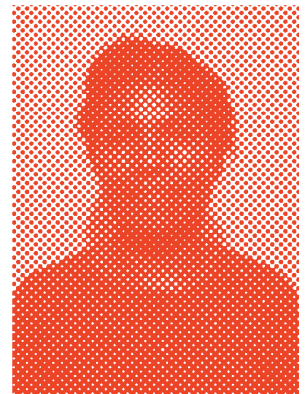
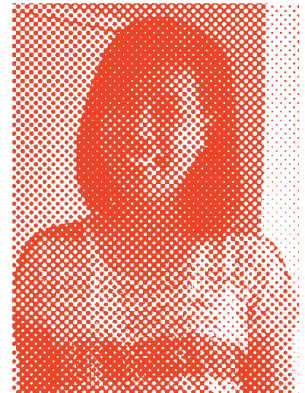
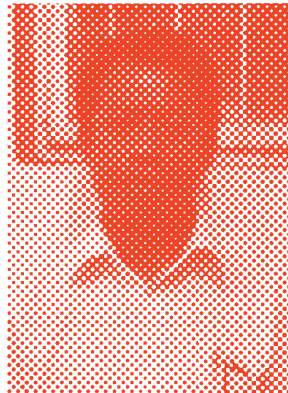
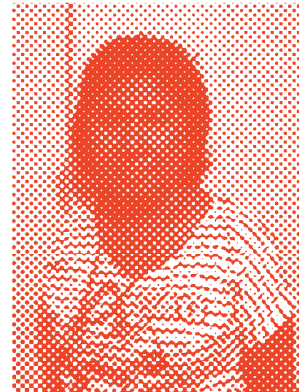
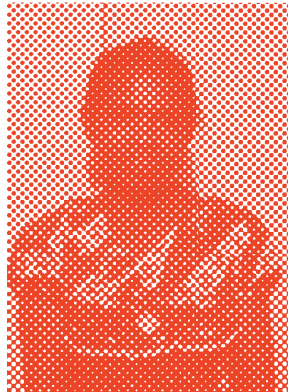
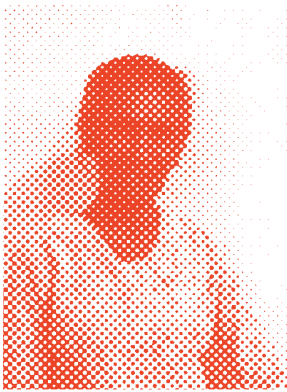
Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami belajar bahwa betapa pentingnya ada perubahan yang mendasar pada masa mendatang:

1. Betapa pentingnya perlindungan hukum oleh pemerintah,
2. Harus ada upaya penegakan hukum yang tegas pada masa mendatang. Setiap warga harus diperlakukan sama di muka hukum, tidak boleh ada lagi diskriminasi sehingga keadilan dapat dirasakan oleh setiap warga Negara, terutama para korban pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah,
3. Tidak boleh lagi ada warga Negara yang dipenjara secara sewenang-wenang, tanpa kejelasan salahnya, tanpa pendampingan ahli hukum. Setiap proses hukum harus dilakukan secara terbuka.
4. Perlu ada upaya pemulihan bagi para korban, rehabilitasi nama baik, serta kompensasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk kasus '65 harus ada upaya konkrit untuk segera melakukan rehabilitasi dalam pemberian kompensasi.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada para Bapak / Ibu korban yang telah bersedia memberikan kesaksian. Juga kepada Pemerintahan Kota Palu dan Pemerintahan Daerah Sulawesi Tengah, Wassalam.



**||| DENGAR
KESAKSIAN
KUPANG**





[Kesaksian Bendelina Kola Raga]

01

SAYA MENYUKAI
PROGRAM PKI DAN
GERWANI

Bendelina Kola Raga, biasa disapa Nanawa / Oma Bende. Lahir di Sabu 20 Desember 1934. Ia menjadi simpatisan PKI karena partai ini memiliki program-program yang memajukan kehidupan masyarakat. Ia menjabat sebagai ketua Gerwani untuk wilayah Sabu Raijua, selain sebagai guru di SMP Negeri 1 di Sabu ketika ditangkap di Dermaga Seba sepulang dari Kupang, Desember 1965.

Saya dan suami bekerja sebagai guru di wilayah Sabu. Saya menjadi guru perempuan pertama di SMP Negeri 1 di Sabu pada tahun 1957, sedangkan suami saya termasuk dalam angkatan pertama di Sekolah Guru Bawah (SGB) di kota Sabu. Sebenarnya, sejak tahun 1961 saya telah diangkat menjadi PNS dan mendapat dua SK sekaligus, yaitu SK penempatan dan SK gaji berkala dari pemerintah Jakarta. Akan tetapi, kepala sekolah secara diam-diam memerintahkan untuk membuang SK saya dan saya baru mengetahuinya pada tahun 1963.

Saya dan suami mengenal PKI dari teman saya yang juga guru, tinggal sekampung dengan kami. Saya menyukai program PKI dan Gerwani karena program itu banyak menolong masyarakat Sabu.

Saya menjadi ketua Gerwani tahun 1964-1965. Saya mengajak para perempuan Sabu untuk berjuang memajukan Indonesia. Saya sedang berada di Kupang ketika mendengar dari radio bahwa di Jakarta sedang terjadi peristiwa G30S. Keluarga saya di Sabu memberitahu saya untuk tidak pulang dulu ke sana karena terjadi kekacauan dan ada isu yang beredar bahwa saya membawa bom di saku celana panjang saya. Padahal saya sedang di Kupang dan tidak memakai celana panjang karena itu dianggap haram bagi kami para perempuan. Saya akhirnya pulang karena khawatir dengan suami saya di sana.

Saya pulang Desember 1965 dalam keadaan hamil tua. Di dermaga Seba, saya melihat sudah ada massa yang menunggu saya dan sedang menghajar seseorang yang saya kenal.

Mereka hendak menangkap saya tapi saya meminta aparat untuk mengizinkan saya berbicara kepada camat. Setelah saya berbicara kepada camat, saya diperbolehkan pulang, tapi harus wajib lapor dan segera menyerahkan diri setelah saya melahirkan.

Pada tahun 1966, mereka menahan suami saya yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Saya tidak tahu dimana kuburannya. Setelah melahirkan, pada awal bulan Maret 1966 kira-kira

pukul 17.00 WITA, ditahan di kompleks rumah sakit dan penjara Seba. Saya membawa bayi saya. Rambut saya dan tahanan lain dipotong tak beraturan untuk mempermalukan kami. Setelah itu, kami menjalani kerja paksa tanpa diberi makanan dan dipaksa untuk memberikan jawaban tentang pembunuhan ketujuh jenderal sekalipun kami tidak tahu menahu tentang itu.

Setelah ditahan sekian lama, kami akhirnya dibebaskan, tapi diwajibkan untuk lapor diri dan mengikuti pembinaan. Dengan bermodalkan SK yang ada, saya kemudian berkuliah di pendidikan guru jurusan bahasa Inggris di Kupang dan kembali ke Sabu setelah tamat tahun 1970. Para guru lalu meminta saya mengajar di SMP Negeri Seba, sejak 1972 hingga 1979, tapi hanya dibayar sebagai honorer. Saya berhenti dan memilih bertani untuk menghidupi diri dan kedua anak saya. Saya kehilangan pekerjaan dan suami tercinta. Tapi, saya tetap tegar menjalani tugas saya sebagai seorang ibu. Berbagai upaya sudah saya lakukan untuk memperoleh hak saya sebagai guru PNS. Tetapi tidak berhasil.

Saya sangat berharap agar pemerintah bertindak dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Saya juga berharap agar masyarakat tidak main hakim sendiri dalam menanggapi sebuah peristiwa.

02

DIKUCILKAN
PEMERINTAH,
TETANGGA DAN
KELUARGA BESAR,
TAPI MASIH HIDUP



[Kesaksian Ferderika Bessie Sinlae]

Ferderika Bessie lahir di Oesao pada tanggal 4 Juli 1948. Pada bulan November 1965, ia dan suaminya ditangkap dengan tuduhan sebagai anggota PKI dan Gerwani karena nama suaminya ada dalam daftar penerima bantuan tanah dari pemerintah. Setelah pemeriksaan, diperbolehkan pulang, tetapi harus wajib lapor dan mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Karena peristiwa itu, mereka beserta anak-anak mereka dikucilkan oleh keluarga besar dan komunitasnya.

Pada bulan November 1965. Suami saya dipanggil oleh Barnemeng (kepala desa) dan ditanyai mengapa namanya ada dalam daftar penerima bantuan tanah dari pemerintah dan keterlibatannya dengan PKI.

Waktu itu memang ada pembagian tanah dari pemerintah untuk keluarga miskin termasuk suami saya. Padahal suami saya tidak tahu apa-apa mengenai PKI. Setelah itu, dia disuruh pulang tapi beberapa hari kemudian, disuruh kembali ke balai desa.

Di sana, telah ada banyak orang yang ditahan dan diperintahkan menginap di sana. Keesokan harinya, disuruh berlari mengelilingi Oesao dengan membawa papan bertuliskan "PKI" yang digantung di leher masing-masing. Sambil berlari, harus menyanyikan lagu Nasakom.

Banyak orang menontonnya. Setelah berlari, lalu dipaksa untuk bekerja. Beberapa hari selanjutnya, mereka diperbolehkan kembali ke rumah pada pagi hari, tetapi harus kembali ke balai desa untuk menginap pada malam harinya. Saya juga dipanggil, dituduh sebagai anggota Gerwani. Saya menjawab tidak tahu menahu tentang itu dan mereka melepaskan saya. Pada Desember 1965, tim pemeriksa yang terdiri dari tentara, Parkindo, dan PNI memeriksa tahanan yang ada di balai desa.

Mereka memegang daftar nama tahanan, tahanan yang ada namanya dalam daftar itu akan langsung dibawa ke Babau (di kantor Camat) dan tidak kembali lagi. Mereka biasanya dibawa pada malam hari. Tahanan yang namanya tidak ada dalam daftar, termasuk suami saya diperbolehkan pulang. Pembunuhan terakhir terjadi di awal bulan Februari 1966 di belakang rumah saya. Pada malam itu, saya terus berdoa. Pada jam 8 pagi esok harinya, saya akhirnya bisa bertemu kembali dengan suami saya, tapi suami saya harus terus melaporkan diri dan tidak boleh keluar dari rumah.

Bila keluar rumah, ia akan dituduh berniat untuk berkompromi dengan komunis. Kami bingung bagaimana cara menghidupi diri karena suami tidak

boleh keluar rumah. Kami dan tahanan lain diwajibkan untuk lapor diri dengan maksud untuk memastikan bahwa kami tidak melakukan hal-hal yang dianggap berbahaya di dalam masyarakat. Kami juga diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus hingga tahun 1980an.

Setiap bulan Agustus, anak-anak kami menyaksikan kami menjalani hukuman yang seharusnya tidak kami terima. Karena peristiwa itu, saya, suami dan anak-anak saya disebut sebagai sisa PKI dan dikucilkan oleh pemerintah, tetangga, bahkan keluarga besar kami sendiri. Saya pernah dicalonkan menjadi penatua, tapi jemaat mempertanyakannya karena saya dianggap PKI. Namun, karena kasih Tuhan saya bisa juga jadi penatua. Kami bersukacita karena ternyata ada yang masih menghargai kami.

Kami terus bertahan hingga saat ini karena kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak bersalah. Kami berharap. Semoga tidak ada lagi saling tuding di dalam masyarakat dan keluarga karena kesalahpahaman dan pemutarbalikan fakta oleh penguasa. Semoga tidak ada lagi peristiwa seperti tahun 1965 agar tahun-tahun depan bisa lebih baik lagi.

03 ANAK PKI KOK BISA JADI PENDETA?



[Kesaksian Konrad Penlaana]

Pendeta Konrad lahir di Polibo, kecamatan Kabola, kabupaten Alor pada 4 Oktober 1962. Ia masih berusia 3 tahun ketika ayahnya dibunuh karena memberikan izin kepada PKI untuk menyelenggarakan kegiatan di kampungnya, di Polibo.

Setelah kematian ayahnya, dia dan dua saudara laki-lakinya beserta ibunya mengalami pengucilan dari masyarakat karena status ayahnya dianggap pendukung PKI. Pendeta Konrad juga mengalami kekerasan dari kakak ayahnya (bapak besar) yang berprofesi sebagai tentara. Mereka terus mengalami diskriminasi hingga pendeta Konrad dewasa dan menamatkan pendidikannya.

Saya masih berumur tiga tahun ketika Bapak saya, Thomas Penlaana, kepala desa Polibo Alor, dibunuh tahun 1965. Saya sendiri bahkan tidak ingat seperti apa wajah Bapak saya. Mama saya, Tabita Penlaana-Moubain, menceritakan kepada saya bahwa Bapak dibunuh karena, Bapak memberi izin bila ada kegiatan

yang akan dilaksanakan di kampung kami, di Polibo, termasuk kegiatan PKI.

Ketika banyak warganya ditangkap dan dibawa ke Kalabahi, Bapak ikut untuk membela para warganya yang banyak dibawa ke sana. Bapak akhirnya dianggap sebagai anggota PKI dan turut dibunuh.

Menariknya, Bapak Besar saya adalah seorang tentara. Bapak besar memberitahu kami bahwa Bapak sudah mati dibunuh, tapi menyuruh agar kami tidak menangis apalagi meratapi Bapak agar tidak ikut ditangkap dan dibunuh. Mama disuruh wajib lapor sejak kematian Bapak sampai saya SMA.

Mama dan orang-orang lain juga disuruh kerja paksa. Kepala Mama digunduli dan Mama juga dipukul dan diinjak di depan mata kami. Bapak Besar sering datang ke kampung kami dengan seragam dan senjata lengkap dan memerintahkan saya, abang, dan adik saya untuk membawakan berbagai kebutuhannya yang terlalu berat untuk anak seusia kami ke tangsi tentara di Kalabahi yang berjarak 17 km dari kampung.

Bapak Besar yang seharusnya melindungi kami ternyata malah menyiksa kami. Mama terus menguatkan kami anak-anaknya dalam melewati masa-masa berat itu. Mama adalah dukun terlatih di kampung kami. Jadi, sekalipun orang kampung membenci kami, mereka tetap datang kepada kami bila ada yang mau melahirkan.

Mama kami tetap menolong warga sekalipun mereka membenci kami. Menurut saya, orang-orang di sekitar kami jahat bukan karena mereka jahat, tapi karena dipaksa oleh situasi. Pada waktu itu, kalau bergaul dengan orang-orang yang dituduh PKI, mereka juga akan ikut menjadi korban.

Mama mengajarkan untuk tidak melakukan balas dendam dan mendorong kami untuk bersekolah sebaik mungkin.

Akhirnya kami semua menjadi pendeta. Setelah tamat SMA, saya ingin menjadi PNS tetapi rencana itu gagal, karena anak PKI tidak akan bisa menjadi PNS, harus mengganti nama dan marga.

Mama bilang, bisa menghidupi dirinya dan kami anak-anaknya sekalipun Mama bukan PNS. Saya lalu memutuskan bekerja di kebun. Syukurlah, gereja kemudian menyekolahkan saya menjadi pendeta pada tahun 1983.

Saat saya menjadi vikaris suatu hari saya melihat ada coretan di dinding gereja bertuliskan "anak PKI kok bisa jadi pendeta / Pendeta anak PKI".

Saya menjadi sedih dan sempat ragu untuk terus menjadi pendeta. Untungnya, ada pendeta senior, Pak Adang, menasehatkan, "Tidak selamanya satu sumber air mengalir air kotor semua." Berkat nasehat itu, saya bangkit kembali dan semakin giat melayani sampai saat ini.

"Saya dan keluarga saya sangat berharap bisa menemukan kuburan Bapak. Kami sudah berusaha ke berbagai tempat dan pihak tetapi gagal. Saya berharap pemerintah bisa menunjukkan lokasi penguburan Bapak saya dan korban-korban PKI lainnya."

"Semoga pengalaman pahit yang saya rasakan ini tidak pernah terulang lagi di masa depan."

04

DIMASUKAN KE
DRUM, DIGULINGKAN
DI LERENG BUKIT**[Kesaksian Petrus Yohanes Neonleni]**

Petrus Yohanes Neonleni lahir tahun 1932. Ia adalah korban penyiksaan militer atas tuduhan sebagai anggota PKI. Saat itu, ia menjabat sebagai temukung besar di Nunusunu yang membawahi enam temukung kecil, yaitu wilayah Nunusunu, Kita, Fauthani, Na'tane, Kiufatu, dan Toineke. Ia ditangkap oleh polisi dan sejak itu, ia terus-menerus mendapatkan berbagai bentuk penyiksaan. Karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dengan PKI, Polisi akhirnya membebaskan Peterus. Pada Akhir Maret 2014, Petrus akhirnya meninggal dunia karena usia yang sudah tua.

Selesai menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat di So'e, saya mengikuti pendidikan guru jumat. Setelah itu, kembali ke kampung saya di Nunusunu dan menjadi kepala desa (temukung besar) pada tahun 1965. Saya mendapat kabar bahwa polisi mencari saya. Ketika saya bertemu dengan rombongan polisi berkuda di kali Noma, saya langsung dilempari batu, dipukul, dan ditendang. Saya dituduh

sebagai kepala PKI di Nunusunu padahal saya sama sekali tidak terlibat dengan PKI. Mereka kemudian membawa saya ke Oe'o untuk menjemput seseorang yang juga dituduh terlibat PKI.

Setibanya di Oe'o, saya dan orang yang dituduh itu dipukul dengan rotan, ditendang, dan diinjak-injak di rumahnya. Kami lalu dibawa ke Pob (sekarang menjadi kantor desa Nunusunu), Nunu'tili dan ke Oehani, tapi tidak diberi makanan sedikitpun.

Di sepanjang perjalanan saya disuruh berlari sambil memikul kepala kuda yang ditanggung oleh seorang polisi dan polisi itu sesekali memukuli kepala saya dengan rotan.

Di Oehani, saya dipukul di bagian dada dan perut diinjak-injak dengan sepatu. Kemudian dimasukkan ke dalam drum dan digulingkan menuruni gunung.

Sampai di bawah, saya disuruh keluar, memikul drum ke atas gunung, dan disuruh masuk ke dalam drum untuk digulingkan kembali, berulang-ulang

hingga 12 kali sampai merasa gelap dan dunia seakan berputar-putar. Lalu dibawa ke los, dipukul, ditendang. Saya disuruh berdiri di atas bangku, tangan diikat di belakang dan talinya digantungkan ke tiang di atap.

Mereka menendang bangku tempat saya berdiri dan saya tergantung di sana. Kira-kira sejam kemudian diturunkan dan disuruh duduk bersila di lumpur di tengah hujan yang sangat lebat. Setelah hujan berhenti, kami melanjutkan perjalanan ke Noemuka dan saya disuruh berendam di dalam lumpur selama hampir sejam.

Keesokan paginya, melanjutkan perjalanan ke Panite dan di sepanjang perjalanan, saya kembali disuruh memikul kepala kuda dan polisi yang menunggangi kuda itu terus memukul kepala saya hingga darah saya terus keluar sepanjang perjalanan.

Sesampainya di Panite di sore hari, saya dan orang lain yang dituduh terlibat dengan PKI dipukul, ditendang dan dada serta perut kami diinjak-injak. Setelah itu, saya disuruh berdiri di tiang bendera dan kemudian kaki, pinggang, dan leher saya diikat dengan tiang bendera. Ikatan itu baru dilepaskan di subuh hari dan mereka membiarkan saya tidur di pinggir rumah pos polisi.

Saya baru diberi makan hari itu, dua hari setelah saya ditangkap. Saat itu, saya sudah tidak mampu lagi untuk makan sendiri sehingga saya harus disuapi oleh seseorang yang membawa makanan bagi kami.

Kami ditahan di pos polisi Panite lebih dari seminggu. Kami disuruh memintal tali dari heknak setiap hari hingga larut malam. Mereka beberapa kali memeriksa saya tapi saya tetap tidak terbukti terlibat PKI. Malam sebelum saya dibebaskan, kami disuruh untuk mengerjakan satu gulungan besar sampai keesokan siang. Setelah selesai, saya dan orang-orang lain yang terbukti tidak terlibat kemudian dikembalikan ke kampung.

“Keluarga saya membuat syukuran atas kepulangan saya dan menetapkan tanggal kebebasan saya, 17 Februari, sebagai tanggal lahir saya yang baru.”



[Kesaksian Rade Christian]

SAYA MENYAKSIKAN
POLISI MEMASUKAN
ALU KE MULUT AYAH

Ibu Rade bekerja sebagai guru di salah satu Kecamatan-Kabupaten Sumba Timur ketika tragedi 1965 terjadi. Ibu Rade ditangkap dalam peristiwa G 30 S, yang dikaitkan dengan pemberian Topi Pemuda Rakyat kepadanya, yang ia tolak, didalam sebuah upacara pada bulan Mei 1965.

Ia kemudian ditahan sekaligus saksi mata tindakan penyiksaan oleh tentara Indonesia terhadap para tahanan, termasuk ayahnya sendiri. Dia dianggap simpatisan PKI, ayahnya ditahan karena anggota BTI, sementara ibunya dituduh sebagai anggota Gerwani. Ibu Rade dibebaskan namun stigma PKI tetap melekat di dirinya sehingga dikenakan siasat gereja.

Saya menjadi guru pada tahun 1965. Pada tanggal 20 Mei 1965, saya ditunjuk oleh kantor Mendikbud untuk menghadiri acara musyawarah pemuda yang diadakan pemerintah. Di sana, saya mendapat tempat duduk di bagian ormas PKI padahal saya bukan anggota

PKI. Mereka tiba-tiba menaruh topi bertuliskan Pemuda Rakyat di kepala saya. Saya terkejut dan membuang topi itu karena saya tidak tahu apa itu Pemuda Rakyat. Karena topi itu, saya dianggap sebagai anggota PKI.

Saya ditahan oleh polisi dan dibawa ke kantor Polsek Melolo yang berjarak sekitar 60 km dari Waingapu. Ayah dan ibu saya ditangkap dan ditahan.

Saya menyaksikan ayah saya disiksa oleh polisi dengan memasukkan alu (alat penumbuk padi) ke mulut ayah saya sampai gigi ayah saya patah dan ayah terpaksa dirawat di Puskesmas Melolo. Rumah kami juga dibakar sehingga adik-adik saya harus diungsikan ke Waingapu, tinggal dengan saudara.

Para pemuda berencana membunuh saya karena mendengar isu bahwa saya adalah anggota PKI. Untunglah, para polisi selalu sigap mengamankan saya sehingga para pemuda itu tidak bisa menangkap saya. Saya dibawa ke asrama polisi dan tidak diijinkan kemana-mana.

Selama di sana, saya tidak disuruh kerja, tapi saya menyaksikan bagaimana para tahanan lain disiksa dan disuruh kerja paksa. Sekitar jam 11 malam, saya dibawa keluar oleh seorang polisi dengan alasan akan ada pertemuan. Tetapi, ternyata teman saya mencoba memerkosa saya tapi saya berhasil melawan dan saya kembali dibawa ke asrama. Saya lalu dibawa ke Waingapu tapi di sana tidak ada tahanan perempuan sehingga saya dipindahkan ke tempat lain. Saya punya firasat buruk sehingga saya menolak

setiap kali mereka berusaha untuk memeriksa saya di luar kantor.

Saat saya di sana, tim pemeriksa dari provinsi datang dan jam 11 malam saya dibawa ke kantor jaksa (tempat penampungan orang yang akan dieksekusi). Saya ditinggal dengan seorang perwira. Perwira itu menawari saya kopi dan menyuruh saya meminumnya agar saya tidak dituduh sebagai PKI.

Saya menurut karena takut. Perwira itu kemudian mencoba memerkosa saya tapi saya berhasil menolak, tetapi seorang teman saya diperkosa oleh polisi lain. Kami kemudian dikembalikan ke penginapan dan setelah itu dibebaskan.

Teman saya itu kemudian bunuh diri karena merasa malu, padahal sebelum penangkapan itu, dia akan segera menikah. Ayah dan ibu juga akhirnya dibebaskan tapi kami akhirnya menumpang di rumah saudara karena rumah kami sudah tidak ada lagi.

Saya dikenakan siasat gereja oleh Gereja Kristen Sumba. Saya berharap gereja tidak lagi menetapkan siasat gereja dan menyisihkan kami para korban. Semoga kita bisa mawas diri dan hidup bersama dalam kerukunan.

06 TIDAK IKUT KB, AKAN DIPAKSA TENTARA



[Kesaksian Dorkas Nyake Wiwi]

Dorkas Nyake Wiwi lahir di Ledeke pada 29 Desember 1985. Ia adalah anak Libertina Nyake Wiwi korban penerapan kebijakan susuk KB di wilayah Sabu-Raijua Ia menyaksikan penderitaan yang dialami ibunya hingga ibunya meninggal pada tahun 2003 setelah ibunya menggunakan alat kontrasepsi bawah kulit pada tahun 1992 atas perintah pemerintah.

Program Keluarga Berencana (KB) mulai dilaksanakan di kabupaten Sabu-Raijua sejak tahun 1992. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dijalankan melalui Puskesmas. Pada waktu itu, semua ibu yang punya anak lebih dari dua diwajibkan mengikuti program KB. Bila menolak, maka akan dipaksa oleh tentara. Susuk KB itu dimasukkan di bawah kulit di lengan atas, bentuknya sebesar korek api. Susuk KB itu dipasang seperti kipas dengan lima buah kapsul sesuai lama waktu KB.

Pada tahun 1994, mama mulai mengalami nyeri kepala hingga berujung pada

sakit kepala yang hebat, badan kram seperti digigit kalajengking, demam yang berkepanjangan, kehilangan nafsu makan, ketegangan urat dan yang paling parah mengalami perdarahan dari vagina terus menerus berbentuk gumpalan seperti hati ayam setiap hari. Makin lama perut mama semakin membesar.

Darah yang keluar terlalu banyak sampai pembalut tidak cukup untuk menahannya sehingga kami akhirnya hanya membiarkannya mengalir di atas kain yang mama pakai. Setiap sore, mama selalu demam dan badannya menggigil, dan urat-uratnya menegang sehingga kami anak-anaknya harus memijat seluruh tubuh mama dengan menggunakan minyak tapi tidak berhasil.

Kami mengupayakan cara-cara tradisional untuk menambah darah mama. Daging hati kambing dan hati anjing yang dimasak setengah matang dan air kelapa muda selalu dicari untuk dikonsumsi oleh almarhumah. Kami juga beberapa kali membawa mama ke dokter umum, tetapi karena keterbatasan biaya, mama tidak bisa dirawat di Rumah Sakit ataupun mendapatkan penanganan dokter spesialis.

Awalnya, kami mengira mama mengalami sakit biasa, tapi ternyata hampir semua ibu yg mengalami susuk KB menderita sakit yang sama dengan gejala yang sama. Kami akhirnya berkesimpulan bahwa mama sakit karena susuk KB. Kami akhirnya membawa mama ke puskesmas, tapi mereka menolak untuk mengeluarkan susuk dengan alasan mantri yang memasangnya sudah dimutasi.

Upaya ini hampir tidak berhasil tapi karena bapak punya relasi dengan pihak Puskesmas, susuk itu berhasil dikeluarkan. Setelah itu, kami berharap mama bisa pulih. Tiap hari mama mesti bergumul dengan darah-darah itu sampai mama meninggal tahun 2010.

Ketika mama meninggal, saya waktu itu sedang sekolah SMA di Momomere dan saya baru mengetahuinya dua hari setelah pemakaman. Saya sangat sedih tapi saya melihat itu sebagai cara pembebasan mama dari penyakit yang dideritanya selama ini.

Sebenarnya bukan mama saja yang mengalami hal itu karena banyak ibu-ibu di kampung juga mengalami hal itu. Semula kami berpikir bahwa itu adalah penyakit yang alami.

Tapi setelah saya mempelajarinya, saya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena itu dilakukan secara sistematis dan meluas. Ketika itu terjadi, tidak ada orang yang mau menyediakan hati dan telinga untuk ibu-ibu yang menderita.

07

PENGUNGI TIMOR
TIMUR BERTAHAN
DENGAN BERTANAM
UBI



[Kesaksian Filomena]

Filomena menjadi pengungsi Timor Timur yang hingga kini berada di tempat pengungsian di wilayah Kupang bersama dengan pengungsi lain. Mereka berada di sana sejak pindah dari Timor Timur tahun 1999 lalu. Hingga kini, ia belum bisa bertemu dengan anak laki-lakinya yang terpisah ketika mereka mengungsi ke Kupang.

Pada tahun 1999, penduduk Timor Timur yang pro-Indonesia dipaksa untuk mengungsi ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 16 September 1999 kami datang ke Kupang.

Akan tetapi, anak laki-laki saya yang bernama Selestino tidak ikut karena kami tidak tahu keberadaannya ketika kami hendak mengungsi.

Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengannya. Sesampai di Tuapukan, pemerintah memberi kami beras. Akan tetapi, sejak tahun 2002, kami tidak lagi mendapatkan bantuan beras sampai sekarang.

“Kami akhirnya hidup dengan bertani di kebun orang untuk bisa membiayai kehidupan kami dan uang sekolah anak-anak kami. Kami menanam ubi untuk menjadi makanan kami.”



[Kesaksian Olandina Da Silva Ximenes]

08

PENGUNGSU TIMOR
TIMUR, BEKAS ISTERI
TNI, DIBENCI ORANG

Olandina Dasilva Ximenes adalah isteri tentara Indonesia berpangkat sersan yang meninggal sewaktu bertugas pada tahun 1996. Karena statusnya itu, ia menjadi korban pengucilan masyarakat Timor-Timur di kampungnya, Ossu. Ia terpaksa mengungsi ke Kupang bersama dengan dua anaknya. Ia menjadi terpisah dengan ketiga anaknya yang lain yang masih tinggal di Dili. Hingga kini, ia masih tinggal di kamp pengungsian bersama dengan pengungsi lain.

Awalnya, saya tinggal di Ossu bersama 2 anak saya yang masih kecil. Suami saya yang tentara terbunuh pada tahun 1999. Sejak kematian suami, saya merasa tidak aman sepanjang malam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya mengikuti saran kakak saya untuk pergi mengungsi ke Timor Barat.

Saya hanya membawa dua anak saya karena tiga anak yang lain masih bersekolah di Dili.

Sepanjang perjalanan, saya mendengar baku tembak di sana-sini. Pada malam kami tiba di Viqueque, ada baku tembak lagi. Kami belum makan sejak dari Ossu. Setelah dua hari di sana, kami berangkat ke pelabuhan Teasu dan di sana juga baku tembak terdengar di sana-sini.

Kami sampai di pelabuhan Kupang jam tujuh pagi tapi baru sekitar jam sepuluh ada pasukan yang menjemput kami. Kami kemudian dipisahkan antara keluarga tentara dengan bukan keluarga tentara. Sampai di kamp pengungsian, kami tidak menemukan apa-apa selain pohon duri, sementara kami juga tidak membawa apa-apa untuk mengungsi. Kami hanya punya mantel yang kami pinjam dari seseorang di perjalanan.

Pemerintah memberikan bantuan beras kepada kami para pengungsi. Satu kepala keluarga (KK) hanya mendapat 5-10 kilo beras saja. Pada tahun 2002, pemerintah sudah menghentikan bantuan beras itu.

Saya akhirnya menenun untuk bisa menghidupi diri dan anak-anak saya. Pada tahun 2002, berkat bantuan PMI, saya mengetahui bahwa dua anak saya masih hidup dan diasuh oleh kakak perempuan saya sedangkan seorang lagi yang tinggal di Kesusteran Ossu sudah meninggal karena sakit.

Saya sudah dua kali pergi ke Dili sejak mengungsi untuk menemui anak-anak saya, tetapi saya sangat takut pergi ke Ossu ada banyak orang yang membenci saya karena mending suami saya adalah tentara Indonesia.

“Saya ingin sekali memiliki rumah dan tanah sendiri di Kupang, bisa menyekolahkan anak perempuan saya sampai sarjana dan bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha tenun saya.”



[Kesaksian Aleta Ba'un]

09 BATU MARMER
DIJARAH, WARGA
MORO AKAN TIDAK
BERARTI LAGI

Aleta Ba'un korban kekerasan penolakan eksploitasi gunung Anjaf-Nausus, gunung yang dianggap suci oleh masyarakat adat setempat. Aksinya bersama temannya yang lain dimulai tahun 2000an. Akibatnya ia mendapat banyak ancaman dan kekerasan dari preman-preman dan investor. Aksinya membuahkan hasil karena ada penangguhan pelaksanaan proyek tersebut sejak 18 Agustus 2000.

Pada tahun 1956 pertambangan batu marmor dimulai di empat lokasi di gunung Anjaf-Nausus, wilayah Mollo. Pemerintah daerah aktif mempromosikannya untuk menari investor. Siapa yang melawan proyek ini mengalami kesulitan hidup, diancam bahkan mendapat tindakan kekerasan dari preman dan investor.

Pemerintah tidak peduli dengan arti penting dan sakral gunung Anjaf-Nausus bagi penduduk lokal. Itu juga menjadi tempat kami melakukan penyembahan untuk memohon hujan dan kesuburan tanah, serta memperoleh nasehat dari

para leluhur. Secara geologis, dua puncak gunung itu termasuk dalam sejumlah gunung yang “mengikat tanah” sehingga mencegah erosi dan melindungi ratusan mata air sebagai asal-usul berbagai sungai besar di Timor Barat.

Selain itu, batu-batu yang ada di gunung Anjaf-Nausus memiliki nilai budaya tinggi bagi warga Mollo. Mereka menggunakan marga dari nama-nama batu. Bila batu di gunung Anjaf-Nausus habis, maka marga warga Mollo sudah tidak berarti lagi. Surat izin pertambangan pertama keluar pada pertengahan Desember 1997, tetapi saya dan warga dari tiga suku, berhasil menutup pertambangan itu pada bulan Agustus 1998.

Ternyata, pada bulan Mei 1999, pertambangan mulai dibuka lagi setelah ada persetujuan tertulis antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah kabupaten. Sejak saat itu, terjadi pengerusakan alam dan lingkungan kehidupan kami secara menyeluruh.

Karena kami menolak pertambangan tersebut maka kami mendapat ancaman penghilangan nyawa dan berbagai kekerasan dan penghinaan di depan umum yang disaksikan oleh hakim, jaksa dan polisi yang tidak melakukan pencegahan. Polisi hanya menyuruh saya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi tapi saya menolak karena yang saya butuhkan tanah, bukan laporan. Karena kejadian itu, orang tua saya menyuruh saya untuk mencabut gugatan itu.

Saya dan teman-teman lalu mencabut gugatan itu. Berbagai ancaman lain kami alami sehingga harus menyembunyikan diri, saya tidak berani pulang ke rumah, karena mereka akan melempari rumah kami dengan batu kalau kami kelihatan di rumah. Anak-anak dan suami saya pindahkan ke tempat lain.

Saya dan warga lain terus bertahan untuk bisa mengeluarkan perusahaan marmer dari tanah Mollo dan membangkitkan kembali struktur sosial-budaya tradisional untuk melindungi lingkungan hidup.

Kami melakukan dua belas kali pertemuan untuk mengkonsolidasikan para pemimpin budaya kami dan berdemonstrasi. Namun, pengorbanan ini tidak sia-sia karena pertambangan itu akhirnya dihentikan Gubernur pada tanggal 18 Agustus 2000. Bekas lokasi pertambangan akhirnya kami gunakan sebagai pusat belajar dan kami mengadakan festival peringatan setiap tahun.

Pesan saya yang paling utama kepada pemerintah provinsi maupun daerah. Orang membangun kota bukan dengan pertambangan tapi dengan hasil bumi. Ingatlah bahwa bumi itu adalah tubuh manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Karena gubernur tidak bisa menciptakan tanah, jadi jangan jual tanah kepada investor. Untuk generasi mendatang, jangan jadi penjual kampung sendiri. Terakhir, silahkan jual apa yang bisa kita buat dan jangan jual apa yang tidak bisa kita buat.

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Dengar Kesaksian Kupang

Pola Kekerasan dan Impunitas dalam kasus Pelanggaran HAM Berat di NTT sejak 1965-2005

Oleh : Pater John Mansford Prior, SVD
(Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan
Candraditya Waiklau - Maumere)

Mendengar kisah-kisah dari para penyintas tadi, Ibu Bendelina, Ibu Ferderika, Ibu Migelina, Bapa Thomas Penlaana, Mama Tabita, Ibu Rade, dan Bapa Petrus Yohanes Neonleni yang menjadi sasaran kekerasan pada tahun 1965-1966, Ibu Libertina korban proyek keluarga berencana, Ibu Aleta Ba'un korban pembela gunung pelindung alam nan sakral, dan Ibu Therezina Monteiro, Ibu Filomena, dan Ibu Olandina yang menjadi korban berakhirnya masa pendudukan di Timor Timur, reaksi saya satu-satunya ialah berdiam diri, membungkam.

Saya juga turut kena virus amnesia sejarah. Para penyintas tadi telah menembus kabut amnesia yang menguntungkan kami-kami ini. Kini dalam diri saya timbul rasa bersalah, juga rasa frustrasi dan marah, bercampur rasa tak berdaya.

Tapi semua perasaan itu harus saya lewati. Kisah-kisah tadi mengajak saya



untuk mengikuti jejak para penyintas dan membiarkan diri saya dibebaskan oleh kebenaran, oleh pelurusan sejarah, oleh pengakuan bahwa kepahitan dan air mata, daya tahan dan keyakinan pribadi para penyintas telah menguntungkan saya dan masyarakat NTT pada umumnya selama ini.

Selama ini kita di NTT hidup dalam mitos palsu karena kemajuan kita berakar dalam sejarah yang berlumuran darah.

Kita menikmati hasil penipuan dan pembelokan sejarah karena kita tidak mau menerima bahwa Orde militer Soeharto-Golkar itu (1965/1966/1967-1998) berdiri di atas kaki yang keras lagi kejam dan hingga sekarang belum merasa harus bertanggung jawab atas salah satu pembantaian terbesar selama abad ke-20. Dan rejim yang biadab itu bertahan selama tiga puluhan tahun karena aksi-aksi teror yang bersusulan.

Di mulut kita mengucapkan nama Tuhan yang Maha Esa, sedangkan nilai-nilai

yang kita hayati secara pribadi, di dalam lingkungan keluarga, pun di dalam jemaat beriman dan masyarakat pada umumnya, diambil dari mitos, struktur, dan sistem kemasyarakatan yang ditawarkan-paksakan oleh kaum penguasa yang sungguh kejam.

Apa kata-kata ini terlalu ekstrim? Coba kita menelusuri ati dari kosakata “kekerasan” dan “terorisme”.

Kekerasan

Lingkup makna kata “kekerasan” jauh melampaui kesakitan fisik. Kekerasan menyangkut kekuatan fisik, bahasa kasar, kemarahan, dan yang lebih penting lagi, pembatasan kebebasan yang dipaksakan.

Kekerasan menggempur orang secara psikologis, meremehkan, merusak, dan mende-personalisasikan pihak lain. Jadi, “kekerasan” adalah tindakan apapun, baik terucap atau tidak, baik lisan atau tertulis, baik fisik atau psikologis, baik secara aktif atau pasif, baik di depan umum atau secara tersembunyi, baik secara perorangan atau institusional, baik pelakunya manusia atau dewa / malaikat / yang ilahi, baik seberapa hebat intensitasnya, yang mencela, melanggar, menghina, melukai, menstigmatisasi, atau membunuh.

Tadi para ibu dan bapa mengisahkan bentuk-bentuk kekerasan yang amat terbuka, juga bentuk-bentuk yang terselubung; ada yang terjadi di tengah masyarakat, lainnya di dalam rumah tangga, juga di tengah jemaat beriman.

Boleh jadi, ada bentuk-bentuk kekerasan

yang kurang kita perhatikan selama ini karena bersifat sistemik seperti seksisme dan ketidakadilan gender.

Akibat kekerasan itu adalah bahwa para ibu dan bapa penyintas kehilangan kehormatan dalam masyarakat, dijauhi dan disingkirkan oleh keluarga sendiri, oleh kenalan, dan warga sekampung. Malah tak jarang dikutuk oleh pimpinan gereja. Jadi, kekerasan membawa “kematian sosial” yang bisa membawa derita yang lebih parah dari penyakit fisik yang kronis.

Tapi, dalam penghematan saya, kata “kekerasan” belum mengungkapkan apa yang dialami oleh para ibu dan bapak penyintas tadi. Yang mereka derita tidak lain adalah terorisme negara.

Terorisme dan Terorisme Negara

Walau belum ada satu definisi “terorisme” yang dapat diterima oleh semua pihak, definisi Bruce Hoffman menggambarkan apa yang baru kita dengar dari para ibu dan bapak penyintas tadi. Bruce menandakan,

Terorisme adalah usaha yang menciptakan dan memanfaatkan rasa takut secara sengaja melalui kekerasan, atau ancaman kekerasan, untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Setiap aksi teror menyangkut kekerasan atau ancaman kekerasan. Terorisme terbentuk sekian lama sehingga berdampak pada psikologis orang secara mendalam, dan jauh melampaui kalangan para korban langsung ataupun tujuan sempit serangan teror itu sendiri.

Tujuannya adalah menanamkan rasa takut dalam jiwa dan batin para korban dan dengan demikian mengintimidasi seluruh masyarakat dan pendapat umum. Terorisme memiliki banyak pola untuk bisa membangun kekuasaan dimana kuasanya belum ada atau mengkonsolidasikan kekuasaan dimana kekuasaannya masih lemah.

Melalui berita dan isu yang disebarluaskan oleh aksi-aksi kekerasan itu, kaum teroris mencari peluang, pengaruh dan kuasa yang belum mereka miliki untuk memajukan perubahan politik yang dikehendakinya.

Pengalaman pahit yang dikisahkan tadi tidak lain adalah cerita tentang terorisme negara. Sasaran aksi teror negara pada tahun 1965-1966 itu adalah seluruh lapisan masyarakat NTT dan bagi kaum penindas, sasaran itu lebih penting daripada nasib para korban langsung.

Para korban diperalat untuk tujuan politik: pemerintah Soeharto hendak menghilangkan generasi pertama yang terdidik, angkatan cendekiawan pertama NTT yang bersifat kritis – guru, kepala desa, pendeta, anggota majelis jemaat.

Kepala dari semua kekuatan pembaruan-progresif dipenggal – reformasi tanah dihentikan, demokrasi dijinakkan, feodalisme ditegakkan kembali.

Dan kekerasan kaum terorisme negara berhasil: seluruh lapisan masyarakat diintimidasi selama puluhan tahun. Hanya dengan demikian, angkatan bersenjata dapat mengambil alih dan

mempertahankan tanduk kekuasaan negara sekian lama.

Pada tahun-tahun berikutnya, sistem teror dimanfaatkan oleh rejim Soeharto sebagai alat pemerintahan.

Rejim itu berusaha memaksakan kontrol total atas masyarakat, bukan hanya melalui repelita pembangunan ekonomi yang tersentralisasi, tapi juga menguasai cara kita berpikir, sejarah kita; malah fungsi agama - agama pada umumnya tunduk pada kekuasaan dan ikut menghalalkan rejim secara ritual.

Demi menjalankan relasi dengan badan - badan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, jumlah anak dari tiap-tiap keluarga dibatasi secara paksa dan dengan metode - metode KB yang belum diizinkan di dunia Barat, para ibu menjadi kelinci percobaan. Salah satu akibatnya sudah kita dengar tadi.

Setelah PKI diberantas “sampai ke akar-akarnya”, rejim menciptakan “musuh potensial”, “bahaya laten PKI” dan “organisasi tanpa bentuk”. Kita diformat untuk saling mencurigai, saling melapor. Salah satu keberhasilan rejim Soeharto-Golkar itu adalah membuat masyarakat saling tidak percaya hingga sekarang.

Atomisasi Masyarakat NTT

Kita juga tahu bahwa aksi teror negara di bawah komando angkatan bersenjata pada tahun 1965-1966 itu dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Tentara melibatkan hampir semua organisasi massa dalam aksi pembunuhan dan penyiksaan massal itu: partai politik, organisasi pemuda termasuk pemuda Kristen, Katolik, dan Islam. Tidak ada pihak yang tidak diikutsertakan supaya mulut kita semua dibungkam dan masyarakat kita diatomisasi (dipecah-belah), tidak dapat membela diri, tidak berdaya, rapuh.

Karena semua unsur dilibatkan, maka semua pihak bungkam dan kita mengalami amnesia dan menghapus masa teror itu dari ingatan kolektif. Para penyintas harus menderita sendiri.

Dan rejim Soeharto dengan kendaraan politiknya, Golkar, berhasil. Justru krisis moneter pada tahun 1997, dan bukannya kebangkitan nurani sosial, yang akhirnya menumbangkan rejim itu.

Stigmatisasi

Sulit jika kita disuruh menyiksa atau membunuh sesama manusia. Para korban harus di-dehumanisasikan dulu, diobjekkan, di-PKI-kan, di-GERWANI-kan, dibinatangkan, baru dapat diikat, diejek, dipukul, didera, dicincang "benda-benda" itu. Para korban dipermalukan, para penyintas dianggap tidak punya etika atau moralitas, khususnya anggota GERWANI yang distigmatisasi sebagai pelacur jalanan. Kehadiran para korban dan penyintas kekerasan 1965/1966 mencemarkan keluarga, masyarakat, dan Gereja.

Walau PKI dan GERWANI adalah organisasi massa yang sah, legal, terdaftar, siapa saja yang dituduh menjadi anggota organisasi

tersebut ditindak di luar jalur hukum, malah dianggap melanggar hukum, bersalah, berdosa, orang kriminal.

Stigma PKI dan GERWANI dianggap cukup untuk menyeret para korban ke luar jalur hukum, dan alasan kuat untuk dijauhi oleh keluarga dan masyarakat umum. Martabat para korban dan penyintas dilukai, mereka mengalami proses dehumanisasi, dan karena itu mudah dilecehkan.

Kekerasan Budaya NTT

Kita dibiusi oleh intimidasi dan rasa takut. Tapi, strategi dan siasat itu tidak mungkin berhasil kalau tidak ada sesuatu dalam diri kita, dalam budaya kita, malah dalam bentuk agama kita, yang memungkinkan, malah membenarkan proses itu.

Pertama, lingkup-lingkup budaya NTT bersifat sangat homogen-konformis. Kita sulit menerima pluralisme. Orang yang berpikiran lain disingkirkan dan sering merantau ke luar dari genggaman kultur kampung yang feodal.

Dan justru unsur-unsur reaksioner-feodal itu yang menjadi mitra rejim Soeharto. Diyakini bahwa norma-norma keluarga dan lingkup budaya lokal terancam oleh kehadiran "virus" PKI yang harus diberantas "sampai ke akar-akarnya".

Dan ada benarnya: GERWANI membentuk perempuan mandiri, bukan perempuan submisif, sementara PKI memperjuangkan reformasi tanah yang mengancam posisi kaum tuan tanah dan seluruh hierarki penguasa. Kedua, keluarga-keluarga kita

terikat oleh sedertan ritus dan kebiasaan menyangkut peralihan penting (kelahiran, perkawinan, kematian). Keluar dari ikatan adat keluarga hampir-hampir tidak bisa dibayangkan. Sekalipun ada paman yang merampas tanah dari keluarga korban 1965/1966, sulit bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan.

Kita merasa aman dalam ikatan keluarga, kita merasa bersalah jika keluar dari situ. Karena itu, semua korban dan penyintas kekerasan negara seharusnya “merasa bersalah”. Kisah para korban dan penyintas “mengancam” harmoni dan kekompakan keluarga; terpaksa mereka berdiam diri.

Ketiga, budaya-budaya kita bersifat patriakal, berpusat pada laki-laki. Sampai kini kelompok narapidana terbesar dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan rumah-rumah tahanan NTT adalah kaum pria yang dihukum karena pelanggaran moral, alias salah satu jenis pelecehan seksual. Dan ini belum terhitung kekerasan dalam rumah tangga.

GERWANI yang membekali perempuan Indonesia agar mampu tampil selaku warga negara yang aktif-terlibat, dihancurkan dan diganti dengan Dharma Wanita, organisasi wajib yang menjinakkan para ibu pegawai dan pejabat dengan pelatihan memasak dan model-model baru untuk mempercantik diri. Kita mundur seratus tahun.

Sepertinya ada asumsi bahwa laki-laki harus membimbing dan menguasai kaum perempuan karena pada kodratnya lebih superior dan dengan sendirinya,

perempuan dianggap makhluk inferior.

Keempat, anak-anak muda sedang melepaskan diri dari akar budaya lokal, dan jika mereka tidak punya pekerjaan yang tetap dan jelas, mereka terombang-ambing tanpa status yang pasti dan masa depan yang jelas pula.

Generasi “mengambang” ini mudah diperalat oleh pihak yang hendak memanipulasi mereka, melibatkan mereka dalam aksi-aksi kekerasan. Menjadi “pahlawan sehari” dapat, untuk sementara, memulihkan rasa harga diri kaum muda laki-laki yang sudah luntur.

Kelima, rasanya “laki-laki” dalam budaya - budaya NTT mesti bersifat “jantan”, kuat, harus dapat mengendalikan situasi, siap membela keluarga, kampung, tanah, dan jika perlu dengan kekerasan. Jika tidak balas-membalas, itu bukan laki-laki. Apakah kita bisa merumuskan kembali makna laki-laki yang pantang kekerasan? Sepertinya kita harus mulai dari awal.

Jika kita hendak membangun sebuah masyarakat yang pantang kekerasan, kita harus membongkar akar-akar terdalam dalam budaya-budaya NTT yang mengizinkan laki-laki menguasai dan memperlakukan perempuan dengan sewenang-wenang, yaitu ketidakadilan dan diskriminasi gender.



Budaya kekerasan akan terus berlangsung sampai status dan pemberdayaan perempuan ditingkatkan. Artinya, mayoritas perempuan harus tamat paling tidak sekolah menengah, umur menikah dan kelahiran anak pertama supaya ditunda, peran sertanya dalam ekonomi dan politik dan pengambilan keputusan ditingkatkan dalam segala aspek kehidupan.

Untuk itu, sikap, keyakinan, dan norma tradisional, baik dalam kultur maupun agama, harus diputar balikkan karena bukan hanya individu yang memeras, melainkan juga struktur sosial, pola budaya, sistem politik dan ekonomi yang kejam yang seakan-akan “menggenggam” kita anggota - anggotanya.



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Dengar Kesaksian Kupang

Pada acara Dengar Kesaksian Kupang, 27 April 2013 di aula Fakultas Teologi UKAW Oesapa, kita memasang telinga dan membuka hati — mendengarkan pelanggaran demi pelanggaran, kekerasan demi kekerasan, yang dialami masyarakat di NTT.

Peristiwa G30S di Jakarta pada tahun 1965 berbuntut panjang dan meluas sampai ke seluruh pelosok tanah air. Ada sebuah mata rantai komando yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang luar biasa bagi anggota PKI maupun yang dituduh memiliki kaitan dengan partai tersebut. Pola kekerasan, represi, dan impunitas yang terjadi pada 1965/1966 oleh negara terhadap masyarakat sipil berlanjut pada dekade-dekade berikutnya.

Di NTT, kekerasan dan represi terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda: perampasan sumber daya alam, pemaksaan KB, dan pemindahan paksa pasca jajak pendapat di Timor-Leste tahun 1999. Budaya impunitas memungkinkan pelaku tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga sekarang.

Dalam acara Dengar Kesaksian, kita mendengarkan cerita 11 orang korban dan penyintas. Ini hanya sebuah titik air dalam lautan pelanggaran yang terjadi di NTT dan di Indonesia umumnya.

Tragedi 1965

Kita mendengar cerita bagaimana keluarga harus bertahan pada saat bapak, mama, kakak, om mengalami pembunuhan, penghilangan, dan penahanan sewenang-wenang tanpa melalui proses peradilan. Penahanan tidak hanya terjadi pada tahun 1965-1966 bahkan terjadi pada tahun 1975-1978.

Ada anak-anak yang ayahnya dihilangkan, dan harus mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga besar, gereja, dan masyarakat, sedangkan ibunya

harus menjalankan kerja paksa dan wajib lapor. Ada guru yang diberhentikan, ditahan, dan sebagian bahkan dibunuh. Ada orang yang mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti 'lari papan'.

Ada perempuan yang saat ditahan secara sewenang-wenang mengalami kekerasan seksual dari aparat negara. Ada kepala kampung yang mengalami penyiksaan keji oleh polisi.

Bukan hanya korban, melainkan juga anggota keluarganya mengalami sindiran, peminggiran dan diskriminasi sosial. Hingga hari ini, sebagian besar keluarga masih mengalami trauma dan tidak mau menceritakan pengalaman mereka.

Kekerasan dalam Konflik Sumber Daya Alam

Kita juga mendengar cerita mengenai pertambangan marmer di Mollo Utara yang merusak sumber daya alam dan penyitaan sewenang-wenang atas tanah masyarakat adat.

Pemaksaan Keluarga Berencana (KB)

Kita diingatkan pada sebuah situasi di mana tentara dilibatkan dalam urusan pemasangan kontrasepsi.

Kekerasan 1999 terkait Pengungsi Timor Leste

Kita mendengar kesaksian dari saudari-saudari kita korban kekerasan 1999 yang menjadi pengungsi dari Timor-Leste.

Akibat kekerasan yang meluas yang terjadi pada masa jajak pendapat, para korban mengalami pemindahan paksa dan perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan. Namun, di tengah cerita-cerita penderitaan, kita juga mendengar bagaimana korban bertahan. Kisah-kisah perjuangan memberi inspirasi. Tindakan-tindakan mereka mencerminkan keberanian, kreativitas untuk merawat kehidupan, spiritualitas, dan solidaritas masyarakat.



REKOMENDASI

A. Pemerintah Nasional dan Lokal

Pemerintah perlu mendengarkan suara korban dan mengakui kejahatan yang terjadi serta membuat komitmen untuk mengambil langkah-langkah pemulihan, termasuk penghentian kekerasan dan diskriminasi bagi korban/penyintas dan anggota keluarganya.

1. Pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hak-hak korban termasuk pemulihan/reparasi dengan merehabilitasi nama baik, memberikan gaji, pensiun, pelayanan kesehatan, dan hak sipil lainnya.
2. Pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten membuat memorialisasi atas tragedi 1965, khususnya di situs-situs pembantaian, agar menguatkan ingatan untuk mencegah pengulangan.
3. Pemerintah berkewajiban menyusun kembali kurikulum sejarah terkait tragedi 1965 yang mewakili perspektif korban dalam rangka pengungkapan kebenaran.
4. Dalam penerapan program KB, pemerintah menjamin hak-hak perempuan untuk menerima atau menolak berdasarkan informasi yang memadai. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur medis yang mampu menunjang program KB yang dipromosikannya.
5. Pemerintah dan pengusaha jangan terus menjual batu, tanah dan sumber daya alam di NTT. Bumi adalah ibu. Jangan menghancurkan tubuh ibu, apalagi menjualnya.

6. Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK segera menjalankan kewajibannya terkait perlindungan, advokasi dan pemulihan bagi korban.

B. Lembaga-Lembaga Agama

1. Lembaga-lembaga agama perlu memeriksa diri dan mengakui keterlibatannya dalam kekerasan baik ketika lembaga-lembaga agama diam terhadap kekerasan itu maupun saat lembaga-lembaga agama turut melakukannya.
2. Lembaga-lembaga agama sebagai bagian dari masyarakat sipil harus membuka ruang dengar kesaksian dan aspirasi para korban agar dapat membantu proses penyembuhan.
3. Lembaga-lembaga agama berkewajiban untuk memfasilitasi rekonsiliasi di dalam masyarakat dan menunjukkan keberpihakan pada korban.
4. Lembaga-lembaga agama membuat memorialisasi atas tragedi-tragedi kemanusiaan di NTT agar menguatkan ingatan untuk mencegah pengulangan.

C. Masyarakat Sipil

1. Masyarakat sipil harus terus mengumpulkan kesaksian-kesaksian korban di NTT untuk disatukan dengan kesaksian lainnya di Indonesia sehingga semakin banyak kebenaran terungkap dan terjadi perubahan di masa depan.
2. Masyarakat sipil berkewajiban untuk menciptakan ruang bagi pendidikan sejarah dari perspektif korban bagi seluruh warga.
3. Masyarakat harus mengakui kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam konflik masa lalu dan menghapus praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan serta mendorong upaya pemulihan.
4. Masyarakat membuat memorialisasi atas tragedi-tragedi kemanusiaan di NTT agar menguatkan ingatan untuk mencegah pengulangan.
5. Masyarakat dapat memanfaatkan tradisi lokal dalam memfasilitasi rekonsiliasi di dalam masyarakat.

Rekomendasi-rekomendasi di atas bertujuan agar kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu itu tidak pernah berulang lagi. Jangan lagi: Kaisa Nai (bahasa Meto), To'o Ona (Tetun), B'ole Tao Ri (Sabu), Woi Panene Ei (Alor), Abi Dika (Sumba-Anakalang).

Kupang, 27 April 2013

Majelis Warga:

1. Romo Leo Mali
2. Pendeta Mery Kolimon
3. Bapak Hendrik Boenga
4. Pendeta Paoina Bara Pa
5. Pendeta Yetty Leyloh
6. Galuh Wandita

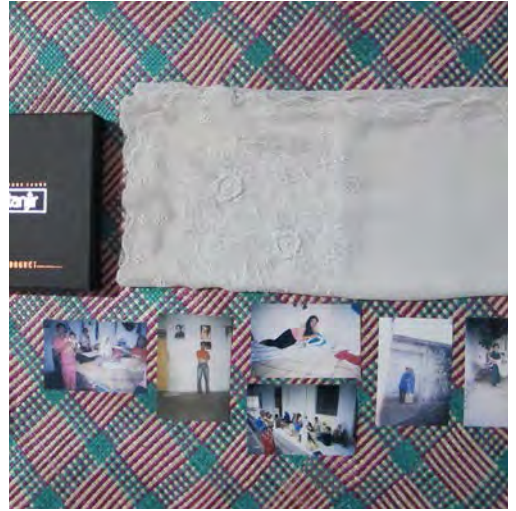






IV DENGAR KESAKSIAN ACEH

* Untuk kepentingan keamanan narasumber maka identitas seluruh narasumber yang memberi kesaksian dalam acara dengar kesaksian di Aceh tidak ditampilkan dalam laporan ini



01

TENTARA MEMASUKKAN
PISTOL KE TELINGA
KANAN KIRI SAYA

Saya adalah janda dan memiliki empat orang anak. Saat ini saya menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Almarhum suami saya lahir pada tahun 1946 dan meninggal tak lama setelah dia dipulangkan oleh tentara dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan setelah ditahan untuk sekian lama di Tanjung Gusta, Medan.

Pada bulan puasa tahun 1990, tentara mencari suami saya. Lalu dibawanya ke kantor Koramil. Tapi suami saya berhasil melarikan diri ke hutan.

Pada malam harinya, tentara mendatangi rumah saya untuk mencari suami saya. Mereka lalu mengambil paksa ayam-ayam piaraan kami. Pada hari keempat perayaan hari Idul Fitri pada bulan September 1990, tentara kembali datang ke rumah saya dan menuduh saya sebagai istri dari wakil GPK. Mereka juga menuduh ayah saya sebagai ketua GPK karena ayah memiliki nama yang sama dengan nama ketua GPK, yaitu Prang. Nama Ayah Abdullah Prang karena dulu ikut berperang melawan DI/TII.

Mereka membawa ayah dan dua adik saya sampai sekarang tidak pernah kembali. Tentara kembali datang menemui saya ketika saya berada di gubuk kecil di kebun. Mereka bertanya tentang keberadaan suami saya sambil menunjukkan KTPnya.

Melihat itu, anak saya berkata kepada saya, "Mak, tolong ambil adik karena ayah mau diambil dan Komandan akan naik ke Gampong." Saya mengambil anak saya dan menggendongnya dengan harapan mereka tidak akan memaksa saya untuk ikut dengan mereka. Akan tetapi, mereka malah merusak gubuk kami, membuang semua barang ke lantai, dan kemudian pergi.

Saya lalu pulang ke rumah, bertemu dengan ibu dan beberapa orang sedang berdiri di depan rumah. Tentara yang tadi datang ke kebun, datang ke rumah lalu membawa saya ke kantor Polsek dan mempertemukan saya dengan orang yang mereka tembak di kebun tadi siang.

Mereka menyuruh saya untuk mengakui laki-laki itu sebagai suami saya, tetapi saya menolak karena itu bukan suami saya. Tentara yang lain sedang menyiksa laki-laki itu.

Mereka menyiram tubuhnya dengan air terus-menerus dan dia berada dalam kondisi jongkok. Mereka lalu menyiksa saya juga pada jam 8 malam di hari pertama. Mereka memasukkan pistol ke telinga kanan dan kiri saya, lalu mengarahkan pistol itu ke tengkuk saya dan mengancam akan menembak saya. mereka mendudukkan saya di kursi dan mengikat tangan dan kaki saya ke arah

belakang. Saat itu saya sedang hamil delapan bulan, tetapi mereka memukul punggung saya dengan gagang senjata dan menumbuk punggung saya sambil mengatakan agar jangan ada lagi anak GPK yang lahir. Seorang polisi bernama Ahmad Rawa kemudian menyelamatkan saya karena mengenal ayah saya.

Dia mengatakan kepada tentara yang menyiksa saya tadi untuk tidak menyiksa saya lagi, menyentuh saya pun tidak boleh.

Mereka lalu tidak menyiksa saya lagi dan mulai memperlakukan saya dengan baik: mereka menyediakan tempat tidur di kamar dengan tikar dan memberikan lampu minyak sebagai penerangan. Lima belas hari menjelang melahirkan saya dikembalikan ke rumah sehingga saya bisa melahirkan di rumah.

Suami saya ditangkap oleh tentara ketika saya ditahan. Dia kemudian ditahan di penjara Tanjung Gusta, jalan Gaperta Medan. Di sana dia mendapat siksaan yang berat.

Dia direndam di kolam lintah dan siksaan terus dilakukan tentara kepadanya selama dua bulan. Dia baru dibawa pulang ke rumah setelah ada MoU.

Kondisinya sangat menyedihkan, dengan badan lemah dan tidak bisa berjalan dengan normal. Akhirnya meninggal pada tahun 2012. Hingga kini, pemerintah tidak memberikan bantuan apapun kepada kami.



“Namun begitu, saya masih berharap pemerintah mau memperhatikan anak - anak saya agar mereka bisa melanjutkan sekolah mereka, bisa mendapatkan pekerjaan nantinya sehingga hidup mereka bisa lebih baik lagi. Saya juga berharap untuk bisa mendapatkan modal usaha.”

02 MONCONG SENJATA MEREKA MASUKKAN KE KEMALUAN SAYA

Saya seorang janda bekerja sebagai petani. Saya mendapat siksaan dari tentara karena suami saya menjadi anggota GAM. Pada tanggal 25 September 1990, saya sedang berada di kebun mencari pisang untuk dijual bersama dua anak saya. Tiba-tiba pada jam 11 siang, kami mendengar suara tembakan.

Saat itu kami tidak tahu bahwa orang yang ditembak itu adalah suami saya. Kami langsung bergegas pulang dan di perjalanan, saya bertemu dengan geuchik dan dia memberitahu bahwa saya dicari oleh tentara untuk dibawa ke Rumah Geudong.

Tentara kemudian membawa saya ke Rumah Geudong dengan kedua anak saya karena mereka tidak bisa dititipkan di tetangga dan mereka juga tidak mau dititipkan di rumah geuchik.

Sesampainya di Rumah Geudong, tentara memberikan kue kepada anak-anak saya dan membawa kami naik ke dalam. Sesampainya di rumah, tentara menanyakan keberadaan suami saya dan saya menjawab tidak tahu. Mereka kemudian

menyuruh saya untuk pergi mengantarkan anak-anak saya ke rumah saudara dan kemudian kembali lagi ke sana.

Sesampainya di Rumah Geudong, tentara menyuruh saya untuk melihat ke halaman rumah tersebut dan ternyata di sana sudah ada sesosok jenazah yang ditutup dengan daun pisang. Perasaan saya sangat yakin bahwa itu tidak lain adalah mayat suami saya yang pasti sudah mereka tembak.

Ternyata benar, mereka sudah mengembaknya di pagi hari tadi. Mereka menyuruh saya untuk melihatnya dari jauh saja, tidak boleh mendekat ke mayat tersebut. Kemudian mereka menanyai saya tentang keberadaan suami saya dan apa yang saya ketahui tentang GPK. Saya menjawab bahwa saya tidak tahu kemana perginya suami saya, karena dia tidak bilang-bilang dia kalau pergi.

Saya juga mengatakan bahwa mereka yang lebih tahu dan saya tidak ada urusan dengan GPK. Mereka marah mendengar jawaban saya. Mereka menelanjangi saya. Rambut disiram bensin, mereka mau membakar saya hidup-hidup, kata mereka. Mereka menyuruh saya berdiri di depan sebuah cermin dan kemudian memakaikan topi koboi jelek di atas kepala saya.

Dalam kondisi telanjang, mereka menyuruh saya untuk melihat diri saya di depan cermin dan mereka mengambil pisau belati, meletakkannya di kuping saya. Mereka menyuruh saya tidur terlentang dan memasukkan moncong pistol pendek ke mulut saya, sedangkan moncong

senjata laras panjang mereka masuk-kan ke dalam kemaluan saya. Ketika itu, barulah tentara memberitahukan bahwa suami saya sudah meninggal dan jenasanya ada di bawah tadi.

Mereka lalu menarik saya agar berdiri dan memasang tali jerat di leher saya sebanyak dua potongan tali nilon. Yang satu diarahkan ke depan dan satunya lagi diarahkan ke belakang. Mereka mengatakan akan menggantung saya.

Mereka menyuruh saya berjalan. Ketika saya berjalan, tali penjerat leher ditarik oleh mereka: ketika saya berjalan lambat tali ditarik ke depan dan ketika saya berjalan cepat tali ditarik ke belakang, dan begitu seterusnya sampai saya tiba di tempat gantungan.

Dengan kondisi telanjang dan dijerat leher, mereka mengarak-arak saya keliling ruangan dan para tentara yang lain menyaksikan saya. Itu sangat menyakitkan hati saya.

Mereka lalu menggantung saya beberapa saat dan setelah itu membawa saya lagi ke dalam. Keesokan harinya, saya disuruh pulang dengan berjalan kaki padahal kondisi saya sangat lemah. Saya hanya segera menjemput anak-anak saya dari rumah saudara

Rumah sangat berantakan dan ada bekas pemandian mayat suami saya. Pada malam harinya, tentara tidak membolehkan orang-orang datang ke rumah kami untuk melakukan kenduri untuk suami saya.

Satu bulan setelah meninggal suami, saya melahirkan anak yang ketiga, sekarang umurnya sudah 23 tahun. Kebun peninggalan suami saya sewakan kepada orang untuk membayar biaya melahirkan.

Saya ingin hidup tenang dan damai. Saya ingin bisa menebus kebun yang dulu digadaikan, dan mendapat modal usaha.

“Saya berharap kepada pemerintah agar kami yang miskin - miskin ini, diperhatikan dan agar pemerintah jangan sampai mengulang kembali segala bentuk kekerasan, penganiayaan terhadap masyarakat.”

03

ENAM BULAN
DITAHAN TANPA
DIBERI MAKAN

Saya janda, petani di Pidie, almarhum suami saya dulu sebagai pemotong kayu di hutan. Ia salah seorang pejuang Aceh Merdeka.

Suatu hari pada tahun 1989, suami saya pergi dengan membawa mesin pemotong kayu dan tidak pernah lagi pulang. Sejak itu, beberapa tentara selalu datang untuk menangkap dan menahan saya.

Mereka mengatakan bahwa suami saya adalah pemberontak dan menuduh bahwa saya membiayai suami saya padahal saya sendiri tidak tahu dimana keberadaan suami saya.

Saya dan anak saya yang berumur 1,5 tahun ditahan pertama kali pada tahun 1989. Saya dibawa ke Pos Cot Tunong di Glumbang Tiga, Pidie, tanpa diberi makan. Saya lalu dilepaskan, tetapi setelah penangkapan itu, saya berulang kali ditangkap-ditahan-dilepaskan oleh tentara dengan tuduhan yang sama. Masih dalam tahun 1989, saya dibawa lagi oleh tentara ke pos militer di Jiem-Jiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie. Di pos militer ini, saya diinterogasi, tentang siapa yang menjadi anggota

GAM. Pada saat itu, saya disuruh duduk sambil memangku anak, lalu dipukul dengan kabel listrik berukuran besar hingga mengenai anak saya. Juga, saya pernah dipukul memakai rotan sebesar pergelangan tangan.

Selama 6 bulan ditahan di Pos Jiem-Jiem ini, tidak pernah diberi makan. Dari pagi hingga sore hari, saya diperbolehkan mencari makan sendiri di sekitar kampung tempat ditahan. Setiap hari saya harus meminta belas kasihan orang untuk bisa menjadi buruh upahan di sawah-sawah mereka agar saya bisa membeli makan untuk saya dan anak saya. Sementara itu, anak-anak saya yang lain tinggal sama ibu saya. Anak pertama saya, perempuan, terpaksa tidak saya akui sebagai anak saya karena saya takut dia akan dibawa dan disakiti oleh aparat tentara. Dia terpaksa saya akui sebagai anak adik saya.

Pada tahun 1990, saya kembali ditangkap dan dibawa ke Rumah Geudong bersama dengan tiga orang anak saya karena tidak ada yang menjaga mereka.

Saya ditahan selama dua malam dan selalu ditanyai tentang keberadaan suami saya padahal saya sudah berulang kali mengatakan saya sama sekali tidak tahu dia berada dimana.

Pada penangkapan selanjutnya, saya dibawa ke SD di kampung saya yang sudah mereka jadikan sebagai pos militer. Keponakan laki-laki saya yang bernama Junaidi ikut ditangkap juga dipukul sampai memar berat dan harus dibawa ke mantri untuk berobat. Saya

juga pernah dibawa ke Jimjim bersama anak saya yang saat itu masih duduk di kelas 3 SD. Selama di sana, tentara memukuli dan meliliti tubuh saya dengan kabel. Lima bulan setelah dilepaskan, saya ditahan kembali di Jiem jiem dan seringkali dipukuli dengan bambu.

Setelah enam bulan ditahan di sana, saya dibawa lagi ke Rumah Geudong dan ditahan, tentara mengikat tangan dan kaki saya, lalu menyetrum jempol kaki saya. Saya ditelanjangi dan dipaksa untuk duduk bersanding dengan laki-laki lain dan dinikahkan dengan dia.

Setelah itu, saya dipaksa menjadi tukang masak bagi tentara. Anak saya juga dibawa ke Rumah Geudong dan ditahan di sana selama tiga hari. Dia juga sempat disetrum oleh tentara.

Pada tahun 1995, saya dibawa ke Rancung, Lhokseumawe dan diinterogasi lagi di sana. Setelah itu, pada tahun 1997 saya ditangkap lagi dan dibawa ke pos di Lung Putu. Selama di sana, saya dilarang ke luar pos, bahkan ke pasar pun tidak boleh. Saat ditahan di sana, ibu saya meninggal dunia, tetapi tentara tidak memperbolehkan saya ke rumah melihat jenazah ibu saya.

Saya sempat merasakan sedikit kebahagiaan pada saat reformasi pada tahun 1998 karena saya sudah bisa berkumpul bersama keluarga dan suami saya. Ketika konflik kembali terjadi tahun 1999, saya dibawa ke Panteu Breuh dan dipaksa tinggal di rumah yang ada di dekat pos.

Tentara terus mengawasi saya di sana dan melarang saya untuk pulang ke Pidie sehingga saya harus tinggal di sana selama setahun dan wajib melapor ke pos militer selama empat bulan. Sekalipun suami saya sudah meninggal, saya masih saja ditangkap oleh tentara pada tahun 2003 karena mereka menuduh saya memberi makan orang-orang GAM. Saya juga tidak diperbolehkan pulang ke rumah selama setahun.

“Saya sudah cukup menderita. Saya berharap supaya tidak ada lagi kerusuhan di Aceh. Jangan ada lagi keributan di sini. Saya juga berharap semoga anak bungsu saya yang laki - laki segera mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dia sudah lulus SMA dan sekarang hanya bekerja sebagai petani untuk membantu saya.”

04

SAYA HANYA INGIN
MELANJUTKAN HIDUP
DENGAN TENANG
DAN DAMAI

Pada tahun 1990, saya tinggal di tempat saudara di daerah Grugok karena kedua orangtua saya sudah meninggal. Waktu itu, saya mendapat kabar dari teman Sabahwa Mu'in, bahwa abang angkat saya, ditangkap dan dibawa oleh tentara ke kantor Koramil Geureugok. Saya bersama kakak ipar saya [istri abang angkat], segera pergi ke sana untuk mencari abang angkat saya. Sampai di sana, kami diinterogasi dan dituduh sebagai keluarga anggota GAM.

Mereka tidak membolehkan saya bertemu dengan abang angkat saya sekalipun pada waktu itu, saya mendengar suara minta tolong dari abang saya. Ketika saya ingin ke ruangan dimana abang angkat saya ditahan, anggota Koramil memukul saya dengan senjata dan menyepak saya sampai saya terjatuh.

Mereka lalu menangkap kakak ipar saya dan menahannya. Saya disuruh pulang sendirian. Sore harinya, saya kembali menjenguk abang dan kakak ipar saya di kantor Koramil, tetapi saya tidak bisa menemui mereka. Tentara berkata kepada saya, "Adiknya juga GPK tidak boleh hidup, harus dibasmi." Saat

itu saya tidak tahu apa arti dibalik kata "dibasmi" itu.

Seminggu kemudian, ada orang yang mengantar baju abang saya yang sudah berdarah-darah ke kantor Koramil dan tentara yang ada di sana menyuruh saya untuk datang ke sana.

Sampai di kantor Koramil, mereka memperlihatkan baju itu dan mengatakan bahwa itu adalah baju kiriman abang saya. Saya lalu bertanya kepada mereka kenapa baju ini berdarah-darah dan dimana abang saya, tetapi mereka tidak menjawab.

Mereka hanya berkata kepada saya agar tidak lagi menanyakan keberadaan abang saya karena saya sudah mendapat bajunya. Mereka lalu menyuruh saya untuk mengambil baju itu. Sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak tahu keberadaan abang dan kakak ipar saya karena mereka tidak pernah pulang.

Saya sempat berurusan kembali dengan tentara pada tahun 2003. Saat itu saya sedang hamil dan sedang mengambil daun pisang di belakang rumah. Tiba-tiba tiga orang tentara mendatangi rumah saya sedangkan beberapa tentara yang lain hanya berdiri jauh.

Ketiga tentara itu lalu menodongkan senjatanya ke saya dan bertanya untuk apa daun pisang yang saya ambil itu; apa untuk bungkus nasi GAM. Saya menjawab bukan karena itu adalah untuk pepes ikan. Mereka lalu masuk ke rumah dan melihat bahwa saya menyiapkan ikan teri untuk dipepes.

Saya heran kenapa setiap pekerjaan yang kami lakukan itu mereka curigai dan bisa membuat kami menjadi korban kalau salah menjawab. Saya kembali mengalami kekerasan dari tentara pada tahun 2003. Waktu itu tentara masuk ke rumah saya untuk mencari suami saya. Ketika tentara menemukan suami saya, mereka memukul dia. Pada waktu itu sedang terjadi penyisiran besar-besaran di kampung kami.

Ada kontak senjata yang terjadi sehingga semua orang disuruh tiarap, merangkak, dan berkumpul di lapangan untuk kemudian ditanyai tentang GAM. Waktu itu saya sedang hamil delapan bulan dengan perut yang sudah besar, tetapi tentara memaksa saya untuk juga tiarap hingga perut saya menyentuh tanah. Saya sudah menjelaskan kondisi saya, tetapi tetap menyuruh tiarap dan diam.

Ketika melahirkan, bidan yang membantu saya mengatakan bahwa kaki anak saya sedikit cacat, bukanlah cacat bawaan lahir, melainkan cacat yang baru. Saya pikir cacat itu terjadi sewaktu saya disuruh tiarap oleh tentara. Saya melakukan pengobatan rutin terhadap kaki anak saya sehingga kakinya bisa kembali normal.

Saya berharap agar konflik ini jangan terjadi lagi di masa depan supaya kami bisa mencari nafkah dengan tenang karena selama ini perhatian pemerintah sangat kurang bagi kami para korban konflik.



“Saya hanya ingin saya bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan damai.”

05

SIKSAAN TENTARA
MEMBUAT SUAMI
MARAH DAN
MEMUKULI SAYA

Saya mempunyai tiga orang anak dan sekarang tinggal di Alue Rambe sambil merawat cucu karena orangtuanya sudah bercerai. Sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani untuk menghidupi keluarga.

Peristiwa kekerasan yang saya alami terjadi ketika ada ditemukan senjata untuk pertama kali di Buloh Blang Ara pada tahun 1990. Pada waktu itu, saya sedang pulang kampung di Tanah Pasir karena saya mendapat kabar bahwa anak saya jatuh ke sungai. Ketika saya pergi, para tentara masuk ke kampung Alue Rambe dan menangkap 12 orang laki-laki.

Rumah-rumah sudah diobrak-abrik oleh tentara. Geuchik (kepala desa) melarang saya pulang ke Alue Rambe dan menetap di Tanah Pasir selama tiga tahun.

Suatu hari ketika saya masih berada di Tanah Pasir, tentara memukul anak saya di kebun ketika dia akan mengikuti kegiatan pramuka. Melihat itu, saya membela anak saya, tetapi tentara itu ikut memukul saya juga.

Pada tahun 1995 saya kembali ke Alue

Rambe. Rumah kami sudah rusak parah sehingga harus dibangun kembali, tak ada barang yang tersisa.

Pada waktu itu, suami saya masih tinggal di Gampong untuk mencari nafkah karena di Alue Rambe sudah tidak aman lagi, tetapi dia kemudian dituduh sebagai pelarian GAM.

Suatu hari, saat saya dan suami sedang bekerja di ladang, kami dipukul dan diikat di bawah pohon pinang oleh tentara. Setelah itu mereka membawa pergi suami saya, sedangkan saya disuruh pergi ke Blang Ara ke Gedung SGI. Sesampainya di Gedung SGI, saya melihat bahwa suami saya sedang berada di depan gedung SGI.

Tiba-tiba saya ditarik ke belakang kantor SGI oleh tentara dan mereka mengancam akan menyetrum saya. Mereka sudah saya ditodong dengan senjata dan saya dipukul dengan sapu.

Pada tahun 2002, tentara menangkap suami saya lagi dan membawanya ke Koramil. Saya mengikutinya.

Di sana kami disiksa: saya didudukkan di kursi, lalu kaki saya disetrum. Beberapa hari kemudian, rumah kami kembali diobrak-abrik tentara. Pada tahun 2003, suami saya disuruh lagi pergi ke pos SGI.

Saya mengantar suami saya karena dia tidak berani pergi sendirian. Di sana, saya dipaksa untuk mengakui bahwa suami saya adalah anggota GAM. Tentara itu mengatakan akan memberikan uang Rp. 500.000 kepada saya jika saya mengakui suami saya GAM. Saya lalu disiksa karena



tidak mau mengakui itu. Suami saya juga disiksa sampai dia menderita lupa ingatan dan mengalami trauma berat.

Pada tahun 2004, rumah saya kembali dihancurkan tentara. Saya heran kenapa kami beserta rumah kami dan warga-warga lain menjadi sasaran kalau yang tentara cari itu adalah anggota GAM. Kami sudah berulang kali mengatakan kalau kami bukanlah anggota GAM, tetapi mereka tidak juga percaya. Mereka juga sering mempengaruhi warga dan anak-anak untuk mengatakan bahwa suami saya, adalah anggota GAM.

Kalau untuk anak-anak, mereka sering mengiming-imingkan uang, sedangkan untuk orang dewasa, mereka berjanji akan memberikan uang Rp 500.000 kepada warga yang mengakui bahwa suami saya adalah anggota GAM. Para warga tetap mengatakan kalau suami saya bukanlah anggota GAM. Suami saya dulu sering disiksa tentara: Siksaan itu membuat suami saya menjadi sering marah dan saya menjadi sasaran pukulannya.

Saya pikir sikap suami saya yang sekarang ini adalah dampak penyiksaan yang

diterimanya. Sekarang, saya berharap bisa hidup tenang, bisa tetap sehat untuk bisa mencari nafkah.

Saya juga harus menghidupi satu orang cucu saya yang ditinggal ibunya yang menjadi TKW di Malaysia. Saya senantiasa berdoa agar pemerintah dapat memperhatikan kami mengingat selama ini kami tidak mendapat perhatian yang layak sebagai korban. Kami hanya mendapat pembagian jatah saat lebaran setahun sekali dan itupun dari pribadi GAM.

Kami mendapat satu botol sirup, gula satu kilogram dan uang Rp 50.000.-. Ini tidak sebanding dengan penderitaan yang sudah kami alami selama bertahun-tahun. Saya juga berharap saya bisa mendapatkan modal usaha agar bisa melanjutkan hidup.

06

SUAMI DISIKSA DAN DIGOROK, UANGPUN DIAMBIL

Saya menikah dua kali. Suami pertama seringkali melakukan kekerasan dan menceraikan saya lima hari menjelang lebaran pada tahun 1985 atau 1986. Saya menikah lagi dan mengalami kekerasan lagi karena suami adalah seorang pemarah. Saya sekarang bekerja sebagai petani dan sebagai pencari nafkah keluarga setelah suami saya meninggal.

Pada tahun 2001 karena suami saya adalah anggota GAM, tiba-tiba diambil tentara dari rumah pukul 1 dini hari. Saya ingin keluar rumah untuk melihat dia, tapi tentara menendang perut saya padahal saat itu saya sedang menggendong bayi.

Tendangan itu sangat kuat sampai saya terkencing-kencing selama tiga hari dan harus berobat ke mantri selama beberapa hari. Isi rumah diobrak-abrik dan uang hasil menjual kopi sebesar satu juta rupiah ikut diambil tentara. Semua bahan jualan kami di kios juga dibuang oleh tentara.

Suami saya meninggal di tahun itu setelah disiksa dan digorok tentara. Kedua tangannya diikat ke belakang,

kakinya diikat dan ditindih, lehernya dipotong hanya tinggal kulit sedikit, dan seluruh tubuhnya dihujam peluru.

Saya harus memandikan dan menguburkan jenazah suami saya sendirian karena hanya ada tiga orang di sana dan tidak ada satupun yang mau membantu. Ini sangat menyakitkan hati saya.

Tiga hari kemudian, saya pulang ke kampung Sigli karena saya tidak berani lagi tinggal di Rimba Raya. Sembilan hari sejak suami saya meninggal, saya mendengar kalau rumah saya yang ada di Rimba Raya itu dibakar.

Pada tahun 2002, paha saya membengkak dan saking sakitnya, saya sempat berpikir bahwa saya akan meninggal. Hidup kami sangat miskin dan saya pernah mengalami kelaparan.

Setiap hari saya harus mencari orang yang mau mempekerjakan saya dan saya akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang, walau hanya membantu mereka membawa pulang pisang dari kebun.

Di Gampong Cot Tunong ini, saya harus merasakan lagi kekerasan dari tentara. Tentara Cot Tunong mendatangi rumah saya untuk meminta ayam jago kesayangan anak saya.

Saya tidak mau menyerahkannya dan karena itu, tentara menampar pipi kiri dan kanan saya sampai mulut saya mengeluarkan darah.

Pada masa Darurat Militer, saya dihadang oleh tentara dengan menggunakan tank

dan panser di tengah perjalanan ketika saya akan menjual hasil kebun ke pasar.

Mereka mengatakan bahwa saya tidak boleh ke pasar dan saya disuruh untuk menjagai tank dan panser mereka. Karena tidak tahan dengan situasi itu, saya menjadi merantau menjadi TKI ilegal di Malaysia pada tahun 2007 hingga tahun 2010.

Di sana, saya bekerja dengan memasak di warung nasi dan tinggal di rumah majikan. Selama di sana, saya mendapatkan perlakuan kasar dari majikan. Saya tidak diperbolehkan memakai sarung dan dipaksa untuk memakai celana pendek.

Selama di sana, saya mendapatkan gaji tiga juta per bulan dan itu saya kirimkan ke kampung untuk membiayai hidup anak-anak saya. Kondisi ekonomi perlahan membaik setelah saya bekerja di Malaysia. Setelah tiga tahun bekerja di sana, saya pulang dan membangun rumah baru.

Saya pernah mendapat kabar bahwa saya mendapat uang kematian suami saya dari Camat, tetapi geuchik bilang tidak ada. Tetapi geuchik akhirnya mengirim saya uang Rp 400.000,-. Camat mengirim saya satu sak beras. Saya juga mendapat dana pemberdayaan ekonomi dari BRA Pidie Rp 10.000.000,- disamping dari KPA tiap hari meugang ala kadarnya.

Saya mendapat dana diyat kematian suami Rp 5.000.000,- namun, itu semua belum cukup untuk membiayai kebutuhan anak-anak saya.

“Saya sangat berharap ada pihak yang mau membantu anak - anak saya supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan mendapat pekerjaan atau kegiatan yang bisa menunjang hidup mereka kelak.”

07 CANTIK CANTIK KO JADI INONG BALE

Saya pernah ditangkap oleh gabungan personel TNI Rajawali yang berpos di Gampong Langgien, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie, dan Polsek Lueng Putu Bandar Baru pada hari Minggu di tahun 2004 karena dituduh sebagai Inong Bale Mereka menaikkan saya ke mobil labi-labi dan membawa saya ke pos di Langgien.

Selama di perjalanan, mereka menginterogasi, membentak-bentak, dan memaksa untuk mengaku sebagai Inong Bale. Sampai di Pos Langgien, Komandan Rajawali menampar saya beberapa kali dengan posisi tangannya ketika menampar itu dari atas ke bawah, dan mengikat tangan saya karena tidak mau mengaku sebagai Inong Bale.

Pada malam harinya, Komandan Rajawali datang dengan hanya berpakaian minim, bercelana pendek, dan memaksa untuk "melayani" mereka sambil menodongkan pistol ke kepala saya.

Saya katakan bahwa saya tidak mau. Mereka bertanya apakah saya tidak takut dan saya jawab bahwa saya tidak takut pada manusia karena yang saya

hanya takut kepada Tuhan. Mendengar jawaban saya, mereka menghentikan usaha mereka untuk memaksa saya, tetapi mengikat kedua jempol saya menjadi satu dari jam 9 malam hingga jam 1 dini hari.

Malam sudah larut tetapi saya tidak tidur karena kaki jempol saya diikat. Tiba-tiba ada tentara bertanya kenapa saya tidak bisa tidur. Saya bilang saya tidak bisa tidur karena kaki saya terikat. Tentara itu lalu melepaskan ikatan kaki saya dan mengoleskan autan di tangan dan kaki saya.

Keesokan harinya mereka melepas saya dan menyuruh saya memasak untuk mereka sambil mengancam saya untuk tidak meracuni mereka. Pada jam 9 pagi, Koramil Lueng Putu menjemput saya dan menahan saya di Koramil selama satu malam.

Keesokan harinya pukul 11 siang, Koramil membawa saya ke Kodim Pidie di Sigli. Di sana, mereka kembali menginterogasi saya dan mengolok-olok saya dengan mengatai saya 'seperti orang terhormat saja'. Jam 2 siang mereka membawa saya ke POM dan ditahan selama satu malam saya.

Di sana, mereka menyuruh saya membuat dan menandatangani pernyataan "menyerah", tetapi saya tidak mau karena mereka yang menjemput saya, bukan saya yang menyerahkan diri.

Keesokan harinya mereka membawa saya ke Polres Pidie di Sigli, salah satu aparat Polres yang bernama David menampar

saya dan berkata “Geram! Cantik-cantik kok jadi Inong Bale”. Selama lima hari mereka menyuruh saya tidur di ruang Serse Polres, sementara itu keluarga saya terus mencari *backing* untuk meringankan kasus yang dituduhkan kepada saya.

Akhirnya saya dibawa ke LP Benteng Sigli dan setelah sepuluh hari disini, baru ada keputusan sidang bahwa saya ditahan selama tiga tahun penjara. Di dalam LP, saya mengurus bayi seorang perempuan yang ditahan karena ibu si bayi sedang sakit karena lengannya ditembak sehingga tidak bisa mengurus bayinya. Saya juga harus mengurus seorang nenek yang ikut ditahan karena diduga memberi makan GAM padahal ia hanya melakukan kenduri untuk keluarganya.

Saya keluar dari penjara pada tanggal 25 Desember 2004, sehari sebelum tsunami. Hukuman saya bisa diperingan setelah keluarga saya mengeluarkan tebusan sebesar 15 mayam emas karena saya sudah tidak tahan lagi di penjara. Pengurangan hukuman ditambah lagi dengan remisi 17 Agustus dan hari Raya Idul Fitri.

Sekarang saya harus kerja banting tulang untuk melunaskan hutang tebusan saya yang dipinjam keluarga saya saat itu. Saya berharap semoga ada pihak yang mau memberi saya modal untuk melanjutkan usaha jualan.

“Saya juga berharap semoga Aceh bisa damai selalu dan orang - orang yang dulu menjadi korban bisa mendapatkan hak-haknya: bantuan untuk pemulihan, baik mental maupun ekonomi.”

08

JANGAN TEMBAK
MAMAK SAYA,
TEMLAK SAYA SAJA

Kekerasan dari tentara saya alami pertama kali pada tahun 2004, ketika diberlakukan Darurat Sipil di Aceh. Suatu pagi sekitar pukul 5 subuh, beberapa tentara menggedor rumah kami. Mereka mencari abang saya yang baru pulang dari Malaysia dan menuduhnya sebagai anggota GAM.

Mereka mencari dia sampai ke kamar-kamar. Saya menjawab tidak tahu keberadaan abang saya dan mereka menampar saya sampai hidung saya mengeluarkan darah.

Mereka menyeret saya ke dapur agar tidak terlihat oleh adik dan kakak saya yang saat itu sedang sakit. Sampai di dapur, mereka masih bertanya tentang keberadaan abang saya.

Ketika kami sampai di dekat kamar mandi, mereka menendang perut saya dan saya kembali ditampar sampai hidung saya berdarah lagi. Mamak saya lalu datang dan mereka mengancam akan menembak mamak saya. Saya lalu mengatakan supaya jangan menembak mamak saya, tetapi saya saja. Karena membela Mamak, saya ditendang lagi. Melihat itu, mamak saya memberitahu

mereka bahwa abang saya ada di Pusong, Lhokseumawe. Mendengar itu, mereka marah pada saya karena saya telah berbohong.

Mereka langsung menggiring saya yang saat itu masih memakai baju tidur ke luar untuk ikut ke Pusong bersama mereka. Kami berjalan kaki sampai ke truk tentara yang ada di simpang Cot Sabong yang berjarak kira-kira 800 meter dan saya digiring seperti penjahat.

Ternyata ada dua laki-laki yang berasal dari kampung saya yang duduk terborgol di truk. Kami semua lalu berangkat menggunakan truk itu menuju ke rumah paman saya di Pusong. Mereka menggebrek rumah paman saya yang ada di Pusong, tetapi tidak menemukan abang saya.

Pada waktu itu, paman saya meminta kepada mereka supaya saya jangan dibawa, tetapi mereka menolak. Paman juga meminta supaya beliau yang mengantar saya pulang, tapi tentara kembali menolak.

Tentara lalu membawa saya pergi dari rumah paman, tetapi ternyata mereka tidak langsung membawa saya kembali ke rumah. Mereka malah membawa saya ke rumah Belanda yang ada di Cunda. Rumah itu menjadi pos sementara mereka.

Di sana mereka kembali menanyai saya tentang keberadaan abang saya, lalu memukul kepala saya, menampar saya, dan mengancam akan memerkosanya karena saya tetap menjawab tidak tahu. Pada hari itu, hujan mulai turun dan waktu itu saya berdiri di luar pos.

Mereka menyuruh saya masuk, tetapi saya tidak mau. Lalu Geuchik Blang Poroh datang ke pos dan mengatakan bahwa saya bukan warganya.

Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya membawa saya pulang ke rumah. Di rumah saya, mereka mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di rumah kami.

Saya tidak berani masuk ke rumah karena takut akan diperkosa mereka. Mereka lalu membawa saya ke jalan besar, namun kemudian membawa saya lagi ke rumah dengan alasan bahwa mereka telah salah tangkap. Orang yang seharusnya mereka tahan itu bukan saya, tapi anak abang saya.

Mereka kemudian pergi, tetapi dua hari kemudian, mereka datang lagi mencari anak abang saya. Mereka tidak menemukan kami karena ibu sudah menyembunyikan anak abang dan saya di rumah saudara yang ada di Lhokseumawe. Kami bersembunyi di Lhokseumawe selama tiga bulan.

“Saya sangat menderita karena perlakuan mereka. Pada saat melahirkan anak pertama, saya harus dioperasi karena tendangan mereka ke perut saya dulu membuat saya sulit untuk melahirkan secara normal. Karena itu, saya sangat berharap semoga ke depan, tidak lagi terjadi konflik di Aceh ini.”

09

DITENDANG TENTARA JADI TRAUMA DAN KESAKITAN WAKTU MENSTRUASI

Saya masih berumur 13 tahun ketika saya menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh tentara. Itu terjadi pada tahun 2004 pukul 4 subuh. Beberapa tentara menggedor-gedor rumah kami untuk mencari paman saya. Tentara menendang pintu rumah karena ibu saya terlambat membuka pintu. Mereka lalu masuk dan memeriksa semua kamar. Saya terbangun dan keluar kamar. Saya lalu menyaksikan pakchik saya dibawa tentara dengan pakaian seadanya karena dia dibangunkan paksa ketika masih tidur. Ibu saya bertanya kepada mereka kemana pakchik saya mau dibawa, tetapi mereka menjawab supaya ibu tenang saja karena pakchik tidak akan dibawa kemana-mana.

Tetapi, mereka kemudian membawa pakchik saya keluar rumah. Ibu saya memaksa ikut sehingga tentara lalu memukul ibu saya dengan senjatanya dan juga menendang ibu. Mereka lalu membawa pakchik saya entah kemana.

Pada sekitar jam 10 pagi, para tentara datang lagi ke rumah saya dan mereka memukul saya juga dengan senjata yang mereka pegang karena saya bertanya

kepada mereka kemana mereka membawa pakchik saya. Mereka mendorong dan menendang perut saya beberapa kali. Mereka mengancam akan menembak saya. Mereka baru menghentikan perlakuan kasar mereka setelah ada wartawan yang datang dan melihat saya diperlakukan seperti itu. Bila wartawan itu tidak datang, mungkin saya sudah mati karena terus dipukuli atau juga ditembak.

Tidak lama setelah kejadian itu, pakchik saya kembali ke rumah. Namun begitu, tentara tetap saja mengawasi kami dan sering datang ke rumah untuk menanyakan tentang GAM. Saya tidak berani lagi bertanya atau mendekati ketika mereka datang karena saya trauma dengan kejadian itu.

Hanya saja, sampai kini saya masih heran mengapa mereka marah dan menendang saya waktu itu padahal saya hanya bertanya kemana pakchik saya mereka bawa.

Selain trauma, saya juga merasa sangat kesakitan saat menstruasi karena tentara pernah menendang perut saya beberapa kali. Terkadang saya sampai tidak bisa bangkit.

Saya harus berobat rutin selama beberapa waktu untuk mengatasi rasa sakit itu. Sekalipun begitu, saya tidak berharap banyak.

Saya hanya ingin agar konflik jangan terjadi lagi di Aceh karena itu akan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Biarlah hanya kami yang mengalami kejadian itu.



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Dengar Kesaksian Aceh

Setelah semua pemberi kesaksian memberikan kesaksian, para pemberi kesaksian melakukan diskusi bersama dengan Majelis Warga tentang perdamaian dan keadilan di Aceh. Ada beragam opini yang mereka kemukakan, namun semuanya memiliki gambaran yang serupa. Menurut mereka, perdamaian hanya ada di atas kertas.

Menurut korban, hingga saat ini mereka belum pernah merasakan perdamaian yang sesungguhnya. Namun begitu, mereka melihat bahwa kini masyarakat Aceh memiliki ruang yang lebih luas untuk mencari nafkah dan sudah tidak perlu merasa takut lagi untuk keluar dan melakukan aktivitas.

Mereka juga mengemukakan bahwa tidak semua korban mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hanya korban-korban yang lantang menyuarkan hak mereka



yang akhirnya mendapatkan bantuan itu. Korban-korban yang tidak bersuara dan tidak aktif menanyakan hak mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak mendapatkan bantuan hingga kini.

Menanggapi kesaksian para korban dan opini yang mereka kemukakan dalam diskusi, Samsidar selaku Majelis Warga mengatakan bahwa pada umumnya pola kekerasan yang terjadi selama konflik itu sama, yaitu adanya penyiksaan terhadap perempuan dan praktik itu selalu menysar organ reproduksi perempuan dan bentuk penyiksaan itu sama di setiap tempat.

Pola ini masih terus terjadi karena pemerintah belum memberikan perhatian khusus dan mengambil kebijakan spesifik untuk menghentikan praktik kekerasan ini. Itulah sebabnya, menurut Lies Marcoes selaku Majelis Warga, penting bagi kita

untuk menuliskan cerita-cerita para korban sehingga kebenaran itu tidak terabaikan dan semua orang bisa tahu bahwa peristiwa itu adalah kebenaran sejarah Indonesia.

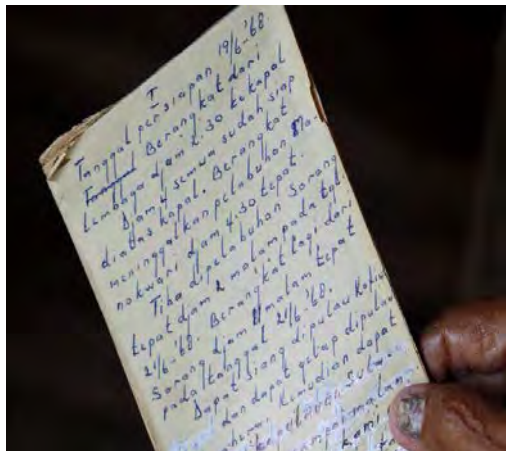
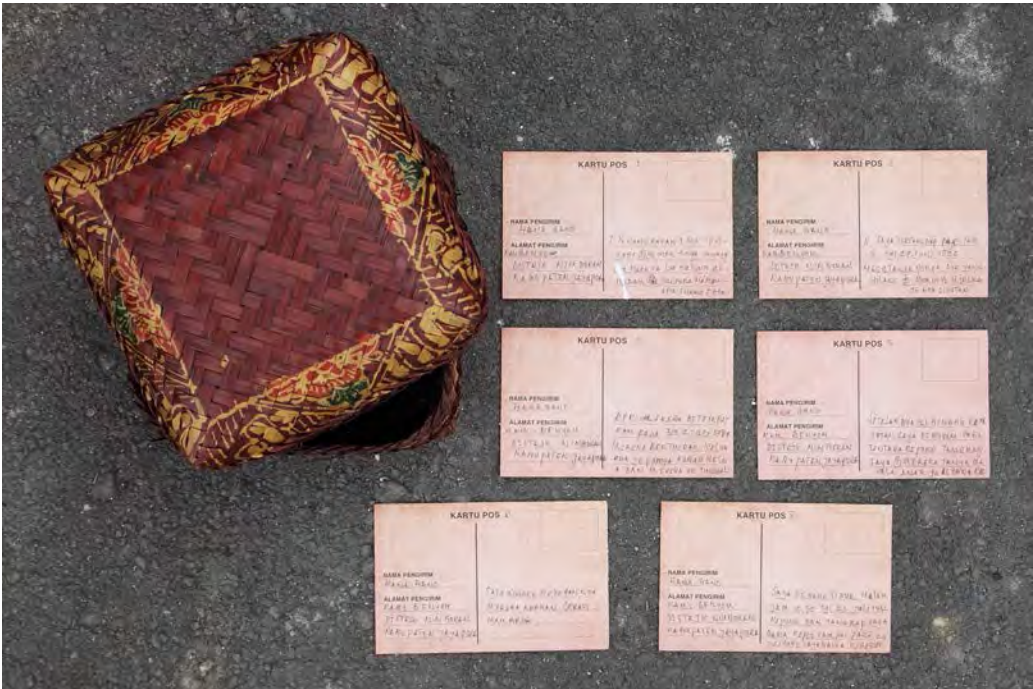
Pengalaman itu harus dibukukan, menjadi sejarah hidup yang tidak boleh dilupakan oleh anak-cucu kita dan menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya. Ketiadaan perhatian pemerintah saat ini tidak boleh membuat kita putus asa karena pasti akan selalu ada jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai keadilan dan kebenaran, dan untuk itulah, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran menggagas acara Dengar Kesaksian ini.

Melalui acara hari ini, diharapkan jalan menuju kebenaran dan keadilan itu semakin terbuka bagi para korban.



V DENGAR KESAKSIAN PAPUA

* Untuk kepentingan keamanan narasumber maka identitas seluruh narasumber yang memberi kesaksian dalam acara dengar kesaksian di Papua tidak ditampilkan dalam laporan ini



01 DI PAPUA, DI JAWA, SAMA-SAMA PENJARA

Pada usia 7 tahun saya masuk sekolah Yongenvolf Solf atau setingkat dengan SD selesai tahun 1950 dan tambah 3 tahun di Sorong. Saya tamat tahun 1954, setingkat SD 6 tahun. Bulan Agustus '54, saya melanjutkan sekolah di Dinas Kesehatan di Manokwari. Tapi tidak meneruskan dan melamar di dinas Agraria di Jayapura.

Saya berhenti di Pertanahan lalu melamar di Dinas Pertanian pada 1 Desember tahun '57 dan 6 bulan kemudian diangkat jadi pegawai negeri. Pada bulan Agustus akhir tahun 1964, kami dari Jayapura dipindahkan ke Manokwari.

Mulai terjadi peristiwa Arfai Awom pada 28 Juli 1965. kami dan masyarakat mengungsi ke hutan sampai penyerangan Awom pada 31 Juli '65.

Sampai di suatu tempat, rombongan besar semua pelarian ketemu, saya bertemu dengan isteri dan anak di situ. Semua suku dari 9 suku, duduk di bawah pohon, anak-anak menangis, Bapak Camat, ikut juga, lalu Hamba Tuhan, kami semua ada di situ. Suku Maymbrat, dari Aimaru, lari terus sampai di Kebar, di daerah

Snopi di gunung. Saya dan isteri yang sedang hamil, sampai di Kroaer, isteri melahirkan anak perempuan pada hari Sabtu 31 Juli 1965. Pada hari itu kami juga kumpul dengan Bapa Awom yang pimpin kami dengan ibadah.

Saya dan keluarga, isteri dengan 3 anak kembali ke Manokwari, sampai tahun 1967 terjadi peristiwa di Ambar. Pada '67, banyak sekali kami yang ditangkap diikat dengan kawat jemuran dan ditahan di Pos Brimob di Ambar. Di kantor polisi kembali ke seksi Reserse, kami diperiksa oleh Kapten orang Ambon namanya Max Sopacua.

Dia tanya-tanya ada senjata taruh di meja, lalu toki [pukul] di Alex punya kepala lalu pingsan dan jatuh di lantai. Kami dikembalikan ke sel, terlalu banyak orang tidak bisa tidur, akhirnya kami naik ke lembaga di Kampung Ambon dan pada saat itu kami disuruh kerja keras di Korem.

Penangkapan itu sudah sangat luar biasa, tidak sedikit. Pada tahun '68 mendekati Pepera pada tanggal 19 April, kami diberangkatkan ke Jawa. Pada saat itu keluarga dilarang mengunjungi dan itu pagar betis jarak 5 meter dijaga dari pintu lembaga sampai pelabuhan. Waktu itu ada 168 orang kita diasingkan ke Pulau Jawa dengan Kapal Berantas. Karena berkenaan dengan Peristiwa G 30S PKI, banyak Gerwani dan tahanan maka penjara penuh, maka kami ditahan di satu ruangan. Karena ruang juga penuh maka kami tahanan dari Papua dan tahanan biasa dipindahkan ke penjara di Jepara.

Pada Agustus '68, kami dibubarkan dari Jepara dan pindah ke Lembaga Pemasyarakata Sukamiskin Bandung. Lalu dari Bandung, ada 110 orang tinggal di Bandung dan 56 orang golongan berat diasingkan ke Bogor.

Sampai di Bogor kami masuk ke Lembaga Direktorat Pemerintahan. Selama di Jawa kami disuruh kerjapaksa di perkebunan. Pada Bulan Juli [1970] setelah Pepera selesai, kami kumpul lagi di Bandung lalu berangkat ke Tanjung Priok dan ikut Kapal Raden Saleh ke Papua sini. Di Manokwari keluarga sambut.

Mobil dari Korem angkat kami semua bawa ke Korem, cek nama satu persatu dan dikembalikan ke keluarga satu persatu. Sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung masing-masing dikembalikan ke instansi dan keluarga. Empat anak yang saya tinggalkan selama ini, bertemu semua. Anak yang pertama dan kedua laki-laki, yang ketiga yang lahir di hutan dan yang keempat berusia dua tahun.

Dia panggil saya om, saya sangat sedih tapi ibu dan kakak-kakaknya beri tahu bahwa saya bapaknya. Istri diperkosa, sedang dalam keadaan hamil dua bulan, tapi apapun keadaannya saya tetap terima itu. Setelah istri saya meninggal tanggal 26 bulan tiga 1989. saya hidup dengan anak dan cucu sampai cicit.

Hidup itu harus berbuat baik dan tidak boleh balas dendam. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan supaya umur panjang.

Sampai pada saat ini tidak ada orang yang perhatikan, sampai dari Awom di hutan lalu sampai kembali dari Jawa, lalu dipenjara tahun '71, sampai keluar.

Saya tidak mengalami Pepera di sini karena kami di Jawa. Pepera di sini juga tidak jujur. Banyak yang dibawa keluar, dan tersisa orang-orang tua sekitar 1025 orang dan ini tidak jujur sehingga menang.

02 BENDERA BINTANG KEJORA, NAIK-TURUN, NAIK-TURUN

Awalnya dari kampung saya mau jualan di Jayapura, waktu itu saya mendengar isu akan ada acara menaikkan bendera Bintang Kejora. Saya bersama dengan 6 orang teman-teman. Kami tinggal di rumah seorang Ibu, dan besoknya ikut kegiatan itu. Kami 3 orang ke hutan di Gunung Abepura, belakang Lembaga Pemasyarakatan, ikut rapat, dan mereka serahkan Bendera Papua dan dokumen-dokumen ke kami.

Waktu itu tanggal 2 Agustus 1980. Kami kembali lagi dan ketemu Kopasandha di jalan. Kami kembali dengan pakaian seperti orang kembali dari kebun. Jadi mereka tidak tahu kami ada simpan bendera dan dokumen dalam tas.

Pada malam hari kami mengatur rencana untuk mengibarkan bendera Papua. Pagi-pagi sekali kami sudah keluar rumah, dan kami sudah siap dengan alat-alat (untuk menaikkan Bendera); Meja lipat, dan alat-alat yang kita mau pakai itu dan tas yang isi Bendera.

Pagi itu ada mobil dari Laksus (Pelaksana Khusus). Mobil TNI yang lewat (dari arah Aryoko lokasi atau kompleks kantor

dan Asrama Tentara), dan kami *leften* [berhentikan] mobil. Sopir (tentara) mobil itu tanya, “*adik-adik dong mo ke mana?*” kami jawab, “Oh kami ada acara di kantor Gubernur”. Dan kami diantar sampai ke kantor Gubernur, lalu mobil itu pergi.

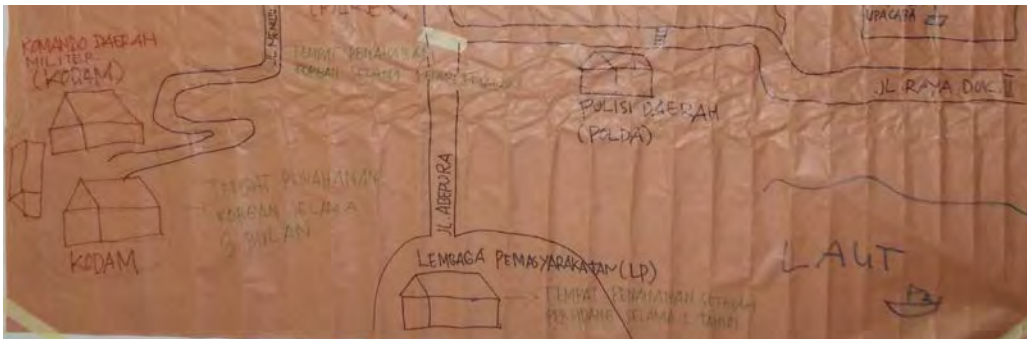
Kami buka meja di tempat itu, kami taruh bendera Merah Putih dan kasih naik Bendera Papua. Ada petugas kebersihan yang bekerja di kantor Gubernur, *Katong su kasih naik bendera dia kasih suara, “pencuri su masuk kota,”* tapi tak ada yang mendengar, cuman ada polisi orang Ambon yang lihat kami, dia bilang, “*kasih naik cepat.*”

Bendera Bintang Kejora kita naikan pada tiang utama kantor Gubenur, setelah dinaikkan kami tetap berdiri di bawah tiang bendera itu. Pada jam 7 pagi, polisi datang. Lalu dorong bawa kami ke Polda. Satu malam di situ, mereka bawa Ibu Prisila ke sana dan taruh dengan parang di dia punya leher.

Pagi tanggal 3 Desember 1980, mereka kirim kami ke Kodam, kami sudah mulai diinterogasi. Setiap kali mau interogasi kami dibawa ke Laksus di Aryoko atau ke Pos Polisi Militer di bagian Taperda (Tim Pemeriksa Daerah) Klofkamp Jayapura.

Tempat tahanan kami di Kodam itu begitu sempit, dan tidak ada lampu, tidak ada tikar. Tapi waktu keluarga kami tahu di mana tempat kami ditahan lalu mereka mengambilkan kami pakaian.

Kami juga menerima perkataan-perkataan yang melecehkan kami, “seperti kamu tidak bisa Merdeka!”



Kami ditahan di Kodam selama sembilan bulan, Selama di tahanan itu saya menderita sakit kuning (lever) karena selama dalam ruang tahanan saya tidak kena sinar matahari. Saya lalu dirawat di Rumah Sakit Aryoko. Pada malam hari di rumah sakit, saya mau diborgol karena aparat (TNI) takut saya lirikan diri. Saya dirawat selama dua.

Setelah 9 Bulan kami dipindahkan ke ruang tahanan di Markas POM (Polisi Militer) di Klofkamp. Waktu di tahanan Polisi Militer itu saya lihat banyak tahanan politik yang laki-laki yang dipindahkan dari Tahanan Kodim Dok V, kepala mereka semua dicukur, di antara mereka ada 2 orang om [paman] saya.

Dan di POM kami ditahan selama 1 tahun, setelah itu kami disidang dan dikirimkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Abepura). Sidang di Pengadilan Militer.

Ada orang Ambon dia bela kita 6 orang, dia tidak sepihak. Mereka tanya, kamu buat ini karena diajak atau mau sendiri? Mama merasa yakin dengan yang dilakukan karena yakin dengan tanah ini tempat kelahiran.

Putusan sidang kami ada 2 orang dari kami yang mendapat hukuman ringan

dan di bebaskan. Sedangkan saya dan lainnya mendapat hukuman 4 tahun penjara.

Setelah itu saya kembali ke Kampung. Saya juga mendapat sindiran dari orang di Kampung yang menganggap saya terlibat dalam politik. Waktu ditangkap saya umur 18 tahun, keluar dari penjara umur 22 tahun.

Anak saya 4 orang, anak pertama saya sudah kerja, perempuan di Salatiga dan 1 orang SMA dan 1 orang SMP.

Baru berhasil semua baru mama merasa puas apa yang mama perjuangkan. Adik-adik harus berhasil terus, apa yang Mama perjuangkan, bukan untuk Mama tapi untuk Papua dan bisa tahu apa yang terjadi. Saya sekolah sampai SD saja, karena kami merasa ini tanah kami dan bagaimana pun kami tahu ini tanah kami.

03 SIAPA YANG TANYA PAPUA, SAYA AKAN BICARA

Saya diambil oleh pihak kepolisian atas perintah Kodim 1708 untuk ditahan dan diperiksa atas terlibat organisasi terlarang yaitu OPM dan Aksi Pelajar Bumi Papua yang didalamnya terlibat semua pelajar di Kota Biak. Banyak birokrat yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pelindung atau jabatan penting lainnya. Setelah ditahan di polisi 2 minggu kami diinterogasi oleh KAS Intel di Kodim Kapten Umar Sai, dan dia saya punya ipar sendiri orang Kei. Dia tanya saya, "tahu tidak organisasi Aksi Pelajar Bumi Papua?" saya bilang, "tidak tahu," lalu dia tunjukkan susunan organisasi.

Dua minggu di kantor polisi, kami dipindahkan ke AL, karena ada Pemilu tahun 1982. Setelah Pemilu selesai kami diperiksa oleh Jaksa, Kodim, AL, Kepolisian, hasilnya mereka tidak dapat. Lalu kirim berita ke Jayapura, lalu dari Jayapura kirim tim pimpinan Deky Manobo. Pak Deky tanya, "Pak tujuan perjuangan ini?" Saya jawab perjuangan ini orang tua cerita kepada anak-anak dan terus menerus dan tidak hilang sampai Yesus datang, ini sudah mendarah daging untuk orang Papua. Lalu Pak

Deky ambil data selesai. Kemudian saya diberangkatkan ke Jayapura bersama 5 orang saja, dan yang lain boleh pulang. Saya tanya kenapa yang lain tidak ikut mereka bilang, "tidak ada dasar kuat sehingga mereka ikut."

Waktu saya sudah di Jayapura, teman tentara bilang yang pulang itu OPM Bayangan, itu memang rekayasa, mereka menyamar untuk cari orang dan otak gerakan, itu yang dilakukan tentara waktu itu.

Kami tinggal di Mess Cendrawasih di Dok 5, kami tinggal dengan tahanan lain dari tanah merah. Sementara kami di Dok 5, pemeriksaan di Paldam, diperiksa lalu mereka tanya teman-teman ada di kamar sebelah, saya bilang siapa-siapa? Kami ditahan beberapa malam di situ. Lalu ada tentara dari Biak Timur, dia bilang, "kamu berdoa banyak karena ada ancaman buat kamu yang dari Biak." Lalu yang diperiksa saya, Arnold Ap dan Edu Mofu.

Setelah periksa saya kembali ke Dok 5 bersama Bapak-bapak dari Biak tinggal 3 bulan sampai 1 desember kami turun ke teman lain di tahanan di POM. Kami tinggal 3 tahun di dalam, tidak ada proses hukum yang jelas. Tahun '82-83 sampai peristiwa pengungsi besar-besaran ke Papua Nugini, kami masih tinggal di dalam.

Setelah situasi di Jayapura mereda, tahun 1984 kami dikembalikan ke daerah masing-masing dan diproses sesuai pelanggaran. Dari Jayapura, saya tinggal 1 tahun di luar dan lapor ke kejaksaan.

Waktu kembali dari Jayapura ke Biak, orang tua bilang, “daripada kau nanti mati, menikah dulu,” lalu saya kawin dan isteri hamil.

Kemudian ada surat perintah dari PN Tinggi Jayapura pada 30 Mei '85, saya masuk penjara, sidang mulai Mei sampai November, keputusan pada November 1985. Ancaman yang dari hukuman mati, turun ke hukuman seumur hidup, turun sampai 15 tahun penjara. Pada saat pemeriksaan karena bertele-tele dalam pemeriksaan, mereka masukan kotoran ke dalam air lalu suruh minum, itu tempat sekarang Kantor Camat Bosnik, saya minum dari jam 11 sampai 4 sore baru habis, karena perut saya tidak kembung mereka bilang, “*kau pake fui-fui (jampi-jampi) ka?*” saya bilang, “tidak.”

Satu hal lagi yang tidak saya lupa, saya punya isteri ketika minta surat ijin untuk ketemu, petugas bilang, “angkat rok sedikit kah baru kita kasih surat ijin,” Mai Tua [sebutan untuk isteri] keluar air mata, kalau dia tidak buat begitu maka tidak bisa ketemu saya di penjara.

Karena ada desakan dari Palang Merah Internasional maka mereka mendapat remisi atas tahanan yang dijalaninya di penjara.

Jadi saya dapat remisi tahun 1993, Tahun 1994 terus langsung bebas.

Setelah bebas, ketua Panitia Pengadilan Negeri Biak, bilang, “Pak Frans membangun negara dia atas negara,” saya bilang, “Saya tidak tahu membangun, karena setahu saya Biak sudah merdeka dan



kemerdekaan hak segala bangsa” Dia bilang, “bikin korek api dan naik sepeda saja tidak bisa, mau merdeka,” saya bilang, “Indonesia merdeka bukan karena bakar korek api tapi karena ada bangsa, ada penderitaan dan itu dasar sebuah kemerdekaan.”

Kami menolak Otsus karena itu rekayasa dan tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat, Respek juga semua dipangkas karena tidak sampai masyarakat. Papua akan Merdeka dan itu tidak pungkiri, Saya bilang ke anak-anak, kalau kami tidak cerita ini, maka tidak ada yang pertahankan lagi, Kalau tidak merdeka, Papua akan musnah, Papua harus diselamatkan saya kira itu.

04 OTSUS UNTUK SIAPA? SAYA TIDAK KEBAGIAN

Saya terlibat dalam kegiatan OPM sejak tahun '69, sebelum menikah. Saya berjuang di hutan rimba, sampai saya pulang ke kampung pada tahun 1981, akhirnya ditangkap tentara Indonesia. Tentara tanya: apa yang Ibu alami di hutan? Saya kasih penjelasan di hutan kita tidak makan nasi hanya makan Papeda. Mereka tanya terus dari mana datang makanan yang lain? Saya bilang tidak ada hanya makan sagu. Di hutan sudah 3 tahun. Saya hamil 5 bulan.

Saya pulang karena sadar tidak sanggup mengalami kesulitan hidup di hutan. Saya sedang menyiram halaman, tentara TNI tangkap saya, waktu itu pagi. Tentara keprung rumah kami, Bapak dan Mama bingung. Saya bilang, "Bapa dan Mama mungkin sudah ada informasi dari orang kampung bahwa saya baru pulang, jadi Bapa dan Mama jangan kecewa, dan doa saja kepada Tuhan agar saya bisa selamat"

Saya ditangkap, didata, dikasih setrum di telapak tangan kiri kanan, saya dalam keadaan hamil dan suami masih bertahan di hutan. Saya ditanya, "bagaimana sampai ibu hamil?" itu pertanyaan dari

militer tapi saya tidak jawab satupun, "bagaimana ibu bisa hamil, bagaimana bisa buat dengan suami," saya diam saja. Sebelum saya jelaskan saya dikasih setrum, setiap kali lapor diri, kasih setrum dulu baru tanya yang lain.

Mereka tanya terus, dari mana datang senjata, dari mana datang peluru? Saya bilang, saya tidak tahu dari mana datang senjata, dari mana datang peluru, saya hanya dampingi suami.

Karena saya disiksa terus oleh tentara, lalu saya minta agar pulangkan mereka, dengan catatan kita tetap berbeda, tetap saya perjuangkan untuk kita punya hak sendiri.

Yang Maha Kuasa sudah ciptakan berbeda dan sudah tuliskan itu. Kita bangsa Papua punya hak sendiri dan tidak punya kait mengkait dengan bangsa lain. Itu saya sampaikan ke Komadan atau anak buahnya. Di situ ada Pak Latief, Pak Hendrik saya sampaikan hal itu pada mereka. Mereka tanya, "bagaimana ibu usahakan mereka balik".

Saya usahakan pulangkan mereka akhirnya berhasil. Ada pertanyaan dalam hati saya. Tapi sampai kapan, orang Papua punya hak perjuangan harus ada detik terakhir harus ada finish. Kemudian terakhir mereka panggil saya sebelum mereka selesaikan operasi selama 3 tahun, 81-84.

Saya buat pernyataan untuk bisa pulangkan saudara-saudara kembali ke kampung supaya orang kampung tidak disiksa, dipukul, direndam disetrum, dikasih

setrum di mulut dirtaruh senjata dimulut, orang tua saya juga mengalami itu. Saya berdoa pada Tuhan agar tidak terjadi sesuatu pada saya karena waktu itu saya sedang hamil.

Sampai pada tahun '85 saya buat pernyataan sikap pada militer. Saya bilang, "Bapak, dengan cara kasar kita tidak bisa mendekati mereka yang di hutan, kalau Bapak buat begini nanti mereka tambah liar lagi."

Setelah sepakat, helikopter langsung datang, angkat barang dan langsung pulang, karena sudah selesai. Truk-truk juga datang angkut barang militer

Harapan saya sesudah disiksa dari tahun ke tahun, bagaimana ke depan ada perhatian untuk kami. Kami tidak punya bagian dari OTSUS (Otonomi Khusus Papua), Kita tidak diperhatikan oleh pemerintah kampung atau distrik atau provinsi, jadi kami mohon supaya kehadiran Bapak dan Ibu di sini supaya di masa depan ada perhatian untuk kami.. Kami sudah disiksa oleh TNI.



05 DI PAPUA JANGAN ADA LAGI PENYIKSAAN

Pada 7 desember 2000, sekelompok orang melakukan penyerangan ke Polsek Abepura, Papua. Penyerangan ini memicu aksi balasan yang dilakukan aparat Brimob dan polisi, yang melakukan aksi penangkapan dan penyiksaan terhadap puluhan mahasiswa dan pelajar asal Pegunungan Tengah, penyiksaan di tempat tahanan menyebabkan 2 orang mahasiswa meninggal dunia.

Salah seorang perempuan yang ikut ditangkap dan mengalami penyiksaan oleh aparat Polisi menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya melalui film dengan Judul: Kami dibuat seperti Layang-layang

Saya akan menceritakan sedikit tentang kejadian tujuh Desember tahun 2000, di Jayapura, tempatnya di jalan Biak, Asrama Ninmin. Waktu itu pas jam dua pagi. Kami sedang tidur. Ada tembakan tiga kali. Kami kaget bangun. Yang naik itu ternyata polisi dan brimob. Laki-laki perempuan dikumpulkan di dekat asrama, kami dikasih pisahkan antara laki-laki perempuan naik ke truknya brimob, dibawa ke brimob di Kotaraja.

Dari situ kami lemparkan lagi ke Jayapura di Psolres Jayapura. Di dalam truk itu kami ditendang pake sepatu, dipukul sampai di tempat. Habis itu, waktu di Polres itu kami disuruh baris, kami baris, kami ditampar, ditendang pake sepatu lars di kaki kami, terus kami disuruh angkat kaki satu ke atas, tangannya ke kepala kami dibakar pake puntung rokok, masih ada bekasnya.

Terus setelah itu kami dipukul lagi dari polisi pake karet mati. Itu tiga-tiga kali kami dipukul. Terus setelah itu kemudian ada dua Polwan yang datang, itu pun mereka tampar kami dua-dua kali. setelah itu kami diambil keterangan. Habis itu jam empat kami dikasih makan, empat sore kami dikasih makan. Itu nasinya hanya sedikit dengan sambal yang begitu banyak. tapi kami tidak dikasih minum. Sampai itu selesai. Dan di kami yang putri itu ada jumlahnya sembilan.

Di antara kami itu ada adik saya yang baru berumur kira-kira tujuh tahun. Itu juga ditangkap. Dan dibuat kayak macam layang-layang. Ditendang kesini kayak layang-layang. Setelah itu kami dibebaskan jam lima. Pulang.

Sampai di tempat dua hari kemudian kami dengar bahwa teman-teman kami yang laki-laki ada dua yang meninggal, yaitu Joni Karunggu dan Ore Doronggi. Harapan saya, supaya biar kasus ini bisa terungkap di manapun bisa ada apa itu ...ada keadilan, yang bisa nyatakan gitu.

Terus memang waktu itu kami lagi putus sekolah sempat, tapi dengan apa kemauan itu saya bisa balik, dan bisa dapat yang baik.

Jadi untuk ke depannya apa... supaya biar Papua itu jangan ada lagi penyiksaan atau apa itu begitu... tapi harus baik damai, itu harapan saya.

Kalau saya dengar macam tembakan atau bunyi yang kuat memang masih rasa takut-takutnya ada. Macam jalan juga, kalau di jalan, macam taksi yang lewat macam balap itu saya menjerti. Takut gitu kaget, takut masih ada.

“Terima kasih, sumber kekuatan saya yaitu pertama Tuhan Yesus yang selalu ada dari dulu sampai sekarang.. .itu satu.

Satunya itu mama bapak yang selalu mendukung saya dalam berjuang sampai terus yang kedua Elsham dan macam kaka Sandra, kaka Dias, trus kaka Penlok ini juga memang korban tapi ada berikan masukan dan lain-lain. Jadi sampai bisa sampai sekarang ini.”

06

**PENGGALAN
KEPALA SUAMI
SAYA DIPAMERKAN
TENTARA**

M*ama ini sempat menghabiskan masa kecil mengungsi ke hutan pada tahun 1967, ketika ada gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Malkias Awom. Ia kemudian menikah dengan seorang anggota tentara Indonesia yang lari ke hutan dan bergabung dengan Gerakan Papua Merdeka. Pada tahun 1987, Mama ini ikut mengungsi kembali di hutan, dan pada tahun itu suaminya meninggal dunia setelah ditembak tentara.*

Kepalanya dipenggal dan dipamerkan dalam acara ulang tahun ABRI di Biak. Hingga sekarang, Mama ini masih mengalami diskriminasi, tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah karena posisi suaminya yang menjadi anggota OPM. Mama ini menceritakan pengalaman kekerasan dan diskriminasi yang dialaminya melalui film dengan judul: Biar Saya Hidup Sendiri, Tuhan Ada

Waktu saya kecil di kampung, berumur 6 tahun saya sekolah di SD sampai keluar sekolah tahun '67. Tahun '67 Bapak Malikias Awom, tiba di Biak Barat. Karena takut, kami semua termasuk orang tua ikut masuk hutan.

Tentara banyak masuk ke kampung, Tinggal di hutan sampai Bapak Rumayong dan Marisan dari Pemerintah mengajak kami ke luar dari hutan. Saya pulang ke Jayapura tahun 1970. Saya tidak biasa melanjutkan sekolah. Tahun '72 baru suami saya meminang dan tahun '79, baru menikah tinggal di di asrama Yonif 751 karena suami saya tentara.

Tanggal 8 April tahun '84, suami lari ke hutan. Tahun '85 tentara membawa saya ke Kodim, menanyakan suami saya. Anak pertama, meninggal di Jayapura. Waktu dia meninggal itu, darah keluar dari mulut dan hidung. Anak yang ke dua saya bawa ke Biak dan meninggal di sana.

Tahun '87 itu di Biak, bulan April. Beberapa minggu kemudian tentara datang dan mengejar suami saya. Suami lari ke hutan lagi. Baru saya menyusul dari belakang. Kita tinggal sama sama dengan suami di hutan.

Waktu suami ke kebun dia ditembak tentara. Tempatnya di Biak Barat, Saywaymar. Di belakang Kampung Sainober, kuburannya di situ. Kepalanya dipenggal. Waktu ada pameran 5 Oktober tahun '89 hari ABRI. Saya ke kota dan mau masuk ke pameran. Saya jalan liat kamar-kamar sampai kamar-kamar yang terakhir. Saya masuk di situ.

Masuk ke dalam dong pamer dia pu foto(mereka pameran foto kepala suaminya). Air mata saya jatuh. Tuhan kenapa begini,



Tapi dong bunuh dia itu, kepala tidak ada. Karena dia pu kepala itu dong pamer, pake kain putih tutup kepala.

Kalau tentara mau bunuh saya, bunuh sudah supaya kita berdua mati sama-sama, daripada saya lihat dia punya kepala. Saya pulang dan tinggal di kampung. Tinggal di kampung, saya dengan anak yang terakhir ini, tinggal sendiri. Saya jualan sampai jam 2 pagi.

“Karena bantuan-bantuan yang mereka drop ke kampung-kampung, tidak dibagikan kepada saya. Karena suami saya dianggap pengacau. Baru saya bilang, biar sudah. Saya hidup sendiri, Tuhan ada.”



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Dengar Kesaksian Papua

Mama-mama dan Bapa-bapa serta saudara-saudara yang kami hormati, Kami memulai dengan pernyataan bijak yang disampaikan oleh salah satu pemberi kesaksian tadi bahwa,

“Dalam kehidupan ini, kita harus berbuat baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan supaya umur panjang.”

Dari dengar kesaksian sepanjang hari ini, Majelis Warga mencatat bahwa Pola-pola Operasi dan Kekerasan Militer sama. Hal ini ditunjukkan:

1. Sejak tahun 1960-an: Semua orang Papua adalah OPM dan melalui screening ideologi, sampai tidak terbukti bahwa individu atau kelompok tertentu tidak terlibat dalam ideologi OPM. Hal ini pun, sama seperti pola-pola operasi yang dilakukan pada periode 1965, dimana operasi

militer di Pulau Jawa dan sekitarnya selalu menstigmakan bahwa orang/kelompok tertentu adalah PKI sampai tidak terbukti bahwa mereka PKI;

2. Tindakan-tindakan yang dialami oleh korban politik adalah : kejahatan seksual, teror, intimidasi, penyiksaan, caci-maki dengan menggunakan kata-kata kotor dan rasis; penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; proses hukum yang tidak jelas, penghilangan paksa; pemindahan dan kerja paksa ke perkebunan dan perusahaan di Pulau Jawa
3. Kepapuaan orang Papua, masih dilihat sebagai sebuah ideologi yang berseberangan dan bertentangan dengan ideologi NKRI. Seharusnya dilihat sebagai salah satu potensi ideologi untuk memperkuat dan menyokong bangsa Indonesia yang lebih bermartabat dan berkeadilan sosial.
4. Ada perbedaan pemahaman akar masalah Papua antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua. Pemerintah beranggapan bahwa masalah Papua adalah kesejahteraan sementara rakyat Papua berpendapat : sejarah dan status politik.

Oleh Pemerintah kehadiran Otsus merupakan titik penyeimbangan atas masalah Papua, pada kenyataannya gagal untuk menjawab masalah Papua, sehingga OTSUS saat ini, telah menjadi OTSUS yang melahirkan uang darah dan uang siksaan, karena secara substansial tidak menyentuh dan tidak menyelesaikan masalah mendasar di Tanah Papua.

Proses Pembelajaran

Pola-pola kekerasan yang selama ini dilakukan oleh militer sama dari Sabang sampai Merauke. Apa yang dilakukan oleh militer tersebut, telah memberikan luka bathin, kesakitan permanen dan trauma berkepanjangan dari generasi ke generasi. Hal ini dianggap benar oleh Militer sebab sampai saat ini tidak ada perubahan.

Membangun bangsa Indonesia harus menggunakan pendekatan kemanusiaan dengan menghargai harkat dan martabat bukan dengan kekerasan, kebencian dan manipulasi.

Kesaksian-kesaksian ini memberikan gambaran bahwa perjuangan untuk mempertahankan tanah tumpah darah sebagai bagian dari harkat dan martabat kemanusiaan manusia Papua, tetap berlanjut dari generasi ke generasi.

Ada konsistensi, dan kegigihan dari para korban dalam menjalani kehidupan, sekalipun mengalami diskriminasi dalam komunitas dan pelayanan publik dalam masyarakat Perjuangan ideologi adalah perjuangan kebenaran.

Jayapura, 9 Desember 2013

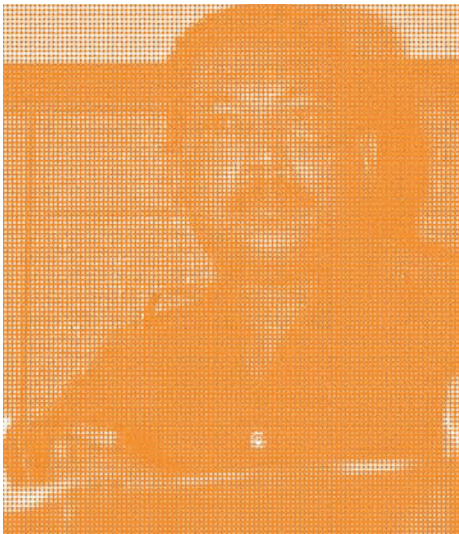
Majelis Warga untuk Dengar Kesaksian Papua :

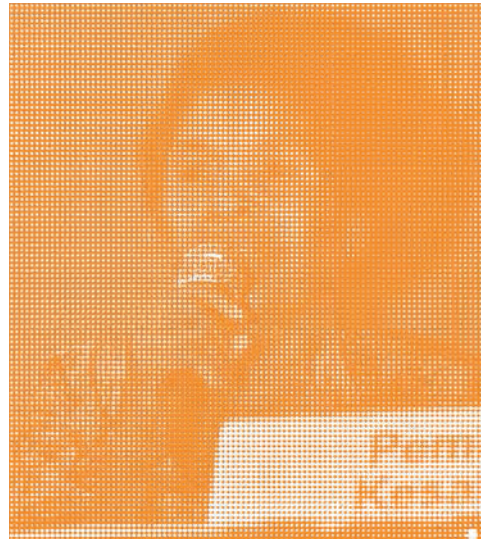
1. Fien Jarangga
2. Imam Aziz
3. Elga Sarapung
4. Septer Manufandu





VI DENGAR
KESAKSIAN
JAKARTA

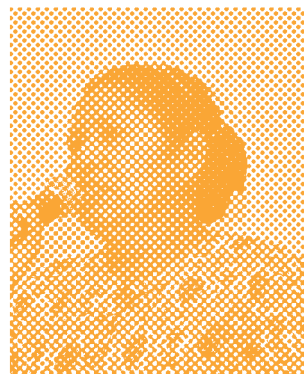
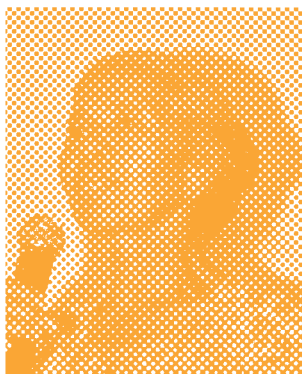
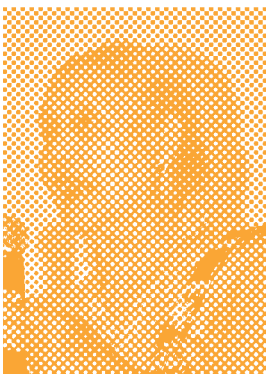






A

• KEKERASAN
TERHADAP
PEREMPUAN





[Kesaksian Migelina Anthoneta Markus]

01

SAYA BILANG,
"MEMANG ADA BATU
DI KEPALA SAYA?"

Migelina Anthoneta Markus atau biasa disapa Oma Net lahir di Pisan, kabupaten Timor Tengah Selatan pada 27 Maret 1935. Ia merupakan keluarga korban sekaligus saksi mata dari aksi kekerasan tragedi gerakan anti-komunisme di Indonesia pada tahun 1965-1966. Ayah, ibu, kakak sulung, adik perempuan, dan saudara sepupu ibunya menjadi korban dari peristiwa itu. Mereka menjadi korban atas tuduhan terlibat dalam PKI dan Gerwani sekalipun pada faktanya mereka tidak terlibat. Akibat peristiwa itu, mereka mendapatkan tuduhan-tuduhan dari masyarakat dan adiknya hingga kini masih merasa trauma karena peristiwa itu.

Terima kasih, selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam mendengar kesaksian ini. Tragedi '65 memakan banyak korban jiwa di dalam keluarga, Papa, Kakak, Om sepupu 2 orang, keponakan 2 orang, dimana mereka? Saya tanya Pemerintah di mana peradilanannya, sejak kapan mereka diadili dan keputusannya mana?

Terjadinya tragedi '65 membuat Ayah kami Micahel Markus hingga sekarang hilang jejak, beliau adalah pejuang membangun bangsa dan negara di NTT, Pemerintah mengadili dan dimana pengadilan yang menetapkan beliau bersalah? Kalau dia mati di mana kuburannya, kalau dia hidup dimana dia ditahan? Kesakitan yang dalam tak dapat diobati. Pemerintah bertindak demi kepentingan sendiri dan masyarakat menjadi korban.

Ayah saya anggota DPRD dan berjuang untuk menaikkan bendera Merah Putih, dia dituduh Belanda sebagai mata-mata Jepang dan ketika [jaman] Jepang menahannya dengan tuduhan mata-mata Belanda.

Sejauh mana melihat situasi dan kondisi yang diperjuangkan ayah saya demi kemerdekaan. Saat itu tahun 1965, Ayah saya sedang berobat di Surabaya, beliau pulang dalam perjalanan tiba di Kupang, tanggal 3 Oktober, beliau ditangkap dan dituduh anggota PKI dan Barisan Tani Indonesia. Pada 16 April tahun 1966, Ayah saya dinyatakan tidak ada lagi di penjara dan dibawa sampai hari ini tidak tahu ada di mana. Kalau itu terjadi mana keadilan, bukti

mana dia diadili dan kebenarannya mana? Kami minta tanggung jawab negara dan pemerintah yang telah bertindak diluar kemanusiaan. Papa saya bukan seekor binatang tapi seorang pejuang, dimana tanggung jawab anda sebagai pemerintah dimana keadilan.

Saya menyaksikan betapa kejamnya pemerintahan saat itu hanya bertindak demi kepentingan pribadi. Papa saya tidak makan uang sepeser pun dan ketika berhenti dari DPRD, dia diangkat sebagai kepala Keuangan Kabupaten TTS [Timor Tengah Selatan] dan kemudian dia pensiun, ketika ditangkap sampai sekarang tidak ada pensiun padahal itu hak Ayah saya yang dipotong dari jerih pekerjaannya

Saat terjadi tragedi 65 saya berusia 30 tahun, dan saat terjadi tragedi begitu sakit hati tapi saya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan beri saya umur panjang sehingga satu ketika menyaksikan kebenaran ini. Kekuatan datang karena doa dengan pergumulan.

Banyak yang mencibir juga, ada tetangga dan sahabat tidak mendekatkan diri kepada kami. Saya punya adik dan mama juga ditahan dan saya berjuang agar mereka dibebaskan, saya datang ke Kodim.

Hanya doa membuat kami menjadi kuat dan mendekatkan diri pada Tuhan agar kami tegar. Adik saya sedang mengajar di Undana [Universitas Nusa Cendana, Kupang] ditangkap tahun '75 dan ditahan di bali selama 3 tahun, dituduh Gerwani. Tahun '65 bulan Desember, ibu kami



diangkat dari rumah di Soe padahal saya ada di rumah mau ke Kupang.

Saya tanya semua orang tidak tahu, saya naik mobil. Sampai di Kupang ternyata beliau satu mobil dengan saya dan mereka tutup wajahnya sedemikian rupa sampai Saya tidak tahu kalau dia ada satu mobil dengan kami. Kemudian sampai di Kupang, Saya cari tahu ternyata dia ditahan di Lapangan Merdeka di Kota Kupang.

Bulan Januari ditahan di Kodim, Bulan Maret ditahan di penjara. Saya datang ke Kodim dan saya bilang saya siap mati demi Mama saya, kami ada karena Mvama. Papa saya sudah tiada, siapa yang harus kami andalkan.



Kami menghadap Kodim dan diikuti tentara, "saya bilang tolong geser apa salah saya, saya minta kita naik pengadilan." Kepala Kodim tanya, "Ibu mau apa?"

Saya bilang minta Mama dilepaskan, kalau ditahan saya minta Peradilan,

Mama salah apa kalau dia terlibat Gerwani, apa salah Gerwani semua harus dengan pembuktian."

Kepala Kodim bilang, "Ibu tanda tangan jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kalau Mama keluar," Saya bilang, "saya siap menjamin kalau Mama buat kejahatan bila perlu saya ditembak saat ini."

Setelah itu beliau dibebaskan dengan wajib lapor.

Saya bilang, “tidak ada wajib lapor karena dia salah apa? pengadilan mana kalau tidak ada maka kami tidak wajib lapor.”

Saya tanya ulang, “apa buktinya? sejak kapan dia diadili dan pengadilan memutuskan kesalahannya apa?”

Dia masih mengatakan, “Ibu ini kepala batu saya bilang memang ada batu di kepala saya.” Mama saya dilepas tanpa peradilan dan tanpa lapor.

Adik saya yang ditahan 3 tahun trauma sampai hari ini. Saya coba gali, dia bilang dari Bali ke Jakarta selalu diperiksa ditelanjangi barangkali ada cap PKI, cap Gerwani atau tidak. Sehingga pergumulan saya hampir 50 tahun, Tuhan mendengar hari ini saya menyaksikan kebenaran tragedi '65 hanya rekayasa seorang untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadinya.

Hari ini saya menyaksikan pemerintah tidak adil dan tidak dapat dipercayai lagi. Bapa ibu besaudara semua khususnya pemuda masa kini saya himbau ketika anda menjadi pemimpin buat kebenaran dan nyatakan itu dalam masyarakat Indonesia demi bangsa. Mari belajar bertindak benar jangan jadi manusia yang tidak berakhlak tapi menjadi manusia membangun kebenaran biar ada kebenaran dan sukacita yang dikehendaki manusia yang punya nilai dan harga di depan tuhan.

Kami berdiri di sini karena kuasa Tuhan namun betapa sakitnya. Bapa-mama sekalian lewat kesaksian kami, mari belajar dari tragedi 65.

“Kami himbau kepada pemerintah supaya film - film tentang '65 dihapus karena tidak benar sehingga generasi sekarang tidak bangun negara bobrok yang tidak adil dan tidak benar. Pemerintah lihat ke depan mampukah minta maaf pada masyarakat, mengobati luka hati yang sekian lama tersayat yang tidak bisa diobati.”

Terima kasih.

Tuhan memberkati



02 KEJAMNYA PEMERINTAH ORBA KEPADA KAMI

[Kesaksian Christina Sumarmiati]

Christina Sumarmiati biasa dipanggil Ibu Mamiek, usia 68 tahun. Di tahun 1965 ia adalah mahasiswa IKIP Jogja, anggota Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI), yang merangkap menjadi guru di sebuah SD. Ia pernah menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) ketika masih di sekolah menengah. Ia ditangkap berulang kali, ditahan di beberapa tempat pernahanan, mengalami siksaan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer di markas CPM Yogyakarta.

Pada waktu tahun '65, Saya lulus SPG dan masuk IKIP Yogyakarta. Saya anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Di dalam kemahasiswaan, Saya bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa

Katolik Republik Indonesia. Pada bulan Desember, saya dicituk dan dimasukkan dalam penjara. Saya curhat pada seorang Romo, kalau saya anggota PMKRI, "Romo, Saya mohon dibebaskan saya tidak terlibat PKI, Saya tidak tahu apa itu PKI."

Pada April tahun '66, saya bebas, lalu melanjutkan kuliah. Ayah dipenjarakan karena anggota BTI, Saya lalu melamar sebagai Guru SD, awalnya ditempatkan di Gunung Kidul, tetapi setelah menemui kepala penempatan kerja dan meminta agar bisa ditempatkan di SD yang dekat dengan kampus. Dua tahun mengajar dan menjadi mahasiswa itu pekerjaan tidak ringan, kalau malam mempersiapkan pelajaran mengajar dan kuliah.

Pada tahun '68 jam 2 pagi, saya ditangkap lagi. Mereka geledah rumah. Di rumah itu saya simpan surat pembebasan pertama, lalu mereka marah karena menyembunyikan kalau saya anggota IPPI.

Dalam pemeriksaan saya ditentangi Di atas meja itu, bulu kemaluan dan rambut kepala saya dibakar. Saya pingsan dan setelah sadar, saya digelandang ke [penjara] CPM Yogya pada jam empat pagi. Saya dimasukkan di dalam sel dan diborgol bersama satu borgol dengan seorang laki-laki. Hari kedua, diperiksa berdua, mereka bilang mau mengaku atau tidak kalau kalian ini gerpol dan dipaksa mengaku sebagai PKI. Mereka menentangi saya dan laki-laki itu juga ditentangi. Saya disuruh berpangkuhan dalam keadaan telanjang atau mengaku. Saya kemudian diangkat dan dipangkukan

dengan laki-laki tersebut dalam posisi berhubungan seks. Mereka tertawa dengan puasnyanya.

Saya lalu dipindah ke Wirogunan di tahanan perempuan bersama ibu yang lain. Kami di Wirogunan untuk memperoleh kesembuhan dan selang beberapa hari setelah keadaan lebih baik saya dipanggil kembali. Selama di Wirogunan saya sering diboncok oleh CPM untuk diperiksa. Satu saat dipanggil kembali, dipaksa mengaku melakukan Gerilya Politik (Gerpo). Dalam pemeriksaan itu saya menghadapi hal diluar batas kemanusiaan, Saya ditentangi lalu kepala saya ditekan dan disuruh mencium kelamin mereka satu persatu, delapan orang di dalam ruangan itu. Saya kehilangan semangat dan tak mampu berjalan, tapi mereka memaksakan lalu kemudian saya ditentangi di tengah ruangan, rambut digunduli dan saya tidak mampu berbuat lain hanya memohon kekuatan pada Tuhan.

Tahun '71 saya dipindahkan ke kamp Plantungan bersama 500 ibu dari Tanah Jawa. Di Plantungan tidak ada lagi penyiksaan fisik tapi teror psikis. Kami dianggap manusia tidak bermoral, pemberontak. Kami tidak cocok dengan pembimbing mental di Plantungan, pembimbing menghormati tapol dan melahirkan 2 anak. Bagaimana kami bisa percaya pada pembimbing itu? Karena banyak hal yang tidak bisa kami terima akhirnya tahun '76 kami dibuang ke Penjara Bulu, Semarang karena dikatakan kami tidak bisa dibina oleh pembina. Tahun '78 dibebaskan.

Stigma yang dilekatkan pada tubuh perempuan tapol sangat menyiksa hati kami. Bagi kami stigma yang diderita perempuan tapol '65 identik kematian, namun kami sebagai umat beriman mohon kekuatan pada Tuhan karena tidak mungkin mohon pada pemerintah. Kami mencari jalan dengan kuasa Tuhan.

Kebenaran yang kami inginkan kami simpan dalam dada dan sampaikan kepada masyarakat supaya bangsa ini mengerti bagaimana kejamnya pemerintah ORBA pada kami.



Semoga apa yang menjadi curahan hati kami bermanfaat agar, jangan sampai peristiwa '65 terulang kembali di negeri ini dan nasib kami diperhatikan, Kembalikan hak kami sebagai manusia.





[Kesaksian Maria de Fatima]

03

SAYA TIDAK TAHU
AYAH BAYI YANG
SAYA KANDUNG

Maria de Fatima adalah seorang survivor yang menjadi budak seks tentara Indonesia ketika menjajah Timor Leste. Peristiwa yang dialami oleh Maria de Fatima berlangsung di Hotel Flamboyan Baucau Timor Timur. Maria de Fatima, menceritakan pengalamannya dalam sebuah film dokumenter.

Para tentara membawa saya melalui jalan ini, mereka menarik saya masuk melalui tempat ini. Ini adalah penjara para para perempuan & laki-laki yang ditahan bersama-sama. Tentara membawa saya keluar melalui pintu ini untuk diinterogasi, kemudian mereka meyerahkan saya kepada mereka yang di bawah. (Hotel Flamboyan yang dijadikan penjara ini punya dua lantai) Di tempat

ini kami berdua duduk di lantai sambil menatap satu sama lain, satu persatu tentara masuk sambil melihat kami, Mereka membawa kami ke tempat ini untuk diinterogasi sambil menginjak kaki kami, sambil bertanya, "Kamu GPK?" Saya menjawab, "Tidak." Mereka bertanya lagi, "Kakak kamu ada di hutan?" saya menjawab, " Ya, kakak saya memang ada di hutan. Dia melarikan diri ke hutan waktu dia masih berada di Dili."

Bila para Komandan ingin berhubungan seks dengan kami, mereka menarik kami ke kamar lain. Mereka membawa pepsodent dan sabun dan menyuruh saya mandi.

Setelah para komandan tidur dengan saya, kemudian mereka menyerahkan saya kepada prajurit di kamar lain. Terkadang kami tidak tidur hanya dengan seorang perwira, tapi dengan banyak orang. Lampu dimatikan semua.

Tidak tahu semua yang masuk. Saya dengar teman tahanan berteriak karena kesakitan akibat diinterogasi, saya dan teman saya hanya diam tidak bisa buat apa-apa. Bila terdengar oleh tentara kami bicara, tentara akan membawa kabel listrik untuk strom kepada tubuh kami, maka kami pasrah dan diam.

Pada saat diinterogasi kami harus mengatakan yang sebenarnya, bila berbicara / mengakatan salah maka kaki kami diinjak. Kadang ada tentara yang baik ketika melakukan interogasi dan kadang ada tentara yang brutal, terlebih bila ada teman mereka yang meninggal pada saat perang di hutan.

Di sini kami disiksa dan dipukuli oleh para prajurit. Mereka melempar kami ke lantai. Kami merayap untuk disuruh mandi, baju kami dilepas.

Setelah satu keluar kemudian akan datang yang lain... Kami hanya di lantai semen, hanya menangis. Hanya bisa pasrah. Mereka menelanjangi (lagi) kami. Jika kami menolak, mereka akan terus memaksa. Kami menangis dan berpelukan

Ketika saya merasakan mengandung, saya tak bisa berbuat banyak. Saya tak bisa menuntut, karena mereka banyak. Mereka berganti-ganti. Saya tak tahu persis siapa ayah dari anak yang saya kandung itu. Dengan kondisi itu saya pasrah saja.

Saya tak pernah punya pikiran untuk dendam pada anak yang saya kandung. Tidak juga mau menggugurkannya. Saya tetap mencintai, meskipun dia ada di rahim saya tanpa hubungan resmi.

Saya tidak pernah berpikir jahat terhadap anak-anak saya. Biarkan mereka hidup. Menjahit, merajut, dari sana saya menghidupi mereka (waktu itu).

Saya pun tidak menaruh dendam pada orang lain. Saya tetap memberi mereka makan, mendidik mereka sampai sekarang.



CAVR mencatat setidaknya 30 orang perempuan yang ditahan di Hotel Flamboyan, hampir sepertiganya mengalami perkosaan, antara tahun 1975-1986.

Para korban menyebutkan pelaku-pelaku perkosaan dari berbagai kesatuan ABRI, termasuk: Yonif 330, Yonif 745, Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), komandan ABRI pertama di Hotel Flamboyan adalah seorang komandan Kopassandha bernama Mayor Leo, Nanggala (nama sandi untuk satu kesatuan Kopassandha yang ditugaskan di Timor-Timur pada 1975-1983), Umi (salah satu dari empat kesatuan Nanggala yang ditugaskan di Timor-Timur yang dinamakan sesuai dengan sandi panggilan radionya), Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 13, Polisi Militer (Pom), Brigade Mobil (Brimob) Polri, Brigade Infanteri (terdiri dari tiga batalyon), Hansip.

“Pada tahun 1975 - 1976. banyak tahanan di Hotel Flamboyan yang dihilangkan.

Hotel Flamboyan juga digunakan sebagai pusat komando untuk operasi pagar betis pada tahun 1981.”

Sampai dengan tahun 1999 Hotel Flamboyan digunakan sebagai barak, dan untuk acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh tentara Indonesia.



04 SAYA MEMULAI HIDUP DARI NOL LAGI

[Kesaksian Aionon Mardiah]

ibu Aionon Mardiah lahir di Kuala Simpang, Aceh, pada tahun 1978. Ayahnya seorang mantan anggota TNI. Pada tahun 1993, keluarga Aionon Mardiah pindah ke pemukiman baru (transmigrasi lokal) di daerah Alue Rambe, Aceh Utara.

Karena letak rumahnya yang jauh dari sekolah, Aionon tidak melanjutkan pendidikannya. Pada usia 15 tahun, Aionon menikah dengan lelaki yang juga tetangga di Alue Rambe.

Pada tahun 2002 adiknya ditembak tentara. Aionon juga mengalami penyiksaan dari Kopassus karena dianggap tidak memberitahu keberadaan suaminya yang dituduh sebagai anggota GAM. Mulai tahun 2003, Kopassus kerap datang ke rumahnya dan menyiksa ayahnya yang dianggap bertanggung jawab mengetahui keberadaan warga desa yang menjadi anggota GAM, karena posisinya sebagai kepala kampung.

Pada April 2004 datang kesatuan 112 Komandan Edji Braha ke rumah, saya dibawa ke Pos Simpang Lima 112. Jam 3 sore, mulai diinterogasi, menanya suami saya dan teman suami. Saya jawab, "tidak tahu," Saya ditampar berpuluh-puluh kali, sehingga pipi saya bengkak. Mereka memukul kepala saya dengan topi baja dan salah satu menendang saya. Penyiksaan berlangsung sampai jam 8 malam.

Jam 8 malam mata ditutup dan tangan diikat dengan kabel dan dibawa entah ke mana. Mereka tanya keberadaan suami di mana dan teman suami di mana, mereka ancam bunuh saya.

Mereka gali lobang dan bilang itu lobang kuburan saya. Mereka lalu menancapkan senjata laras panjang di telinga kiri dan kanan dan suruh saya mengucap. Kemudian terdengar suara letusan. Saya tidak tahu suara letusan apa, saya pingsan.

Jam empat pagi, saya sadar dan mereka tanya makan saur atau tidak. Saya bilang bagaimana saya makan kalau mata ditutup, lalu mereka buka penutup mata. Mereka kemudian ajak saya mencari markas GAM. Saya bilang tidak tahu karena GAM bergerilya.

Di dalam pos, anak buah mereka menarik saya, memeluk sampai baju saya koyak, mereka mau perkosa saya. Saya berteriak sekuatnya, "Pak Edji Barka anak buah Bapak mau perkosa saya," Pak Edji Barka menjawab, "alah kamu mau dikasih enak aja menjerit," lalu saya katakan, "Bapak orang berpendidikan tapi harga dirinya nol, saya tidak punya pendidikan tapi saya punya harga diri." Lalu Pak Edji memukul anak buahnya yang menggangu saya.

Setelah tujuh hari di Pos 112 saya dibawa ke SGI [di Buloh Blang Ara] di situ saya disetrum, lalu seorang di antara mereka meremas payudara saya sekuat-kuatnya. Tiga hari di SGI, Saya dibawa ke Kuala Simpang dan tidak boleh kembali ke kampung.

Saya di Kuala Simpang disuruh tetap komunikasi dengan mereka, berpindah dari satu rumah saudara ke rumah saudara lain karena tidak punya apa-apa.

Ketika Kampung Alue Rambe dikuasai TNI, tidak ada laki-laki remaja dan dewasa yang berada di Kampung. TNI membuat kemp di atas perbukitan, di bawahnya adalah alur tempat perempuan mandi dan mencuci.

Kami sering diminta mencuci pakaian mereka. Mereka mengatakan semua bentuk tubuh perempuan Kampung Alue Rambe sudah mereka ketahui, karena mereka mengintai kami mandi dan mencuci di alur ini. Kami juga dibatasi untuk keluar dari Kampung.

Dalam satu hari hanya boleh 3 orang yang bepergian ke pasar. Sebelum ke pasar kami digeledah di Pos 112 Simpang Limeng, harus menitipkan KTP. Ketika pulang dari pasar kami harus kembali melapor ke pos, belanja kami dijatah, kami hanya bisa membeli beras untuk keperluan 3 hari, katanya tidak boleh lebih nanti dikasih ke GAM.

Saya kembali ke Kampung Alue Rambe setelah Penandatanganan Damai pada tahun 2005. Saya memulai hidup dari nol lagi karena seluruh harta benda saya hilang dan rumah saya sudah rusak.

Saya ingin perempuan yang tidak bersalah jangan diperlakukan begitu. Saya harap tidak adalagi tindak kekerasan terhadap perempuan di Aceh.

05 KANDUNGAN KAMI TIDAK MAMPU UNTUK MELAHIRKAN ANAK

[Kesaksian Tineke Rumkabu]

T*ineke Rumbaku adalah salah seorang saksi mata dan korban penyiksaan seksual dalam Peristiwa Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Biak Juli 1998. Ibu Tineke Rumkabu menceritakan pengalamannya di tahanan yang mengalami penyiksaan seksual oleh tentara.*

Pada awal Juli 1998, sekelompok orang menaikkan bendera Bintang Kejora di menara (*tower*) air dekat pelabuhan kota Biak. Banyak warga masyarakat berkumpul, berdoa, dan menyanyikan lagu-lagu gerejani dari tanggal 2-5 Juli.

Pada tanggal 6 Juli, saya dan warga yang berkumpul diserang oleh gabungan TNI dan Polisi Brimob. Kami berpendapat bahwa di masa reformasi ini adalah waktu yang tepat untuk menyatakan keinginan kami untuk merdeka.

Tetapi tepat 6 Juli jam 5 subuh, terjadi penyerangan terhadap kelompok yang berada di bawah tower.



Kami mama-mama selalu menyiapkan makan dan minum untuk anak kami yang ada di bawah tower itu. Pagi jam 5, saya dengan teman mengantar kue, teman pegang ceret dan saya juga pegang ceret isi kopi dan kue di kardus.

Kami sementara berjalan sampai di jalan Penas dekat tower, tiba-tiba kami disergap oleh tentara yang di leher pakai pita merah topi daun-daun muka dicoreng sampai kelihatan hitam lalu mereka mendekati kami dan rampas ceret dan siram kopi yang begitu panas dari kepala, saya dipukul dengan popor senjata dari belakang dan jatuh lalu diinjak di perut. Saya teriak, "Tuhan tolong!" lalu seorang tentara bilang begini, "silahkan panggil Tuhan Yesus yang beberapa hari tolong kamu biar Dia bantu kamu.

"Lalu saya diseret beberapa meter kearah took Aru. Ada temannya tentara, dia suruh lari dan bilang, "Ibu lari pas saya tembak, kita seiman. "Saya lari kearah kompleks Perumahan Kesehatan, ada barak di situ, saya tahu di situ ada keluarga lalu di belakang rumah mereka

ada lubang pembuangan. Saya lari menuju tempat, kebetulan teman yang ada sama-sama juga lari ke tempat itu.

Kami sama-sama sembunyi tapi tidak bertahan karena ketakutan lalu kami masuk dalam rumah. Pakaian kami sudah sobek karena ditarik-tarik, kebetulan dalam rumah ada daster dan kami ganti lalu pura-pura pegang keranjang dan ke pasar.

Saat kami keluar, di luar sudah ada truk kuning, Saya bilang teman, "Kamu lari biar selamat." Saya lalu ditarik oleh tentara, diikat mata dengan kain lalu dilempar ke dalam truk. Waktu jatuh dalam truk rasanya jatuh di atas orang yang sudah dalam mobil.

Saya dibawa ke suatu tempat, di mana orang teriak seperti dalam satu ruangan. Saya dengar perempuan laki teriak, "Tuhan tolong-tolong." Lalu kita punya pakian dibuka semua kasih telanjang dan diborgol tapi dalam keadaan telanjang. Lalu tentara bakar lilin dan masukan ke dalam vagina. Rasanya pedis, "Buka mata lihat teman-teman kamu sudah mati, sebentar lagi kamu mati."

Tentara juga menyiksa Saya dengan melukai kemaluannya dengan sangkur. Ada juga perempuan lain yang payudaranya dipotong. Berbagai jenis penyiksaan dialami oleh Saya dan teman-teman. Akhirnya Saya dan teman-teman diselamatkan oleh seseorang yang juga tentara dan berhasil melarikan diri ke hutan. Saya tiga bulan di hutan, tanggal 3 September dipanggil ke kantor polisi untuk lapor. Tapi tidak lanjutkan lapor karena sudah sakit pendarahan.



Pengalaman ini membuat suami saya tidak senang dengan saya. Tiap hari bentrok dalam keluarga sampai saya tidak bisa bertahan, akhirnya saya lari dari rumah ke Jayapura atau tempat lain untuk tenang dengan teman-teman aktivis perempuan.

Pernah kejadian suami pukul saya, lukanya harus dijahit 6 jahitan. Saya lapor polisi tapi polisi tidak mau urus. Saya sudah pisah dengan suami dan anak.

Harapan saya, pengalaman ini jangan terulang lagi terhadap perempuan secara umum dan perempuan di Papua khususnya. Sudah cukup kami dilahirkan untuk disembelih dan dibunuh seperti binatang. Kandungan kami tidak mampu untuk melahirkan anak yang akan terus dibunuh dan dibantai seperti binatang



[Kesaksian Porman Boru Siagian]

06 TETAP BERJUANG
UNTUK
MENGEMBALIKAN
TANAH ADAT

Porman Siagian atau lebih dikenal dengan panggilan Ompu Jasa lahir di Janji Maria pada 13 Desember 1944, adalah salah satu pejuang perempuan adat dari perkampungan di Desa Sugapa Tanah Batak, Kecamatan Silaen (sekarang Sigumpar), Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Tobasa). Pada 1988, sepuluh inang (ibu) dari Desa Sugapa, dari 62 KK warga Desa Sugapa mengawali perlawanan terhadap PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang sekarang berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Perlawanan ini berawal dari tindakan PT IIU, 1987, yang menanamkan tanah adat milik turunan Raja Sidomdom Barimbing yang bernama Tano Parsibarungan seluas

51,36^{ha} dengan tanaman *Eucalyptus* (bahan baku untuk bubur kertas).

Ketika itu pihak PT IJU beralih bahwa tanah adat tersebut sudah diserahkan beberapa warga, Kepala Desa, dan Camat Silaen untuk dijadikan areal Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Padahal sebelumnya, tanah adat tersebut berfungsi sebagai tempat penggembalaan ternak dan tempat mengambil kayu bakar bagi warga Desa Sugapa. Menurut pihak PT IJU, penyerahan tanah adat tersebut sudah sesuai dengan prosedur, karena Kepala Desa dan Camat Silaen sudah menerima uang pako-pako (biasanya diberikan kepada pihak ketiga sebagai uang saksi) sebesar Rp. 650.000,- (Rp.12.500,-/Ha) dari PT IJU.

Namun setelah dikonfirmasi, beberapa warga desa yang merupakan keturunan langsung dari Raja Sidomdom Barimbing, mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk menyerahkan tanah tersebut. Bahkan selanjutnya mereka menemukan ada kecurangan dalam transaksi tersebut, yakni pemalsuan tanda tangan dan pengikutsertaan sejumlah warga yang bukan pemilik atau bukan pihak yang berhak menyerahkan tanah tersebut.

Kesepuluh inang yang dipimpin Nai Sinta br Sibarani ini meskipun diperhadapkan dengan tindakan represif aparat ketika itu, tetapi dengan gigih dan berani tetap berjuang agar tanah adat mereka dikembalikan oleh pihak PT IJU. Mereka berkali-kali mendatangi Kepala Desa, Camat, DPRD, dan Bupati untuk

mempertanyakan dan menyampaikan keberatan atas tindakan PT IJU ini. Namun keberatan dan pengaduan mereka tidak juga membuahkan hasil.

“Tanah kami diambil PT Indorayaon, tahun '87. Indorayon ambil tanah kami di ladang, tapi kami tidak tahu. Tahun '88 baru kami tahu, kami ke ladang dan larang mereka tapi mereka tidak mau. Lalu kami ke kepala desa dan tahu-tahu kepala desa yang jual tanah ini. Lalu kami ke polisi dan polisi tidak mau karena sudah dikasih uang, karena banyak uang Indorayon.”

Kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak menggubris pengaduan mereka, akhirnya kesepuluh ibu ini mencabuti tanaman *Eucalyptus* yang sudah ditanam oleh karyawan PT IJU.

Mengetahui tindakan kesepuluh ibu ini, PT IJU segera mengadu ke Polsek, dan kesepuluh inang ini pun ditangkap. Proses hukum pun berjalan. Pengadilan Negeri Tarutung pada 1 Februari 1990 menjatuhkan vonis hukuman percobaan masing-masing enam bulan kepada kesepuluh ibu ini.

“Kami adukan ke pengadilan dan kami dipanggil 10 orang [perempuan] yang tuntutan tanah itu. Kami pergi dan pengadilan bilang, 10 orang ini ditahan. Kenapa kami ditahan? tanah kami yang diambil, kenapa kami ditahan? tapi PN bilang kalian ditahan tiga bulan.”

Merasa putusan ini tidak adil, kesepuluh inang ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Tetapi putusan PT ini juga

tetap tidak adil, yakni tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan. Sehingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Tetapi sampai sekarang hasilnya tidak mereka ketahui. Mereka juga tidak pernah menjalani putusan tersebut dengan alasan “kemanusiaan”. Karena tidak mendapatkan keadilan, kesepuluh inang ini pernah berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri, Rudini. Ketika itu, kesepuluh ibu yang didampingi berbagai NGO mitra di Jakarta, menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada Menteri Dalam Negeri.

Mereka juga meminta agar tanah adat mereka yang dirampas PT IIU dikembalikan kepada mereka. Mereka menyatakan tidak setuju kalau tanah adat tersebut dijadikan sebagai Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Atas pengaduan kesepuluh ibu ini, Mendagri (Rudini), segera menyurati Bupati dan PT IIU agar segera menyanggupi semua tuntutan warga.

“Lalu kami omong-omonglah dulu di kampung dengan yang lain, lalu kami ke bupati [Toba Samosir], Bupati tidakanggapi lalu bilang ke gubernur [Sumatera Utara], lalu kami ke gubernur, tapi tidakanggapi. Kami rapat, bilang ke bapak-bapak supaya ke menteri, lalu kami omong-omong ongkos sekalian diusahakan.

Datanglah bapak-bapak bilang, kalian pinjam uang untuk ongkos kalau kalian tidak ke menteri, kalian ditahan. Lalu kami pinjam uang dan terbang ke menteri [di Jakarta].

Tiga sampai empat hari kami tidak ditanggapi menteri, duduk-duduk di lorong, ada yang bawa anaknya, menangis dia. Terus datanglah mahasiswa dari Jakarta menonton kami.

Sudah 4 hari baru menteri buka kantor dan kami naik ke atas 4 orang. Begitulah Menteri bikin surat ke gubernur dan ke bupati ada 4 amplop.

Kami tak tahu entah apa isinya, jadi ya kami keluar dari kantor Menteri dan naik bus pulang.

Macam mana kalian datang ke menteri kenapa begini isi suratnya kami tak tahu isi suratnya dilem, tanya bapak-bapak di kampung”



07 APARAT BUKAN MELINDUNGI TETAPI MERUSAK KAMI

[Kesaksian lin Tunga]

lin Tunga, gadis lokal di Poso, lahir di Bulili, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso pada 23 Januari 1981. lin kemudian tinggal bersama tantenya di Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Pada awal bulan September 2002, lin melakukan hubungan seks dengan Dodi Setiawan, seorang anggota Brimob dari Polda Kalimantan Timur yang berjanji akan menikahnya. lin hamil, namun Dodi Setiaawan meninggalkan begitu saja seiring masa tugasnya di Poso berakhir.

Saya salah satu dari ratusan perempuan di Poso yang menjadi korban eksploitasi seksual oleh aparat keamanan yang bertugas dalam kaitan konflik Poso.

Konflik Poso berlangsung sejak tahun 1998. Sejak tahun 2000, dengan alasan keamanan, ribuan aparat keamanan ditempatkan di Poso. Salah satunya di desa saya. Tahun 2002, di desa saya ditempatkan 17 aparat Brimob dari Polda Kalimantan Timur.

Saya dibujuk oleh salah satu anggota Brimob untuk melakukan hubungan seksual. Dia berjanji akan menikahi saya. Saya juga disuruh cuci pakaian dan masak untuk dia dan teman-temannya. Pas saya hamil, si anggota Brimob ini ingkar janji. Dia meninggalkan saya. Sebelum pulang ke Kalimantan, dia sempat berjanji akan datang menjemput saya dan menikah.

Kenyataannya, sampai usia kehamilan 6 bulan, tidak ada kabar. Bayi saya lahir prematur dan kemudian meninggal. Saya *so* pernah laporkan hal ini ke Provost Brimob Kalimantan Timur.

Saya pikir mereka akan bantu saya, ternyata saya malah disuruh mengurus sendiri ke Kalimantan. Mereka bilang itu urusan anggota Brimob, bukan urusan kesatuannya.

Orang tua, tetangga, masyarakat di sekitar saya menganggap saya ini perempuan nakal. Karena itu saya sangat sering mengalami kekerasan fisik dan psikis karena masa lalu.

Bahkan Saya sering dipukul oleh suami, sampai mata pecah, selalu dikatai, "bagaimana kamu dulu dan awalnya bagaimana." Dalam hati saya sampai kapan saya terus alami dan diam padahal kekerasan selalu saya alami dalam diri.

Saya ini ingin maju, ingin bergerak dan hidup normal seperti perempuan yang lain. Tapi kenyataannya, setiap kali saya punya kegiatan di luar, sering dicurigai kegiatan saya diluar tidak benar. Bukan hanya saya, saya ulangi, bukan hanya saya tapi masih banyak perempuan lain yang alami hal seperti saya di Poso.

Saya bisa bilang, waktu itu kami dalam keadaan konflik, aparat keamanan berjanji mau melindungi kami. Ternyata, kalau belajar dari pengalaman saya, justru mereka yang merusak kami. Saya, yang punya kesempatan berbicara kebenaran sekarang ini hanya salah satu.

Hanya salah satu dari sekian ratus perempuan di Poso yang alami eksploitasi seksual dengan janji keamanan.

Memang Poso sekarang sudah bebas dari kerusuhan tetapi yang tertinggal adalah kerusuhan di hati perempuan seperti yang saya alami. Hal ini berpengaruh dalam rumah tangga kami kerusuhan tertinggal dalam rumah tangga kami karena masa lalu saya itu. Setiap ada masalah saya diterpa suami, "kamu itu mau tuntutan ini itu kepada Saya, sementara kamu itu dulunya seperti apa awalnya," saya bilang, "kalau seperti ini terus tidak akan ada bahagia tidak akan ada merdeka."

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso mendokumentasi setidaknya terdapat 60 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, umumnya masih berusia muda, di Poso, Sulawesi Tengah Dalam menyikapi konflik antar komunitas di Poso yang terjadi sejak 1998 hingga tahun 2000 an, Pemerintah pusat menginisiasi perjanjian damai antar komunitas melalui Deklarasi Malino pada Desember 2001.

Selain inisiasi damai, Pemerintah juga mengembangkan kebijakan keamanan, terutama dengan penempatan aparat kepolisian dan TNI di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Poso, khususnya sejak tahun 2000 sampai dengan 2005.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan keamanan lainnya, antara lain pembentukan Satgas Poso, yang mengusung gagasan pemulihan keamanan secara holistik. Terdapat 12 jenis operasi keamanan sejak tahun 2000 sampai dengan 2005.

Pola Operasi yang dilakukan adalah membangun pos-pos Brimob dan TNI di sepanjang jalan Trans Sulawesi, pada setiap pintu masuk desa dan menempatkan pos sejenis di tengah pemukiman masyarakat dalam setiap desa.

Total jumlah keseluruhan pada tahun 2005 sebanyak 2.302 personil TNI dan Brimob yang menyebar di 8 (delapan) wilayah kecamatan di Poso, yaitu: Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota, Lage, Pamona Selatan, Pamona Timur dan Pamona Utara.

Rata-rata masa bertugas pasukan keamanan/militer yang di-BKO (Bawah kendali Operasi) ke Poso sekitar 2-6 bulan.



TANGGAPAN SAKSI AHLI

Kekerasan Terhadap Perempuan

oleh Ibu Sjamsiah Achmad
(Mantan Komisioner KKP
Indonesia-Timor Leste)

Pola Berulang Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste

Terima kasih Majelis Warga dan KKPK yang undang saya hari ini. Saya menyampaikan kekaguman Saya pada Ibu Net karena tidak hanya mengungkapkan kebenaran tapi memberi sikap yang patut ditiru kita semua. Semua tetap belajar, berjuta-juta kesaksian di dunia telah dihimpun oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa.

Saya sarankan kita belajar dari pengalaman yang lewat karena meski disepakati dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang perlu diperangi tapi masih berlangsung di sekitar kita.

Sekarang kita melihat fakta terjadi kekerasan, tetapi motivasi di belakangnya tidak diketahui, tidak hanya mengakui ada



kejadian tetapi juga siapa yang melakukan, korban dan motivasi pelanggaran, bagaimana penderitaan korban, apa hak sudah dipenuhi atau tidak.

Kita sepakat dan ketentuan dunia bahwa itu terjadi tetapi juga penting peran negara tidak hanya mengakui, tetapi menyesali hal itu terjadi, lebih dari itu negara harus minta maaf pada korban.

Negara mengikatkan diri secara moral dan etik bahwa itu salah dan melakukan program untuk memenuhi hak korban, apa yang dilakukan dan strateginya.

Perempuan menjadi sasaran karena umumnya pihak yang lemah. Keadilan bukan hanya hukum tetapi keadilan dalam kehidupan sehari, yang juga penting reparasi fisik atau psikologis tapi dan yang lebih baik status sebagai manusia yang independen dan mampu melakukan apa yang dia inginkan.

Pertemuan ini sangat berharga dan kita tidak boleh berhenti untuk itu. KKPK harus menarget undang-undang atau perangkat hukum, selain itu saya sarankan untuk mencari kebenaran lewat pendidikan di

sekolah sejarah kurikulum, di perguruan tinggi, dari pada Indonesia mengikatkan diri pada konvensi HAM tetapi bagaimana prakteknya untuk kemanusiaan. Saya sangat menghargai Ibu menunjukkan konsistensi dan mempertahankan haknya dan bagaimana kita membantu agar ini bisa diteruskan.

“Kita harus benahi buku sejarah karena tanpa itu tidak bisa membangun masa depan yang lebih baik.

Ibu berani melakukan tindakan itu dan pada waktu tersebut tidak banyak yang melakukan seperti itu.”



Kalau perlu ditulis buku-buku mendokumentasikan seperti ini. Saya menekankan kita benahi pendidikan kita sekarang, karena sudah tidak mengacu pada Pancasila dan Konstitusi tetapi membuat peraturan yang tidak sesuai. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Kekerasan Terhadap Perempuan



Peran Komnas Perempuan sebagai Mekanisme Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak - Hak Perempuan Korban.

Oleh: Yuniyanti Chuzaifah
(Ketua Komnas Perempuan)

Dari pagi hingga sore teraduk perasaan kita, ini sangat nyata sangat kongkrit, atas nama Komnas Perempuan menyampaikan hormat terhadap penggagas inisiatif ini dan tentunya suatu kehormatan pula Komnas Perempuan bisa menjadi bagian dalam proses dengar kesaksian ini.

Kebenaran, keadilan, pemulihan dan reformasi tata kelola negara khususnya sektor keamanan, yang paling lamban adalah keadilan. Di berbagai kasus penanganan pelanggaran HAM masa lalu, satu kata ini kerap diletakkan dibawah karpet, sehingga hanya persahabatan dan rekonsiliasi, atau kebenaran dan rekonsiliasi yang mengemuka, dengan sejumlah alasan.

Aktor-aktor penyelenggara negara, kerap berseloroh, mari menatap kedepan, terlalu lama melihat spion bisa menabrak. Atau mulai berpikir memberi hak pemulihan, tapi tidak boleh gaduh. Tokoh perdamaian terkemuka juga mengatakan, mari saling memaafkan dan bergerak kedepan, karena mengungkap kebenaran atau keadilan, terlalu beresiko untuk komunitas yang punya tradisi mendendam.

Tetapi kekuatan dan semangat para korban, penggiat kemanusiaan menjadi magma yang tak bisa dibendung. Hormat kami sebagai orang muda, sebagai institusi dan kita semua yang hadir di sini, atas keberanian para korban untuk bicara dan terus memintal perjuangan bersama dengan para penggiat kemanusiaan lain. Ibu-ibu Korban Peristiwa '65, Mama - Mama Papua, Inong Aceh, Mama di Maluku, Poso Timor Leste, Inang Sugapa Sumatera Utara dan banyak perempuan korban lain yang bersemangat liat, yang mempertaruhkan hidupnya untuk kata pendek tapi perlu nafas panjang yaitu: keadilan dan kebenaran.

Pramilla Pattern, salah satu anggota Komite CEDAW saat berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Ibu-ibu Korban Peristiwa '65 yang sudah sepuh.

Mereka menjadi dinamit sendiri bagi Pramilla, bagaimana usia lansia tak kenal renta. Mereka masih bertanya, apakah ICC (International Criminal Court) bisa jadi lubang jarum untuk menyoal kasus pelanggaran HAM ini, sebuah kejahatan kemanusiaan yang lamban mendapatkan titik terang keadilan.

Pertemuan di Komnas Perempuan dengan para korban tersebut, menjadi salah satu kacamata pembesar bagi Komite CEDAW untuk berlanjut menyoal pelanggaran HAM masa lalu pada pemerintah Indonesia saat Indonesia direview oleh komite CEDAW.

Komnas Perempuan juga turut membawanya pada Universal Periodic Review Dewan HAM PBB. Komite ICCPR, termasuk selalu meminta ruang khusus seluruh mekanisme HAM PBB yang hadir ke Indonesia, antara lain Komisi tinggi Dewan HAM PBB, Navanethem Pillay, saat hadir ke Indonesia.

Sebagai mekanisme HAM, Komnas Perempuan melakukan pemantauan mendengar suara korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual disejumlah wilayah konflik.

Dalam hasil pantauan 4 dekade kekerasan di Indonesia yang digugus dalam buku ; "Mari Kita Bersikap", mencatat deret panjang perempuan korban. Dalam berbagai peristiwa diantaranya: Konflik

Aceh, Tragedi 1965, Tragedi 1998, Kerusuhan Maluku, Konflik Poso, Serangan terhadap Jemaah Ahmadiyah, Konflik Papua, Konflik di Timor Leste.

Berbagai data yang terungkap tentunya bisa seperti gunung es. Tapi dalam perspektif HAM, satu kasus cukup dan itu adalah persoalan serius. Kerentanan saksi dan korban, kerap membuat pengungkapan kebenaran tersendat, disinilah kenapa LPSK dilahirkan, dimana Komnas Perempuan termasuk salah satu yang mendorong urgensinya.

Itu bukan angka atau score, mereka adalah perempuan-perempuan yang punya wajah dan sejarah. Hidup mereka terhenti, dikoyak karena tragedi kemanusiaan, konflik bersenjata, konflik komunal atau konflik-konflik lainnya, tubuh perempuan digunakan sebagai simbol penaklukan, proxy (pengganti) target, pesan teror, penghentian regenerasi dengan merusak reproduksi perempuan, menghancurkan seksualitas sebagai simbol penghancuran kehormatan komunitas yang disasar.

Semoga ini menjadi harapan baru, Komnas Perempuan bersama sejumlah mitra bersama-sama mendorong 3 wilayah, yaitu Kota Palu, Kota Solo dan Provinsi Jakarta agar negara meminta maaf dan memenuhi hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Selain Walikota Palu yang sudah meminta maaf dan melembagakan kebijakan reparasi untuk korban '65, ada juga komitmen politis Wagub DKI, yang akan menjadikan situs-situs sejarah pelanggaran HAM masa lalu, setidaknya monumen Jarum Mei di Klender, Makam

massal Pondok Rangon, dan makam Soe Bengkong akan dimasukkan dalam situs wisata sejarah Provinsi Jakarta. Mereka berkomitmen untuk memugar dan merawat bersama para korban.

Selain itu memorialisasi Komnas Perempuan beserta gedungnya juga mulai dirintis sebagai salah satu memorialisasi bangsa bahwa Tragedi Mei pernah terjadi dan tak boleh berulang.

Komnas Perempuan dan pendamping yang ada disini juga berusaha memfasilitasi perjuangan korban 65 melalui ruang-ruang budaya sebagai celah membuka ruang pemulihan khususnya rehabilitasi dan kebenaran.

Kita harus apresiasi perjuangan para korban. Di Papua, bersama jaringan perempuan Papua, mendokumentasi 40 tahun kekerasan terhadap perempuan. Temuan penting dari pendokumentasian tersebut dan juga pengalaman di sejumlah wilayah post konflik, atau konflik yang diduga banyak pihak sudah berhenti, rupanya konflik dan kekerasan hanya berpindah pola, kasus KDRT cenderung melambung. Perempuan menjadi sasaran KDRT, karena kefrustasian komunitas yang terkalahkan, tidak ada pemulihan mengembalikan martabat, sehingga yang tersisa adalah agresi, ingin menunjukkan supremasi melalui penaklukan pada yang dianggap lemah, yaitu perempuan, anak-anak dan bisa siapapun di hadapan mereka.

Budaya kekerasan menjadi warisan yang ditiru dan impunitas terbiar dan

terlanggengkan karena tidak ada proses keadilan. Pendekatan keamanan yang penuh kekerasan, perlu ratusan tahun untuk memulihkan dan membenahi.

Korban tak pernah lupa, ingatannya sangat tajam walau sudah 4 dekade atau lebih, dan kalau tidak terpulihkan, pengalaman di banyak negara post konflik, jelang tidur, para perempuan ini menitipkan pada anak-anaknya untuk membuat perhitungan, membayar kemarahan, mengajari angkat senjata sebagai perang suci untuk mengembalikan martabat perempuan-perempuan yang dicintainya yang telah direnggut.

Beruntung banyak yang hadir disini menekuni perdamaian dan menjadikan perempuan sebagai aktor kunci dalam perdamaian baik di publik maupun domestik. Sehingga, di sejumlah wilayah rantai dendam tersebut bisa diolah menjadi energi perdamaian.

Dalam catatan kami, Korban cenderung dibiarkan sendiri berjuang untuk survive, karena viktimisasi atas kekerasan seksual dari komunitas juga kerap mempertebal traumanya. Walaupun banyak organisasi pendamping setia tak henti menguatkan dan memberdayakan, namun jumlah korban dan lapis persoalan tak cukup berimbang kalau tidak dibarengi dengan respon negara.

Pemulihan harus ditopang oleh empat pilar, yaitu diri sendiri korban untuk menggeliatkan diri menjadi penyintas, juga dukungan keluarga, komunitas dan negara.

Tapi partisipasi dan tanggungjawab komunitas atau aktor non negara tidak menghilangkan tanggungjawab negara. Dalam mekanisme HAM negara menjadi penanggungjawab utama pemenuhan, penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi.

Betapa pemulihan, kebenaran dan keadilan menjadi kunci, menghentikan hutang kemanusiaan. Bangsa beradab dan berperadaban adalah bangsa yang punya malu, jujur pada sejarahnya, dan memupus kekerasan agar tidak berulang.

“Saatnya bicara kebenaran, menggemakan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Jangan biarkan korban berjuang sendiri. Seluruh upaya tersebut harus dipintal bersama.”

“Mari terus bicara, jangan diam dan mendinginkan.”





Handwritten text in Indonesian script, likely a letter or document, located in the top left corner.

Handwritten text in Indonesian script, located in the top middle section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the top right section.



Handwritten text in Indonesian script, located in the middle left section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the middle right section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the lower middle left section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the lower middle right section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the bottom middle left section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the bottom middle right section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the bottom left corner.

Handwritten text in Indonesian script, located in the bottom middle section.

Handwritten text in Indonesian script, located in the bottom right corner.



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Kekerasan Terhadap
Perempuan

Mendengar kesaksian 7 orang penyintas dari berbagai usia yang tinggal diberbagai daerah.

Sejak pagi hingga sore hari ini, sebagai Majelis Warga kami berterima kasih atas kesediaan membagi pengalaman yang sangat menguras emosi dan nurani kita bersama yang mendengarkannya.

Kami majelis warga merasa bangga terhadap keberanian yang telah ditunjukkan oleh para penyintas untuk mengungkapkan kebenaran dari kekerasan yang telah menimpa diri mereka selaku anak bangsa.

Serta kami setuju bahwa sekaranglah saatnya untuk kita semua sebagai warga menuntut keadilan.

Perempuan sebagai korban mengalami penderitaan yang berlapis dan berkepanjangan, yang terkait tubuh dan ketubuhan perempuan. Khususnya seksualitas perempuan dan posisi perempuan di masyarakat membuat perempuan rentan terhadap stigma sosial termasuk bila terjadi kehamilan di luar keinginan korban.

Sedangkan Negara sampai sekarang terus mengabaikan dan melupakan penderitaan mereka yang berkepanjangan. Adanya sikap negara dan masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan menjadikan perempuan korban semakin jauh dari akses terhadap kebenaran dan keadilan. Meskipun perempuan menjadi korban mereka tetap menjalankan perannya merawat hidup dan kehidupan, termasuk keberlanjutan hidup keluarga.

Dalam mencari keadilan perempuan berkemampuan untuk melampaui peran yang umumnya diberikan oleh masyarakat, menghadapi aparat keamanan, menghadapi para penyiksa, dan pejabat negara.

Para perempuan korban menunjukkan mereka tetap tegar, konsisten, dan peduli pada orang lain, termasuk menggantikan tugas-tugas anggota keluarga yang dihilangkan atau ditahan. Kenyataan ini mematahkan pelabelan sosial bahwa perempuan adalah makhluk lemah.

Pola umum kekerasan yang dialami adalah , mereka diambil oleh aparat militer atau polisi, diintimidasi, disiksa, dilecehkan, dan diperkosa. Kekhususannya adalah mereka yang semula bukan sebagai target utama , tetapi karena absenya anggota keluarga laki-laki pada akhirnya dijadikan target utama. Karena dia perempuan, maka dia menjadi target kekerasan seksual yang khas perempuan seperti perkosaan massal dan penelanjangan paksa yang akibatnya masih dirasakan oleh mereka seumur hidup.

Sampai hari ini belum terlihat adanya peluang bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya sebagai sesama warga negara.

Namun demikian para korban tetap bertahan, dan berketetapan hati, serta terus bergerak untuk mencari keadilan dan kebenaran serta pemulihan. Padahal keadilan, kebenaran, dan pemulihan adalah hak setiap korban, bukan pemberian.

Forum Dengar Kesaksian selama lima hari ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran dan kesadaran masyarakat, pentingnya kebersamaan dalam mendukung korban, agar peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terulang kembali apapun motifnya. Maka Forum

Dengar Kesaksian ini adalah upaya korban bersama warga masyarakat yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KKPK untuk terus mengajak masyarakat bersama-mendorong dilakukannya pertanggungjawaban negara terhadap korban kekerasan atas hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan serta jaminan agar tidak terulangnya kebijakan negara yang tidak manusiawi dan praktik-praktik kehidupan bernegara yang mengedepankan kekerasan.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada para ibu - ibu korban yang telah bersedia memberi kesaksian.

Tertanda Majelis Warga
Saparinah Sadli
Lies Marantika
Fien Djarangga
Samsidar
Ichsan Malik



B. OPERASI MILITER

01 ORANG TERKORBANKAN OLEH NEGARA MASIH TERLANTAR

[Kesaksian Murtala]

Murtala lahir pada 12 desember 1970 di Paloh Lada, Aceh. Ia merupakan salah seorang korban penganiayaan dan pemukulan dalam peristiwa Simpang KKA. Murtala kemudian aktif dalam organisasi korban dan menjadi koordinator K2HAU, sebuah organisasi korban di Aceh.

Pada tanggal 3 Mei 1999, sebuah insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Den Rudal 001 serta Yonif 113 Aceh Utara terhadap masyarakat.



Insiden tersebut terjadi di Simpang KKA Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Dalam peristiwa tersebut sebanyak 39 warga meninggal, 156 luka-luka, 10 orang dinyatakan hilang dan ratusan orang mengalami trauma.

Peristiwa Simpang KKA awalnya dipicu oleh 'isu hilangnya' anggota TNI, Aditiya Rahmadan dari Detasemen Rudal 001/Lilawangsa pada 30 April 1999 ketika tengah menyusup ke acara ceramah agama pada peringatan 1 Muharam yang diselenggarakan warga Cot Murong.

Hilangnya anggota tersebut kemudian disikapi oleh anggota pasukan militer dari Detasemen Rudal dengan melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga. Saat pencarian, aparat melakukan kekerasan yang mengakibatkan sekitar 20 orang warga mengalami kekerasan; dipukul, ditendang dan diancam. Tidak terima dengan tindakan aparat, warga melakukan aksi protes di Simpang KKA.

Tapi aksi protes warga juga disikapi oleh aparat TNI satuan Detasemen Rudal 001/Lilawangsa dan Yonif 113/Jaya Sakti

dengan memberondong senjata ke arah warga di Simpang KKA

Hari Senin, 3 Mei 1999, saya tidak masuk kerja karena perayaan 50 hari kelahiran anak. Saya pergi ke tempat salah satu kawan, kemudian mau ke pasar beli keperluan rumah.

Di saat pergi, saya lihat banyak truk dan sepeda motor, saya penasaran sampai di depan lapangan bola saya lihat massa banyak sekali, orang tua, anak-anak, perempuan sudah berkumpul.

Saya batal pergi ke pasar karena takut, sebentar lihat dan pulang. Sepanjang jalan dirintangi drum dan kayu. Saya dengar orang berteriak menuju ke Simpang KKA, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah. Kita lihat truk militer [Yonif] 113 di sebelah barat dan ada kios-kios kecil, saya melihat Camat Dewantara, Drs. Marzuki dan juga Koramil Dewantara, Kapten Muhammad Jafar.

Pak Camat naik ke truk untuk bicara, warga menolak membubarkan diri dan menuntut Muspika Dewantara untuk menghadirkan Bupati, Kapolres, Danrem Lhokseumawe. Pada jam 12 siang lewat *dikit* azan berkumandang, lalu saya turun pergi sholat ke rumah Pak Jusuf.

Setelah sholat orang semakin berjubel, lantas saya bergabung lagi dengan Pak Camat. Saya lihat tentara pake baret hijau lari ke semak, seiring itu dari arah selatan mobil datang dan pas di persimpangan mobil berhenti, lalu militer di dalam mobil ke samping sambil mengendap dan mendekat.

Kemudian datang batu ke arah kerumunan massa, massa membalas lalu terdengar dua kali tembakan, lalu tembakan berikut tak berhenti. Tentara [Yonif] 113 ada yang duduk, jongkok dan tiarap, katanya.

Saya berusaha merangkak di bawah truk militer, mau lari, dipukul di dada dengan senjata sampai terjatuh, lalu bangun dan dipukul lagi di punggung.

Saya sempat lihat beberapa orang terjatuh mengeluarkan darah di depan Saya. Saya lihat kios perabot, saya masuk ke situ. Saya dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit PT. PIM.

Kemudian Dokter yang memberi pertolongan pertama memanggil keluarga saya agar dapat merujuk segera ke Rumah Sakit Umum Lhokseumawe, karena menurut hasil diagnosa saya harus segera dibawa ke Lhokseumawe untuk perawatan lebih intensif akibat benturan benda tumpul, [popor senjata di bagian tengkuk].

Selama tiga hari tiga malam saya tidak sadarkan diri, baru pada hari keempat saya baru sadar kalau saya dirawat di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe. Pada saat itulah saya melihat banyak orang yang terbaring di koridor, di ruang tunggu, ruang perawatan, hingga ruang konsultasi dokter, puluhan orang merintih tertunduk dan terbaring berdesakan.

Semuanya dengan wajah pucat menahan sakit dari luka tembak tubuhnya, jarang saya mendengar yang menangis, hanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Takbir yang terdengar lirih.

Dalam MOU Helsinki ada poin tentang pengadilan HAM yang belum terjawab sampai sekarang. Saya sebagai konselor, menangani korban yang mengalami tekanan batin, apa yang mereka alami pelan-pelan mereka ceritakan, mereka ingin reparasi dini, anak-anak yang tidak bisa sekolah, ekonomi korban hari ini seperti Ibu Nurhayati, untuk membiayai sekolah anak, proses pengobatan memang ada program pemerintah pengobatan dan pemberdayaan anak yatim, kenapa tidak ada kekhususan untuk orang yang terkorbankan oleh negara.

Ada korban yang memaafkan tapi tidak lupa, ada korban yang mau melalui proses pengadilan. Kita memaafkan, tapi tidak untuk melupakan. Saya harap Pemerintah dan kita semua [disini] termasuk korban, jangan pernah berhenti mencari keadilan dan berjuang bukan dengan senjata.

Terhadap peristiwa Simpang KKA, pada tahun 2000 telah dilakukan penyelidikan dan pengkajian oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88/1999.

Dalam laporannya, komisi menyebutkan sebanyak 39 warga sipil tewas (termasuk seorang anak berusia 7 tahun), 156 sipil mengalami luka tembak dan sekitar 10 warga sipil dinyatakan hilang.

Sedangkan pihak yang diduga sebagai penanggung jawab atau pelaku penembakan adalah Kol. Inf.

Jhony Wahab (mantan Danrem Lilawangsa), Komandan Yonif 113/Jaya Sakti Letkol Inf Bambang Haryana, Komandan Detasemen Rudal 011/1 Mayor Art Santun Pakpahan, Danki Den Rudal Letnan Art Ismail dan Danru masing-masing pasukan.



02 "MAU APA KAU, MAU MATI?" KATA TENTARA

[Kesaksian Tikamariah Usman]

Tikamariah Usman alias Ma Putroe, lahir di Binjee tanggal 1 Juli 1965. Ia dan suami, Bapak Usman, tinggal di kampung Sidomulyo Kecamatan Buloh Blang Ara, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang ini Ma Putroe tinggal di Dusun Drien kawan, Desa Alue Papuen, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Pada Tahun 1990, ketika Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Ma Putroe bersama suaminya ditangkap

oleh Kopassus saat keduanya kembali ke rumah setelah selesai berbelanja. Mereka mendapat siksaan karena dituduh ikut membantu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti membantu GAM.

Hari Sabtu-Minggu kita jualan, habis itu hari senin kita [saya] ke pasar, belanja. Pulang hari Senin ke rumah, tahu-tahu Kopassus sudah ada di rumah. Pikir aku siapa itu, mobil sudah ada di rumah.

"Dari mana bu?" tanya mereka, "pulang dari pasar," jawabku. "Ibu ke sini dulu, naiklah aku ke mobil." Abis tu dibawa ke tanah lapang dekat rumah sekolah. Abis itu duduk aku di situ di mobil, dijemput lagi laki [suami] aku di rumah sama orang lain.

Tahu-tahu kita dibawa tanpa ditanya apapun, sampe di tempat dekat sungai, kita disepak, rambut ditarik, laki saya ditarik disepak dimasukkan ke gorong-gorong, aku disuruh ganti di belakang. "Kita tak mau coba Bapak dulu kalau abis sampe

di belakang situ aku gantian,” kataku, “anjing lu memang dasar babi ko, ” jawab Kopassus. “Aku babi Pak, Bapak itu babi juga karena bilang aku babi.” kataku.

Aku ditendang terus sampe muntah dan tak bisa bicara lagi, dihantam senjata di kepala, anting putus hilang semua. Aku bukan orang lagi, aku perempuan. Aku dipegang, baju koyak dan biar ngaku. Apa yang mau aku ngaku orang tidak salah. Abis itu diikat dibawa ke sungai dilempar ke sungai biar kedinginan, biar ngaku orang mau ngaku apa orang tidak tahu salahnya.

Kita dipendam di air nggak bisa kita berenang, takut ada lintah bukan takut senjata, sama senjata satu aja udah mati sama lintah tidak mati. Lalu mereka bilang, “ditolak lagi biar takut, biar mampus.” Suami saya ditarik, dipukul-pukul, aku karena pingsan maka ditarik lagi dari dalam air.

Lalu dibawa ke beberapa tempat penahanan dan penyiksaan seperti kantor Koramil [Buluh Blang Ara], dan ke Kantor Kodim [Lhokseumawe]. Laki saya entah ke mana dibawa, ke Kodim entah taruh di mana, Pedih kita orang perempuan selama 7 hari rasanya 7 tahun, makan tidak karena kita nggak senang dikerjain seperti itu. Abis itu udah 7 hari Aku di situ dibawa ke Koramil lagi dimaki-maki lagi, “anak kau ya udah sampai Kodim sudah ada pelindung kau Kodim, Pak Aswi.”

Tahun 2003, diambil lagi laki saya dari rumah di Bintang-bintang, dibawa entah kemana, cari hampir 2 bulan tak dapat. Cari lagi biar dapat, sore jam 5 sudah

dapat di Rudal [Denrudal Arhanud 001 Pulo Rungkom], tunggu aku di situ, karena ada kabar bahwa ada 8 orang ditahan di tempat itu.

Pura-pura cari obat di rumah sakit. Aku bilang cari obat untuk orang tua di rumah. Jam 5 [sore] dikeluarkan 8 orang itu, dia sapu sampah dan buang ke pokok bambu. Aku terus pulang, mau jumpa sama Pak Rusli (Danramil Buloh Brang Ara).

Aku bilang, “bagaimana itu laki kita sudah di Rudal?”

Siapa bilang?” tanya Pak Rusli.

“Bukan bilang Pak, saya lihat sendiri.” Dia menyuruh saya pergi ke Kopassus, minta bantuan Kopasus. Kita sendiri pergi ke Kopassus, nekat padahal takut sekali.

Sampe di Kopassus, aku ditanya, “kemana Engkau?”

Mau minta bantuan Bapak,” jawabku. “Kau enak saja kalau ada apa minta bantu kalau kami minta bantu, kemana?” Mungkin karena aku udah nangis di situ, abis itu oleh Kopassus bilang, “kalau ada di Rudal, kalau tidak ada kita minta ganti sama Ibu? ini disuruh dengar, katanya tidak ada.

” Saya bilang, “ada karena sudah lihat sendiri.” Kopassus telpon lagi, “kalau ada bilang ada kalau tidak ada bilang tidak ada karena sudah lihat sendiri bininya.”

Abis itu telpon lagi, “bisa jam 8 datang lagi kemari jumpa sama lakinya.” Aku pulang ke rumah, besok Kopassus bilang pergi saja ke Kodim, di tempat tahanan. Terus minta bantuan bini Pak

Rusli, Danramil. Pergi kita sama-sama beliau. Lalu kita pulang ke rumah.

Lalu datang lagi aparat ke rumah, tanya, "mana itu laki kamu, mana laki kamu pigi mana, ke ladang?"

Apa orang GAM?" Masa tanya begitu kita kan bukan orang GAM, masuk ke rumah orang dan bilang, "Tika ayolah sama kami biar duduk-duduk kita berdua." Sampe masuk dia ke dalam, yang lain di luar, didempet aku ke dinding, minta yang enak-enak katanya, aku lawan orang itu, kugigit tangan dia, ditendang aku sampe gigi ompong, tidak takut aku.

Laki sudah diambil, masa ditanya-tanya lagi? Abis itu rumah saya dibakar sama orang itu, karena kita orang jualan bukan orang tani dipukul kita seenak-enaknya.

Ada anak yang kita pelihara diambil juga entah di mana sekarang, Aku dibawa lagi ke pos dipukul, ditaruh di lubang, disuruh ngucap biar mampus. Tambah takut aku mau disembelih, Aku dibawa ke belakang ditaruh di lobang, mau apa kau? Mau mati? Saya tutup muka ditembak mati, aku nggak apa. Tidak ditembak.

Datang lagi orang lain, ada bawa kuping orang ditaruh di tali, dia bilang, "ini kuping iki? coba liat dulu, ini kuping siapa?" (tentara bicara dalam bahasa Jawa)

Harapan kami, bagaimana baiknya Ibu Bapak semua karena kami korban banyak di kampung Aceh, biar negeri kita aman dan tidak lagi seperti dulu.

03 LUKA KEMANUSIAAN DI TIMOR LESTE

[Kesaksian Domingos Pinto de Araújo Moniz]

Domingos Pinto de Araújo Moniz, biasa disebut Atai, lahir di Dili pada tanggal 26 Agustus 1962, sekarang telah berkeluarga dan punya 6 orang anak, tinggal di Santa Cruz, Dili, pekerjaan sebagai tenaga administrasi honorer di Universitas Timor Oriental (Unital) Dili.

Atai merupakan salah seorang korban dan saksi dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang aparat ABRI/TNI sewaktu invasi dan pendudukan di Timor-Leste. Sewaktu ABRI/TNI menginvasi Timor-Timur pada tanggal 7 Desember 1975, Atai masih berumur 13 tahun ikut mengungsi ke hutan bersama keluarganya.



Pada hari Minggu tanggal 7 Desember '75, setelah invasi TNI ke Timor Leste, saya bersama keluarga lari ke hutan kurang lebih 3 tahun. Selama di hutan saya bergabung di organisasi Kepemudaan Timor Leste kurang lebih satu tahun. Di hutan saya punya misi membantu pendidikan untuk orang yang tidak bisa menulis dan mengajar orang agar bisa menyanyi, dengan dasar ini saya sebagai komposer lagu di Timor Leste sekarang.

Setelah kurang lebih 3 tahun di hutan, tanggal 18 September tahun '78, saya bersama masyarakat, 300 orang, ditangkap TNI 721 Sulawesi Selatan di wilayah Natarbora. Kami dibawa ke Kecamatan Soibada dan dilanjutkan ke Laclubar.

Tiba di Laclubar, sore hari kami disuruh tidur. Sekitar jam 11 malam, seorang hansip masuk ke tempat kami tidur memanggil kami satu-satu.

Saya dengan empat orang teman, tiga orang dewasa, saya waktu itu 16 tahun, dan satu lagi teman seumur saya, kami dibawa ke Koramil untuk merebus jangung. Selama interogasi kami disiksa, kaki ditendang. Saya diinterogasi berulang kali. Saya baru sadar kenapa saya dipanggil karena kakak saya, menjadi komandan kelompok region Manatutu di hutan pada waktu itu.

Pada tanggal 8 November 1978, saya dibawa ke Dili bersama orang tua dan diharuskan mendaftar di Koramil Dili Timur-Becora. Sebagai tahanan luar selama 6 bulan, melapor setiap senin, dan tidak boleh kemana-mana.

Setiap Senin kami disuruh membersihkan WC, pagar, lalu disuruh menyanyi Indonesia Raya. Kalau tidak hafal teks kaki diinjaknya. Mulai tahun '78-80, situasi di Dili setiap malam terjadi penangkapan besar-besaran termasuk kakak saya yang nomor 4, dia dipukul dan mati dalam penjara Balide. Waktu diminta Pastor untuk diserahkan kepada keluarga, intel tidak mau.

Pada saat itu kami mendapat surat dari Fraksi DPRD AURI, bahwa orang-orang yang keluarganya masih di hutan akan dibunuh tujuh turunan.

Masyarakat kaget dan tak sabar lagi, setiap malam ada penangkapan, ada yang dibunuh, ada yang disiksa sampai mati. Pada 17 Juni '80 disebut Peristiwa Marabia, disitulah Falintil menghadang Pos Brimob, Filentil mati satu orang dan brimob satu orang.

Setelah Falentil serang Pos Brimob, pagi harinya masyarakat di sekitar bukit disuruh turun ke kota. CAVR mencatat setidaknya 121 nama-nama orang yang dibunuh, dihilangkan atau meninggal dalam tahanan.

Penangkapan ini kebanyakan terjadi di Dili, namun juga ke kabupaten-kabupaten sekitar. Dari asosiasi korban Timor Leste sekarang kami mencatat ulang sekitar 75 nama orang yang hilang. Kakak saya nomor dua hilang sampai sekarang tidak tahu di mana. Mulai dari hari itu penangkapan semakin menambah.

Pada 22 Juni malam, Saya bersama tiga orang satu perempuan dan dua laki ditangkap oleh Korem dan Kodim 1627 Dili, kami disiksa dan diangkut ke Kodim 1627 Dili. Saya ditahan selama satu malam, pada sore hari mereka melepaskan saya, tetapi diwajibkan lapor setiap hari di Kodim 1627 Dili selama satu minggu (30 Juni 1980), sambil menunggu keberangkatan ke Atauro.

Berhubung kondisi kapal yang akan mengangkut saya dan yang lain ke Atauro penuh maka kami tidak jadi berangkat. Kemudian saya dan yang lain dilepas kembali tetapi kami diwajibkan melaporkan diri setiap hari Senin selama satu tahun lebih, mulai dari satu 1 Juli 1980 sampai 17 Agustus 1981.

Setiap hari satu kelompok terdiri dari 100 orang yang harus lapor ke Koramil Dili Timur-Becora. Jadi total ada 600 orang yang wajib lapor. Selama proses wajib lapor ini, kami disuruh membersihkan

kantor Koramil mulai dari ruang kerja, wc, halaman dan membuat pagar dengan kayu dan melatih nyanyi lagu Indonesia Raya. Bila kami tidak hafal tesksnya kami diteror dan diancam akan dibunuh.

Satu hari 9 orang (8 laki-laki dan 1 orang perempuan) dari kelompok saya yang 100 orang disuruh ke Hera dengan alasan memotong pohon, tetapi mereka tidak pernah kembali sampai sekarang. Kemudian saya balik ke rumah hidup sebagai masyarakat biasa.

Pada tanggal 5 April 1982, saya disuruh Ibu pergi ke Marcado Lama (pasar), tahu-tahu di Marcado dihadang hansip dan intelijen, saya bilang, "minta maaf ada apa?" dia bilang, "mau melawan?" Saya dipukul, ditendang di muka umum, saya ditarik masuk Polres Dili, dekat Marcado Lama, saya ditahan dua malam, bukan polisi yang interogasi tapi preman, polisi bilang kami amankan saja, 2 hari interogasi, disiksa, lalu disuruh cuci mobil dan siram bunga. Banyak penyiksaan lain yang saya alami.



“Harapan saya ke depan jangan terulang lagi kejadian seperti yang saya alami. Kedua, saya di sini bukan atas nama sendiri tapi atas nama korban di Timor Leste yang haus akan keadilan dan saya datang ke sini membawa nama Atai, tapi dalam hati saya bawa semua penderitaan masyarakat Timor Leste yang menderita selama okupasi di Timor Leste.”



04 PERTEMUKAN KAMI DENGAN KELUARGA DI TIMOR LESTE

[Kesaksian Isabelinha Pinto]

Pinto biasa dipanggil Lina Sembel, lahir pada tahun 1973 di Timor Leste. Dia diambil secara paksa dari keluarganya pada saat berumur 6 tahun dan dibawa ke Indonesia. Lina tinggal dengan orang tua angkatnya, seorang tentara, di Bekasi, Jawa Barat. Masa kecilnya sangat menderita, dimana ia sering tidak mendapatkan makan yang cukup, dan harus bekerja sangat keras untuk mencuci, dan pekerjaan domestik lainnya. Menjelang remaja, ia menjadi korban pelecehan seksual dari tentara yang mengangkutnya.

Saya adalah salah satu dari 4000 anak anak Timor Leste yang dibawa paksa oleh tentara. Saya dibawa tahun '79 saat berumur 6 tahun.

Saat adopsi itu ada petinggi ABRI di antaranya Panglima ABRI M. Jusuf, dan Sudarto yang menandatangani surat pengangkatan saya.

Orang tua tidak setuju saya dibawa, tapi karena invasi saat itu dimana orang tua dipaksa, sebagai jaminan agar keluarga saya tidak dibunuh.

Akhirnya saya dibawa oleh tentara dari Kesatuan 202. Sampai di Bekasi, saya dibawa oleh keluarga yang nggak setuju saya datang. Akhirnya saya jalani hidup dengan berbagai kekerasan dan pelecehan juga. Sampai tahun '84 Bapak Tentara masih berkomunikasi dengan keluarga saya di Timor Leste.

Kalau saya tanya, katanya itu bukan keluarga saya dan kamu diambil dari hutan dan tidak punya keluarga.

Tapi saya ingat ada penandatanganan di bawah waktu itu, dan saya baru tahu ada petinggi tentara itu.

Ayah saya Raja di Dili dan menurut tentara kalau anaknya diambil maka akan menurut pada tentara. Tahun '84 saya dibawa ke Manado dan tinggal dengan keluarga tentara yang mengambil saya. Mereka juga tidak suka dengan saya karena dianggap menyusahkan dan tidak jelas dari mana. Saya mengalami berbagai kekerasan dan pelecehan seksual sampai kelas 2 SMA.

Pada saat itu saya pernah mengambil surat pengangkatan saya dan saya berikan ke teman dan berharap satu saat bisa temukan keluarga saya dengan cara apapun.

Saya dipanggil lagi oleh orang tua angkat di Bekasi dan ibu [angkat] tetap tidak suka dengan saya. Saya tinggal pindah-pindah. Ternyata, Bapak tentara suka pada saya dan ingin saya jadi isteri. Saya alami kekerasan dan pelecehan dari Bapak itu, sekarang Bapak itu udah meninggal. Saya cari hidup sendiri, cari pekerjaan dan menikah dengan suami dari Jogja serta berharap bisa ketemu keluarga.

Pada tahun 2009 keluarga berusaha mencari saya dan saya difasilitasi keluarga bisa ketemu keluarga di Timor Leste. Dari keluarga saya tahu bahwa dulu ada pengangkatan resmi, tetapi mengapa saya kehilangan jejak?

Anak-anak lain banyak yang satu kapal waktu dibawa dari Laga. Mereka latihan naik kapal kecil lalu naik kapal besar

lewat tambang, saya dan anak kecil digendong tentara naik kapal, Anak-anak laki-laki dipukul dan dimasukkan dalam karung. Saya dan dua anak perempuan lain dibawa ke tempat tentara mandi dan disuruh melihat mereka mandi.

Sampai di Surabaya ada yang mau beli, Bapak Tentara bilang, "jangan kalau binatang saya kasih aja, tapi ini manusia. Jangan ini bukan keturunan biasa," lalu dibawa ke Bekasi. Sampai di Bekasi ganti nama. Ada firasat lewat mimpi bahwa Dili itu semakin dekat. Saya ingat bayangan kejadian masih kecil, saya mimpi ada rumah saya diterjang tsunami terus dalam mimpi saya lihat waktu masih kecil.

Pada tanggal 16 Juni 2009 jam 11 sepupu datang, anak saya bilang ada tamu datang mungkin saudara ibu, mirip sekali. Anak saya bilang ibu jangan menangis lagi karena sudah ketemu keluarga ibu. Mama saya sudah telpon, "lou (nona) kamu ingat bahasa Tetun?" Saya ingat lagu yang dinyanyikan waktu saya kecil.

Lalu ada saudara saya di Kedutaan Timor Leste datang juga, tapi sekarang keluarga dari orang tua angkat tidak berani datang ke rumah, karena dulu kan mereka janji untuk menjaga saya dan dia jaminan tapi ternyata tidak terjadi. Identitas masuk keluarga orang tua TNI dan nama diganti masuk nama keempat tapi tulisan saja, tidak diakui itu.



Harap Pemerintah Timor Leste mengambil tindakan agar anak-anak yang diambil paksa setidaknya bisa ketemu keluarga di Timor Leste dan berharap Timor Leste bisa kerja sama dengan Dephukham atau LSM di Indonesia untuk mencari anak seperti saya agar bisa berkumpul dengan keluarganya.



Victor da Costa, anak yang dipindah paksa dari Timor Leste, juga memberi kesaksian:

Berkaitan dengan Anak Timor yang dibawa sejak invasi dari Timor Leste pada tahun '75-79 seperti Kak Lina, sama dengan saya. Saya dibawa pada tahun '80-an. Memang posisi anak seperti ini beda-beda, kalau Kak Lina dibawa petinggi TNI tapi ada yang dibawa person-person TNI, ada yang kehidupan baik tapi ada yang tidak.

Saya ketemu anak di Semarang, dia dulunya jadi TBO (Tenaga Bantuan Operasional) semacam penunjuk jalan di hutan waktu di Timor Leste. Harapan kami ada keterusterangan antara Indonesia dan Timor Leste agar anak yang terpisah dari keluarga bisa ketemu keluarga mereka kembali, soal dia mau tinggal di mana itu pilihan tapi Indonesia wajib mempertemukan mereka dengan keluarganya di Timor Leste.

04 ORANG JAKARTA TIDAK MENGETI KAMI ORANG PAPUA

[Kesaksian Christian Padwa]

Christian Padwa, biasa dipanggil Chris lahir di Mandori tanggal 29 Desember Tahun 1942.

Karena aktivitasnya mempersiapkan Act of free choice, Bapak Chirs, ditangkap oleh Polisi pada 27 November 1967. Ia dan rekannya ditahan di beberapa tempat penahanan, mengalami penyiksaan dan menjalani kerja paksa di beberapa tempat.

Bapak Chris dibebaskan pada September 1969 setelah Pepera. Ia kemudian



kembali ke Biak dan bekerja di PLN. Pada Januari 1983, kembali ditangkap dan ditahan selama 25 hari dengan tuduhan terlibat dalam Gerakan Papua Merdeka. Ia juga kemudian dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai PLN.

Masuknya Papua ke Indonesia. Kembali lagi kepada persetujuan Indonesia-Belanda pada 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia sepakat pada tahun '69 orang Papua mengadakan penentuan nasib sendiri, mau merdeka atau gabung dengan Indonesia. Tetapi penandatanganan diganti menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua masuk Indonesia hanya kesepakatan Indonesia - Belanda melalui PBB diserahkan oleh UNTEA

Saya ditangkap pada November tahun '76 dan dibebaskan pada September '69. Saya ditahan di sel polisi di Biak selama 4 bulan lalu dikirim ke Manokwari. Manokwari adalah pusat penahanan bagi semua tahanan di Papua pada waktu itu, hampir 900 orang ditahan, dari Fak-fak, Kaimana, Biak. Saya

ditahan di Manokwari, teman lain di Biak di AURI dan AL. Di Manokwari, dalam pemeriksaan itu ada meja bulat, kuku ini ditaruh salah satu kaki meja lalu empat sampai lima orang naik di atas, itu langsung kencing di celana.

Kedua disetrum dengan kabel hitam di salah satu jari dan yang merah salah satu jari, tapi untung saya karena kerja di PLN jadi saya tahu caranya waktu ditrap saya angkat kaki jadi tidak rasa trap.

Tahun '68 sekitar 100 orang dibawa dari Manokwari ke Jawa kerja di perkebunan di Jawa barat. Menjelang Pepera, kami tinggal 102 orang, 10 orang dipindahkan dari Manokwari dan satu minggu kemudian 42 orang menyusul ke Arfai, nama saja yang kembali, tidak pernah kembali dengan utuh.

Pada November tahun '68 kami dipaksa patroli bersama dengan Raiders 700 di hutan, ada 20 orang, dengan tujuan, pas kalau lagi patroli ada kontak senjata dengan OPM kami yang ditembak. Di sana kami punya tugas cari beras dan kaleng, sambal yang didrop pesawat.

Sebelum Pepera, dari Korem dikeluarkan surat pembebasan dan juga dari pengadilan, seolah kami sudah dibebaskan padahal itu taktik supaya kalau ada yang tanya seolah saya sudah keluar.

Kami tinggal di tahanan sampai teman-teman dikirim ke Jawa sampai sel-sel sudah kosong, kami hanya tinggal 102 orang. Dari 102 dibebaskan berturut-turut sampai tiga minggu menjelang Pepera (1969) di Manokwari kami didatangi

Intelejen polisi, memisahkan 10 orang yang dianggap kelas berat (kasusnya), : Manuel Watopa, Guru Yance Mofu, Zakharias Kafiar, dan saya lupa tujuh orang lainnya. Mereka dikirim lebih dulu ke Arfai.

Pada peristiwa 1965 sampai Tahun 1970, siapa yang pergi ke Arfai hanya namanya saja yang kembali. Jadi waktu mereka dibawa pada jam sore hari jam lima atau 6 kami anggap saja itu mereka sudah hilang (mati). Setelah hampir dua minggu jelang Pepera, kami 42 orang menyusul lagi (ke Arfai). Dan saya berterima kasih kepada Tuhan sebab, ada satu hal yang luar biasa.

Ada truk polisi tapi beritahukan bahwa saya sakit usus buntu jadi saya harus pergi minta obat, saya pergi ke Dokter Tan, dia tanya,

"Kamu mau dibawa kemana?"

Saya kasih tahu, dibawa ke Arfai.

Dokter Tan kasih saya obat usus buntu. Dan setelah kami tinggal di Arfai selama 2 minggu kami hanya diberi beras saja. Sedangkan lauk pauk seperti ikan, sayur, itu kami berusaha sendiri.

Kami tinggal di Arfai waktu menjelang Pepera itu ada wartawan-wartawan asing datang. Akhirnya setelah Pepera selesai baru kami dibebaskan

Kantor RRI Manokwari kami yang bangun, kami disuruh ambil batu. Jalani hukuman dengan cara kerja kasar, kami 20 orang dibawa ikut tentara Raiders ke Manyamboi, tinggal di Manyamboi selama bulan November 1968, naik dari Warmare.

Pada 17 Februari 1983, saya ditangkap lagi kedua kali dan ditahan 25 hari di tempat kecil 2x2 meter. Secara fisik tidak mendapat siksaan tapi secara psikis dibuat mental jatuh.

Setelah dibebaskan saya melapor selama 3 tahun, dari tahun '83-86, berkat kebaikan Pak Simanjuntak yang bilang, "Chris tak usah lapor lagi," sebelumnya lapor senin dan kamis. Setelah keluar saya dapat resume dari polisi, saya dipecat PLN wilayah 10 Biak.

Hari ini saya berdiri mewakili teman saya baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, kami sedikitpun tidak menyimpan dendam terhadap yang menyiksa kami waktu itu. Kita tidak bisa membangun Indonesia dengan dendam, sebab kita harus membangun dengan kasih karena dengan bahasa kasih yang bisa dilihat orang buta dan dengan kasih didengar orang tuli.

Saya tulis surat ke PLN Biak-Jayapura dan Pusat, tapi tidak ada jawaban satu pun, saya pernah tulis surat ke Presiden Megawati tapi dia tidak jawab. Janji - janji tinggal janji pulangkan saja saya ke orang tua saya. Akhir pembicaraan saya, kenapa Papua sampai hari ini konflik terus karena orang Jakarta tidak mengerti kami orang Papua.



06

LIMA TENTERA PERKOSA SAYA BERGANTIAN

[Kesaksian Naomi Masa]

Naomi Masa, perempuan dari suku Namblong, lahir di Besum, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura pada 17 April 1954.

Serangkaian operasi militer telah menyisahkan sejumlah pengalaman menyedihkan bagi kehidupan perempuan di Papua. Seperti yang dialami Ibu Naomi Massa. Ia pernah dijadikan 'umpan' oleh tentara mencari suami yang dituduh OPM dan lari ke hutan. Ketika tidak berhasil menemukan suaminya, ia dibawa tentara ke Pos Tentara di Besum dan diperkosa oleh lima orang tentara

Suami saya ditangkap oleh Pasukan 753, 751 752 sore jam 4 pada tahun '83. Jam 7 pagi baru saya dengar berita kalau Bapa sudah diikat sudah mau diculik. Saya bilang Bapa salah apa? Bapak tidak ikut politik. Saya tinggalkan anak yang masih 3 bulan, saya mencari Bapak ke Pos.

Di pos saya tanya tentara, "Bapa ada di sini ka?"

Dia bilang, " ah Bapak tidak ada,"

Mbak Jawa yang ada di situ kasih kode dengan tangan menunjuk ke belakang. Saya ke belakang panggil nama kecil langsung dijawab Bapa.

Tangannya diikat dan mata ditutup, saya kembali tunggu, sore saya balik lagi dan melihat Bapak sedang disiksa, saya bilang bapak berdoa saja.

Tentara bilang, "iyo ko percaya jadi," saya bilang,

"ya kita umat Kristen sudah."

Bapak bilang, "kasih suara sebentar malam kalau kau dengar bunyi senjata berarti saya sudah ditembak.

” Sa pulang ke rumah dan jam 6 sa dengar bunyi senjata 4 kali, sa bilang aduh Bapak su ditembak. Tidak lama ada truk stop depan rumah, terus ada yang teriak,

”Mama Naomi keluar kau tadi bicara apa di sana?”

”Kamu semua tahu apa yang sa bicara.” Tentara suruh naik truk, cari bapak di hutan. Turun di Distrik Sawoi, jalan kaki di hutan besar batariak,

”Bapa ko di mana?”

Ditendang, dipukul, sa bilang,

”sa sakit, ada anak kecil jangan tendang.”

Kembali naik truk, turun di depan Gereja Katolik Besum. Mereka tendang kasih siksa saya. Anak kecil sa lepas di rawa besar, langsung masuk dalam hutan, ditendang saya tidak tahu apa anak sa lepas atau tidak, baru Tuhan kasih ingat saya menyanyi lagu ini, ingat dalam susah, saya keluar baru ingat ada kasih masuk anak dalam lumpur, bayi tiga bulan tapi dia tidak mati dalam lumpur. Lalu saya menyanyi lagu Firman Tuhan halus mengundang jawabanku Alleluya.

Saya ditendang dari gunung sampai ke bawah, saya lindungi anak kecil agar selamat, saya bilang Tuhan tolong.

Sampai di pos, tentara ikat kaki sebelah kanan di kanan bangku kanan dan kaki kiri di bangku kiri, tangan ikat di meja, 5 orang naik di atas badan, perkosa saya, dari jam satu malam sampai jam tiga pagi. Anak saya mereka kasih minum kopi. Jam empat mereka suruh saya pulang. Saya tidak bias berjalan dan jatuh di depan pos.

Mereka membawa saya ke rumah sakit dan mendapat banyak jahitan di kemaluan saya. Koramil menahan saya sampai sembuh dulu. Tetapi saya langsung ke Laksus mengadukan keadaan saya.

Saya pingsan sampai keesokan harinya. Sesudah sadar saya bilang sama tentara, ”Pak saya punya tubuh begini, apa suami saya bisa terima. Saya merasa malu, martabat sudah jatuh. Kalau saya pulang apa masih diterima oleh masyarakat? ”

Saya pulang ke kampung, tetapi saya tidak mau tinggal di kampung, saya tinggal di hutan selama tujuh tahun. Saya rebus air coklat dan daun pandan untuk kasih anak saya. Tinggal di hutan dari dia umur tiga bulan sampai tujuh tahun.

Pastor datang ke kebun dan bilang, supaya saya kembali. Pastor kemudian sekolahkan anak saya dan kami kembali ke kampung.

Kelima orang tentara yang memperkosa saya adalah orang Ambon dari 753 Manokwari, YM suku Biak Papua dari 753 Manokwari dan 3 orang lainnya : 1 Papua, 2 orang rambut lurus (pendatang).

Orang Ambon ini satu gereja dengan saya, dia bilang,

”sa memang sudah nekat lamar ko.”

Waktu dia siksa saya,

saya bilang, ”sa ibu rumah tangga bukan nona.”

Satu lagi bilang,

”cara Mama terima kami di rumah bagus, mama di gereja tampil di depan.”

Suami saya Alex, dia Ondoafi. Saya menyesal martabat rapuh, teman-teman sekarang tidak mau bergaul. Saya sekarang di kebun dan rumah.

Saya punya suami sudah lepas, saya seperti janda, saya sekarang cari makan sendiri. Anak perempuan saya yang saya sembunyikan dalam lumpur mati, jantung hangus. Dokter bertanya, "dia kenapa?"

Saya bilang tentara kasih dia kopi. Ia meninggal tahun 2010, dan saya kubur di pinggir jalan biar tentara lihat. Saya berdoa Tuhan, saya harus bersaksi sekarang dan sekarang terjawab.

“Harapan ke depan, ada usaha supaya martabat saya kembali. Suami sudah kawin, tidak mau tubuh saya lagi.”

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Operasi Militer
di Timor Leste

Oleh Pat Walsh, (Peneliti CAVR)

Saya bukan korban dan bukan orang Timor Leste tapi saya tanggung jawab besar atas nama ribuan orang Timor Leste yang kelaparan dan sudah mati. Saya bekerja dengan CAVR di Dili dan lebih dari 40 tahun sejak kunjungan tahun 1968 saya mempromosi hubungan Indoensia Australia melalui *Inside Indonesia*.

Timor-Leste adalah bekas koloni Portugis yang diserbu oleh ABRI /TNI pada tahun 1975 dan diduduki selama 24 tahun sampai tahun 1999. Ribuan korban mengatakan kepada Komisi Kebenaran CAVR (2001-2005) tentang pengalaman mereka selama perang ini. CAVR menyimpulkan bahwa aktivitas militer Indonesia meninggalkan jejak kaki kemanusiaan (humanitarian footprint) yang sangat besar yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.



CAVR menemukan bahwa DOM tidak baik hati seperti Soeharto telah diklaim. CAVR menyimpulkan bahwa lebih dari 24 tahun, DOM terlibat: minimal 100.000 kematian warga sipil, penahanan, penyiksaan dan kekerasan seksual, penindasan kebebasan demokratis, pelanggaran hak-hak sosial-budaya dan penolakan penentuan nasib sendiri.

Tuna Wisma

“Hampir setiap orang Timor yang hidup melalui tahun-tahun ini menderita beberapa bentuk pemindahan dan banyak yang beberapa kali mengungsi”.

Laporan Chega! menyebutkan pemindahan skala besar terjadi khususnya sebelum invasi (termasuk ke negara-negara lain), pada saat invasi, selama tahun-tahun awal perang, sebelum dan sesudah jajak pendapat pada bulan Agustus 1999.

Setiap kali, pemindahan terkait dengan konflik dan sering dipaksa. Selama 24 tahun konflik dari awal hingga 1999 pengalaman itu sama dengan tuna wisma (homeless) yang dampaknya buruk pada kaum tua, muda dan akan kecil yang rentan pada umumnya. Menurut

Chega, laporan CAVR hampir setiap orang Timor yang hidup pada tahun ini menderita beberapa pelanggaran dan beberapa kali mengungsi

Pemindahan Paksa

Kecuali pemerintah membuat ketentuan alternatif, pemindahan paksa merupakan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia, yaitu kebebasan bergerak, perumahan memadai, makanan /air, bebas dari kelaparan, akses ke sumber makanan, layanan medis.

Hasil paling buruk dari pemindahan paksa adalah kelaparan besar di Timor Leste pada tahun '78-'80, kira-kira tiga tahun pada tahun-tahun itu. ABRI karena belum berhasil mengatasi perlawanan di Timor Leste, lalu menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Tujuan ialah kosongkan air dari ikan dan mendapat kontrol atas rakyat agar berada di bawah ABRI. Metode yang diterapkan: intensifkan tekanan militer, paksakan rakyat menyerah lewat kelaparan, abaikan seruan untuk bantuan, mambatasi rakyat.

Banyak penderitaan sebuah mimpi malam yang menakutkan dan konsekuensi bagi manusia: kelaparan terburuk dalam sejarah Timor-Leste, minimal 85.000 kematian karena kelaparan dan penyakit, penderitaan intensif/kesedihan karena kerugian keluarga dalam keadaan yang mengerikan.

Dampak berat pada anak-anak, orang sakit, kaum tua, penghancuran sumber makanan, gangguan ekonomi subsisten, tanah dan sistem sosial, pukulan besar bagi perjuangan kemerdekaan. Bahkan

lebih buruk dari kondisi dibawah penjajahan Portugal dan penjajahan Jepang. Pada saat itu LSM Internasional termasuk Palang Merah Indonesia dan organisasi bantuan luar negeri, saya di Australia dan gereja di Timor Leste dan Tim di Barat dan Jakarta, tahu penderitaan rakyat dan mendesak Pemerintah Indonesia selama 3 tahun untuk membiarkan bantuan luar negeri di Timor Leste, tetapi ABRI menolak bantuan sampai tujuan militer tercapai. Konsekuensi sudah jelas banyak orang tidak menerima bantuan.

Pembuangan ke Pulau Atauro

Pada 80-an ratusan anggota keluarga yang diduga terkait resistensi dipindahkan ke Pulau Atauro yang dahulu dipakai Portugal untuk tempat penahanan, tempat kecil dan miskin. Laporan Chega! menyebutkan: "Dimana-mana orang mati. Mereka mati karena kelaparan, pengeboman, dan sakit. Ada mayat-mayat yang masih memegang ubi, mangga, dan makanan, meskipun bagian-bagian tubuh mereka membusuk dan ulat-ulat keluar darinya.

Tetapi kami harus mengambil dan membersihkan (makanan) dengan kain atau apapun yang ada, sehingga kami dapat memakannya, karena kami juga hanya menunggu giliran untuk mati. Tidak ada air bersih, hanya kubangan air yang di dalamnya ada bangkai kerbau dan mayat manusia.

Kami harus menyaring (air) dengan kain atau sarung supaya kami bisa meminumnya." Halic, Mola River, dekat Zumalai, achir 1977.

Chega! Vol 2, 7.3 # 137

Temuan CAVR:

1. DOM di Timor-Leste bersifat ilegal dan ditandai dengan represi dan kekerasan
2. ABRI secara paksa memindahkan masyarakat sepanjang perang menyebabkan gangguan besar dan kematian
3. Kelaparan adalah salah satu dari banyak taktik sengaja digunakan selama DOM sebagai perang senjata
4. Penyebab utama kematian selama DOM itu adalah kelaparan, tidak menembak
5. Resistansi bertanggung jawab oleh menolak untuk membiarkan rakyat menyerah lebih cepat
6. ABRI dan pejabat negara Indonesia bersalah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

dan setuju dengan temuan CAVR dan rekomendasi CAVR, juga saya melengkapi dan bekerja sama dan itu sangat baik.

Ada dua pendapat dari CAVR dan KKP itu tidak baik, perbedaan sangat penting karena KKP hanya lihat dari tahun 1999 saja sementara CAVR dari tahun 1974, yang penting apa yang terjadi sejak awal, mudah-mudahan rekomendasi kedua komisi itu bisa diadopsi di sini dan di Timor Leste dan diadopsi di luar wilayah seperti di Australia, Amerika dan bahkan di PBB.

Pembelajaran yang dipetik:

1. Rakyat biasa menderita mengerikan ketika kekuasaan digunakan dengan impunitas
2. Rule of law demokratis jauh lebih baik untuk common good daripada law of the ruler dan hukum senjata
3. Komunitas internasional gagalkan rakyat Timor dengan mengabaikan rule of law
4. Dengan bantuan para korban, sebuah komisi kebenaran berkontribusi dengan menyoroti sudut-sudut gelap

Ada banyak LSM di Indonesia dan Timor Leste melihat kalau hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP) kontradiktif dengan temuan CAVR.

Saya menulis pada saat laporan KKP dan diterima laporan itu sangat bagus

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Pendekatan Militerisme di Indonesia
dan Dampaknya bagi Warga Sipil

Oleh Stanley Adiprasetyo,
(Pegiat HAM dan Anggota Dewan
Pers Indonesia)

*K*alau dulu konflik di Jaman Soekarno, memang ada konflik di antara aliran ya tapi relatif tokoh-tokoh bangsa waktu itu masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, yang muncul kemudian konflik antara kelompok-kelompok yang mencoba keluar dari Indonesia karena kecewa, misalnya PRRI/Permesta dan seterusnya, kemudian dihadapi Jakarta dengan pengerahan tentara.

Kita bisa melihat misalnya DI/TII, PRRI dan seterusnya. Nah itulah yang terjadi meskipun ya konflik horizontal memang terjadi tapi tidak banyak sebetulnya. Karena konfliknya lebih ke ideologis.

Nah konflik itu menjadi nyata ketika Soekarno memang ingin melawan kolonialisme dan imperialisme yang mengancam Indonesia.

Salah satunya adalah Trikora di Papua, di mana kemudian Indonesia *meng-klaim*



bahwa Papua Barat yang disebut sebagai Irian Jaya ketika itu adalah bagian dari wilayah Indonesia

Diikuti dengan seruan Trikora oleh Soekarno yaitu merebut kembali, mengembalikan Irian Jaya sebagai bagian dari Indonesia. Ketika itu mulai dilakukan operasi-operasi intelijen dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga muncul konflik yang sifatnya *horizontal*.

Yang lain adalah Dwikora, di mana Soekarno juga melalui pidato mencoba menggagalkan semua negara boneka bentukan Inggris yang saat ini menjadi tiga negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei.

Nah ini dulu dicoba dilawan oleh Soekarno dengan cara mengirim sukarelawan - sukarelawan yang kemudian didukung oleh KKO [Korps Komando Operasi] yang sekarang menjadi marinir. Sebuah pasukan elit nomor satu di Indonesia.

Nah, pasukan - pasukan ini memang cuma dibekali *one-way ticket*, dia harus masuk ke daerah-daerah yang nanti

akan menjadi operasi-operasi tempur, mereka menyamar dengan menggunakan nama-nama setempat.

Pada tahun '63an itu Soekarno semacam menggosok - gosok melalui operasi intelijen supaya muncul PGRS Paraku, Partai Rakyat Kalimantan Utara.

Mereka kemudian didukung sebenarnya oleh sukarelawan dari mana-mana, terutama orang Dayak dan seterusnya, dan orang-orang keturunan Tionghoa penting disebutkan di sini karena ada 2 pleton anak-anak dari Nanyang.

Mahasiswa-mahasiswa dari Nanyang yang sekarang menjadi Nanyang University di Singapura itu. Mereka ini tugasnya adalah pertama mengajak dan mempengaruhi masyarakat di sana untuk menyatakan mereka lebih baik bergabung dengan Indonesia, atau mendirikan negara sendiri daripada menjadi bagian dari negara persemakmuran di bawah Inggris.

Demikian juga yang di Timor-Portugis, orang-orang dari Macau, OeTjoe Tat, saya mendapatkan keterangan ini ketika saya mewawancarai beliau masih hidup. Beliau ditugaskan ke Macau dan selanjutnya untuk menemui orang-orang keturunan Tionghoa di Timor-Portugis, karena mereka punya keluarga besar di Macau.

Dan mencoba membentuk semacam kelompok-kelompok masyarakat yang menunggang bergabung dengan Indonesia.

Ketika pergantian ke Soeharto tentunya dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang bersimpati kepada

komunis. Kelompok ini kemudian dijepit.

Kemudian yang GPRS Paraku kemudian dijepit oleh kerjasama pasukan yang dipimpin oleh RPKAD bersama dengan tentara kerajaan Diraja Malaysia dan SAS Inggris. Mereka dijepit dituduh komunis. Seringkali dalam operasi militer itu mungkin Tentara Indonesia membawa lambang Palu Arit, gambar Mao Che Tung dan kalau ada korban diletakkan di jenazah itu lalu dikatakan bahwa ini terbukti kelompok komunis karena ada simbol-simbol.

Kita bisa melihat bahwa ada operasi penumpasan PGRS Paraku akhirnya tamat pada tahun 1973. Jadi tahun 1966 dilakukan operasi bersama untuk menjepit kelompok-kelompok yang sebetulnya pendukung Soekarno. Baik orang-orang yang ada di Serawak, tentara - tentara kita maupun sukarelawan.

Tentara itu adalah KKO. KKO yang paling banyak mati. Mereka berjuang di hutan dengan one-way ticket, tidak punya kesempatan untuk pulang.

Hal yang lain adalah kondisi ini memicu nantinya konflik yang sifatnya horizontal. Waktu itu pedagang-pedagang perantara orang-orang keturunan Tionghoa, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat yang ada di pedalaman yang budidaya rotan, penghasil tanaman dan buah dan kemudian dibawa ke kota.

Karena terjadi kekosongan orang-orang Tionghoa, dilakukan satu operasi yang sebetulnya ini adalah operasi intelijen.

Jadi RPKAD menggunakan cara untuk memecah persatuan diantara orang-orang keturunan Tionghoa yang memang diduga menjadi pendukungnya PGRS Paraku ini dengan kelompoknya orang-orang Dayak. Caranya adalah dikerjain aja dua kelompok itu, difitnah.

Pimpinan Tumenggung Dayak dibunuh, kepalanya dipenggal kemudian diletakkan di mulut kampung, tentara mengatakan pelakunya PGRS Paraku, pimpinan Tan. Orang Dayak kumpul semua melakukan upacara Mangkok Merah, mereka menandai bahwa seluruh orang Tionghoa, seluruh PGRS Paraku itu harus dibunuh.

Karena itulah terjadi arus pengungsian besar-besaran dari orang Tionghoa di pedalaman menuju ke kota Pontianak, Singkawang dan kota-kota pantai. Dari pedalaman mereka terusir, yang didatangkan adalah orang-orang Madura yang secara etnik dan adat juga berbeda. Kondisi ini menimbulkan konflik di kemudian hari, ketika Jaman Orde Baru. Konflik yang panjang sampai muncul Peristiwa Sampit, Peristiwa Sanggau dan seterusnya.

Proses menjelang Trikora, sejumlah sukarelawan juga diterjunkan ke Papua. Ada orang-orang dari Ambon, dari pulau-pulau terdekat sana yang menyusup dan juga operasi intelijen, dimana tentara berpakaian sipil menyusup dan mempengaruhi penduduk setempat.

Banyak perlawanan terutama dari masyarakat setempat. Apalagi kemudian ada kelompok Papua yang memproklamkan diri di Manokwari. Kelompok ini kemudian

dikejar oleh tentara dan menjadi target. Mereka punya bendera sendiri, mereka yang mengumumkan kemerdekaan ini, menjadi target dari operasi-operasi yang dikirim dari Jakarta untuk dihilangkan atau barangkali dibunuh.

Karena itulah kemudian referendum Papua, Indonesia menang. Tentunya melalui manipulasi karena orang-orang yang punya potensi sebagai Ondoafi [kepala suku] yang suaranya bisa mempengaruhi ratusan massa itu sudah tidak ada. Nah yang lain [ondoafi-ondoafi] yang masih hidup memang tidak punya kesempatan untuk ikut memilih karena mereka berada di pedalaman dan kemudian PEPERA itu memenangkan Indonesia.

Jadi menurut Saya, apa yang pernah dilakukan dengan model operasi militer intelijen penyusupan dan seterusnya di Jaman Orde Lama kemudian menjadi semacam contoh yang kemudian digunakan oleh Soeharto di Jaman Orde Baru sebagai metode yang efektif.

Kita mengenal di Indonesia ada 3 model operasi militer, yaitu a) operasi yang dilakukan oleh tentara untuk memenangkan sesuatu, itu adalah operasi intelejen; b) operasi tempur, dan c) operasi teritorial. Di dalam operasi intelijen, dikenal macam-macam, ada operasi yang sangat tertutup.

Bila perlu operasi yang sifatnya membenturkan 2 kelompok massa. Atau barangkali adalah operasi yang seolah-oleh dilakukan oleh lawan yang anti kepada pemerintah, operasi penghalangan. Itu yang disebut operasi hitam itu. Kita tahu dulu pernah

dikejar oleh tentara dan menjadi target. Mereka punya bendera sendiri, mereka yang mengumumkan kemerdekaan ini, menjadi target dari operasi-operasi yang dikirim dari Jakarta untuk dihilangkan atau barangkali dibunuh.

Karena itulah kemudian referendum Papua, Indonesia menang. Tentunya melalui manipulasi karena orang-orang yang punya potensi sebagai Ondoafi [kepala suku] yang suaranya bisa mempengaruhi ratusan massa itu sudah tidak ada. Nah yang lain [ondoafi-ondoafi] yang masih hidup memang tidak punya kesempatan untuk ikut memilih karena mereka berada di pedalaman dan kemudian PEPERA itu memenangkan Indonesia.

Jadi menurut Saya, apa yang pernah dilakukan dengan model operasi militer intelijen penyusupan dan seterusnya di Jaman Orde Lama kemudian menjadi semacam contoh yang kemudian digunakan oleh Soeharto di Jaman Orde Baru sebagai metode yang efektif.

Kita mengenal di Indonesia ada 3 model operasi militer, yaitu a) operasi yang dilakukan oleh tentara untuk memenangkan sesuatu, itu adalah operasi intelejen; b) operasi tempur, dan c) operasi teritorial. Di dalam operasi intelijen, dikenal macam-macam, ada operasi yang sangat tertutup.

Bila perlu operasi yang sifatnya membenturkan 2 kelompok massa. Atau barangkali adalah operasi yang seolah-oleh dilakukan oleh lawan yang anti kepada pemerintah, operasi penghalangan. Itu yang disebut operasi hitam itu. Kita tahu dulu pernah

terjadi peristiwa lapangan Banteng. Itu pelakunya adalah orang-orang pemerintah sendiri, agen-agen pemerintah.

Tapi yang kemudian dipersalahkan oleh masyarakat dan Partai PPP. Sehingga pada Pemilu 1982 untuk pertama kalinya GOLKAR menang di Jakarta. Itu operasi intelejen betul. Operasi penghalangan yang dilakukan untuk meredam peristiwa Malari, Hariman cs.

Aksi Mahasiswa ditunggangi oleh demo yang lain dan melakukan pembakaran. Sehingga dengan alasan itulah, mahasiswa seluruhnya ditangkap termasuk tokoh oposisi. Itu adalah operasi yang betul-betul canggih dan hanya ada di dalam struktur OPSUS [operasi khusus] dan Ali Murtopo yang bertanggung jawab langsung berada di bawah Presiden.

Kalau kita lihat kombinasi yang sampai sekarang terjadi, baik di Aceh, kemudian terjadi di beberapa tempat yang menjadi pokok bahasan itu adalah gabungan dari operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi militer. Operasi militer barangkali ditahun 80-an semenjak kita mendapat sorotan dunia internasional, kemudian para tapol dibebaskan, mulai berkurang, sehingga yang dominan adalah operasi intelejen dan operasi teritorial.

Kita bisa melihat Peristiwa Penembakan Misterius [Petrus], itu gabungan antara operasi militer dengan operasi intelejen serta operasi teritorial. Keterangan seorang mantan agen Ali Murtopo, menenggarai bahwa kejahatan-kejahatan sebelum Petrus jangan - jangan dilakukan oleh tim yang melakukan operasi intelejen itu.

Jadi ada perampokan yang kejam luar biasa, penghuninya diperkosa. Jadi untuk menimbulkan efek ketakutan masyarakat, maka bukan tidak mungkin agen intelijen ini pelakunya. Setelah masyarakat muak lalu didorong OPK [Operasi Pemberantasan Kejahatan]. Militer mendapat suport dari masyarakat.

Operasi intelijen terjadi di banyak tempat dan kejadian. Apakah ini di Aceh, Papua, kalau lihat secara kasat mata lebih operasi intelijen yang kemudian diikuti dengan tindakan militer. Militer mendapatkan legitimasi akibat operasi intelijen itu.

Orang yang menuntut tanah di Lampung, peristiwa Gunung Bala atau Talangsari, kemudian diwacanakan sebagai kelompok Islam Fundamentalis, kelompok Islam Fisabilillah yang membahayakan bangsa, maka butuh dibasmi. Nah sepenuhnya itu adalah operasi penghalangan.

Keadilan itu ada dua, saling terkait, pertama, keadilan dalam bentuk pemulihan nama baik, mencakup: rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi yang seharusnya itu adalah hak korban. Kedua, penyelesaian melalui pengungkapan kebenaran.

Pengungkapan kebenaran dan barangkali reparasi kepada korban itu adalah bagian yang inheren dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu yang harus dilakukan oleh negara. Dan mulainya adalah dengan cara mengungkapkan kebenaran, karena kalau cuma reparasi korban, orang akan bertanya-tanya, apa kok saya menerima ini, apa yang terjadi sesungguhnya.

“Itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 65 sebagai ujung pangkal dari kekerasan itu, meskipun barangkali kekerasan yang terkait dengan Pepera mungkin lebih awal.”

“Tapi kekerasan secara masif baru muncul ketika dalam skala yang luar biasa yang memiliki pola yang sama dibiarkan oleh negara ini, dan tidak ada orang yang berani mempersoalkan.”

“KKPK mengajak masyarakat untuk mempertanyakan lagi semua bentuk kekerasan yang pernah terjadi di negeri ini.”



REFLEKSI MAJELIS WARGA Operasi Militer

Kami telah mendengarkan berbagai kesaksian yang telah dituturkan oleh para penyintas kami dapat turut merasakan kepedihan yang dirasakan para penyintas akibat tindak kekerasan yang dialami di masa lalu. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para penyintas untuk hadir dan menuturkan pengalamannya

Sesi pada hari ini bertemakan dengar kesaksian Kekerasan dalam Operasi Militer. Dengan alasan keamanan dan kedaulatan negara, operasi militer seakan memiliki dalih pembenaran untuk

melakukan tindakan sewenang-wenang. Dalih sesungguhnya operasi militer dimana pun dilakukan tidak pernah lepas dari ketentuan hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, sebaliknya apabila dalam konteks operasi militer terjadi tindakan kekerasan maka sangat patut diduga telah terjadi pelanggaran Hukum dan HAM.

Namun di antara tuturan kepedihan, kami juga menemukan mutiara yang lebih berarti dari kepedihan yang dirasakan mutiara yang kami temukan sangat relevan dengan pencahangan tahun kebenaran oleh KKPCK

Mutiara yang kami temukan diantara tuturan kepedihan adalah jiwa besar seperti yang dituturkan oleh seorang penyintas yang menyatakan bahwa ia tidak dendam dan berharap agar kita tidak menjadi generasi pendendam. Kita catat juga perlunya memaafkan tetapi tidak untuk melupakan.

Tantangan besar yang kita hadapi bersama dan juga menyatakan harapan para penyintas adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan berdasarkan kebenaran yang kita temukan agar pengalaman pahit yang dirasakan para penyintas tidak terulang pada generasi anak dan cucu kita

Tantangan itu membutuhkan tinjauan lebih dalam dan lebih luas dari sekedar kejadian tindak kekerasan itu sendiri dan tidak bisa selesai dalam sebuah potret karena banyak pihak dan institusi yang tidak dihadirkan dalam dengar kesaksian KKPK tapi turut bertanggung jawab atas terjadinya tindak kekerasan

Tantangan ini yang perlu dijawab dan dicakup dalam mekanisme kerja KKPK dalam mewujudkan cita-cita besar pencanangan 2013 sebagai tahun kebenaran.

Peran dan keberanian para penyintas untuk hadir memberikan kesaksian merupakan sumbangan besar untuk bicara kekerasan memutus lingkaran kekerasan dalam sebuah kerangka yang lebih komprehensif dan diletakkan dalam satu bingkai dengan elemen reparasi terhadap kerugian yang diderita akibat kekerasan yang terjadi.

Pencapaian keadilan serta reformasi kelembagaan sebagai jaminan peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi hadirin semua semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niat baik kita semua.

Secara khususnya kami Majelis Warga mencatat beberapa pola:

1. Adanya modus operasi militer untuk memperoleh informasi dari berbagai daerah konflik/ DOM adalah sama: menangkap, melakukan penyiksaan, ditahan tanpa pengadilan ataupun mekanisme pembelaan dan bahkan, untuk korban perempuan, mengalami kekerasan seksual. Ini mengakibatkan trauma berkepanjangan.
2. Adanya kekuasaan tanpa batas, yang dipegang oleh militer, yang memaksakan takluk, tunduk tanpa ada perlindungan apapun. Salah-satu penaklukkan dilakukan dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Walaupun kita telah mempunyai capaian reformasi sektor keamanan, ada kasus-kasus yang terulang dari 1978-2004.
3. Pencabutan identitas (budaya, agama, nama), pengambilan anak secara paksa. Negara (dua negara) harus memfasilitasi pertemuan kembali anak-anak ini dengan keluarganya. Pemulihan hak-hak anak-anak ini.
4. Stigma terhadap korban perempuan, korban kekerasan seksual oleh militer yang kemudian ditinggalkan oleh suaminya, dan dikucilkan oleh masyarakat. Perempuan dan anak dijadikan target kekerasan menggantikan suami / saudara laki-laki yang dicari dalam operasi militer. Dampak stigma sosial dialami sangat lama, bahkan bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Pencarian orang hilang, penjelasan / informasi tentang hilang orang-orang yang dicintai. Ini adalah rekomendasi

KKP dan CAVR yang belum dijalankan sampai dengan sekarang. Kedua laporan ini patut menjadi bahan belajar buat generasi kedepan.

Suara para korban mengiris hati nurani kita; kekuatan para penyintas menjadi inspirasi bagi kita. Kebenaran mereka menjadi tempat kita berlabuh untuk menuju sebuah bangsa dan negara yang lebih baik, yang dilandasi hak asasi manusia, kebebasan dan keadilan. Pemenuhan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan.



Kami Para Majelis Warga,
Jakarta 26 November 2013,

1. Agus Wijoyo
2. Zumrotin
3. Fien Jarangga
4. Samsidar
5. Nia Sjarifudin
6. Galuh Wandita



A large crowd of people is gathered for a festival. In the foreground, two men in traditional Indonesian attire (Korpri) are walking. The man on the left wears a light-colored jacket and a traditional headpiece. The man on the right wears a dark jacket and a white cap. Behind them, a large crowd of people is visible, many wearing blue and red clothing. A large, colorful dragon dance is in progress, with a dragon head in the foreground. The background shows a dense crowd of people, some holding umbrellas, suggesting an outdoor setting. The overall atmosphere is festive and crowded.

C

• **IDEOLOGI DAN
KEBEBASAN
BERAGAMA**



[Kesaksian Dewi Kanti]

**01 ADA YANG SALAH
DI NEGERI INI**

Agama Djawa Sunda (ADS) atau juga dikenal sebagai Sunda Wiwitan, yang didirikan pada tahun 1848 oleh Pangeran Madrais Alibasa Widjaja Ningrat, yang dipercaya sebagai keturunan Sultan Gerbang Pangeran Alibasa I, saat ini telah berkembang ke pelosok Jawa Barat, seperti Kuningan, Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Padalarang, Bogor, Purwakarta dan DKI Jakarta.

Jumlah penganut ADS dipercaya pernah mencapai lebih dari 100.000 orang. Saya merupakan generasi ketiga pelestari spiritual yang disebut Agama Djawa Sunda. Latar belakang agama Djawa Sunda diawali keadaan pada jaman penjajahan, dimana ketertindasan sebagai bagsa

memunculkan pemahaman bahwa ada yang salah di bangsa ini. Kenapa muncul penjajahan atas nama bangsa bahkan intimidasi atas nama agama saat itu. Sehingga terjadi penggalan spiritual yang digali oleh seorang tokoh yang bernama Madrais pada 1890-an.

Beliau merasa perlu adanya gerakan spritual untuk melawan keterpurukan bangsa, menumbuhkan kesadaran bangsa yang mandiri dan merdeka. Ini jadi fondasi melakukan perlawanan budaya terhadap penjajah.

Perlawanan budaya ini diperhitungkan Belanda dan peluang menghancurkan gerakan ini adalah dengan diadu domba dengan kelompok lain dan dinyatakan sebagai aliran sesat, penyembah api dan tidak Bertuhan, sehingga kelompok pesantren yang hanya mendengar informasi secara sepihak akhirnya membuat stigma.

Ada perubahan politik pada tahun 1845 Belanda sendiri secara hukum adat mengakui ada pelayanan sipil dengan pernikahan Adat Sunda, selanjutnya pada penjajahan Jepang posisi komunitas kami justru semakin tertekan.

Pada Jaman Jepang dibentuk kantor urusan agama sehingga memisahkan layanan publik pada kantor itu. Ketika masa DI/TII masuk, kami mengalami peristiwa dimana gerombolan itu masuk rumah adat kami dan berusaha membakar, namun puji rahayu rumah adat kami terselamatkan.

Setelah Periode 50an, masa Republik Indonesia Serikat, saat itu mulai muncul arah angin baru dimana oraganisasi kebathinan ada ruang bergabung dalam ruang Organisasi Kebatinan Indonesia dan kami jadi anggota.

Namun dalam perjalanan selanjutnya legalitas sebagai orgnisasi menjadi tantangan ketika Bakorpakem dibentuk tahun '64 dengan SK Bakorpakem membubarkan ADS. Perkawinan dikriminalisasi bahkan puluhan pasang setelah menikah dipenjara termasuk Ayah saya.

Pada tahun '64 beliau ditangkap dan juga diarak keliling jalan raya di Kuningan, dibiarkan untuk dicaci maki dan dilempari batu dan ditodongkan senjata dengan pengawal senjata.

Tahun '65 ada UU PNPS yang hanya mengakui agama resmi dan itu semakin memojokkan kami. Kakek saya melakukan perenungan dan mendapat pewahyuan, kami harus melindungi di bawah cemara putih, yang waktu kakek memahami berlindung di bawah cemara putih adalah berlindung di Kristen dan Katolik. Kakek memiliki kesepakatan dengan pimpinan Gereja Katolik Kuningan, bahwa kami tetap menjalani tradisi kepercayaan.

Tahun 1976, karena sejarah rumah adat kami dinaikan statusnya sebagai cagar budaya dan Pemerintah Pusat mau membantu memperbaiki, Pihak gereja Katolik memutuskan tidak menempati rumah ibadah kami sebagai gereja. Pada peristiwa peringatan tahun baru Syura Ayah meminta liturgi gereja supaya Pastor menggunakan atribut Kesundaan,

awalnya disepakati, namun pada hari H pastor tidak menggunakan. Ayah saya keluar dari gereja, tanpa diperintah warga lain mengikuti. Disitulah gejolak ada ketidakcocokan diantara kami. Kami menyadari agama apapun intinya sama, tapi kami punya prinsip, kami Katolik tapi Katolik yang nyunda, tapi tidak disepakati

Pada tahun '82 setelah keluar dari Katolik, Ayah kami mendirikan Paguyuban Adat, untuk melestarikan tradisi spritual. Tetapi Kejaksaan Jawa Barat kembali mengeluarkan SK 44 tentang larangan perkawinan liar, dasarnya mendapat masukan dari masyarakat.

Dengan pelarangan dan pembedaan, bahwa kami aliran sesat oleh Muslim, kami dihina oleh misionaris di Jawa Barat. Tantangan luar biasa itu tetap kami hadapi. Anak-anak kami mengalami kekerasan psikis setelah keluar SK Kejati tahun 80 pada semua upacara bendera anak-anak jangan masuk paseban karena itu aliran sesat.

Setelah 17 tahun pelarangan Seren Taun, ada perubahan mata pencaharian di komuitas kami.

Ketika kami menanam varietas lokal untuk persembahan dalam acara tersebut, banyak anggota komunitas yang patah arang, untuk apa lagi tanam varietas lokal, toh upacara kami dibungkam.

Momentum reformasi, kami menampilkan jati diri kami kebetulan kakak saya melakukan upacara pernikahan adat. Seren taun dihidupkan lagi. Dari sisi administratif, diskriminasi KTP, perkawinan dianggap masih dianggap liar, menghasilkan akte kelahiran tertulis lahir seorang perempuan dan secara hukum dihilangkan dari silsilah ayah kandung.

Sebagai generasi muda saya mau menunjukkan bahwa saya berharap agar ada penghargaan terhadap para leluhur nusantara kita lahir sebagai bangsa bukan atas keinginan kita. Manusia lahir dari ibu yang mewariskan peradaban baik spirtual maupun kebudayaan. Saya ingin menjadi saksi meski dianggap berbeda dan aneh.



Beberapa upaya yang sudah kami lakukan: membuat langkah berjejaring menyuarakan hak konstitusi. Saya harap kesadaran berbangsa ini terus dilanjutkan oleh adik-adik yang terlanjur mendapat pengajaran budaya yang salah.

Harapan saya: adik-adik saatnya bangkit sebagai generasi muda, melaksanakan harapan tokoh agama untuk memperjuangkan kerukunan antar umat beragama, tidak hanya terbatas pada agama formal yang diakui negara tapi juga agama leluhur warisan nusantara

Bagi kami UU Adminduk bukan sebuah penyelesaian, tetapi negara memecah belah warga dengan politik belah bambu satu diinjak satu diangkat.

Dalam UU Adminduk masih ada redaksi agama belum diakui, ada syarat pencatatan perkawinan penghayat harus ada legitimasi organisasi. Sementara dalam kepercayaan, perkawinan disahkan oleh orang tua. Mereka tidak paham keanekaragaman budaya nusantara, ini politik penyeragaman dan pengingkaran konstitusi.

02 DITUDUH MENARI GENJER-GENJER DI LUBANG BUAYA

[Kesaksian Mudjiyati]

Ibu Mudjiyati, yang ketika peristiwa 1965 masih berusia 17 tahun, ditangkap oleh aparat militer yang berasal dari Puterpra Petamburan ketika berada di rumah. Ia ditangkap untuk dimintai keterangan mengenai aktivitas bapaknya yang lebih dahulu ditangkap. Sebelum dibawa ke Kodim Air Mancur, ia sempat ditahan selama satu malam di kantor Puterpra tersebut. Selama pemeriksaan dilaksanakan di Kodim Air Mancur, ia mengalami tindakan penyiksaan dari aparat militer yang memeriksanya. Setelah dari Kodim Air Mancur, ia kemudian dipindahkan ke Penjara Bukit Duri.

Pada April 1971, ia dipindahkan ke Plantungan dan menjalani kerja paksa, Mujiyati dibebaskan pada 7 Desember 1979. Walaupun sudah dibebaskan dari



Plantungan, ia masih menjalani wajib lapor dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibat stigmatisasi yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru, ia dan keluarganya sempat mendapat kesulitan untuk mengurus surat pindah tempat tinggal.

Pada tahun '65 saya masih remaja, ikut anggota Ormas Pemuda Rakyat. Saya tertarik ikut Ormas Pemuda Rakyat karena saya belajar kesenian, belajar paduan suara, kami menyanyikan lagu-lagu nasional.

Pada peringatan 17 Agustus 1965 kami disuruh tampil di perayaan RT kami di Slipi. Tak lama kemudian terjadi peristiwa September '65, saya nggak ngerti duduk perkaranya. Kita hanya mendengar dari radio.

Waktu mendengarkan radio saya bingung. Ada apa? Berita di koran macam-macam, saya semakin bingung. Bulan Oktober rumah saya didatangi tentara yang mengambil Bapak saya. Bapak saya pegawai kecil di Front Nasional, Jalan Merdeka No. 13. Rumah kami digeledah, tak tahu apa yang dicari. Waktu itu ditemukan 1 stel pakaian hijau. Semua pegawai punya pakaian sukarelawan tapi itu juga resmi. Bapak saya dibawa. Saya anak terbesar dan adik kecil-kecil.

Tak lama kemudian rumah saya didatangi lagi, saya dimintai keterangan Puterpra (sekarang koramil) Petamburan, lalu dibawa ke Koramil Petamburan. Di situ sudah ada Bapak saya dan tahanan lain. Karena saya tidak mengatakan apa-apa, mulut saya dibekap dan kepala dibenturkan ke tembok. Karena saya tidak mengerti ya saya tidak mengiyakan apa yang dituduhkan kepada Bapak.

Kami anak perempuan di Jakarta waktu itu dituduh ikut menari genjer-genjer di Lobang Buaya, padahal saya tidak tahu apa itu genjer-genjer dan di mana letak Lobang Buaya. Di Kodim Air Mancur, Budi Kemuliaan saya ditahan selama dua bulan, kemudian dipindahkan ke Penjara Bukit Duri. Kami satu kamar mestinya untuk orang satu, diisi bertiga.

Satu tidur di tempat tidur lalu yang lebih muda tidur di bawah. Ibu-ibu yang ditahan banyak yang punya anak dan bayi atau anak yang bersekolah sekolah ikut ibunya karena ibu-bapak mereka ditahan. Ada anak kelas 1 mengalami disel, Ibu hamil juga ada.

Kebetulan Ibu Salawati Daud, seorang perawat yang ditahan menolong ibu melahirkan dengan alat apa adanya. Ada 150 orang di Penjara Bukit Duri.

Dari hasil pemeriksaan saya masuk golongan C, mestinya saya dibebaskan tahun '67, atau tahun '70. Saya berharap bisa bebas tahun '70 ternyata tidak juga. Lalu saya dipindahkan ke Penjara Plantungan, Jawa Tengah. Di sana berkumpul perempuan dari Jawa, sekitar 500 orang. Di Plantungan ada unit-unit kerja: unit kerja pertanian, pejahitan, kerajinan tangan, dan pembatikan. Saya memilih unit pertanian. Saya di sana belajar mengolah tanah, menanam singkong sayuran. Unit kerajinan tangan kerjanya merajut, menyulam kristik Unit penjahit juga ada.

Secara fisik di Plantungan tidak disiksa tapi saya mendapat siksaan mental, saya tidak tahu penyebabnya saya dipanggil komadan ke ruangan dikatakan melanggar peraturan, saya bilang langgar peraturan yang mana, waktu apel saya ada waktu tugas di dapur. Saya dikurung di kantor dari pagi sampai sore. Mau kirim surat diatur komandan hanya boleh 20 kata.

Saya tidak ada yang bezuk karena bapak saya dipecat tidak dengan hormat dan ibu saya bekerja keras menghidupi adik-adik saya. Yang mendapat kiriman uang, diganti dengan uang-uangan yang ditulis angka uang. Kami diberi uang dari hasil kerajinan yang kami jual itu.

Tahun '70 Desember akhir, saya dibebaskan dari Plantungan, dan ditampung oleh PSK (Projek Sosial Katdinal) di

Tebet Barat Raya kepunyaan Romo Sutono Panduyo. Di tempat ini sudah ada banyak mantan Tapol dari Pulau Buru dan Nusa Kambangan, perempuan dan lain laki-laki. Di situ beberapa bulan. Di situ ketemu jodoh, lalu kami memutuskan menikah bulan Mei '80 dan kami mengontrak rumah di daerah Sawangan.

Untuk pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya, kami mengalami kesulitan tidak diberikan surat pindah oleh Koramil setempat.

Tahun '80-an daerah Guntur digusur karena mau dijadikan daerah segitga emas, saya tidak punya uang, saya terus pindah ke Pondok Rangon, jangan lapor lagi tapi langsung tinggal. Sesudah 1 tahun kemudian kami baru mengurus surat pindah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur.

Tahun '94, suami meninggal, dan sama lurahnya kami dikirim surat undangan, pada tanggal 1 Oktober disuruh kumpul di kantor lurah. Bagaimana dengan anak saya?

Saya mengatakan kepada anak saya bahwa hari ini tidak tidur di rumah dan kumpul di kelurahan. Saya membuka diri kepada anak, karena ibu bapak dituduh PKI. Pada satu hari ada tugas dari sekolah membawa KTP orang tua, tapi karena KTP saya ada kode ET (Eks Tapol) maka dia pinjam KTP ibu temannya.



[Kesaksian Mujayin]

03 ROMBONGAN PERTAMA KE BURU, ROMBONGAN TERAKHIR DIPULANGKAN

Peristiwa 1965-1966, merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu yang ingin melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dianggap telah melakukan perlawanan terhadap negara.

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kerap kali dialami oleh para korban ketika itu, termasuk salah satunya Bapak Mujayin. Ia beberapa kali ditangkap oleh aparat militer karena pekerjaannya sebagai wartawan Harian Rakyat. Selama penahanan, ia mengalami penyiksaan. Bahkan ia juga dipaksa

bekerja tanpa diupah untuk kepentingan aparat militer. Setelah dibebaskan dari tahanan pada tahun 1979, ia kemudian berusaha bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Namun cap sebagai tahanan politik 1965 menyulitkan bapak Mujayin untuk memperoleh pekerjaan. Ia pun harus mengajar privat bagi anak-anak SMP secara diam-diam, untuk menghidupi keluarganya karena tahanan politik dilarang untuk mengajar.

Mujayin meninggal dunia di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2014 pada usia 84 tahun.

Nama saya Mujayin umur 83 tahun, pekerjaan wartawan, dituduh terlibat G 30 S. Saya ditangkap dan ditahan di Jakarta tahun '65, berpindah tempat mulai dari Cipinang, Salemba dan Pulau Buru tahun '69-79, karena kategori Golongan B. dibuang ke Pulau Buru. Saya rombongan pertama yang dibuang ke Pulau Buru dan rombongan terakhir yang dibebaskan.

Pulau Buru dijadikan tempat pembuangan berdasarkan Surat Keputusan Pamkomkamtib No 009 Tahun 1969 yang menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tahanan G 30 S Golongan B dan menunjuk Jaksa Agung menyelenggarakan pemanfaatan Golongan Tahanan B di Pulau Buru.

Pulau Buru adalah penjara di alam terbuka, jumlah tapol 10-12 ribu orang, ditempatkan di 21 unit kegiatan. Seharian, jam 5 pagi apel, setelah itu kami

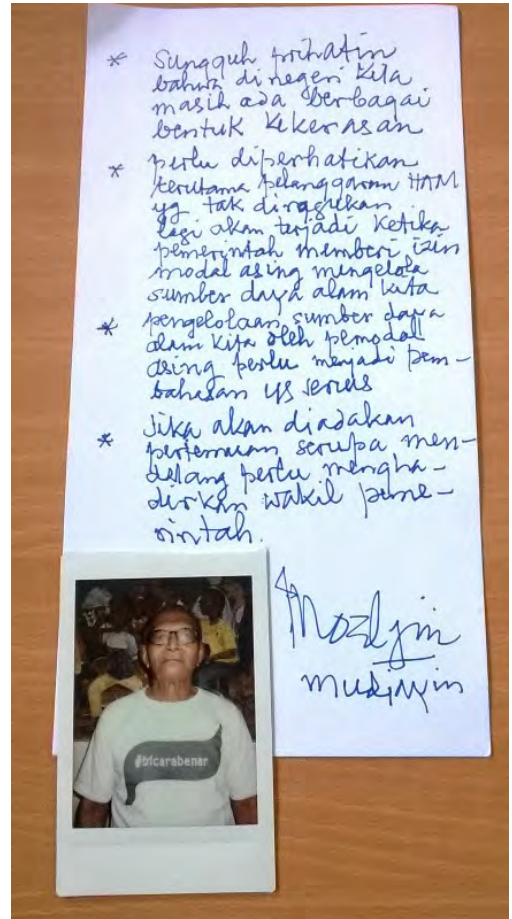
menjalani kerja paksa bermacam-macam, di sawah, ladang, menggergaji, menjadi tukang dan kuli angkut barang. Jam lima sore, apel dan kemudian kembali ke barak masing-masing. Malam hari tidak boleh keluar barak.

Dari kerja paksa yang tidak dibiayai ini, Tapol mencetak sawah dan ladang tiga juta ha, jalan selebar tiga meter yang menghubungkan antar unit dan markas komando sepanjang 175 km, di samping itu kami membangun bendungan, jaringan irigasi, masjid dan gereja. Dari jerih payah Tapol yang tidak dibayar, daerah bekas kami tinggal dijadikan daerah transmigrasi, tanpa mengeluarkan sepeser biaya oleh pemerintah. Bunyi surat pembebasan tahun '79: melaksanakan perubahan penahanan atas diri saya Mujayin dari tahanan G 30 S berasal dari Pulau Buru dari tahanan penuh untuk dikembalikan ke masyarakat. Selama 14 tahun menurut surat pembebasan ini kami ditahan, apakah tindakan ini sewenang-wenang atau tidak? Silahkan menilai. Kami berusaha mencari keadilan dan jawaban apa salah ku? Sampai sekarang belum terjawab. Selain ditahan, dibunuh, Tapol juga dililit dengan peraturan diskriminatif sampai ke anak cucunya.

Peraturan ini merupakan payung hukum yang digunakan penguasa. Supaya ORBA dianggap sah membasmi orang PKI dan keluarganya, maka pada tahun '81 diterbitkan Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981, dikatakan bekas TAPOL tidak bisa jadi PNS, guru dan pada KTP ditulis bekas tapol dibubuhi ET. Tahun '95 ada penghapusan kode ET di KTP.

Tapi bagi Tapol usia 60 ke atas tidak mendapat KTP seumur hidup. Baru pada tahun 2006, dikeluarkan UU Adminduk yang menyatakan Tapol dapat KTP seumur hidup. Gus Dur mencabut salah satu UU Penelitian Khusus (Litsus) yang dikenakan kepada kami.

Melalui forum ini kami mohon sekiranya bisa mendesak Presiden untuk menyelesaikan masalah kami. Kami menuntut rehabilitasi, kompensasi dan penghapusan peraturan diskriminatif sesuai surat Mahkamah Agung dan hasil penyelidikan Komnas HAM.



04

**SBY JANJI BERI
KOMPENSASI, HANYA
JANJI DOANG**
[Kesaksian Husain Safe]

Peristiwa Tanjung Priok, yang terjadi pada tanggal 12 September 1984, bermula dengan ditahannya empat orang warga Tanjung Priok yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, yang kemudian dipindahkan dan ditahan di Kodim Jakarta Utara.

Pada tanggal 12 September 1984, masyarakat Tanjung Priok kemudian mengadakan tabligh akbar di Jalan Sindang yang diselenggarakan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat, Amir Biki.

Di dalam ceramahnya, ia menuntut pada aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushola As Sa'adah yang ditahan di Kodim Jakarta Utara.

Nama saya Husain usia 68 tahun, korban Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok berawal dari masuknya seorang Babinsa ke Musolah As Sa'adah tanpa buka sepatu dan mencari brosur masyarakat.

Kemudian Babinsa menyiramiram



brosur tersebut dengan air comberan. Masyarakat marah dan mengejar Babinsa yang bernama Pak Herman yang kemudian melarikan diri. Motornya tertinggal, dan motor dibakar massa. Pengurus Musolah kemudian dibawa ke Kodim selama tiga hari, dipukul. Alm Amir Biki kemudian menggelar pengajian di Jalan Pindang, menuntut masyarakat jangan ditahan di Kodim, kalau bisa di Polres.

Alamarhum Amir Biki member waktu sampe jam 11 malam, ternyata tidak dipenuhi Kodim. Maka pada jam 11 malam saya disuruh untuk menggiring jemaat pengajian ke Kodim. Jemaah yang ikut 5000 orang. Sampai di depan Kapolres Jakarta Utara dihadang regu Lanhanud, kami disuruh berhenti.

Amir Biki masih di belakang. Saya sedang mengatur teman saya, tapi langsung ditembak tanpa peringatan, ditembak di kaki saya dalam jarak 1 meter. Setelah itu tembakan kayak dalam perang,

banyak yang luka, bergelimpangan yang mati. Ketika Alm Amir Biki datang, ada yang tentara teriak "Amir Biki datang habis", maka bunyi senjata semakin keras, sekitar 10 -15 menit. Kalau ada yang teriak Alahu Akbar, langsung ditembak. Maka saya diam pura-pura mati. saya *diseret* ke pinggir jalan kayak kambing tuh. Sampai di pinggir jalan saya dilempar ke mobil. Di atas truk saya mendengar hitungan tentara, ada 28 orang dengan saya. Selama dalam perjalanan saya tidak berteriak karena ada pengawalan tentara.

Kaki saya yang ditembak patah, dan menyisakan serpihan peluru di daerah mata kaki, yang kelihatannya seperti bisul. Dokter hanya menganggap itu bisul, sebab tidak pernah dirontgen. Saya menderita sampai empat tahun. Awalnya kami didampingi oleh Pengacara API, Hamdan Zoelva (ketua MK) namun tidak menemui jalan keluar.

Kami dekati Pak Munir mulai tahun 2000 sampai sekarang ada hasil, dengan KontraS bisa masuk pengadilan. Saya selalu dicegah untuk memberikan kesaksian dan ketika saya pindah ke Purwakarta saya didatangi intel yang meminta supaya saya tidak memberikan kesaksian. saya mau diberi kendaraan apa saja asal jangan memberi kesaksian di pengadilan. Saya bilang walau saya tidak punya duit saya tidak terima duit,

Kami dijanjikan kompensasi 1 milyar oleh hakim tapi tidak ada sampai sekarang. Pengadilan bohong, sandiwara saja. SBY sudah janjikan mau kasih kompensasi tapi tidak diberikan, janji doang.

Selama 25 tahun kami menderita karena

tidak ada pencaharian, kami dianggap GPK jadi tidak ada yang percaya kami, TNI yang stigma kami. Padahal dulu kami punya toko di Tanjung Priok, gara-gara peristiwa ini saya bangkrut, bos-bos saya tidak mau lagi pinjam. Karena di Tanjung Priok masyarakat pesimis kepada kita dan dianggap GPK, saya pindah ke Purwakarta dan usaha pasir di sana. Tapi tahun 96/97 kena krisis moneter, dan merugi sampai sekarang tidak bisa berusaha lagi

Masalah islah saya nggak ikut terlibat karena saya tanya Pak Tri kalau Pak Tri akui salah baru kita islah, kalau yang Bapak lakukan ini halal, karena tidak ada yang mengaku bersalah, Pak Tri tidak bersalah, korban tidak bersalah. Kalau Pak Tri mengaku salah aja saya mau Islah, kalau tidak mau kita ke pengadilan saja karena yang berhak menyatakan salah itu pengadilan. Kalau tidak ya diselesaikan apa diperintahkan oleh HAM.

" Bagi saya pribadi orang yang istilah itu munafik, kalau pemerintah mau beri hak mereka silakan karena mereka juga korban. Saya bilang ke KontraS boleh didampingi tapi jangan gabung dengan kami."

05 SEBANYAK 130 ORANG HILANG SAMPAI SEKARANG

[Kesaksian Azwar bin Kaili]

Azwar Kaili lahir di Desa Prapat, Sumatera Barat pada tahun 1942. Saat ini tinggal di Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. ketika terjadi peristiwa Talangsari, Azwar Kaili sedang menghadap Camat Way Jepara. Saat kembali ke kampung, rumahnya telah terbakar dan anak isteri mengungsi. Azwar kemudian ditahan berpindah-pindah oleh Koramil setempat, Korem Metro dan di LP Rajabasa, dipindahkan ke Panti Sosial untuk menjalankan rehabilitasi selama 10 hari. Setelah keluar Azwar masih menjalankan wajib lapor berkala. Kemudian ditahan lagi di Korem selama 3 bulan. Dia kembali dipenjara selama 6 bulan, dengan tuduhan melakukan penyerangan terhadap Babinsa dan warga. Isterinya ditangkap dan ditahan



di Padang, dengan tuduhan melarikan diri akibat peristiwa ini, Azwar Kaili kehilangan seluruh harta benda, isterinya mengalami gangguan kesehatan akibat, dan anak-anaknya tidak diterima sekolah di sana dan terpaksa dititipkan di Pesantren di Jakarta dengan status anak Yatim

Kejadian Talangsari pada 7 Februari 1989, mengakibatkan 130 orang hilang sampai sekarang. Saat kejadian saya sedang memenuhi panggilan Pak Camat [Way Jepara], yang jaraknya sekitar 40 kilometer dari rumah.

Ada suatu tuduhan dari menteri, saya mendidik anak-anak kesehatan yang sebenarnya yang ada di rumah saya waktu itu pendidikan baju pengantin tapi yang melakukan orang lain bukan saya, memang penuh gadis di rumah saya. Itu

dituduhkan kepada saya. Saya uraikan pada Pak Camat, ini fitnah. Setelah selesai diperiksa saya pulang. Di tengah jalan motor yang saya tumpangi rusak, Jam lima sore ada orang Madura satu kampung lewat akhirnya menumpang dengan dia pulang ke kampung.

Sampai jam 9 malam di rumah lampu tidak ada menyala, rumah tidak dibuka, kawan tadi ajak nginap di rumahnya. Isteri kawan cerita apa bapak tidak tahu kalau ada rampok depan rumah bapak, kepala desa mati, bapak tidur di sini dulu, mungkin ibu menyingkir. Besok saya ke pasar tanya apa yang terjadi, datang Babinsa pesan bahwa saya dipanggil Koramil. Sampai di Kodim, Danramil tidak ada lagi keluar saya tunggu sampai dua jam, Polisi suruh Pak War menghadap polisi saja, saya tidak mau karena berkepentingan dengan Danramil.

Lalu anggota Babinsa antar ke polisi. Saya dimasukkan dalam sel, di situ ada orang berlumuran darah. Setelah dua jam di sel saya dan kawan tadi dirantai dan dimasukkan ke mobil oleh Danramil, dengan alas an situasi lagi tidak damai dan ditahan dulu di Kodim.

Setelah diperiksa saya dibawa ke sebuah ruangan, di situ anak-anak dipukul ada yang pingsan rupanya. Jam 11 malam kami dipindahkan ke Rajabasa Lama, ada 40 orang semua tangan diborgol. Pagi-pagi datang pasukan kira-kira 1 kompi melihat anak-anak tahanan, semua pasukan menonjok anak-anak. Satu minggu di Rajabasa Lama dipindah ke LP Tanjung Karang jam 11 malam.

Besok kami dipanggil ke Korem untuk diinterogasi. Selama tiga bulan di tahanan Korem. Terakhir didatangkan tim Kejaksaan untuk sidang untuk tahanan, Kejaksaan tanya Korem kenapa Pak Azwar ditahan karena kesalahannya nol.

Dua hari setelah itu saya dikirim ke Panti Sosial Lempasing, ada 10 hari saya di situ dan diberikan surat bebas dengan menyatakan saya terlibat. Dikasih uang Rp 5 ribu untuk ongkos pulang. Sampai di rumah atap hancur. Isteri ke Sumatera barat untuk kasih tahu keluarga bahwa saya ditangkap tanpa ketahuan kesalahan, tetapi dia malah ditangkap bersama anak saya yang berusia 12 tahun, dituduh pelarian, kepalanya dihantamkan ke tembok dan ditahan di Padang. Saya ke Padang, isteri sudah di rumah orang tua saya dan semua berkas disobek. Isteri saya disiksa ditahan di Padang sampai dia seperti orang gila.

Waktu itu datang komandan dari Medan yang mengamankan ibu dan menyuruh dipindahkan ke Korem dengan anak. Saya sampai ke Padang dan bawa pulang isteri dan anak-anak saya. Mau makan, makanan tidak punya. Saya lalu tinggalkan isteri dan tempat berteduh untuk cari hutang beras, malam itu rumah saya dibakar anak-anak tidur di bawah rumah terbakar.

Dalam peristiwa itu rumah tiga, kios satu dan mobil terbakar. Saya mencoba mengirimkan surat ke bupati dan DPR untuk kelanjutan hidup, tidak ada jawaban sama sekali. Lalu ada teman saya polisi buat surat ke kotak 5000, eh surat ini sampai ke Korem, saya dipanggil ke

Korem dan disiksa. Kawan saya ini diinjak-injak, tiga bulan dia mati, saya ditahan empat bulan di Korem dan tiap pagi saya kerja menyuci mobil mereka.

Saya mencoba bertani, saya minjam duit setelah hampir panen, dibawa Babinsa dengan masyarakat 40 orang, saya hadang mereka, saya malah dilapor ke polisi bahwa kejar mereka. Saya bilang, Pak saya tidak kejar orang tapi binatang yang berbentuk orang. Saya disidang sekali lalu jatuh hukuman enam bulan penjara. Itulah penderitaan saya selama Peristiwa Talangsari

Selama empat tahun, isteri saya menderita gatal tidak bisa sembuh. Kalau ada tamu datang, besoknya saya dibawa ke Korem dan ditanya siapa yang datang. Keluarga saya ketakutan. Anak-anak tidak diterima sekolah di sana, dua anak saya diterima di sekolah di Jakarta atas nama anak yatim, setelah besar dia malu karena ayah masih hidup tapi disebut yatim, sekarang sudah SMA, anak lain sudah tamat SMA. Isteri saya bekerja membantu orang melahirkan.

Yang mati di Talangsari, anak saya 11 tahun dan sampai sekarang tidak ditemukan, ada empat orang anak lain yang bersama dia lari ke satu rumah yang kemudian dibakar. Dalam investigasi dengan KontraS, ada tulang belulang yang ditemukan di rumah itu.

Komnas HAM sudah bilang itu pelanggaran HAM berat dan sudah masuk Kejaksaan Agung, tapi tidak ada tindaklanjutnya. S

Saya sudah ke SBY supaya didorong kasus ini ke pengadilan dan dia bilang, iya, tapi sampai hari ini tidak ada apa-apa, ke Menkopolkam, Kejaksaan Agung, dia bilang tunggu keputusan DPR. Saya ke Komisi III DPR dan mereka bilang desak Presiden, sampai sekarang tidak.

SBY janji dalam empat hari tim saya sampai sana tapi sampai sekarang sudah hampir lima tahun belum ada tindakan.

06

MENUNGGU
SURAT JAMINAN
KEAMANAN**[Kesaksian Nasrudin Ahmadi]**

Nasrudin Ahmadi lahir di Bogor tanggal 12 Mei 1968, saat ini tinggal di Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai muballigh Ahmadiyah. Ia memberi kesaksian tentang tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Kami, warga Jamaah Islam Ahmadiyah Wilayah Lombok- NTB adalah bagian dari Jamaah Islam Ahmadiyah Indonesia, yang sudah memiliki Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA.5/23/13 Tgl. 13-3-1953. Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 31 Maret 1953, nomor 26. Diperkuat dengan Pernyataan Depag. RI. Tanggal 11 Mei 1968, tentang hak hidup seluruh organisasi Agama



yang AD/ART nya sudah disahkan oleh Badan Hukum Menteri Kehakiman dan sudah memiliki AD/ART sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Komitmen terhadap 4 Pilar Kebangsaan : Sesuai dengan Anggaran Dasar, Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1. Berasaskan Pancasila 2. Mengembangkan Agama Islam, ajaran Nabi Muhammad Shal-lallaahu Alaihi Wasallaam menurut Al-quran, Sunnah dan Hadits, 3. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Meningkatkan kemampuan para anggautanya baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, akhlak, amal bhakti maupun kerohanian.

Bagi warga Ahmadiyah, Kesetiaan Kepada ʻUud'45, Pancasila Dan Nkri dengan semangat ke-bhineka-an adalah suatu

keharusan, karena kami yakin, Hubbul-wathan minal-liman, cinta kepada tanah air adalah bagian dari ke-imaan.

Bukti kesetiaan warga Ahmadiyah terhadap NKRI ini dapat di teropong di beberapa peristiwa dan tempat berikut :

Tahun 1945/1946, di tempat yang berbeda, sebanyak 16 orang Ahmadi dari cabang Cukangkawung-Jabar, Indihiang-Tolenjeng-Garut, Ciandam-Cianjur-Jabar mereka telah disyahidkan oleh gerombolan Daarul-Islam, karena kesetiannya kepada NKRI, dan banyak lagi di tempat lainnya. Ahmadiyah juga aktif dalam menegakkan Kemerdekaan RI.

Kampanye Kemerdekaan RI : Pemuda-pemuda Ahmadiyah (Mlv. Nuruddin, Haji Yahya Pontoh), giat mensosialisasikan dengan bahasa urdu kesucian perjuangan RI untuk meraih kemerdekaannya dengan cara, masuk ke kantung-kantung tentara India (Gurca),

Dukungan Ahmadiyah Internasional : Perjuangan kemerdekaan RI pun di dukung penuh oleh, Imam tertinggi Jemaat Ahmadiyah International, Al-haj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Penyerangan yang dialami oleh warga Ahmadi dimulai sejak tahun 1998 di Desa Keruak- Lombok Timur (Lotim). Terjadi penyerangan pada tanggal 22 Juni 2001 di Dusun Sambielen Kecamatan Bayan, Lotim, kerugian, 22 rumah dirusak, 80 orang diusir, 24.1 Ha tanah terlantar. Meninggalnya satu orang Ahmadi, yaitu, Papuq Hasan.

Serangan yang lebih besar pada tahun 2002, secara simultan, sehari-hari (5-6

hari) dan tepat sasaran, padahal selama ini warga Ahmadi bermukim diberbagai tempat, rumah-rumah berbaur dengan masyarakat non Ahmadi yang padat, selama 32 tahun sangat kondusif. Uniknya saat terjadi penyerangan, sang penyerang tahu persis mana rumah-rumah warga Ahmadi dan yang bukan. Penyerangan skala lebih besar lebih 130 rumah diserang dijarah dan dibakar, ada 2 - 3 masjid dibakar yang menyerang mereka yang mencintai nabinya Muhamamad yang mengklaim agamanya Islam kami mengalami 13 kali pembakaran dan amuk massa saya sampaikan yang besar saja, ini data polisi NTB.

Terindikasi Keterlibatan Pemerintah dan Aparat : Khususnya pada tanggal 9-14 September 2002, selama enam hari berturut-turut di Pancor Lotim, terjadi peristiwa yang sangat besar dan terencana, puluhan rumah, lebih dari 81 unit dihancurkan dan dibakar, dua Masjid dirusak dan dibakar, 383 orang diusir dari kampung kelahirannya, 14.8 HA tanah ditelantarkan.

Para Pengurus/tokoh Ahmadiyah ditempatkan di Makodim Lotim, sementara anggota biasa ditempatkan di Mapolres-Lotim. Pada saat yang sama di tempat berbeda ada pengumuman dengan nada provokasi dan adu domba, di Makodim. "perlu kalian ketahui, seluruh anggota kalian di Mapolres, sudah keluar semua dari Ahmadiyah atau bertobat....!"

Sementara di Mapolres ada pengumuman, "apabila masih ingin tinggal di Lotim, maka tinggalkan Ahmadiyah dan apabila masih di Ahmadiyah, silahkan

tinggalkan Lotim. perlu kalian ketahui, sekarang seluruh Pengurus dan tokoh-tokoh Ahmadiyah di Makodim, sudah keluar.... !" Sudah tentu informasi ini mengacaukan hati dan pikiran.

Sikap Kepolisian : Kami menyaksikan, institusi Kepolisian yang seharusnya melayani, mengayomi dan melindungi, tidak kami rasakan.

Penegakkan hukum : Para pelaku tidak ada satu orang pun yang diproses secara hukum, sebaliknya korban dikorbankan, selalu dituduh sumber dari keresahan dan kerusakan.

Kami sekarang tinggal di kamp pengungsi asrama Transito, Jl. Transmigrasi, Desa Majeluk, Mataram – NTB.

Dengan kondisi Pakumis (Padat Kumuh dan Miskin). Pengungsi bekerja ala kadarnya menjadi :

Tukang ojek, buruh tani, jual sayur mayur, dan pekerjaan serabutan lainnya, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) membuat retorika Relokasi, Transmigrasi dan pembelian aset warga Ahmadiyah di Desa Ketapang, sampai saat ini tidak ada realisasinya.

Secara pribadi, DPW Ahmadiyah NTB dengan Walikota Mataram, TGH. Ahyar Abduh, cukup dikenal tidak ada masalah. Kebijakan yang positif, Gubernur Prov. NTB (TGB. Dr. H. Zainul Madji), pernah beberapa kali didesak masa intoleran untuk mengeluarkan PERGUB.

Pelarangan aktivitas, bahkan desakan pembubaran Ahmadiyah di seluruh NTB. Tetapi beliau tidak membuat kebijakan tersebut. Adapun Gubernur NTB untuk menghadapi warga Ahmadiyah di Transito melalui jalur "Pembinaan". Proyek pembinaan di mulai bulan Juli – Desember 2011, yang diselingi istirahat 1 bulan karena bulan Ramadhan. Para pembina/narasumber : 25 orang, terdiri dari : Para Tuan Guru/Ulama, MUI, NU, NW, Pimpinan Ponpes. Budayawan/tokoh sasak, Akademisi, dan SKPD. Hasil akhirnya, tidak ada keputusan yang jelas.

Dampak negatif dari kekerasan ini diantaranya, dari segi fisik (hilangnya harta, rumah (lebih 123 unit drusak/dibakar), asset warga, dan pembunuhan. Dan juga kerugian Fisik : Trauma yang berkepanjangan (stres, depresi, dan masuk ke Rumah Sakit Jiwa). 739 orang terusir dari kampungnya (anggota Ahmadi NTB, lebih dari 2500 orang/1962). Note : Semua data bisa dikonfirmasi ulang.

Tidak memiliki asset (Tanah) karena sudah dijual untuk biaya hidup lebih dari tujuh tahun, dan tidak memiliki rumah, karena sudah dihancurkan dan dibakar.

Secara fisik dan psikologis kurang baik untuk pendidikan dan perkembangan anak-anak karena berlama-lama di pengungsian dengan kondisi yang tidak nyaman.

Masa depan yang tidak jelas, kapan akan berakhir, laksana berjalan tak bertepi, berlayar tak berpantai dan jatuh ke lubang tak berdasar.

Harapan dan Mimpi Indah ke depan:
Jaminan keamanan : Warga Ahmadiyah yang juga warga NKRI ingin mendapatkan Jaminan keamanan dan kebebasan secara tertulis dari Pemprov. NTB (Gubernur atau Kapolda), kapan dan dimanapun bertempat tinggal, termasuk kembali ke kampung halamannya. Karena hal ini adalah hak warga NKRI.

Dan menginginkan tempat berkumpul untuk pembinaan. Warga Ahmadiyah menginginkan penegakkan hukum terhadap para pelaku. Sampai saat ini, tidak ada satu orang pelaku pun yang diproses secara hukum atas perbuatan mereka yang menyerang, merusak, menjarah, mengusir, melukai dan membunuh warga Ahmadiyah,

**“Pungguk merindukan bulan,
atau laksana melempar
stirofom / gabus ke air
agar tenggelam, tapi tidak
tenggelam juga”**

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Tragedi 1965 dan Kasus yang
Menimpa Aliran Kepercayaan

Oleh: Asvi Warman Adam

Beranggapan Tragedi 1965 sebetulnya terdiri dari 5 aspek: pertama, menyangkut 1 Oktober 65, persoalan versi G 30 S PKI, siapa dalangnya. Kedua, masalah pembunuhan massal setelah meletus G 30 S PKI yang memakan korban 78 ribu - 3 juta orang, angka moderat 500 ribu orang, sudah tewas dalam pembunuhan antar anak bangsa.

Ketiga, ada ratusan dan ribuan pemuda Indonesia yang belajar di luar negeri yang dicabut warga negara mereka, kehilangan hak sebagai warga negara dan mereka kelayapan puluhan tahun di luar negeri. Keempat, pembuangan paksa ke Pulau Buru terkait dengan Pemilihan Umum. Persiapan dilakukan dalam rangka pembersihan masyarakat dari hal terkait pemilu '71, sehingga mereka dibuang tahun '69. Kelima, stigma kepada korban dan keluarga selama puluhan tahun oleh ORBA.



Siapa penanggung jawab?

Pulau Buru kasus sangat kuat. Tahun 2003, saya bersama tim Komnas HAM untuk Pulau Buru, kami menyimpulkan kasus Pulau Buru, kasus kuat untuk jerat Soeharto. Dari segi waktu jelas 10 tahun dari tahun '69- '79, jumlah korban 10-12 ribu orang dan pelaksanaan jelas.

Pulau Buru dikoordinir oleh Kejaksaan Agung, Sugiharto waktu itu. Ketika kami selidiki tahun 2003, dia masih hidup dan sekarang sudah meninggal. Jaksa Agung oleh Kopkamtim dan jelas garis komando dari Soeharto. Jelas siapa penanggung jawab Kasus Pulau Buru.

Apa yang disampaikan Pak Mujayin tentang Keppres No. 28 tahun '75 tentang Golongan C yang menyangkut juga tidak diterimanya dana pensiun PNS dan ABRI yang terlibat gerakan 30 S PKI, sudah diajukan ke Mahkamah Agung, di dalam website Mahkamah Agung ditulis sudah diputuskan dan kabul.

Ini momentum untuk desak Mahkamah Agung salinan putusan itu jangan sampai ada yang hilang, berubah atau tidak jadi.

Para pensiun PNS atau ABRI berhak menerima pensiun walau jumlah mereka tidak banyak. Jumlah yang dibayar negara juga terbatas, tapi sangat penting paling tidak secara simbolik pengakuan kesalahan negara atas warganya

Waktu tinggal 1 tahun bagi presiden untuk selesaikan tugasnya. Rehabilitasi sudah dicoba oleh Watimpres dengan melontarkan usaha Presiden untuk minta maaf terhadap mereka yang jadi korban '65, tapi disisi lain sudah disiapkan kelompok lain yang menolak minta maaf.

Sudah ada skenario menggagalkan usaha ini. Selain melakukan tuntutan hukum, secara individual seperti yang dilakukan Ibu Nani Nurani melakukan gugatan Perdata kepada pemerintah layak dicontoh walau jalan panjang, tapi upaya semacam ini berhasil menggugat KTP seumur hidup, gugatan perorangan baik juga dilakukan para korban.

Bagi generasi muda pelurusan sejarah karena di dalam pemberitaan media massa karena apa yang disiasatkan TV ada program di TV yang membahas sejarah tapi ironis dalam pengajaran sejarah sendiri terjadi kemunduran dalam kurikulum tahun 2004 Sudah diuraikan lebih objektif, dengan demikian kurikulum tahun 2004 tanpa pakai PKI lagi, tapi sayang tahun 2006 terjadi kemunduran berdasarkan tuntutan elit Islam sehingga perubahan pada 2006, ada versi tunggal bahwa G 30 S PKI dalang adalah PKI.

Terjadi kemunduran besar. Tahun 2007, tragedi pendidikan ketika Jaksa Agung Abdurrahman Saleh melarang buku beredar di sekolah yang tidak berisi Tragedi 1965 dan Madiun, buku yang dilarang itu untuk siswi SMP kelas satu dan dua, dimana jilid satu tentang kerajaan nusantara, jilid dua tentang masa penjajahan dan masa jilid tiga tentang PKI sementara jelas ini kebodohan karena jilid satu dan dua jelas tidak muat tentang G 30 S PKI.

Saya ingin menggarisbawahi pembicara pertama apa yang dialami kelompok ADS. Memang jadi persoalan sejak Indonesia merdeka persoalan yang disebabkan oleh politik angka. Angka sangat penting bahwa di Indonesia, 90 persen beragama Islam sangat penting karena angka 90 persen identik mayoritas berarti mayoritas berkesempatan mendapat fasilitas dan melakukan banyak hal keinginan menjadi mayoritas dan tidak mengurangi fasilitas.

Upaya kolom agama di KTP ini menjadi akar masalah, berani kah kita meninjau kolom agama di KTP? Dengan berbagai argumen saya melihat permasalahan ini akan terus muncul. Keinginan menjadi mayoritas dan jumlah terbanyak itu yang terjadi. Beberapa waktu lalu di tokoh buku gramedia, buku laris ayahku sebuah biografi Hamka yang ditulis anaknya.

Tapi yang heran, saat sama ada buku tentang Mahdud Karim, adik tiri Hamka yang menikah dengan seorang wanita Amerika dan beralih agama dan jadi Pendeta Kristen, hanya bertahan beberapa hari. Padahal ini menarik pahlawan dan ulama punya saudara pendeta,

tetapi ini dianggap sesuatu yang tidak selayaknya begitu. Mayoritas itu tidak boleh dikurangi. Hj Agus Salim tokoh nasional yang menurut saya jago dalam berdebat ketika datang ke Negeri Belanda ditanya wartawan, yang menganggap bisa ditaklukan adiknya, Salid Salim, tokoh PKI yang dibebaskan kembali ke Belanda dan bekerja sebagai staf lokal di Belanda lalu beralih agama Kristen.

Pertanyaannya, tahukah Anda jika Adik anda sudah pindah agama? Haji Agus Salim jawab, malah lebih baik, dulu dia itu kiri tidak beragama, sekarang dia beragama dan punya Tuhan, bukan kah itu lebih baik? Ini pernyataan menggambarkan kenegarawan Agus Salim. Dengan pengangkatan pahlawan Rajiman Widyodiningrat ketua BPUPKI dan dia bertanya dasar negara dan dijawab Soekarno, Pancasila. Dia seorang dokter dan rawat penderita lepra di Ngawi, Jawa Timur.

Rajiman berjasa tapi ada satu hal yang dipersoalkan karena dia anggota teosofi suatu golongan memisahkan manusia dengan agama, tapi kenyataannya ada pahlawan kita yang menganut teosofi, meski dikecam oleh kalangan muslim, tapi ini bentuk pengakuan negara juga terhadap aliran ini.

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Diskriminasi Terhadap Penghayat
Kepercayaan & Persoalan
Kebebasan Beragama

Oleh Nia Sjarifudin
(Sekjen ANBTI)

Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Landasan Kebebasan Beragama di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pasal 28E (1) menyebutkan: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
2. Pasal 29 menyebutkan (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.



Catatan Advokasi

Dalam gerakan masyarakat sipil, terutama sejak reformasi, ada banyak usaha memutus mata rantai kebijakan diskriminatif dan upaya menata ulang tatanan kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat, tanpa membedakan apapun latar belakang suku, bahasa, adat, warna kulit, agama dan kepercayaan.

Ini tercermin dalam Amandemen Undang - Undang Dasar 1945, ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, sampai penerbitan Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Tetapi kebijakan ini sering diproses tanpa ada sensitivitas terhadap latar belakang politik pembedaan dan pengutamaan sebelumnya, sehingga hasil kadang justru makin memperpanjang mata rantai diskriminasi.

Sebab Diskriminasi

1. Politik Pengelolaan Negara

Agama (resmi) dikelola oleh kementerian agama, tiap agama dikoordinir dirjen dengan pejabat yang representasi mewakili agama. Sementara Kepercayaan Kepada Tuhan YME.

Dikelola dibawah Kementerian Pendidikan dan Budaya (dulu Pariwisata dan Budaya) setingkat sub direktorat dengan pejabat yang bukan representasi dari pemeluk kepercayaan. Perbedaan pengelolaan Berdampak pada perbedaan kewenangan, anggaran dan kualitas pelayanan. Dalam kebijakan pengelolaan umat menjadi terpisah, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak melibatkan penghayat sebagai bagian dari forum dan penghayat mudah untuk dijadikan sasaran penyesatan / dianggap menjadi sasaran dakwah.

2. Undang-Undang Adminduk

Dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 26 November 2013 untuk amandemen Undang-Undang Adminduk dinyatakan 'hanya 6 agama resmi' yang bisa dicantumkan dalam kolom agama, bagi penghayat kepercayaan tetap dilayani dalam formulir pendataan penduduk tetapi kolom agama dalam KTP dikosongkan.

Beragam kasus kolom agama dalam KTP selama ini, antara lain dikelompokkan kedalam agama Hindu (kasus Kalimantan, Sulawesi, Maluku), sebagian kecil bisa menulis nama

kepercayaannya dalam kolom KTP; dikosongkan atau tanda "-" kondisi ini menyebabkan para penghayat kepercayaan rentan mendapat stigma kafir, sesat, atheis dan komunis.

3. Dalam Peraturan Pemerintah No.37/2007 pasal 81 tentang pelaksanaan UU No.23/2006 tentang Adminduk menyebutkan:

- Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Dampak

1. Pernikahan yang tidak dicatat mendapat stigma 'kumpul kebo', rentan dikriminalisasi kebijakan terkait asusila. Status anak dianggap 'anak di luar nikah
2. Pernikahan tidak tercatat, dianggap tidak berkeluarga sehingga tidak memperoleh fasilitas untuk keluarga.
3. Pekerjaan, kesulitan menjadi PNS/TNI/Polri karena hambatan stigma, bahkan untuk sumpah jabatan sering dipersoalkan.

4. Pendidikan, negara tidak menyediakan guru agama khusus untuk penghayat. Anak murid penghayat terpaksa/ dipaksa untuk belajar agama dari salah satu agama resmi
5. Pemakaman, TPU dianggap sebagai lahan hanya untuk agama resmi. Banyak kasus ditolak petugas TPU atau berdasarkan desakan masyarakat tertentu (terutama di Jawa) – kuburan dibongkar dan dikubur di halaman rumah
6. Eksodus karena desakan politik Kasus 1965 berimbas kuat pada kelompok penghayat. Stigma tidak beragama, atheis, komunis membuat mereka dijadikan target sasaran ditangkap, disiksa dan bahkan dibunuh. Ada strategi politik dilakukan dalam kondisi terdesak dengan pindah masuk dalam agama resmi. Di Cigugur, mayoritas penganut Sunda Wiwitan pindah ke Katolik, namun dalam praktek hidup masih banyak sebagai penghayat. Ini terjadi juga di daerah lain dan kerap menimbulkan masalah (kasus Jambi & Sragen)
7. Di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku banyak penghayat secara sengaja/ dipaksa di “hindu” kan dengan beragam latar belakang politik. Padahal secara teologi, tidak ada sama sekali kesamaan dengan Hindu yang kita kenal di Bali ataupun India

depan istana, Kasus Ahmadiyah, Syiah Sampang, Kasus Syiah.

Refleksi:

Kelompok keagamaan dan kepercayaan merupakan elemen yang terlibat aktif dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia baik secara individu, komunal bahkan kelebagaannya yang sudah ada di Indonesia sebelum tahun 1945.

Era Orba, negara bertindak ‘kejam’ pada kelompok agama yang diduga ekstrim seperti kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung dan lain-lain. Negara lebih suka eksekusi langsung tanpa proses peradilan untuk membuktikan

Situasi dan kondisi sekarang, sikap negara justru membiarkan, memfasilitasi kelompok mengatasnamakan agama yang terbukti malah kerap melakukan teror dan kriminilitas diruang publik.

Bahkan makin memburuk karena negara bahkan menjadi pelaku kekerasan. Contoh aparat keamanan yang tidak netral atau melindungi korban dan cenderung mengkriminalisasi korban, kebijakan diskriminatif dan statemen provokatif/ bias dari pejabat terkait (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri). Namun ada pejabat yang berani tetap konstitusional (Gubernur Banga Belitung, Yogyakarta, Jawa Tengah menolak menyesatkan Ahmadiyah).

Sekilas Gambar Tentang Penyebaran Kebencian, Hasutan, Hinaan, Fitnah Kasus rumah Ibadah “Terpaksa” Ibadah

Ini membuktikan ada degradasi dan orientasi kebangsaan yang tidak sama,

bahaya besar bagi usaha menjaga integritas bangsa

Rekomendasi

1. Pengelolaan negara harus satu dibawah Kementerian Agama dan Kepercayaan.
2. Cabut semua kebijakan diskriminatif / inkonstitusional. Negara tidak perlu intervensi kecuali untuk menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sesuai konstitusi
3. Hapus kolom agama di KTP
4. Negara harus menjamin proses pemulihan identitas agama dan kepercayaan (kasus Kaharingan, Sapto Darmo, dan lainnya), pemulihan hak bagi korban, seperti Ahmadiyah dan Syiah di Pengungsian Sidoarjo Jawa Timur
5. Tidak ada tindakan tegas terhadap pemda setempat yang melawan keputusan Mahkamah Agung
6. Kurikulum Nasional 2013 perlu dikoreksi karena tak sesuai dengan RPJM 2010-2014 untuk pendidikan nasional berkarakter kebangsaan
7. Negara harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal/ adat yang sudah terbukti mampu mengelola keberagaman masyarakat (torang samua basudara, pela gandong) itu yang menuntun kita

Dalam gerakan masyarakat sipil, terutama sejak reformasi, ada banyak usaha memutus mata rantai kebijakan diskriminatif dan upaya menata ulang tatanan kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat, tanpa membedakan apapun latar belakang suku, bahasa, adat, warna kulit, agama dan kepercayaan.





REFLEKSI MAJELIS WARGA

Ideologi dan Kebebasan Beragama

Kami Majelis Warga pada tanggal 27 November 2013 telah menghadiri acara *Dengar Kesaksian 'Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan'* bertempat di Ruang Theater Perpustakaan Nasional dan mendengarkan paparan atas sejumlah kasus kekerasan yang terjadi sebelum kemerdekaan (kasus diskriminasi terhadap Agama Djawa Sunda), tahun 1965 (kasus peristiwa 1965), tahun 1984 (kasus peristiwa Tanjung Priok), tahun 1989 (kasus peristiwa Talangsari) dan tahun 2002 (kasus Ahmadiyah di NTB).

Masing-masing kasus kekerasan telah dipaparkan oleh Ibu Dewi Kanthi, Ibu Mujiyati dan Bapak Mujayen, Bapak Husain Safe, Bapak Azwar dan Bapak Nasrudin yang dari mana Majelis Warga mengeluarkan pernyataan ini.

Forum ini merupakan suatu forum terbuka dimana terpapar sebuah kenyataan kehidupan berbangsa kita yang realitasnya diwarnai oleh kekerasan. Kekerasan tersebut bersifat impersonal, karena siapa saja bisa menjadi korban.

Tetapi kekerasan ini juga bersifat amat personal karena meninggalkan bekas-bekas penderitaan yang mendalam. Kita boleh jadi telah abai tentang masa lalu yang membentuk sejarah sosial kita bersama. Padahal ingatan tentang masa lalu itu penting karena ingatan merupakan sumber renungan akan masa kini dan masa depan : suatu dunia yang pernah ada dan bagaimana kita mau menyikapinya.

Ingatan juga penting karena ia merupakan sumber bagi perumusan identitas kita, baik secara personal, sosial maupun nasional.

Solidaritas sesama anak bangsa dituntut untuk bersama-sama mengungkap kebenaran, walau itu pahit, di hadapan publik .

Olehnya menjadi tugas semua anak bangsa untuk menuntut negara mengungkap semua fakta dan kebenaran, karena dari semua kasus terlihat aparat negaralah yang ternyata menjadi akar dan sumber semua masalah ini. Seyogyanya negara juga harus bertanggung jawab untuk mengungkap dan menyelesaikannya melalui rekonsiliasi nasional .

Lembaga Negara/Pemerintah tidak berhak untuk menentukan bahwa 'ini' agama dan 'itu' bukan agama; 'itu yang diakui' dan 'itu tidak diakui'.

Tokoh atau pimpinan agama / lembaga keagamaan-pun tidak berhak untuk menentukan hal yang sama. Lembaga Negara / Pemerintah-pun tidak bisa berperan untuk melakukan proses pertobatan atas nama 'dialog' kepada kelompok-kelompok agama dan keyakinan dan menuduh mereka sesat. Lembaga Negara/Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu melakukan pengakuan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyintas. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan apapun yang dapat menghentikan semangat, kerja dan harapan kita, pejuang keadilan dan kebenaran.

Keberagaman dan ideologi bangsa Bhineka Tunggal Ika seyogyanya menjadi landasan argumen bagi negeri ini untuk menghapuskan segala bentuk intoleransi, kekuasaan represif negara terhadap masyarakat / kekuasaan nilai-nilai dominan yang membungkam hak kelompok lain melakukan kegiatannya dalam kehidupan berbangsa bernegara .

Keadilan pada dasarnya merupakan bagian dari moralitas tetapi pada sisi lain dirumuskan dalam aturan-aturan yang baku untuk dilaksanakan.

Keadilan merupakan suatu situasi sosial di mana norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasarnya adalah martabat manusia sehingga prinsip dasarnya adalah pengakuan dan penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya .

Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Dewi Kanthi, Ibu Mujiyati dan Bapak Mujayen, Bapak Husain Sape, Bapak Azwar dan Bapak Nasrudin yang telah memberikan kesaksiannya pada hari ini .

Jakarta, 27 November 2013

Kami Majelis Warga yang mendengarkan,

1. Nani Nurrachman
2. Gomar Gultom
3. Elga Sarapung
4. Imam Aziz
5. Dolorosa Sinaga

A soldier in a green uniform and cap walks away from the camera on a dirt path. The path is surrounded by dense green vegetation and tall grass. In the background, a rocky hillside rises, featuring several dark cave openings. The sky is blue with scattered white clouds. A large, yellow, speech-bubble-like graphic is overlaid on the center of the image, containing text.

D



**SUMBER
DAYA
ALAM**

01 LAHAN KAMI DIRAMPAS, KAMI DIHEMPAS

[Kesaksian Neneng]

Neneng, 43 tahun, memimpin komunitasnya melakukan aksi perlawanan Warga Kampung Cibitung terhadap upaya AURI yang mencaplok lahan mereka, di Kampung Cibitung Kecamatan Rumpin, Kabuapten Bogor, Jawa Barat. Sengketa antara petani Cibitung dan AURI terjadi sejak tahun 1955, sampai saat ini belum ada kejelasan soal kepemilikan tanah.

Pada 22 Januari 2007, terjadi bentrokan antara warga dengan AURI. Tragedi yang paling menyedihkan dan menyakitkan bagi warga Rumpin, TNI sampai mengintimidasi dan menggunakan kekerasan sampai mau menembak warga, untung kami masih bisa diselamatkan.



Sebelum kejadian sudah panas-panas karena melihat TNI yang lewat banyak banget. Saya sholat zuhur, dari sini lari saya panggil teman-teman semua, mengajak menolak adanya alat-alat karena salah satunya pasti merusak sawah - sawah kami.

Spontan ada seribu massa langsung turun. Kami membawa spanduk sambil nyanyi, kami turun ke sana ke depan tempat *water training*, di situ sudah 400 aparat menghadang kami dengan bawa tabengan begitu komplit dengan senjata.

Di situlah perjuangan kami mulai, kami berteriak-teriak, kami orasi, kami nangis-nangis memohon supaya TNI jangan ambil tanah kami karena di situlah satu-satunya untuk kehidupan kami untuk makan di situ bertani.

Sebelum 2007 ada sawah di sini, sekarang kayak lautan tidak ada manfaatnya anak-anak bisa kecebur, sudah tidak menjadi lahan garapan lagi. Sawah di sini sudah menjadi hak milik kami yang sudah disahkan Bupati, sudah ada SPPTnya, tetapi itu yang diklaim TNI.

Setelah 22 Januari 2007, kami kehilangan sawah,. Dulu kan setiap panen kami barengan bawa makan bawa nasi, sekarang hanya beberapa warga saja yang bisa seperti itu. Kedua, pikiran kami nggak nyaman, pahit banget, dari 2007 sampai sekarang merasa resah kayaknya hidup ini nggak tentram mikiran tanah.

Dulu kami nggak punya perasaan-perasaan seperti ini, aman, tentram kehidupan, walaupun kami hanya makan ikan asin, daun singkong, tapikan bisa bertani aman.

Kemarin kami bikin tim verifikasi, kami bikin kesepakatan bersama TNI duduk bersama, Dephan dan pihak Bogor. Surat sudah dikirim ke TNI, Dephan dan belum ada jawaban sampai sekarang. Satu-satunya yang bisa mencabut itu ya pihak TNI lagi.

Sampai sekarang kami bertanya siapa yang suruh TNI datang ke kampung. Hari itu kami usir TNI sampai dia pulang. Keesokan harinya 22 Januari 2007 jam satu siang, saya aktif di pengajian, ada ibu nangis, TNI yang kemarin datang lagi. Saya lihat ke situ ternyata mereka sudah datang bawa pasukan banyak, saya tidak takut karena TNI bakalan mengayomi. Lalu kami buat aksi, saya belum paham taktik aksi sama sekali

bawa poster dan kertas dan lari ke sawah, kami nangis ini tanah kami dan kami makan di sini. Kata tentara, "ibu jangan nangis," dan kami bertahan dua jam orasi, nangis, bertahan, telanjang, namanya lagi emosi. Lalu TNI buang tembakan, saudara saya terkena tembakan. Kami bertahan sampe jam lima sore, mereka [TNI] bilang, "pulang aja nanti ibu sakit dandanannya cantik pake kerudungan kenapa galak-galak sama kami."

Salah satu anak Ibu Haji Neneng kelas dua SMP kena pukulan sampai pingsan. Bu Haji Neneng selamatkan anaknya ke rumah sakit. Kami tetap bertahan mempertahankan hak-hak kami.

Akhirnya kami tidak tahu, diturunkan aparat tak terhitung membuang tembakan sampai kami tunggang langgang, kena pukulan, Pak Usup, teman saya terkena lemparan, saya teriak Allahu Akbar, kami kayak binatang. TNI banyak tak terhitung, sampai ke rumah warga, laki-laki semua kabur. Kami mengungsi saking takutnya.

Ternyata setelah kami pergi kekerasan menambah, seorang tokoh warga, yang tidak ikut aksi diambil dari rumahnya, disiksa, kena setrum. Seorang pemuda juga kena setrum. Ada tujuh orang tokoh yang ditangkap dan kena setrum.

Di markas TNI. Kenapa kok TNI itu, saya tiga hari menyaksikan begitu kerasnya TNI. TNI masih di kampung saya. Sudah 24 ha tanah diambil untuk perumahan elit, tiap hari kami dengar dentuman tembakan untuk latihan TNI di *water training* untuk latihan.

Setelah kejadian itu kami tidak merasa kalah meski ada yang tertembak, kami percaya siapa yang berjuang Allah melindungi. Kami didampingi LBH, KontraS, Walhi sampai saat ini. Pada 5 Mei 2011, kami aksi dengan semangat, para simpulnya begitu luar biasa sampai 6000 ribu massa dari Rumpin, kami ketemu TB Hasanuddin di situ, saya ikut masuk.

Setelah aksi tanggal 5 Mei 2011 satu minggu kami kunjungan ke DPR. TB Hasanuddin bilang pendekatan dengan TNI karena DPR pun bilang itu hak masyarakat Rumpin. Setelah itu kami pulang dan membentuk tim verifikasi, ada camat, warga, aparat desa dan TNI AU.

Buat tim, bahwa tanah di Desa Sukamulya, 36,6 ha adalah lapangan terbang, 24 ha yang dia [TNI] kuasai dengan perampasan yang dibeli 5000 per meter dan water training 19 ha adalah seluruhnya milik warga.

Tanah Pemda yang ada di dekat water training, dan 19 ha masuk ke sertifikasi. Kami mendatangi Pemda kenapa didiamkan, Pemda ke situ bawa Satpol PP dan mendatangi galian di luar galian verifikasi. TNI telepon Pemda bahwa 1000 ha di Sukamulya tanah mereka. Kami sedih karena Pemda takut TNI, apalagi Kami?

02 PIHAK KABUPATEN MENGAMBIL ALIH SUMBER HIDUP MASYARAKAT



[Kesaksian H. Kardjana]

H.Kardjana lahir di Indramayu, 12 Januari 1940. Ia melakukan advokasi terhadap masyarakat dengan membentuk Paguyuban Petani Tanah Pengangonan Desa Bogor. Karena sejak tahun 1968, terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah daerah yang mengkalim kepemilikan atas lahan Pengangonan di desa Bogor, Indramayu. Bapak H. Kardjana bersama beberapa petani Desa Bogor diangkut paksa oleh aparat ke Koramil lalu dilimpahkan ke kantor Polisi dengan status tahanan luar.

Masalah yang saya sampaikan adalah masalah perampasan Tanah Pengangonan 80 ha di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Tanah Pengangonan adalah tanah penggembalaan milik bersama oleh 123 warga ulayat. Tanah ini sebetulnya tanah turun temurun dan digarap oleh masing-masing keluarga.

Tetapi kami mendapatkan pukulan sangat berat ketika pemerintahan Orba tahun 1970-2000, tanah yang merupakan sumber penghidupan warga desa diambil semuanya oleh kantor Kabupaten. Bagi kami orang tani, tanah seperti isteri sendiri tidak jauh dari itu.

Kemudian kami protes selama 40 tahun. Tahun 1968 kami ditahan di Koramil berbulan-bulan dan kemudian tahun 1967/1968 dipindahkan ke tahanan kepolisian. Untungnya kami tidak dituduh PKI. Ketika di pengadilan, saya waktu itu diputus bebas murni.

Tetapi 12 anak lain bertahun-tahun melapor ke polisi sebagai tahanan luar. Selama 40 tahun kami melakukan protes, didengarkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga kami mendapatkan surat yaitu Peraturan No. 1 tahun 1982 bahwa tanah Pangangonan, Desa Bogor dikembalikan ke Desa Bogor, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat No 2113 bahwa tanah dikembalikan ke Desa Bogor.

Tetapi semuanya dianggap angin oleh Pemda Indramayu. Tanah Pangangonan itu kemudian dibagi tiga. Kami mendapat bagian hanya 28 ha, dari tanah seluas 80 ha. Kami tidak putus asa, kami maju ke Pengadilan Negeri Indramayu, mengajukan tuntutan bahwa kami tidak menerima keputusan pembagian tanah tersebut dibagi tiga dengan alasan apapun. Tahun 2010, keluar putusan MA yaitu tanah 80 ha dikembalikan ke Desa Bogor. Meski sudah ada putusan MA, namun tanah Pangangonan tetap dibagi tiga.

Akhirnya tanah dieksekusi pada 2011 dan kami mendudukinya ramai-ramai, kami menggarapnya. Tapi kami ditangkap pada tahun 2011, Kepala Desa Pak Sukarta divonis 4 tahun penjara. Kami semua 600 orang. Beruntung kami dapat pertolongan dari Kontras, Walhi, LBH Jakarta.

Tanggal 27 November 2013, kami masuk ke lahan itu kembali, waktu kami di tengah sawah datang pasukan berpuluh orang dipimpin Bapak Camat mau mengusir kami. Yang paling mengerikan pancingan Bupati ada traktor, di belakangnya, ada Camat, Polsek, Koramil, Pol PP, ada preman yang menyusup di lahan itu dan

dia langsung ke depan. Waktu deklarasi, perempuan berjuang hebat, betapa banyak dan antusiasnya mereka, perempuan dan laki-laki berjuang mempertahankan tanah Pangangonan. Sepertiga ibu-ibu yang berjuang, isteri saya tidak ikut karena dia sibuk menyiapkan makanan 600-700 warga,

Kami sudah terbiasa dengan pengalaman sering dikerasi. Pada tahun 2012 waktu didatangi unsur TNI, Polri, Satpol PP kami bisa menolaknya, tapi kepada preman kami takut karena preman ada di depan dan yang nembak tentara dan polisi di belakang, dan bom molotov sering dipakai meledakkan desa kami. Kemudian kami melaporkan ke Polisi para preman yang membawa bom molotov dan pedang yang berminggu-minggu beraksi di desa kami. Tapi polisi tidak hiraukan laporan kami. Atas nasihat Syamsulmunir kami menghadap Kapolri dan diterima ajudan polisi yang akhirnya memerintahkan ke Kapolres Indramayu untuk mengusut preman-preman tersebut.

Preman-preman akhirnya mulai takut. Kemudian terjadi rencana serifikasi tanah tersebut atas nama orang-orang yang tidak jelas. Kami menolaknya.

Saya menduga tanah ini mengandung minyak, sehingga pihak Kabupaten sangat ngotot ingin menguasainya.

03 PENGUASA DI BELAKANG PENGUSAHA MENGGUSUR PETANI

[Kesaksian Suhdin]

Bapak Suhdin berasal dari Kampung Badega, lahir tahun 1940, mewakili komunitas Petani Badega, memberi kesaksian Perlawanan petani Badega, Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat atas sengketa tanah antara 312 petani penggarap di gunung Badega dengan PT. Surya Andaka Mustika (SAM). Sengketa ini mengenai siapa yang berhak atas tanah seluas sekitar 400 Ha, eks perkebunan PT. Sintrin. Perlu diketahui bahwa masyarakat mulai membangun pemukiman di daerah gunung Badega sejak tahun 1930-an.

Di Badega ada tanah yang ditelantarkan oleh pengusaha seluas 498 ha. Dari sekian banyak tanah, 84 tanah Badega digarap oleh masyarakat di antaranya oleh orang tua saya, dan sampai dewasa



saya ikut menggarap tanah di sana. Tahun 1984 masyarakat mau mengajukan permohonan kepemilikan melalui Bupati Garut dan ditolak Bupati dengan alasan akan dijadikan perkebunan.

Para petani penggarap menggunakan dasar Keppres No.32/1979 dan Peraturan Mendagri No.3/1979 serta UUPA No.5/1960 yang menyebutkan bahwa, rakyat yang menggarap tanah negara, seperti tanah bekas perkebunan, sejak 1960 dilindungi undang-undang dan tak bisa diganggu gugat.

Sementara pada waktu yang hampir bersamaan PT. SAM yang berkedudukan di Bandung mengajukan permohonan HGU atas areal tanah yang sama.

Pada tahun 1985 Bupati Garut Kolonel Taufik Hidayat mengeluarkan surat yang isinya, menolak permintaan para petani penggarap dengan alasan antara lain: (i) Bahwa tanah-tanah eks perkebunan harus tetap dipertahankan fungsinya sebagai perkebunan, (ii) tanah perkebunan terlantar gunung Badega sedang dalam proses untuk diberikan HGU kepada PT. SAM.

Jalan keluar melalui mengirim surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri tidak pernah dijawab, begitu pula pengajuan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Garut tidak pernah mendapat respon yang semestinya. Karena permohonan masyarakat ditolak kami ke Agraria, kami tanya kenapa ditolak, Tanpa sepengetahuan petani penggarap, tahun 1986 HGU perkebunan terlantar dimiliki oleh PT. SAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/HGU/DA/86 yang ditandatangani Dirjen Agraria. Sejak itu PT. SAM telah menganjurkan kepada para petani penggarap untuk segera menyerahkan tanah garapan mereka dan dijanjikan akan diterima menjadi buruh perkebunan PT. SAM dengan upah Rp 600/hari.

Muncul PT. SAM mengobrak abrik tanah rakyat, dengan menggunakan polisi, hansip dan tentara. Saya diculik malam-malam sekitar jam 7 tanggal 30 september 1988. Yang datang polisi dengan menggunakan 2 mobil jeep, saya diambil, diantaranya ada 2 orang kawan saya ikut dan dibawa ke kantor Kecamatan Kicaga. Saya dipukul sampai muka babak belur, saya ditelanjangi, ini badan disundutin api

rokok, setelah itu dipanggil ke Kapolres. Saya dijebloskan ke penjara.

Esok harinya saya disatukan dengan orang lain yang bertindak kriminal, pencuri, pembunuhan, pemalsuan. Ukuran kamar tahanan 1,5x 2,5 m diisi tahanan 27 orang. Yang paling mengerikan selama satu minggu kalau buang air besar ditampung dengan kantong plastik (kresek) kalau mau kencing pake botol Aqua.

Paling ngerinya, saya mau sholat, minta keluarga bawa ember untuk tampung air sholat, dan ember ditendang Polisi. Jadi saya tidak bisa sholat. Enam puluh hari kemudian saya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (LP). Waktu saya masuk LP, ada mahasiswa yang mendampingi masyarakat, karena saat itu masyarakat dikejar oleh Hansip dan Polisi.

Di pengadilan Garut, masyarakat kalah. Yang dipenjara 13 orang, saya divonis 16 bulan, tapi saya naik banding. Surat keputusan pengadilan tinggi menyebutkan bahwa dikarenakan masyarakat terlebih dahulu ada di tanah Badega dan sudah mengajukan permohonan kepemilikan, maka kepemilikan tanah dikembalikan ke masa sebelumnya, kecuali ada yang mengajukan tanah secara sukarela ke PT. SAM.

Saya dibebaskan oleh pengadilan tinggi. Tujuan UU Agraria '60, rakyat yang menggarap tanah rakyat bekas perkebunan tidak bisa digugat dan dilindungi UU Agraria, mau apa lagi?



“Status masih tanah negara, sekarang tinggal 30 ha yang dikuasai perusahaan dan bukan PT. SAM tapi PT. Cakra. Tahun 1986 PT. SAM diberi HGU dan sekarang HGU sudah habis. Apabila PT. SAM berhasil apakah bisa diambil alih, karena keputusan Gubernur Jawa.” Barat No. 104 menyebut dilarang mengover alih merubah bentuk.”

04 HUTAN AKAN LEBIH AMAN KALAU DIJAGA RAKYAT



[Kesaksian Mursid Tenggara]

Bapak Mursid Tenggara, 36 tahun berasal dari Kampung Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, Banten, menuturkan soal pencaplokan tanah adat untuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Banten.

Kampung Cirompang merupakan kampung yang masih memegang erat adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat yang bermukim di Kampung Cirompang merupakan keturunan/incu putu dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar (komunitas Adat).

Dari penelusuran sejarah dan diskusi dengan kasepuhan mereka mulai bermukim di Desa ini sejak masa penjajahan Belanda-Jepang. Pada tahun 1978,

hutan adat Cirompang beralih fungsi menjadi hutan produksi.

Implikasi atas perubahan ini berdampak pada akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan semakin terbatas. Pada tahun 2003, hutan produksi beralih menjadi hutan konservasi, sebagai perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003, menyatakan bahwa semua areal masyarakat kasepuhan menjadi kawasan TNGHS yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan dan keleluasan dalam menggarap lahan adat mereka. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pengelola TNHGS. Kampung Cirompang luasnya 600 ha, hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan AMAN pada tahun 2008.

Dari 600 ha itu, sebanyak 50 ha masih hutan, kami sebut Hutan Tutupan. Sebanyak 320 ha hutan di zona pemanfaatan, kami sebut Lahan Garapan. Leluhur sudah membuka garapan di sana sejak dahulu dari tahun '20 an. Yang jelas sebelum kemerdekaan Indonesia, leluhur kami sudah menempati lahan tersebut.

Pada tahun '78 waktu itu saya baru berumur satu tahun, wilayah kami yaitu wilayah adat yang 372 ha dirampas oleh Perum Perhutani. Mereka kemudian memungut sejenis pajak penghasilan 25 persen pertahun dari petani.

Ketika seluruh tanah tersebut dijadikan hutan konservasi yang berarti masyarakat tidak bisa lagi mengelolanya, masyarakat-pun masih tetap dikenai pajak walau dengan cara halus, yaitu memberikan sumbangan yang dikumpulkan oleh Ketua Rukun Tetangga, yang kenyataannya kemudian diserahkan kepada pihak Taman Nasional.

Pada 2005, ketika membangun mushola kecil kami minta ijin kepada petugas Taman Nasional untuk membangun mushola dan minta kayu walau kayunya di ladang kami karena klaim mereka sudah kelola di sana, maka kami negosiasi, "silahkan tapi jangan terlalu banyak," kata petugas. Maka ditebanglah 6 pohon secara acak.

Suatu ketika, datang petugas ke kampung di belakangnya ada polisi. Saya bertanya, "Ada apa?" Ternyata mereka memeriksa kayu yang akan kami buat untuk membangun mushola.

Jumlahnya hanya 60 potong saja. Kayu direndam di kolam agar tidak terkena rayap. Ternyata mereka angkat semua kayu, termasuk milik warga untuk dijadikan barang bukti.

Singkat cerita dibawahlah dua tokoh Kasepuhan, Wolotopon Pemangku Adat dan Muhro Ketua Pembangunan. Mereka dibawa ke bawah, saya ikut mendampingi.

Sore pukul 4 saya pulang ke rumah ditanya Amusuniah, isteri Wolotopon, "Murshid kakek lu kemana?"

"Sudah dibawa polisi," beliau menangis.

"Tolong kakekmu," katanya,

"dia sudah tua kenapa dibawa polisi kalau kalian tidak mau menolong saya sendiri berangkat ke sana."

Akhirnya kami mengurusnya ke sana ke mari. Setelah 2 hari 2 malam, Wolotopon dan Muhron ditahan di Kapolsek Subang, mereka dikeluarkan.

Sebenarnya yang dilakukan mereka di sana dengan dalih konservasi, adalah membuat program penanaman tanaman endemik di lahan warga seluas 320 H. Padahal itu omong kosong. Buktinya di kawasan Sinakem kayu habis ditebang pengusaha yang sampai saat ini tidak ditangkap.

Pernah ditangkap, setelah hutan itu habis, tukang pikulnya [buruh] divonis penjara lima tahun Terkait dengan Perda, hutan yang dijaga oleh Negara, kalau dibandingkan dengan hutan yang dijaga rakyat, lebih aman yang dijaga rakyat.

Yang dijaga Taman Nasional sekarang sudah tidak ada. Ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat, kata Menteri Kehutanan pengakuan sebagai hutan adat akan sah jika dibuat dalam bentuk Perda, maka kami bekerja keras agar hak wilayah adat keluar Perda. Kami bekerja keras agar keputusan tersebut masuk dalam Perda.

Saya dan teman teman di Cirompang dan Kesepuhan masih merasa sebagai bangsa Indonesia meski dalam tanda kutip kami belum merdeka dan kami perjuangkan sampai merdeka, kami berhak atas tanah.

05 PEMDA & PENGUSAHA BERSEKONGKOL MEMISKINKAN RAKYAT



[Kesaksian Jaya]

Bapak Jaya, 57 tahun, tinggal di Desa Rawa Indah, salah satu lokasi transmigrasi yang berada di wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Bengkulu. Secara administratif Desa Rawa Indah terletak di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Wilayah ini dihimpit oleh investasi perkebunan dan pertambangan, dan selalu diincar oleh pengusaha-pengusaha tambang. Walaupun sejak 2011 masyarakat dapat menghentikan salah satu perusahaan yang bergerak di tambang pasir besi yaitu PT Famia Tardio Negara, namun dengan berhasil menghentikan PT Famia Tardio Negara ini, tidak berarti lepasnya semua masalah.

Sejak tahun 2011 datang ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit PT Agriandalas. Bersama masyarakat Desa

Rawa Indah, Bapak Jaya melakukan perlawanan terhadap PT Agriandalas. Akibat aksi perlawanan tersebut, Bapak Jaya mengalami ancaman pembunuhan dan teror yang tidak hanya ditujukan kepada dirinya namun juga dialami oleh dua orang anak perempuannya.

Berdasarkan data yang ada di Kanwil BPN, lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Agri Andalas tahun 1987 dan berakhir tahun 2018, hanya di wilayah Kecamatan Sukaraja dan Seluma. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Ilir Talo yang berada berdekatan dengan desa Rawa Indah dan Penago Baru, tidak ada dokumen. Sedangkan berdasarkan data yang di dapat bahwa HGU PT Agri Andalas hanya mencapai angka 7.000 hektar namun realita yang terjadi di lapangan luas wilayah lahan kebun PT Agri Andalas

mencapai angka 17.000 hektar. Kelebihan lahan tersebut diambil secara paksa dan ilegal, termasuk kawasan transmigrasi Desa Rawa Indah seluas 174 ha.

Untuk menyelesaikan konflik, dikeluarkan Surat Keputusan oleh Pemerintah Daerah, tetapi ini belum menjadi solusi penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT Agriandalas, karena sampai saat ini tim yang dibuat tersebut cenderung berjalan di tempat tanpa ada upaya serius sebagai upaya penyelesaian konflik.

Yang mengesankan, sebagai daerah transmigrasi yang sesungguhnya menjadi program pemerintah di jaman orde baru, diskriminasi lain yang dialami oleh warga adalah ketiadaan akses jalan yang memadai bagi warga.

Desa mereka terisolir, berlumpur. Untuk mencapai ibukota kabupaten yang jaraknya 17 Km, harus menempuh waktu dua jam. Belum lagi diskriminasi yang dialami oleh warga karena para transmigran ini dianggap sebagai pendatang bagi masyarakat lokal.

Pemerintah tidak peduli dan cenderung mengabaikan kondisi wilayah ini, karena wilayah ini dianggap sebagai pembangkang dan penghambat investasi di kabupaten Seluma. Dalam konflik ini, PT Agri Andalas melakukan bermacam provokasi dan propaganda mendekati Pemda sehingga lahannya menjadi seluas 17 ribu ha, di luar HGU yang dimilikinya.

Masyarakat tetap berjuang, mempertahankan lahan milik warga yang sudah ditanami oleh warga. Ketika kami mengambil tanaman atau mencabut tanaman yang menindih tanaman kami, PT Agri Andalas melaporkan kami ke aparat hukum, sebaliknya ketika masyarakat ambil 1 berondol kelapa sawit, Brimob datang dan Pemda diam saja.

Saya diintimidasi oleh preman. Para preman dan polisi datang ke rumah mendesak harus meminta maaf. Pada bulan Desember 2012, bermacam intimidasi dan kekerasan dilakukan terhadap kami. Anak gadis saya sedang menghadiri pernikahan di kampung lain, dia dihadang dan dihajar oleh preman sampe babak belur dan tidak ada yang berani melawan.

Dia lari ke kamar Pak Azwar, seorang warga desa setempat. Anak saya dan temannya serta Pak Azwar lari ke hutan, dan selama setengah hari bersembunyi di hutan. Kemudian dijemput warga, polisi dan camat lalu di bawa di rumah sakit untuk divisum. Selanjutnya setelah di-BAP oleh pihak kepolisian sampai sekarang tidak ditindaklanjuti sama sekali.

Masih kurang puas mereka mengadakan berbagai tindakan untuk membuat hati saya luntur untuk berhenti berjuang. 15 hari kemudian, anak saya ke dua, lagi bermain dengan pacarnya sekitar 500 meter dari desa di pinggir pantai, dia dihampiri 4 preman tak dikenal, tanpa basa basi diikat pacarnya dan dibuang ke hutan, ketika melihat anak saya, langsung diinjak lehernya. Tidak puas

memperlakukan anak saya seperti itu, pacar anak saya diikat kakinya tangannya, baju disobek anak saya pun begitu. Seluruh baju anak saya dilucuti dan alat kelamin anak saya diraba pelaku, anting emas dilucuti, motor di ambil dan ditinggalkan begitu saja.

Pacar kemudian berhasil melepaskan diri dan mengambil baju di rumah lalu membawa anak saya ke rumahnya. Besoknya saya dan anak ke Polres, di-BAP. Tadi saya dengar informasi dari Polisi mengatakan “sabar nanti kami tindaklanjuti”.

Di daerah saya ada 28 motor hilang lima kasus perampokan dan belum diungkap. Satu nenek dirampok, mulutnya disumpel dengan kain untuk sholat dan meninggal. Ini semua modus perusahaan untuk membuat kami tidak betah di sana setelah kami tinggalkan mereka berpesta ria.

Alasan kami menolak tambang pasir besi PT Famian, karena desa kami berjarak 500 meter dari pantai, dan hanya berjarak tiga meter dari air pasang tertinggi. Ini merupakan ancaman besar dari tsunami.

Harapan, kepada semua elemen dan teman-teman untuk membantu saya agar kasus saya cepat terselesaikan. Saya mengharapkan jaminan keamanan dan jaminan sosial bagi diri saya, keluarga dan masyarakat. Kemudian tolong tanah 174 ha dikembalikan kepada masyarakat karena itu hak warga.

Tambang pasir besi luasan sekamir 3600 ha sekian, dua kilometer masuk ke dalam laut dan tiga kilometer ke

darat maka pemukiman kami habis, transmigrasi 450 ha kali 2 sekamir 2000, maka di bawah pemukiman kami juga termasuk ijin PT tambang itu.

Kami ramai-ramai datang ke kantor bupati dan jawaban pemerintah, meski kalian nangis darah saya tidak mencabut ijin PT Famian. Di dalam peta kerja PT Famian tidak ada Rawa Indah, kampung kami, dan ditulis di situ hutan belukar, padahal kami sudah masuk di wilayah itu dari tahun 1992.

Mungkin sudah takdir dari yang Maha Kuasa, saya pernah ditawari PT Famian sebesar Rp 35 juta saya tidak mau. Mungkin itu sudah panggilan. Isteri saya juga ikut aksi dia bagian pegang uang, isteri saya pernah ikut ke Bandung ikut kegiatan bersama Jatam dan Walhi, kami di rumah sudah jodoh.



06 ADA APA DIBALIK UDANG?



[Kesaksian Nafian Faiz]

Bapak Nafian Faiz, lahir di Sawang Balak, 05 Juni 1967. Ia bergabung dengan PT. Dipasena Citra Darmaja (PT. DCD) sejak tahun 1992. Ia mewakili Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), Dipasena Lampung

Petani Tambak Udang Bumi Dipasena adalah Petani Tambak dengan pola kerja sama kemitraan antara PT. Dipasena Citra Darmaja (Anak Perusahaan Gajah Tunggal) Milik Syamsul Nursalim sebagai inti dan Petani Tambak sebagai Plasma nya.

Pembukaan lahan pertambakan dimulai tahun 1989 dengan luas lahan pertambakan 16.000 ha lebih, yang berada di Ujung Pantai Timur Lampung. Tambak ini terintegrasi dengan berbagai infrastruktur

lainnya seperti: Pembenuhan, Pabrik Pakan, Pengolahan Udang, Pengolahan Air Tambak, Pabrik Es, Pendidikan, Pemerintahan, termasuk pula fasilitas Ekspor Impor dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan Berikat.

Permasalahan mulai mencuat antara petambak Plasma Dipasena dengan Perusahaan Inti PT DCD bermula pada tahun 1997. Saat itu budidaya petambak plasma berhasil, namun sudah delapan tahun lebih hutang yang ditanggung petambak tak kunjung lunas, bahkan jumlahnya bertambah.

Pihak perusahaan menanggapi sebagai dampak dari krisis moneter yang terjadi. Saat itu perusahaan tidak memberi transparansi pembayaran hutang setiap petambak. Hak dan

kebebasan para petambak plasma juga terampas dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang sepihak. Ditambah lagi dengan kewenang-wenangan PT DCD dalam menentukan harga jual udang dan kebutuhan produksi udang. Para petambak plasma yang merasa dirugikan menyuarakan haknya dan membentuk organisasi petambak.

Pada 2 September 2010, terjadi aksi massa besar-besaran menuntut hak-hak dan dilaksanakannya kewajiban revitalisasi. Beberapa anggota P3UW dituduh sebagai provokator kerusuhan tersebut. Selanjutnya Bapak Nafian Faiz bersama tiga pengurus P3UW lainnya yakni Anul Muklis, Sigit Winardi dan Abdurrahman ditangkap oleh aparat. Bapak Nafian Faiz kemudian divonis hukuman penjara selama 30 bulan oleh Pengadilan Negeri Menggala, Lampung.

Kami menempati areal penambakan 16 ribu ha kalau kanal digabungkan jadi satu lebih panjang dari jalan lintas Sumatera. kami ada 700 kk, kami berhimpun di organisasi Perhimpunan Tambak Udang Windu. Kami sudah melakukan protes sampai Jakarta ada 32 bis, dan dibidang disponsori oleh PKI. Tambak ini bermasalah dan dijual oleh pemerintah dan dikuasai oleh Aset Kredit dan Saham Group Dipasena kepada PT. Central Proteina Prima (CPP Group) melalui konsorsiumnya (Konsorsium Neptune). Karena melakukan protes, saya dipenjara 2,5 tahun

Sebenarnya kami lupa masa lalu kami dan menatap masa depan. Bagi kami tidak ada pilihan kecuali melawan. Puncaknya

perlawanan kami, saya ditahan dan dikriminalisasi. Seorang provokator. Sekarang ingin menatap masa depan kami lupa kalau Presiden SBY berjanji ingin menyelesaikan masalah kami dalam 100 hari, kami lupakan janji gubernur kami dan janji bupati kami. Negara nggak ada kami berproduksi sendiri.

Perputaran uang di sana 15-20 milyar per hari. Tambak ini menyumbang 60 persen udang nasional. Kalau saya ingin uang bukan saja saya bebas dari penjara tapi bawa uang dan mobil dari penjara tapi saya tidak mau dan memilih berjuang dengan kawan-kawan.

Beberapa hari di sini, saya mendengar cerita yang lain, ternyata derita saya tidak seberapa dengan penderitaan Ibu dan Bapak lain.

Orang tua bicara sejarah dan anak muda bicara masa depan. Saya bersyukur di penjara setidaknya menempa fisik dan batin keluarga saya menjadi mandiri, itu menjadi pelajaran luar biasa bagi anak-anak, mereka mencari sekolah sendiri.

Apa kita perlu melihat masa lalu terus sementara perlu lihat masa depan. Saya bersyukur tambak kami tambak terbaik di dunia dan sebulan lalu kami dibawa ke Indramayu.

Pelajaran saya di Indramayu, tidak ada satupun tambak di Indramayu yang tidak dibidang juragan, namun kenapa kami di Lampung tidak kaya?

Karena kami bertahun-tahun diperbudak. Sekarang kami belajar mau kaya tanpa hutang.

Kami hampir enam tahun sebelumnya diperlakukan gaya militer, kami disana bukan petani biasa, kami direkrut dengan pendidikan militer ketat, negara di dalam negara, orang tua tidak bisa masuk kalau tidak ada ijin, presiden juga mau masuk harus ada ijin, kami juga ada perpecahan internal pemimpin, ada yang disogok, bawa pulang kompensasi dan ini bukan pekerjaan mudah.

Sudah banyak pimpinan kami yang silih berganti, tempat kami tempat terpencil, butuh delapan jam dari kota di jaman dulu sampai sekarang TV tidak bisa masuk dan perusahaan bisa buat berita sendiri, Saya sempat trauma kalau ada speed boat masuk.

Dulu begitu saya sering dijaga teman-teman. Karena pendidikan kami dilatih dan kepentingan kami satu, masing-masing punya dua lahan tambak, Posisi sama sehingga mau bergerak ya sama.

Kalau dulu perusahaan drop pakan ke tambak secara khusus, sekarang penambak yang beli pakan sendiri, begitu juga es jadi ini bisa menggerakkan ekonomi, tinggal pemerintah yang lihat, ini tidak menarik karena kami tidak kasih upeti. Kita bangun saja negara ini dengan kemampuan kita sendiri.

07 TAMBANG NIKEL, LAPANGAN GOLF MENGUSUR SAYA KE PENJARA

[Kesaksian Jardin Kololi]

Jardin Kololi lahir di Dongi, 17 Agustus 1948, berasal dari suku Karonsie' Kampung Dongi, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1950, Pak Jardin bersama anggota komunitasnya meninggalkan Kampung Dongi karena merasa terancam keselamatannya sehubungan dengan terjadi pemberontakan DI/TII pada waktu tersebut. Lalu dilanjutkan dengan peristiwa G 30S, membuat warga Dongi trauma dan takut untuk kembali. Namun pada tahun '67 ketika Pak Jardin dan kawannya mencoba kembali untuk melihat kondisi kampung ternyata PT. Inco dari Kanada sudah mulai masuk dan mengelola tambang nikel.



Pada tahun 1967 wilayah adat Dongi oleh Pemerintah diberikan ijin kepada PT. International Nickel Indonesia (PT INCO) Tbk, melakukan penambangan bijih nikel melalui kontrak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat Dongi sebagai pewaris wilayah adat tersebut.

PT. Inco mengatakan bahwa tanah kami sudah mereka bayar dan masuk dalam kontrak karya mulai '68. Kami tidak bisa buat apa-apa, kami takut apalagi ada korban peristiwa '65, sehingga kami diam.

Pada Mei '99 kami coba tanya ke pemerintah dan dihalangi. Ketika saya datang ke Dongi, sudah digusur semuanya, pada tahun '67 dibakar gerombolan DI/TII, dan tahun '78 sudah digusur PT. Inco dan dijadikan lapangan golf.

Pada 2002 Mei, kami mengajak beberapa teman, kami bertindak menduduki lahan, tapi yang terjadi kami menjadi bulan-bulanan polisi dan dibawa ke sana kemari, diinterogasi dan puncaknya tanggal 17 April 2003, Kapolsek Nuha Let 1, Abdul Tamimi, datang dengan anggotanya bersenjata lengkap dan perintah tembak ke kami.

Saya sedang mencangkul, dia datang. Saya buka baju dan bilang, "siap Pak ditembak saya mati, siap membela hak anak cucu saya daripada mati ditembak karena korupsi," saya disiksa, diseret dan dibuang ke mobil polisi lalu dibawa ke kantor security terdekat.

Seorang kemenakan saya, perempuan, berdua kami diintimidasi dari pagi sampai jam empat sore, dan kami berdua pulang berjalan kaki. Saya dipanggil kembali, diinterogasi, selama 3 bulan saya dimasukkan ke tahanan tidak pernah ditanya apa kesalahan.

Terakhir saya ditangkap dengan tuduhan melawan pemerintah, melawan PT. Inco dan menyerobot tanah perusahaan. Bagaimana bisa? Ini tanah saya. Terima kasih kepada Walhi dan Ibu Mai, saya tidak tahu bagaimana proses hukum. Saya ditanya Camat apa ada sertifikat?

Saya bilang saya punya nenek moyang tidak tahu sertifikat dan beberapa tahun kami tidak pernah diberi kesempatan hidup layak. Terakhir saya dipanggil dan disuruh keluar dari lokasi.

Saya juga beruntung sudah ada yang mau mengikuti saya di lokasi tempat saya sekarang, sudah ada 54 kk yang lain masih bertebaran di luar karena masih takut dengan intimidasi dimasa lalu.

Dari Orde Lama dan ke Orde Baru yang kami harapkan ada perubahan ternyata tidak ada dan sekarang reformasi beda-beda tipis. Kami heran tidak bisa diberi keleluasaan hidup dan dianggap ilegal, padahal sebagai masyarakat adat, kami punya bukti adat sesuai kriteria yang disampaikan AMAN [Aliansi Masyarakat Adat Nusantara]. Kami tidak punya tanah lagi, sawah sudah ditenggelamkan, air kami yang dulu untuk sawah tapi sekarang jadi air mata.

Kami menonton kekayaan alam kami dibawa keluar. Daerah saya terkaya di Sulawesi Selatan, karena targetnya 100 ton nikel per bulan dan kami sampai sekarang tidak menikmatinya.

Keadaan perempuan-perempuan kami yang dulu punya kegiatan sekarang ini tidak bisa bekerja karena tidak ada hutan tidak ada sawah. Juga sekarang banyak kawin kontrak di sana. Kawin 3 bulan kemudian diceraikan. Banyak kafe di pinggir jalan, yang katanya dilindungi.

Kami meminta air minum tidak dilayani karena di sana ada 3 PLTA, 165 mw 110 mw dan 95 mw. Walaupun ada PLTA kami masyarakat di sekitar itu masih memakai pelita. Kami bersurat resmi sudah 10 tahun untuk meminta penerangan tetapi tidak pernah diberi.

Baru pada bulan Mei lalu, kami menyambung kabel [listrik] ke rumah dan ditangkap, karena dituduh mencuri.

Sangat menyakitkan sampai hari ini, kami tetap dianggap sebagai penduduk ilegal. Tidak boleh bikin rumah permanen. dan tidak pernah diberikan apa-apa. Itulah pengalaman kami.

Waktu ke sini ke mari, sudah ada 54 kk dan komitmen kami sudah siap menata kembali kampung kami. Bekas kampung kami telah menjadi lapangan golf. Saya dan teman membangun rumah sekitar 200 meter dari desa lama dengan nama Kampung Baru.

Harapan kami adalah melalui perjuangan yang panjang dan dibantu oleh teman-teman dari pelosok tanah air, dengan semangat juang yang tinggi dan tidak merasa lelah, kami mengharapkan bias membangun hari esok yang lebih baik dari hari ini.

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Penggunaan dan Praktik Militerisme
dalam Penguasaan SDA
dan Pembangunan

Oleh Mia Siscawati
(Akademisi dan Aktivis Rimbawan
Muda Indonesia)

Ass. Salam sejaherta, selamat siang. Terima kasih Bu Neneng, Pak Karjdana dan Pak Mursid. Terima kasih atas kesaksian yang diberikan. Saya hadir di sini, walau diundang sebagai saksi ahli tapi sebenarnya Ibu dan Bapak dari komunitas adalah ahli sesungguhnya. Semoga kesaksian tadi menjadi pengetahuan untuk mendorong perubahan.

Kisah tadi adalah kisah keseharian dalam komunitas selama Orde Baru dan sampai sekarang terjadi. Selama Orde Baru, negara ini digambarkan sebagai komunitas yang subur dan Soeharto menyebut diri sebagai Bapak Pembangunan, namun si bapak mendorong beragam terjadi kekerasan terhadap warga di desa dan perempuan serta kelompok marginal yang menderita.



Paling tidak dari kisah tersebut dan ribuan kisah lain, ada 3 (tiga) faktor akar konflik yang dialami perempuan, laki dan kelompok marginal lainnya di komunitas:

1. Diadopsi konsep teritorialisasi SDA dan kekayaan alam
2. Kebijakan pembangunan terutama agraria berbasis pada komodifikasi alam yang menempatkan alam sebagai barang yang bisa diperjualkan belikan terutama untuk pemenuhan pemodal bukan rakyat
3. Pendekatan militerisme dalam pengelolaan SD

Teritorialisasi SDA

Ini sudah terjadi selama masa kolonial undang-undang yang direproduksi oleh ORBA terkait erat dengan teritorisasi negara, bukan sekedar membuat batasan

wilayah luar dari wilayah negara tetapi juga teritorialisasi internal negara dengan membuat batasan penguasaan negara atas wilayah tertentu yang mengandung kekayaan. Hal ini didukung oleh pembuatan batas - batas dan perampasan wilayah diikuti beragam kekerasan untuk mempertahankan pembatasan tersebut.

Proses ini dimulai jaman penjajahan dan dilanjutkan pada Orde Baru. Orde Baru menetapkan beragam peraturan yang mengukuhkan teritorialisasi SDA. Saya gunakan ilustrasi sektor kehutanan yang kemudian direproduksi untuk sektor lainnya.

Salah satu cara teritorialisasi negara secara internal, hutan yang sebelumnya dikelola masyarakat adat kemudian dengan menetapkan hutan sebagai kawasan hutan negara. Karena negara punya kepentingan atas tanah tersebut.

Kawasan hutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1977 dan diperbaharui Tahun 1979, menetapkan semua wilayah yang tidak ada hak milik individual ditetapkan sebagai hutan negara.

Hal ini menyebabkan ribuan kampung dianggap tidak pernah, ada orang-orang, perempuan dan laki-laki dianggap tidak ada kalau ada mereka bukan warga negara, mereka penduduk ilegal di kampung sendiri, namun mereka akan dianggap warga ketika ada kepentingan politik.

Ada kasus dimana perempuan tua di kawasan hutan dipaksa untuk ikut KB, yang dipaksa oleh polisi hutan, alasannya supaya kalian tidak banyak anak agar tidak ada perambah hutan. Kepada perempuan-perempuan di kampung melakukan beragam kekerasan yang khas dialami perempuan dilakukan oleh pegawai kehutanan.

Kebijakan Agraria berbasis

Komodifikasi

Teritorialisasi berlanjut dan diperkuat oleh kebijakan negara yang menetapkan alam komodifikasi berbagai kebijakan Agraria di Indonesia memiliki karakter serupa yaitu penguasaan tanah untuk mendukung kepentingan pasar global. Pada masa sekarang komodifikasi alam sebagai barang yang diperjualbelikan atas nama pelesatiran lingkungan.

Proses ini menyebabkan perempuan dan kelompok marjinal terlempar dari kampung karena pemiskinan semakin terjadi, perampasan tanah membuat ruang hidup semakin sempit.

Data statistik wilayah-wilayah yang menjadi penguasaan negara menjadi wilayah tingkat migrasi, bahkan menjadi tempat perdagangan perempuan wilayah pengirim buruh perempuan, Sebagian mereka keluar karena korban trafiking. Kebijakan tersebut bekerja sama dengan faktor ketiga

Pendekatan Militerisme

Apa yang dialami Ibu Neneng, dll, adalah kisah yang menggambarkan pendekatan militer tidak hanya dalam rangka menghukum atau memperkecil

upaya mempertahankan hak tapi juga pendekatan militer dilakukan secara formal pada masa ORBA. Dari kita tahu Soeharto merekrut militer untuk duduk dalam kabinet teknis baik yang aktif maupun purnawirawan.

Soeharto menunjuk seseorang dari pimpinan direktur jenderal kehutanan bernama Sujarwo, dia rimbawan, seorang pejuang kemerdekaan ikut membasmi PKI 1948 di Madiun. Dia menyatakan bahwa gagasan para ahli bahwa rakyat adalah pengelola kehutanan merupakan gagasan dari komunis. Para rimbawan ketika pendidikan mengikuti pendidikan militer. Ijin Hak Pengelolaan Hutan di kawasan hutan negara yang ditetapkan hutan produksi banyak diberikan kepada institusi militer, walaupun diberikan kepada perusahaan swasta hanya menyiapkan modal dan jaringan pasar tapi mereka kerja sama dengan institusi militer. Pendekatan militer ditetapkan dalam pengelolaan hutan negara, termasuk oleh Perhutani, sebuah BUMN di Jawa yang menggunakan militer, tidak hanya militer tapi juga para-militer. Namun para preman bukan hanya dari luar kawasan, tetapi juga dari dalam kawasan.

Sebetulnya mereka para pemuda yang ruang hidupnya sempit, kehilangan pekerjaan dan tidak punya tanah, menjadi penganggur dan direkrut menjadi para-militer. Pendekatan militer diadopsi di sektor lain seperti tambang, sawit, laut, dan lain-lain. Korban militer ini bukan hanya pejuang laki-laki tapi juga perempuan muda, yang mendapat kekerasan berbasis gender.

Pendekatan tersebut dikaitkan dengan kriminalisasi terhadap para pejuang agraria. Kriminalisasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang membuat siapa saja di kawasan hutan mudah dikriminalisasi jika ketahuan menebang hutan maupun memegang alat yang dianggap bisa menebang pohon, UU ini telah ditetapkan pada tahun 2013.

Ketiga faktor diatas tidak hanya pada masa ORBA, tetapi berlangsung hingga saat ini. Ada beragam upaya dilakukan untuk melindungi komunitas.

**Pak Mursid menyebut keputusan
Mahkamah Konstitusi:**

**Kawasan hutan adat bukan
lagi hutan negara, ini tonggak
perlindungan hak masyarakat
adat, tetapi kementerian
kehutanan masih mengelak
dari keputusan ini.**

**Seperti Pak Mursid tadi bilang
kalau mau mendapatkan
pengakuan kata Kementerian
Kehutanan harus mendapat
pengakuan dari pemerintah
daerah dulu. Bagaimana bisa
dari Mahkamah Konstitusi
turun ke pemerintah daerah?**

TANGGAPAN SAKSI AHLI

Keterlibatan Non State Actor dalam
Konflik Sumber Daya Alam
dan Pembangunan

Oleh Siti Maemunah
(Pegiat Lingkungan)

Terima kasih kepada KKP dan selamat sudah melaksanakan ini. Yang kita saksikan kasus terakhir melibatkan korporasi yang kepentingan hanya satu bagaimana menghasilkan kepentingan sebesar-besarnya dengan modal murah dengan ciri perusahaan bisa skala besar trans-nasional bisa kecil bisa dibiayai bank dan kedua berhubungan dengan pasar, tambak udang, pasir besi, nikel. Peran korporasi sebagai aktor pelanggaran HAM sudah terjadi sejak lama.

Pengaduan itu sudah sampai di PBB sejak tahun '98, mereka sudah membuat komisi yang melihat bagaimana perilaku korporasi, yang kemudian merekomendasi bahwa melindungi hak asasi manusia adalah tugas negara dan korporasi menghormati hak asasi manusia, korban wajib mendapat hak pemulihan.



Sekarang kita kenal panduan bisnis dan HAM. Kita tahu angka pelanggaran HAM oleh korproasi tinggi, di mana 1009 kasus pada November sampai Desember 2012, yang melibatkan korporasi agraria dan mencemarkan lingkungan.

Perusahaan prinsipnya mengatur diri sendiri dan tidak diatur oleh negara. Kasus Rio Tinto di Kalimantan Timur, katanya kami punya code of conduct, katanya CSR adalah proses mengkomunikasikan perilaku buruk perusahaan.

Dimana negara kemudian karena perusahaan tidak mau diatur maka mereka yang atur negara. Kontrak karya Freeport ditetapkan sebelum kita punya UU Pertambangan. Seluruh kontrak karya pada masa Soeharto mengikuti kontrak karya PT Freeport.

Belakangan pengamanan objek vital negara tiap tahun ada ratusan daftar perusahaan yang harus dijaga keamanannya oleh tentara dan polisi.

Melihat pengalaman kasus sebelumnya membayar langsung aparat keamanan dan preman, dalam kasus Freeport setelah dipublikasi oleh security exchange bahwa tahun lalu Freeport membayar militer sebesar Rp 50 Milyar. Cerita Pak Jaya, bagaimana kemudian Aparat Keamanan membiarkan kasus tidak tertangani, rampok musiman agar masyarakat tidak tenang.

Kasus Rio Tinto, salah satu manajer perusahaan memperkosa 6 perempuan dan tidak ada yang masuk penjara, bahkan ada yang jadi Bupati Kutai Kartanegara, sekarang ke korban mereka bilang sudah kasih uang santunan. Pola tetap di banyak tempat menuduh komunis.

Pola lain dengan menetapkan skema - skema seperti kasus perbudakan buruh murah dalam praktek perusahaan. Model melempar tanggung jawab, PT.Inco kemudian dijual ke Nale Brazil dan Nale Brazil tidak pernah tanya kepada masyarakat bagaimana status tanah. Negara membiarkan perampokan luar biasa atas SDA dan rakyatnya dibiarkan dibayar murah.

Kalau kita bicara pelanggaran HAM di sektor SDA melibatkan korporasi dan didukung lembaga keuangan transnasional dan bank nasional, dimana uang kita tabung di sana malah dipakai untuk mendukung korporasi yang merusak SDA. Pelanggaran HAM dalam konteks

SDA berbentuk fisik namun kemudian melibatkan pelanggaran ekonomi, sosial dan budaya oleh perusahaan tambang karena dia meninggalkan lubang-lubang tambang yang tentu menjadi beban kerusakan lingkungan kepada negara.

Pelanggaran EKOSOB seperti pelanggaran diam-diam dan tidak berdarah ini penting dilihat dalam sumber daya alam karena orang akan menjadi miskin dan sakit. Kalau pun bicara kepulihan tidak hanya orang tapi juga lingkungan karena kalau lingkungan rusak maka orang di kawasan itu juga terus sakit. Pengalaman Masyarakat Buyat meski sudah berobat ke Jakarta tapi kalau sudah balik ke kampung mereka sakit lagi karena lingkungan sudah rusak.

Peran perempuan dalam lingkungan, perempuan paling banyak berhubungan dengan SDA, air, hutan, kebun sehingga kerusakan pada alam mengakibatkan perempuan yang kena berlapis-lapis dampak, itu karakternya. Cerita Pak Jardin dari tahun '68 sampai sekarang terus berlangsung. Kemudian pada pebisnis masuk ranah politik, Prabowo punya tambang batu bara, Aburizal Bakrie pemilik tambang skala besar.

Ini tantangan ke depan, isu pelanggaran SDA penting untuk dikomunikasikan ke publik, karena para pemain politik mendapat keuntungan luar biasa untuk kekuasaannya.

Tantangan ke depan, yang Saya rasa penting adalah masterplan percepatan ekonomi Indonesia yang membagi Indonesia dalam 6 bagian koridor yang akan dieksploitasi besar.

Saya cukup bersemangat hari ini karena ada dua kunci ke depan yang jadi harapan:

“Bahwa rakyat sedang tidak diam dan melakukan dua hal dan mencoba memulihkan lingkungan mereka yang rusak dan saya pikir ini yang kedepan yang perlu kita pulihkan.”





REFLEKSI MAJELIS WARGA

Konflik Sumber Daya Alam

*P*ertama-tama, kami ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan tinggi, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para korban, survivor (penyelamat-pejuang), pemberi kesaksian, pemberi pandangan ahli, dan kita semua yang mendengar kesaksian dan pandangan pada hari ini.

Kami menghargai bukan cuma keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, dan ketulusannya berbagi pengalaman penderitaan tak terperi dan perjuangan panjang menggapai keadilan dan membela hak asasi mereka yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

Ribuan hektar tanah diklaim oleh penguasa di berbagai tingkat, institusi militer, pengusaha besar (perkebunan atau pertambangan) dengan cara sewenang-wenang dan brutal. Rakyat yang mempertahankan tanah harus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan (mulai dari penangkapan, pemukulan, penyiksaan, pelecehan seksual, perkosaan, pemenjaraan, hingga penembakan).

Sampai saat ini ribuan warga yang mempertahankan tanahnya hidup dalam kecemasan, ketidak pastian, ketakutan, teror dan trauma.

Payung hukum dan instrumen HAM yang seharusnya melindungi mereka seperti tak berdaya menghadapi cengkraman kekuasaan yang memangsa tanah rakyat. Para anggota Majelis Warga adalah orang-orang yang tumbuh komitmennya menjadi pemikir, pembela HAM, dan aktivis agraria semenjak Indonesia dibawah kuasa rejim militer otoritarian Soeharto.

Kesaksian-kesaksian itu mengingatkan kami pada apa-apa yang kami saksikan terjadi pada rejim Orde Baru. Mengapa setelah lebih 15 tahun setelah rejim Otoritarian-Militer itu tumbang dan Agenda-agenda Reformasi dijalankan, kita masih menyaksikan kekerasan-kekerasan yang sama, yang dialami mereka yang menjadi korban perampasan tanah, wilayah dan sumber daya alam?

Penting untuk dicermati bagaimana sistem-sistem politik dan ekonomi yang menjalankan perampasan tersebut, dan mesin-mesin kekerasan langsung maupun kekerasan struktural, terus bisa hidup dalam jaman demokratisasi, desentralisasi, dan merebaknya kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi.

Forum untuk dengar kesaksian ini dibuat di tahun 2013, 15 tahun setelah tumbangnya rejim otoriter Suharto, diselenggarakan oleh warga negara, dan bukan oleh suatu lembaga negara. Kasus-kasus perampasan wilayah dan pencurian kekayaan alam masih terus berlangsung dengan ciri-ciri yang sama dengan yang terjadi di masa Indonesia dibawah rejim Otoritarian-militer Orde Baru. Apa artinya hal ini? Suatu konsep yang penting dalam perspektif HAM adalah memasang upaya perlindungan korban pelanggaran HAM dengan “Kewajiban Negara”. Musti menjadi cermin kita semua bahwa lembaga-lembaga negara yang dibentuk semenjak Reformasi dimulai tahun 1998-1999 belum berhasil menjalankan “Kewajiban Negara” melindungi korban-korban, dan menyediakan forum penyelesaian atas perampasan tanah,

wilayah dan sumber daya alami milik rakyat, beserta kekerasan-kekerasan yang dialami mereka.

Kami sadari upaya melepaskan hubungan kepemilikan antara rakyat dengan tanahnya bagaikan melepaskan nyawa dari badan manusia, jiwa dari raga manusia. Kekerasan adalah mekanisme melalui mana hubungan pemilik tanah dilakukan sedemikian rupa untuk melepaskan hubungan kepemilikan itu.

Dalam kesaksian-kesaksian hari ini, kami mendengar juga bagaimana secara khusus para pejuang-penyelamat itu mengalami penyiksaan, kriminalisasi, pemenjaraan, hingga pemiskinan sedemikian rupa. Secara khusus, kami memberi perhatian pada dipergunakannya berbagai bentuk penyerangan dan kekerasan seksual pada kaum perempuan untuk meluluhlantakkan keteguhan perjuangan para penyelamat-pejuang itu.

Kami menyampaikan pandangan bahwa penggunaan dan penyalahgunaan otoritas kelembagaan pemerintah, dan kekerasan oleh polisi dan tentara, serta dikerahkannya preman partikular untuk menindas rakyat agar melepaskan kepemilikan atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya, sesungguhnya mengkhianati cita-cita mulya pendirian negara, dan melanggar asas dasar bahwa negara adalah badan penguasa untuk melindungi rakyat dan tanah airnya.

Para penjuang penyelamat yang bersaksi hari ini, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya adalah mereka yang berdiri sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk memberi contoh terbaik bagaimana rakyat, laki-laki maupun perempuan, berjuang agar eksistensinya bisa dilihat.

Secara sederhana, mereka berjuang agar bisa terlihat dan hak-hak mereka bisa diakui. Menurut kami, apa yang mereka ungkapkan bahwa “kami tidak terlihat”, “hak-hak kami tidak diakui”, “kami ditindas”, “kami tak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kami tak punya tanah di sini dan sulit mendapatkan air, juga tidak bisa menjadi pandu ibuku, karena kami hanya dijadikan penonton yang tak berdaya” tak lain dan tak bukan adalah masalah kronis dari politik agraria Indonesia saat ini. Refleksi ini akan diakhiri dengan menyampaikan Lagu Indonesia Stanza Tiga

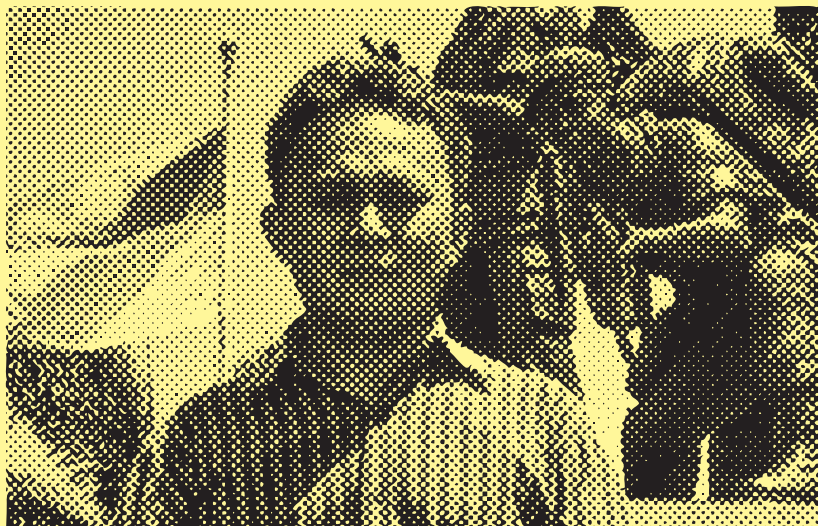
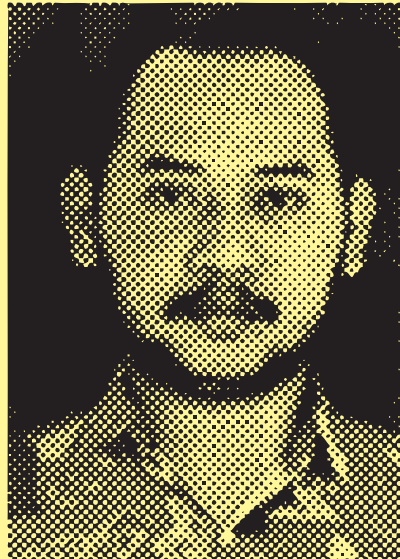
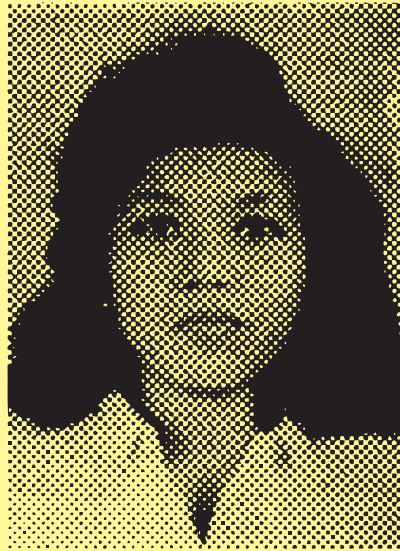
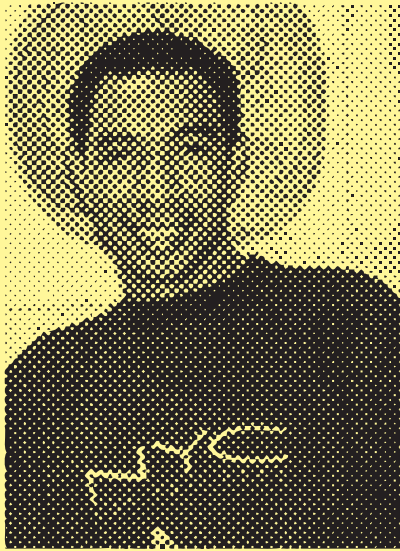
Jakarta, 28 November 2013

1. Majelis Warga:
2. Jhoni Simanjuntak
3. Septer Manufandu
4. Noer Fauzi Rachman
5. Tati Krisnawaty
6. Ridha Saleh

***Indonesia tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri
Menjaga Ibu Sejati.
Indonesia Tanah berseri
Tanah yang aku sayangi.***

***Marilah kita berjanji In-
donesia Abadi. Selamatkan
tanahnya, Selamatkah
puteranya, pulaunya, Lautnya
semuanya Majulah negerinya
Majulah pandunya untuk
Indonesia Raya***

***Indonesia Raya Merdeka,
Merdeka, Tanahku, Negeriku,
yang kucinta Indonesia
Raya Merdeka, Merdeka,
hiduplah Indonesia Raya
(2x)***





E

**PEJUANG
HAK ASASI
MANUSIA**

01

KASUS UDIN HAMPIR KADULAWARSA, BELUM SELESAI

[Kesaksian Marsiyem Untuk Udin]

Fuad Muhammad Syafruddin yang akrab dipanggil Udin lahir di Bantul, Yogyakarta, 18 Februari 1964 – Meninggal karena dianiaya oleh orang tak dikenal di depan rumah sewaanannya, di Dusun Gelangan Samalo, Parangtritis Km 13 Jalan Yogyakarta, 16 Agustus 1996. Udin adalah wartawan Harian Bernas, Yogyakarta. Sebelum kejadian ini, Udin sering menulis artikel kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi reporter di Harian Bernas sejak 1989.

Tanggal 13 Agustus 1996 pada sekitar 10:40 malam itu, Marsiyem sedang menyetrika. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu oleh seseorang, setelah pintu dibuka ditanya keperluannya. Orang tak dikenal itu menjawab bahwa dia ingin



menitipkan sepeda motor kepada Udin. Tanpa curiga, Marsiyem memberitahu suaminya yang sedang di depan komputer. Udin bertemu dengan tamunya dan Marsiyem melanjutkan menyetrika.

Tak lama kemudian, ia mendengar suara pukulan, ia kemudian mendekati tempat asal suara. Dan ternyata Udin, suaminya, jatuh di lantai. Berlumuran darah. Berikut kesaksian Marsiyem tentang peristiwa pembunuhan Udin dan dampak yang dialami keluarga mereka hingga sekarang:

Kejadian sudah 17 tahun yang lalu terjadi di Jogja, pada saat itu Pak Udin sering menulis berita di wilayah Bantul mengenai pejabat Bantul. Jadi untuk masalah ini saya sempat tanya Mas Udin, “kenapa berita ini begitu kerasnya,” tapi

Pak Udin bilang, “memang kenyataan seperti itu jadi mau apa lagi kalau seperti itu.” Karena beberapa hari ada intimidasi semacam itu, janggal dalam kehidupan saya.

Saya tanyakan lagi karena mau digugat Pemda Bantul, mau diajukan ke Pengadilan, saya takut, tapi Pak Udin jawab, “karena ini kenyataan sampai kapan pun akan saya bela walau sampai mati”

Setelah Pak Udin meninggal teror demi teror menghantui kehidupan kami terutama dari Polisi, dia selalu datang ke rumah, selalu menanyakan hal itu, kalau saya menjawab dengan berita Pak Udin, dia mengelak. Ada polisi yang bilang, “Mbak ini masalah biasa ini masalah perselingkuhan.” Sampai saat ini, Polisi menyakini ini masalah perselingkuhan. Betapa sakitnya hati kami dengan upaya itu.

Padahal Pak Iwik sudah menarik kembali pengakuannya. Teman-teman wartawan kerja keras mengikuti temuan polisi, bahkan ada pembentukan TPF untuk masalah ini, tapi Polisi bersikeras itu masalah perselingkuhan. Jaksa menuntut bebas.

Saat ini sedang pengadilan pra peradilan di Jogjakarta. Cuma yang kami butuhkan kenapa Polisi begitu? Memang berat menjalani peristiwa ini, tapi banyak dukungan yang membuat saya kuat. Saya harapkan hanya kebenaran saja jangan sampai hal ini direkayasa lagi. Kasus Udin saat ini sedang diangkat lagi dalam persidangan pra peradilan di Jogja. Saat ini batas waktu kasus

tersebut hampir 18 tahun, dan jika lebih dari waktu tersebut kasus ini sudah tidak bisa dituntut secara hukum. Kapolda DIY yang sudah berganti sekitar 15 kali, belum juga bisa melengkapi berkas penanganan kasus ini.

Sementara berdasarkan surat yang diterima AJI Indonesia pada 15 Agustus 2012 dikirim oleh Kepolisian atas kasus pembunuhan Udin dikirim oleh AJI Indonesia pada tanggal 30 Juli 2012, Polda DIY memberikan penjelasan berikut, pada poin empat, polisi Yogyakarta masih yakin bahwa Dwi Sumaji alias Iwik adalah pelaku utama.

Kemudian menyatakan pada poin berikutnya bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda DIY belum mendapatkan bukti signifikan.

Dan telah mencoba untuk mengirim surat resmi ke pengadilan militer Semarang untuk meminta salinan hasil pemeriksaan Sri Roso Sudarmo. Kemudian pada 30 Agustus 2012 Yogyakarta polisi mengirim surat sekali lagi untuk AJI Indonesia kembali jawaban yang sama dengan surat yang disampaikan oleh Indonesia AJI menyatakan bahwa sejak rilis Iwik, polisi telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini dan sampai bahwa saat ini masih belum menemukan bukti kuat yang mengarah kepada pelakunya.

Saya cuma berharap kalau polisi tidak bisa mengungkap kasus ini, bikin saja surat keterangan dihentikan atau dilanjutkan. Biar anak-anak saya tidak trauma dengan kejadian ini kasihan mereka baru 2 tahun waktu kejadian.

02 API MARSINAH TAK TERPADAMKAN

[Kesaksian Marsini untuk Marsinah]

Marsinah lahir tanggal 10 April 1969. Dia buruh di pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) sejak tahun 1991. Karena merasa adanya ketidakadilan diantara buruh lokal dan buruh dari Tiongkok menyangkut jumlah gaji dan jam kerja, Marsinah melakukan protes. Karena itu ia hampir dikeluarkan. Dia ditemukan tewas di Hutan Wilangan, Nganjuk pada 8 Mei 1993 dalam posisi melintang, sekujur tubuhnya penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangannya lecet-lecet, dalam keadaan terikat. Tulang panggulnya hancur.

Di sela-sela pahanya ada bercak-bercak dara. Pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. Mayat Marsinah segera dibawa ke RSUD Surabaya



untuk dilakukan autopsy. Dokter forensik RSUD Surabaya menyimpulkan bahwa Marsinah tewas akibat penganiayaan berat.

Pada tanggal 30 September 1993, Badan Koordinasi Stabilitas Nasional dan Daerah (Bakorstranasda) Jawa Timur membentuk Tim Terpadu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah.

Penanggung jawab tim adalah Kapolda Jawa Timur dan Komandan Satgas Kadit Reserse Polda Jawa Timur, yang beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jawa Timur serta Den Intel Brawijaya. Tim tersebut secara diam-diam menangkap para petinggi PT CPS. Mereka diinterogasi serta mengalami penyiksaan fisik maupun mental di markas Kodam V Brawijaya.

Mereka dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

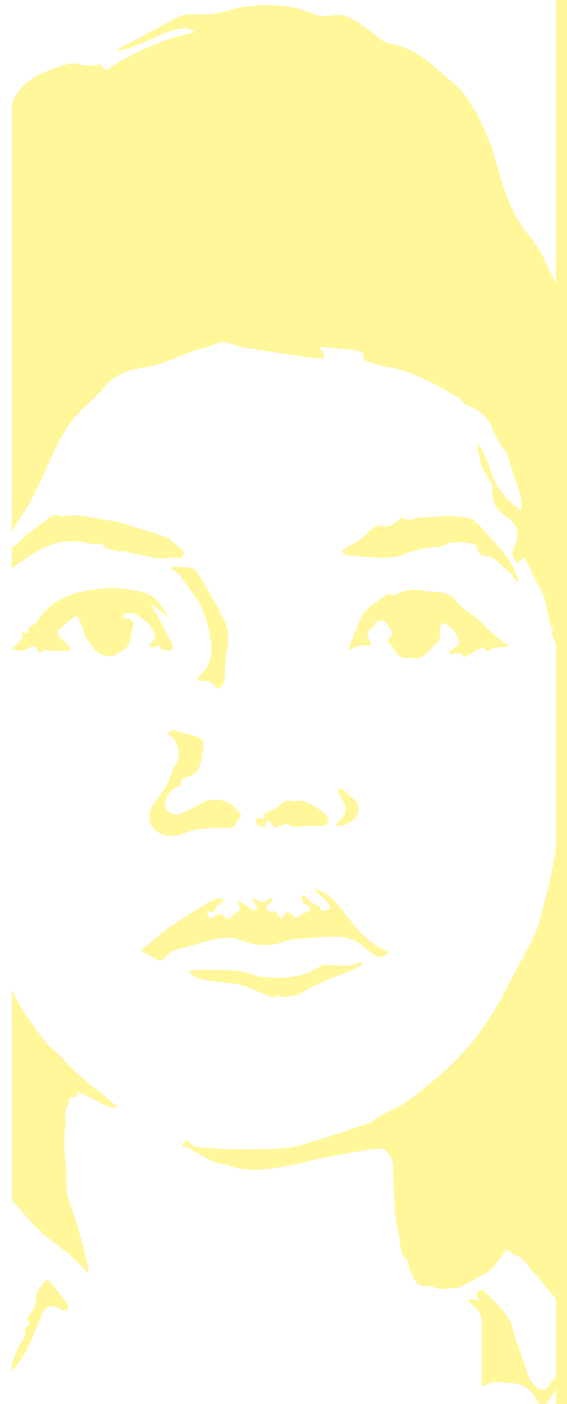
Setelah 18 hari kemudian, mereka telah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan tuduhan pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto mengungkapkan adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Para aktivis pada waktu itu turut melakukan kegiatan kampanye dan pendampingan terhadap kasus Marsinah.

Munir dan beberapa LSM lain turut serta dalam investigasi independen dan kampanye untuk penuntasan kasus Marsinah. Mereka membentuk KSUM (Komite Solidaritas Untuk Marsinah). KSUM mendapatkan berbagai intimidasi oleh Bakorstanasda, agar KSUM menghentikan kegiatannya. Namun advokasi terus dilakukan oleh KSUM, termasuk mengawal pengadilan rekayasa atas orang-orang yang ditangkap oleh Tim Terpadu Bakorstanasda.

Marsini, kakak perempuan Marsinah memberi kesaksian tentang peristiwa pembunuhan Marsinah dan dampak yang dialami keluarga mereka

Saat itu saya hamil 8 bulan. Sejak 10 Mei 1971 saya dan Marsinah ditinggal ibu karena meninggal dunia. Karena ibu meninggal dunia, saya terpisah dengan ayah, bersama adik tinggal di rumah nenek. Sewaktu kelas 5 SD, saya pindah



ke rumah Paman, dan disusul oleh Marsinah ketika saya duduk di kelas 3 SMP. Marsinah kemudian melanjutkan sekolah di SMP

Negeri dan saya di SPG Negeri, walau nenek berat membiayai. Sesudah saya lulus saya pindah ke kawasan industri di Surabaya, lalu adik saya ikut juga.

Awalnya dia diterima brekerja di perusahaan lain, tetapi kemudian pindah ke CPS, sebuah PT yang memproduksi arloji. Tahun 1991, ada masalah di di tempat kerjanya, ia hampir dikeluarkan, namun adik saya ada dasar kuat akhirnya tidak dikeluarkan.

Di situ dia diperlakukan tidak sama terutama merasakan perbedaan, kalau tenaga kerja dari Cina, kerja ringan upah tinggi, sementara yang tenaga di sini, upah rendah sementara tenaga diperas. Dia mau minta bantuan ke LBH. Saya nasihati agar tidak melanjutkan rencananya.

Setelah bercerita dengan kasus yang saya pernah alami betapa sulitnya melawan perusahaan dan kalah, akhirnya dia tidak melanjutkan niatnya. Dia lalu mau melanjutkan sekolah hukum.

Tahun 1992, saya diangkat menjadi guru di desa terpencil, adik saya tetap di Surabaya. Saat itu ada pengembangan pabrik CPS di Porong. Waktu adik saya pulang pada Januari '93, saya sempat menanyakan, kenapa bisa buka cabang di Porong ?. Dia bilang, pabrik itu buka cabang untuk memproduksi barang yang bisa duplikat jam-jam merek terkenal.

Adik saya ditemukan di gubuk di Wilangan, Nganjuk, Polisi datang dan bertanya, "mana baju terakhir?" mestinya Polisi yang tangani karena itu baju itu barang bukti. Keluarga menjadi sasaran utama untuk diselidiki, juga Pak De saya, termasuk orang tuduhan juga. Setelah itu pernah jam satu malam ada intel memberitahu agar dibongkar makamnya. Makam adik saya dibongkar tiga kali, dan tahlilan tiga kali juga. Saya memang berambisi agar adik saya diketahui pembunuhnya dan ditangkap.

Ada salah satu Polisi datang dengan temannya, ada surat ijin saya tandantangani begitu saja, lalu ada aparat datang dan saya disorongi tulisan, saya bilang ini surat apa? Dibilang kelanjutan surat keroncong, jadi saya tanda tangan aja kertas kosong, sampai sekarang berpikir apa itu dipakai untuk merekayasa peristiwa adik saya?

Malam hari saya didatangi lagi oleh aparat, saat itu pembantu tidur dan saya bangunkan, saya bilang kalau ada apa-apa, tolong lompat lewat jendela. Kesedihan saya karena saya sendirian melewati semua ini, saya dari kecil hidup karena belas kasih keluarga, saya mencari hidup sendiri dan menemukan kondisi adik saya sendiri dan itu goncangan bagi saya.

03 HANYA ADA SATU KATA, “LAWAN”

[Kesaksian Wahyu Susilo untuk Wiji Thukul]

Wiiji Thukul atau Widji Widodo dilahirkan di Sorogenen, Solo, tanggal 26 Agustus 1963 dari keluarga tukang becak, Aktif berkesenian mulai sejak SMP ketika bergabung dengan Sanggar Teater Jagat. Lulus dari SMP, Thukul melanjutkan studi di SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia sampai kelas II. Thukul juga menulis puisi. Puisinya pernah dibacakan di Radio PTPN Solo, dimuat di Mutiara, NOVA, Swadesi, Inside Indonesia dan Suara Merdeka. Pergumulannya dengan kesenian kerakyatan semakin mendalam ketika mulai mengembangkan aktivitas kesenian di kampung bersama teman-temannya yang kebanyakan kaum buruh. Dia mulai membaca puisi di kampus, di gedung kesenian dan ngamen di bis



kota bahkan di aksi-aksi massa.

Dia sempat pula berjualan koran, jadi calo karcis bioskop, dan menjadi tukang plitur di sebuah perusahaan meubel.

Menikah dengan Sipon rekannya satu teater pada tanggal 23 Oktober 1988 dan dikaruniai dua orang anak, Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah.

Represi aparat mulai dirasakan ketika Thukul bersama rakyat di kampungnya memprotes pencemaran pabrik tekstil PT. Sari Warna Asli. Dalam aksi ini Thukul sempat ditangkap dan dijemur oleh aparat Polresta Surakarta.. Thukul kemudian bergabung dalam Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER), sebagai salah satu organ dari Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Dalam satu aksi buruh PT. Sritex pada Desember 1995, Thukul dianiaya oleh aparat hingga salah satu matanya hampir buta.

Ketika pecah peristiwa penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada 27 Juli 1996, di Jalan Diponegoro Jakarta, PRD dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut.

Selain itu PRD juga dianggap sebagai organisasi yang berdasarkan komunisme, sehingga beberapa aktivisnya ditangkap oleh Polisi dan Thukul menjadi salah satu orang yang dijadikan sasaran penangkapan. Sejak saat itu Thukul menjadi buronan.

Thukul hidup berpindah-pindah dengan bantuan kawan-kawannya di berbagai tempat, di Solo, Salatiga, Jogjakarta, Jakarta bahkan sempat Pontianak. Terakhir Thukul bertemu dengan keluarganya adalah pada Desember 1997 ketika anaknya yang kedua akan merayakan ulang tahun yang ketiga. Kontak terakhir dengan istrinya pertengahan tahun 1998. April 2000, hilangnya Thukul dilaporkan oleh keluarganya ke KontraS.

Berikut Kesaksian Wahyu Susilo, adik Widji Thukul, dalam acara Dengar Kesaksian yang dilaksanakan di Jakarta pada 29 November 2013:

Acaman terhadap Widji Thukul sudah lama berlangsung, sebelum penculikan '98, sejak kasus Kedung Ombo tahun '89, karena saya dan kakak tinggal satu rumah di Jogja bersama teman Jogja, Solo. Pertama kali Widji Thukul ditangkap tahun '90, kasus PT Sariwarna

Asli di Solo yang mencemari sungai dan mencemari warga. Kakak saya mengorganisir masyarakat dan protes di depan pabrik. Lalu ditangkap dan diinterrogasi semalaman. Ditangkap lagi tahun '93, waktu itu terjadi kasus pelecehan seksual buruh perempuan di Karang Anyar. Waktu datang ke DPRD kami bersama. Setelah didampingi pengacara, baru dibebaskan pada malam hari.

Pengawasan tidak hanya secara fisik, korespondensi juga diawasi. Satu kali dapat kiriman dari Belanda, saat tiba di rumah kiriman sudah buka.

Tahun '95, ketika peringatan Indonesia Emas, kakak dengan JAKER dari seluruh Indonesia, kami peringatan Indonesia Cemas pada Agustus '95, rumah kami digerebek dan lukisan anak-anak dirampas. Saya kira yang paling membuat fisik Widji Thukul sakit adalah ketika demo buruh pada desember '95, PT Sritex pemasok baju untuk militer dan ABRI, di situ dia dipopor senapan dibagian mata sampai hampir buta.

Tapi tidak menyurutkan perjuangannya. Tragedi pertama datang ke keluarga kami ketika dia dinyatakan sebagai DPO dalam penyerbuan kantor PDI [27 Juli 1996], Agustus '96, Thukul agar bisa menyelamatkan diri, dia pindah dari kota ke kota. Mba Sipon (isteri Widji Thukul), diinterrogasi, diintimidasi, Wani (anak perempuan Widji Thukul) di sekolah diolok-olok sebagai anak PKI dan Fajar [anak laki-laki Widji Thukul] yang seharusnya setiap hari bertemu ayahnya, dia tidak ingat ketemu ayahnya.



Itu juga saya alami pada akhir Agustus '96 ditangkap BIA di kantor Solidaritas Perempuan, diinterogasi selama 24 jam, ditelanjangi, dimasukkan ke kolam dipukul pake ember, disetrum kemaluan saya. Selama 24 jam saya mengalami itu, tapi beruntung waktu itu kakak saya selamat menyeberang ke Kalimantan.

Ini menyebabkan ketika kakak saya tidak bisa berkomunikasi sekitar Maret atau April '98, kami dalam keadaan ragu, apakah dia masih dalam kondisi bersembunyi atau dihilangkan. Ada optimisme pada tahun '98, ada tapol yang dibebaskan. Kami masih menunggu Thukul pulang. Lalu ada investigasi, semua kontak menyatakan Thukul hilang.

Deklarasi Thukul hilang baru tahun 2000. Tidak ada perhatian sama sekali atas kasus-kasus ini, hak sipilnya terabaikan, hak ekonomi juga terabaikan. Berulang kali Mba Sipon mengajukan pinjaman tapi semua harus atas nama suami, Wani ditanya ketika ambil raport, "bapakmu dimana?" tidak bisa jawab karena negara tidak memberi status di mana orang yang hilang saat itu. Ini implikasi yang dialami keluarga Widji Thukul sampai sekarang.



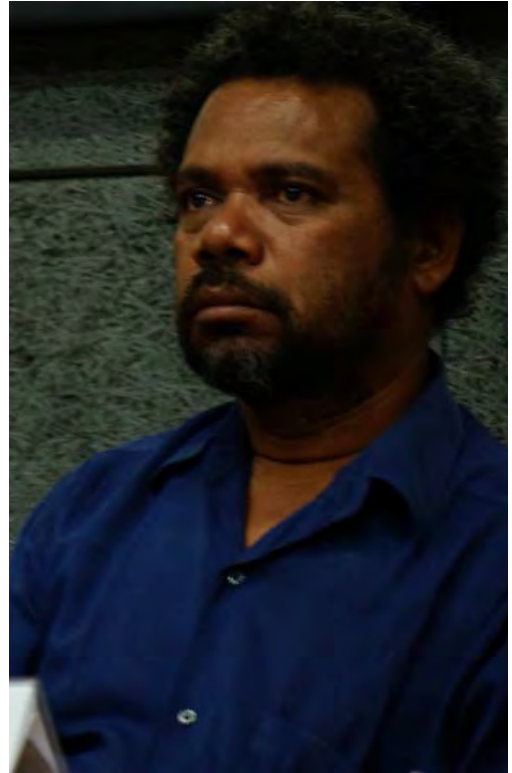
• BUNGA DAN TEMBOK •



Seumpama bunga
 Kami adalah bunga yang tak
 Kau hendaki tumbuh
 Engkau lebih suka membangun
 Rumah dan merampas tanah
 Seumpama bunga
 Kami adalah bunga yang tak
 Kau kehendaki adanya
 Engkau lebih suka membangun
 Jalan raya dan pagar besi
 Seumpama bunga
 Kami adalah bunga yang
 Dirontokkan di bumi kami sendiri
 Jika kami bunga
 Engkau adalah tembok itu
 Tapi di tubuh tembok itu
 Telah kami sebar biji-biji
 Suatu saat kami akan tumbuh bersama
 Dengan keyakinan: engkau harus hancur!
 Dalam keyakinan kami Di manapun

[WIJI THUKUL]

04 **DITUDUH SEPARATIS, PERDAMAIAN TIDAK TERWUJUD**



[Kesaksian Ferdinand Marisan, untuk John Rumbiak]

John Rumbiak lahir di Pulau Biak, Papua pada 1962, Ia kemudian mendirikan Lembaga Studi Advokasi dan HAM di Jayapura. Dibawah supervisi John Rumbiak, ELSHAM telah menjadi baris terdepan mengerjakan advokasi dan pelaporan HAM. Pada tahun 2003, John Rumbiak melakukan siaran pers di LBH Jakarta tentang keterlibatan Kopassus dalam Peristiwa penembakan di Tembaga Pura, Timika. Kemudian John Rumbiak berangkat ke Amerika dan baru tahun 2005, pulang ke rumahnya, dan menderita stroke hingga sekarang.

Sebelum sakit, John Rumbiak aktif melakukan kampanye pelanggaran HAM di Papua di Amerika dan Australia. John Rumbiak dan Elsham kemudian digugat

oleh TNI dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik TNI terkait laporan Elsham tentang keterlibatan Kopassus dalam Kasus Penembakan di Tembaga Pura, Timika tahun 2002.

Ferdinand Marisan, Direktur Elsham bersaksi tentang Sosok John Rumbiak dan dampak yang dialami Elsham pasca gugatan Pangdam atas Elsham terkait Kasus Tembaga Pura:

Saya kenal John Rumbiak sejak tahun '95, ketika masih mahasiswa di Uncen. Tahun '94, terjadi penembakan terhadap pendeta di Gereja di Timika waktu perayaan Natal, dan John Rumbiak menginisiatif untuk melakukan investigasi. Dia mulai menulis kejadian itu dan laporan diserahkan kepada Komnas HAM tahun '95. Pada waktu bertemu John pertama kali, dia

bilang, “kalian kalau mulai membantu rakyat kecil maka nyawa jadi taruhan, ditahan dan akan dibunuh.”

Tahun '95, kami demo dan meminta pemerintah mengusut kasus penembakan tersebut dan terbukti dibawa ke Pengadilan Militer. Pelakunya ada yang dihukum ada yang bebas dan ada yang pangkatnya diturunkan

John lalu membentuk Lembaga Elsham Papua, bekerja pertama untuk kasus penembakan masyarakat sipil di Timika, tahun '96, dimana terjadi penyanderaan beberapa peneliti oleh Kelly Kwalik dan waktu itu pembebasan dilakukan oleh Kopassus yang dipimpin Prabowo. Saya ingat mereka mengecat helikopter dengan palang merah dan mereka menembaki masyarakat. Kami bekerja di kantornya John yang kecil, dan dia tidak mau pulang ke rumah karena setiap malam orang datang ke rumah, mengenakan seragam dan tidak mengetuk rumahnya

Tahun 2000 terjadi pembunuhan terhadap Theys, John melakukan investigasi. Tahun 2002, penembakan warga Amerika di Tembaga Pura, kami bersama John melakukan investigasi, dan dari kesaksian masyarakat menyebutkan bahwa ada Kopassus yang terlibat. John lalu membuat siaran pers di LBH Jakarta.

Karena John dianggap melakukan tindakan tidak benar maka dia ditetapkan sebagai tersangka, Pangdam bilang Kopassus tidak terlibat, padahal jelas indikasi keterlibatan Kopassus di lapangan. Tahun 2003, Elsham dibawa ke Pengadilan dituduh oleh Pangdam mencemarkan

nama baik Pangdam dan Kopassus. Yohanes Bonay sebagai ketua Elsham Papua yang menghadiri sidang-sidang itu, karena John belum pulang dari Amerika. Elsham dituntut minta maaf kepada Pangdam dan Kopassus dan membuat pernyataan di media bahwa TNI tidak terlibat dalam penembakan di Tembaga pura. John sendiri kampanye di Amerika dan Australia tentang kasus itu.

Pada 24 Februari 2005 sampai 25 Februari pagi, John Rumbiak diinterogasi FBI di Amerika, ketika dia pulang sampai di rumahnya dia kena stroke. Dia tinggal di New York untuk pemulihan dan sampai sekarang dia tidak pulih. Saudara perempuannya mendengar John jatuh sakit, akhirnya ikut sakit dan satu minggu kemudian meninggal dunia. Akibat kepada lembaga, tahun 2003-2009 Elsham dicap lembaga Separatis di Papua dan mendukung Papua Merdeka. Kami percaya, apa yang kami kerjakan itu suatu kebenaran dan tidak ada yang bisa memotong perjuangan kami di Tanah Papua Kami tetap melakukan advokasi dan ke depan berharap pemerintah tidak lihat LSM HAM dengan sebelah mata, kalau Negara masih lihat kami sebagai separatis maka perdamaian di Papua tidak akan terwujud.



Tambahan informasi dari Pater John Jonga:

Sewaktu pengadilan kasus Elsham tahun 2003, saya sebagai saksi dengan Mama Yosepa di Pengadilan Militer tentang Deky Murib yang 12 tahun diberi perlindungan oleh Kopassus dan saya mengambil keterangan seorang yang dididik militer, saya bawa bukti itu ke pengadilan. Saya sempat ditanya Jaksa tujuan apa membuat video ini, saya bilang tidak ada tujuan karena seseorang datang kepada kami dan pengakuannya penting maka kami rekam. Dan dalam putusan pengadilan Elsham didenda 50 M. Kami kalah tapi tak apa karena kami benar.

05 RACUN HANYA MELUMPUHKAN JASAD MUNIR

[Kesaksian Choirol Anam untuk Munir]

Munir lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Malang. Ia aktif dalam isu-isu hak asasi manusia masih kuliah hukum Universitas Brawijaya. Setelah mendapat gelar sarjana hukum ia bekerja untuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Jawa Timur. Selama tahun 1990-an ia menjadi penasihat hukum untuk sejumlah korban kekerasan dan represi aparat negara. Ia kemudian memimpin Divisi Operasional YLBHI.

Munir pertama kali muncul dalam kampanye yang terjadi pada akhir 1997 dan awal '98 ketika dua lusin aktivis pro-demokrasi diculik. Pada puncak kampanye ini, Munir mendirikan organisasi hak asasi manusia KontraS (Komisi



untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dengan dukungan dari 12 LSM pro-demokrasi termasuk YLBHI. Awalnya Munir menjadi Koordinator Komite Kerja KontraS, kemudian ia memimpin Dewan Pengurusnya .

Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda. Otopsi yang dilakukan oleh Institut Forensik Belanda menemukan kandungan arsenic dengan tingkat mematikan didalam tubuhnya. Choirol Anam mewakili Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) memberi kesaksian tentang advokasi dan kampanye yang dilakukan KASUM dalam penanganan kasus Munir.

Setiap malam saya, Panca, Usman, Haris dan Mufti yang kurang lebih seumuran di Tebet sana, menikmati diskusi dengan Cak Munir. Dia tidak pelit dengan informasi. Waktu dia mau sekolah pun antara merelakan atau tidak karena momen setiap malam itu.

Saya mewakili KASUM untuk menceritakan apa yang tidak terungkap di publik ketika mengadvokasi kasus ini, tentang orang-orang yang meninggal dunia disekitar pengungkapan kasus Munir, walau belum bisa dibuktikan secara legal tapi bisa ditarik benang merahnya. Ada Dokumen bahwa Pollycarpus sudah di Singapura tanggal 5 dan 6 [September 2006], paginya dia balik ke Indoneisa, malam [tanggal] 6 dia ke Singapura bersama Munir.

Kami menemukan orang yang menjemput Polly di Singapura meninggal tidak wajar. Ada pertemuan di ruang pertemuan B ? Ada sketsa, ada perencanaan di situ Orang yang memberi informasi adalah purnawirawan, baru pensiun salah satu anggota mereka, dia minta ketemu di resepsi pernikahan, tapi kami tidak pergi. Sekian hari kemudian kita ketahui dia meninggal. Orang yang mengundang Cak Munir, Wija Subijakto, dia deputy 7 intelijen Angkatan Laut, dia jago informasi, Cak Munir tidak mau datang. Dari situ kita telusuri bahwa BIN terlibat. Kami juga mendapatkan informasi dari seorang teman, untuk mendapatkan dokumen telpon yang bisa jadi dokumen hokum. Hanya Wija yang bisa dan ternyata Wija meninggal dunia, katanya serangan jantung. Dia bisa membaca bagaimana komunikasi itu ada.

Catatan publik Pollycarpus bicara dengan Muchdi, ada 40 kali, tapi dalam catatan tim TPF lebih dari 100 kali. Yang meninggal mendadak terakhir adalah Ongen, dia adalah orang yang mengetahui posisi duduk antara Ongen, Poli dan Cak Munir dan diduga tahu bagaimana racun masuk dalam Cak Munir. Setidakmya ada 4 orang meninggal terkait kematian Cak Munir. Terakhir yang tidak terkonfirmasi adalah Kolonel Budi, dia memberi kesaksian Poli masuk intelijen negara dan Direktur Garuda. Budi adalah Direktur 1 di bawah Deputy 3.

Dia ada di Pakistan katanya, masih di sana, dan ada yang bilang sudah meninggal. Kami buka di sini untuk melihat banyak dilakukan pelaku untuk menutup jejak. Tidak hanya terjadi pada Orba tapi sekarang terjadi pembungkaman orang dengan mengambil nyawaya.

KASUM menjadi contoh cara advokasi publik dan itu yang penting, ada tukang becak yang tiba-tiba kampanye, ada tukang ikan di Jatinegara sana yang tiba-tiba kampanye dengan cara sendiri, KASUM bertahan 6 tahun tanpa timbul tenggelam dan ini bisa jadi best practice bagi kita semua.

Ketika TPF berakhir masa kerjanya, kita putuskan gugat Garuda untuk menjaga tensi informasi di masyarakat tetap terjaga, di acara Kick Andy tema Munir lebih dari 3 kali, Koran Jawa Pos hampir tiap hari ada tema tentang Munir. Kalau ambil contoh baik tentang manajemen kampanye, KASUM baik dalam agar kebenaran ini terjaga terus. Jargon kita hari ini adalah membangun Sahabat



Munir, sahabat yang berani dan tidak melupakan masa lalunya. Kami selalu meyakini bahwa tidak ada jalan yang buntu, yang ada kita harus berpikir keras untuk menembus itu semua.

Informasi pengadilan kasus Munir.

Januari 2008, mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti memberikan Munir minuman yang telah dicampur racun saat transit di Bandara Changi Singapura. Pengadilan juga menghukum Indra Setiawan, mantan kepala nasional Garuda, satu tahun penjara karena perannya dalam kasus yang sama.

Pada bulan Juni, polisi menahan Muchdi Purwoprandjono, jenderal purnawirawan bintang dua, eks Deputy V BIN sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir tanpa merinci perannya pada saat pendakwaan.

Jaksa menuntut Muchdi dengan penjara 15 tahun. Pada 31 desember 2008, Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bebas atas Muchdi. Oktober 2013, untuk kedua kalinya Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan PK oleh Pollycarpus dan memotong masa tahanannya menjadi 14 tahun penjara, berkurang 6 tahun penjara dari putusan awal yaitu 20 tahun penjara.

06 MEMBANGUN KEMBALI AMBON MANISE

[Kesaksian Baihajar Tualeka]

Baihajar Tualeka lahir di Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 4 Februari 1974. Saat ini menjabat sebagai Direktur Lingkaran Pemberdayaa Perempuan dan Anak (LAPPAN) Ambon. Pasca konflik Maluku, dia aktif membangun dialog-dialog untuk menciptakan situasi damai diantara komunitas yang berbeda keyakinan. Berikut penuturan Ibu Baihajar dalam mempromosi dan menjaga perdamaian pasca Konflik Maluku, termasuk ketika konflik kembali terjadi pada September 2011.

Sebelum kerusuhan di bulan September 2011 awalnya muncul beberapa isu dan selebaran menjelang pemilihan Walikota Ambon bahwa akan terjadi konflik di Ambon, Ambon akan diIslamisasi dan



Kristenisasi. Masyarakat mulai mengurangi interaksi dengan komunitas lain, dampak psikologis mulai dirasakan.

Ketika meletus kejadian di tanggal 11 September 2011, jam 14.00 WiT, saya dikontak oleh beberapa ibu-ibu di Waringin bahwa ada insiden demo, mobilisasi massa dalam jumlah yang besar, polisi belum ada,

Ketika inisiasi ibu-ibu itu mendatangi kantor polisi, namun tidak ditanggapi oleh aparat yang bertugas saat itu. Bahkan ketika audiensi dengan Kapolres Pulau Ambon PP Lease di tahun 2011 “beliau mengatakan bahwa sulit menyelesaikan persoalan yang terjadi di Ambon, karena akan dianggap berpihak kepada kelompok tertentu atau tidak netral”. Bila aparat tidak serius, maka masyarakat di wilayah

konflik kian resah, lemahnya penegak hukum, tidak adanya jera kepada pelaku, menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Jarak Waringin dengan Polres Pulau Ambon, hanya berjarak kurang lebih 1 KM. Pemukiman ini berada dalam pusat kota akses ke pihak kepolisian dan TNI sangat dekat. Saat kejadian saya sedang dalam perjalanan menuju kota Ambon, hendak pulang ke rumah namun belum sampai di rumah Waringin sudah terbakar bahkan tidak bisa lewat, karena semua jalan untuk menuju Waringin sudah ditutup dan dibarikade.

Pada saat itu, angkutan umum yang kami tumpangi menurunkan kami di tepi jalan karena angkutan tersebut tidak bisa masuk terminal. Kondisi sudah tegang dan aksi mobilisasi masa dengan membawa senjata tajam di beberapa lokasi termasuk di tugu Trikora Ambon. Jalanan yang biasanya dilewati sudah penuh dengan banyak orang, mereka berdiri sambil membawa alat tajam dan sebagian bertanya-tanya “apa yang sedang terjadi?” Waringin sudah terbakar, rumah kamu bagaimana?

Siapa yang bisa dikontak untuk ambil barang-barang atau dokumen? Saya tidak bisa menjawab hanya diam. Kami harus memulai dari nol kembali untuk memulai kehidupan baru. Yang ada dipikiran saya bahwa harus siap menghadapi kenyataan agar tidak lelah dan terlarut dalam kesedihan. Saat duduk di tepi jalan di puncak Batumerah, saya melihat ada beberapa bapak-bapak sedang membawa anak-anak untuk mengungsi. Suasana mulai tegang, beberapa ruas jalan ditutup dengan kontener, saya

berjalan sepanjang Pantai Mardika, walaupun mendengar beberapa kali suara tembakan dan bom. Kemudian saya pergi mencari satu persatu kepala keluarga, dan meminta mereka untuk berkumpul di satu tempat, supaya memudahkan untuk saling kordinasi,

Yang ada dipikiran saya, apakah komunitas masih bersemangat seperti dulu? Semoga mereka tetap *survive* dan tidak mudah rapuh. Malam makin larut, duduk sambil bercerita, mulai membagi tugas, menghimbau untuk laki-laki agar tidak kembali ke Waringin dan melakukan aksi anarkis.

Kemudian membangun komunikasi dengan korban lainnya yang rumahnya terbakar dalam insiden ini. Hal utama yang perlu di sadarkan adalah soal mengelola rasa marah, dendam, memahami isu dan konten konflik, supaya masyarakat tidak larut dalam kemarahan. Kami sepakat untuk tidak saling menuduh dan menyalahkan komunitas tertentu, kami mereflesikan dan sepakat bahwa ini musibah, maka semua harus semangat dan bangkit kembali.

Waringin merupakan daerah yang mix di Kota Ambon, sejak terbakar beberapa kali, masyarakatnya mulai pesimis untuk kembali, pilihan opsi untuk relokasi di tempat lain, mereka menolak karena lahan yang mereka tempati adalah warisan para leleher mereka dari Buton yang sudah lama menetap di Ambon. Tahun 2005, saya memutuskan untuk tinggal di Waringin, awalnya ditolak oleh Bapak saya, karena dianggap daerah yang tidak aman.

Pada bulan Mei, saya merupakan orang yang pertama tinggal di Waringin di tengah puing-puing saat itu. Kemudian, beberapa kepala keluarga mulai berani datang dan mau menetap untuk tinggal. Langkah berikutnya kami menghimbau agar mereka kembali pulang dan membangun kampung. Himbauan ini dilakukan karena kondisi kehidupan mereka di kamp pengungsian saat itu sangat jorok, tidak ada air bersih, banyak persoalan dan kian miskin. Setelah kami semua mulai tinggal di Waringin, saat itu mulai melakukan berbagai kegiatan sosial, melakukan dialog lintas komunitas terkait hidup orang basudara, karena komunitas Waringin terdiri dari Muslim dan non Muslim.

Melalui inisiasi oleh ibu-ibu, kami mulai membangun infrastruktur di kampung seperti jalan setapak, air bersih, pengelolaan sampah komunitas, posyandu, PAUD dan membangun ketahanan diri warga. Kami kembali membangun dan menata kampung dari sisa puing-puing, menata kembali kehidupan, dengan harapan konflik tidak berulang.

Pada tahun 2009, para ibu di pemukiman ini bersepakat untuk menjadikan Waringin sebagai situs memorialisasi, sebuah tempat untuk mengingatkan agar kejadian kerusuhan serupa tidak berulang di masa mendatang. Untuk itu mereka menamakan gang di pemukiman itu dengan nama-nama yang memberikan pesan damai seperti Gang Damai, Gang Anti Kekerasan, Gang Kebersamaan, dan Gang Kebangkitan.

Penamaan gang ini bertujuan untuk memelihara damai berkelanjutan antar komunitas dengan harapan konflik tidak berulang lagi.

Pada September 2011, ketika daerah Waringin terbakar untuk ketiga kalinya. Butuh waktu lama bagi warga untuk meyakinkan diri kembali membangun Waringin. Dari ibu-ibu di Waringin gagasan Napak Damai ini berawal. Kali pertama Napak Damai dilakukan pada tahun 2012 dimaksudkan untuk membangun ketahanan masyarakat dan merekatkan kembali hubungan antar warga yang terkoyak akibat konflik.

Dalam diskusi Napak Damai, peserta juga mendiskusikan strategi advokasi hak-hak mereka, termasuk tentang bantuan bahan bangunan rumah dan mengusulkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah tentang jaminan rasa aman dan melahirkan ide dialog lintas tetangga untuk memelihara damai berkelanjutan.

“Semua berharap konflik tidak terulang kembali, dan mereka dapat dengan tenang menetap dan mengupayakan kehidupan baru yang lebih baik.”

07 KORBAN PENCULIKAN TERHADAP MAHASISWA AKTIVIS MAHASISWA TAHUN 1998

(Kesaksian Mugiyanto)

Mugiyanto lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 2 November tahun 1973. Ketika diculik tahun 1998, dia adalah mahasiswa sastra Inggris UGM Yogyakarta. Setelah dibebaskan ia aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang mulanya diinisiasi oleh Munir yang kala itu menjadi ketua KontraS. Mugiyanto menjadi ketua IKOHI hingga sekarang sekaligus sebagai presiden federasi penghilangan Paksa Asia (AFAD, Asian Federation Against Involuntary Disappearances). Mugiyanto memberi kesaksian Kasus Penculikan Aktivis Mahasiswa 97/98.

Terima kasih telah diberikan waktu, saya adalah salah satu dari korban yang diculik militer, Kopassus, tahun 1998 dan selamat. Ada 24 orang yang diculik Kopassus pada tahun '97-98. Dari 24 orang yang diculik, ada 9 orang dilepaskan dan saya satu dari 9 orang



yang dilepaskan. Saya aktivis mahasiswa dan oleh Orba apa yang kami lakukan dituduh subversif.

Tanggal 3 Maret '98, saya diambil dari rumah kontrakan Rumah Susun Klender, saya dibawa ke Duren Sawit dan Koramil Jakarta Timur, ke tempat dimana mengalami penyiksaan.

Cuma pakai celana dalam, kaki dan tangan ditutup, disetrum, ditanya mengapa kami ingin Dwi fungsi ABRI dicabut, mengapa mau Timor Leste merdeka, termasuk dipertanyakan hubungan dengan Gus Dur, Amin Rais dan Megawati.

Di tempat penyiksaan saya baru sadar kalau saya tidak sendirian, ternyata ada orang lain yang mengalami penyiksaan.

Dari suara saya kenal, Nesar Patria dan satu kawan lain, Aan Rusdianto. Mereka selamat namun sekarang bergabung dengan Partai Prabowo.

Setelah dua hari dari tempat X, berhenti di beberapa tempat, di Kodam Jaya, di Jakarta Timur diinterogasi, dibawa jalan lagi, mata ditutup diancam dibunuh dan dibuang di jalan tol dan kemudian diturunkan di Polda Metro Jaya dan ditahan di sana. Saya diperiksa dari jam 5 sampe 11 malam, dikenakan pelanggaran UU Subversif.

Di situ, saya kenal dekat dengan Munir dan dia jadi pengacara saya. Ketakutan dan trauma saya hilang ketika saya tahu dibesuk oleh Ester dan Munir, ketika saya masih di Polda. Itu yang saya alami selama tiga bulan di Polda Metro.

Saya tahu bahwa yang hilang tidak hanya kami, mereka bilang masih ada yang lain, ada Widji Thukul dan yang lain masih hilang. Setelah bekerja di KontraS pada tahan '98 baru dapat informasi bahwa tempat penyekapan kami adalah di Markas Kopassus di Cijantung, hal itu sudah diakui oleh Prabowo, namun mereka bilang hanya menculik 9 orang.

Saya bilang bahwa itu tidak benar karena kawan yang lepas itu sempat bertemu di Markas Kopassus dan berbicara dengan teman yang belum kembali hingga sekarang, Para pelaku sekarang sudah mulai konsolidasi, bukan hanya diantara pelaku tapi juga mengkonsolidasi korban, ini penting bukan hanya bagi saya dan korban tapi juga bagi Indonesia.

“Saya hargai korban yang memberi kesaksian dan dari kesaksian yang diberi mereka tidak hanya bahas dirinya tapi tentang bangsa ini. Beda sekali dengan SBY yang hanya bicara dirinya dan keluarganya. Banyak yang mencemooh saya, apakah masih ada harapan buat saya? Tapi yang penting adalah kebenaran tetap harus diungkapkan.”

TANGGAPAN SAKSI AHLI

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

“Kebebasan Berekspresi dan Pembungkaman Gerakan Progresif”

Oleh Poengky Indarti (Direktur Imparsial)

Ada peristiwa '65 ada pembungkaman Ormas dan Parpol, dikalangan masyarakat sendiri ada *floating mass* yang tidak berani bersuara atau mengevaluasi Soeharto dan pembangunan yang ada adalah semu, membangun industri yang menguntungkan pemerintah dan merugikan rakyat.

Dari kesaksian tadi terlihat pola pembungkaman gerakan progresif:

1. Pembunuhan dan penghilangan paksa, ada skenario untuk memecah belah pada kasus Udin dengan tuduhan selingkuh, pada kasus Marsinah dia terbunuh karena rebutan warisan, dan hal ini terjawabkan ketika tadi Marsini tadi bilang kami keluarga miskin tidak ada warisan, lalu penguasa bilang penyebabnya 'cinta segitiga' dan dijawab teman - teman Marsinah tidak ada pacar, lalu terakhir Manajer PT CPS yang dituduh dengan alasan Marsinah
2. Tidak hanya kelompok vijilante tapi aparat militer pun memakai baju lain, mendukung industri. Dalam kasus persidangan Marsinah, ketika Mutiari dibawa ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa apaat keamaann dan perusahaan mendeteksi ada gangguan lalu dibutuhkan langkah cepat untuk menghilangkan gangguan tersebut.
3. Stigma PKI
4. Kelompok yang disasar adalah kelompk kritis, Udin menggugat Bupati, marsinah tentang 13 rekannya yang diPHK sepihak dan dan pabrik yang melakukann pemalsuan arloji, Widji Tukul yang melakukan kritik atas pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
5. Dijauhi masyarakat, keluarga menderita seumur hidup dan tidak ada ganti rugi serta mencetak generasi luka.



“Pembungkam Aktivistis Kemanusiaan”



6. Saya bersyukur masih ada Tukul dan Udin yang masih memelihara idealisme, saya harap teman Pembela HAM tetap digaris depan meski ada pembunuhan dan penghilangan paksa.
7. Di Papua dan Maluku, rakyat tidak bisa mengungkapkan bebas apa yang dipikirkan, rejim refomasi menunjukkan wajah aslinya. Masih ada kekerasan, masih ada impunitas dan lebih berbahaya lagi lahir undang-undang yang membelenggu kebebasan berekspresi dan berserikat yaitu Undang-Undang Ormas.

Penguasa menciptakan kekerasan di mana-mana dan menggunakan pasal KUHP untuk memberangus kelompok kritis, ini dilakukan di wilayah kaya SDA, akan selalu diciptakan kekerasan seolah ada masalah dan membutuhkan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan perbedaan sebagai pemecah belah dan upaya pecah belah dengan isu adu domba masyarakat. Ini dilakukan oleh Jakarta, lalu ciptakan kelompok para militer, tidak hanya yang di Papua, seperti “Barisan Merah Putih” tapi juga preman seperti vijilante.

Lalu menciptakan gejolak di daerah untuk lupakan masalah di Jakarta, istilahnya ‘pengalihan isu.’ Isu Ambon Untuk lupakan isu Pengadilan Soeharto, alhasil Soeharto tidak diadili sampai meninggal. Ada isu separatis dan teroris untuk menutupi isu besar, siapa jadi korban dalam kasus ini? Bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan dan anak. Peran perdamaian perempuan sangat besar disini, trauma pasca konflik bisa diatasi teman perempuan dari Ambon dalam kesaksian tadi.

Dari kasus di Papua dan Ambon, memberi pelajaran bahwa security sector reform [SSR] menjadi sangat penting.

Para pelaku adalah aparat keamanan, di mana mereka punya hukum sendiri dan masyarakat tidak mengerti. Para Pembela HAM harus belajar SSR agar bisa membalas aparat keamanan dengan SSR. Melakukan review KUHP untuk pasal makar dan kebebasan berekspresi

Kasus Munir terjadi menjelang perubahan politik 2004, sempat ada isu bahwa ini “perang jendral melawan rakyat biasa,” ini sengaja diciptakan, ini operasi militer yang dilakukan oleh orang luar biasa. Cerita dari Anam sangat menginspirasi tentang advokasi melalui kampanye publik, gugat Garuda, mengajukan kebebasan mendapatkan informasi publik dan dukungan media dan publik serta kampanye internasional.

Dari kasus Munir, ada cara yang bisa dilakukan untuk melawan, kita bisa meniru kampanye kasus Munir. Buka kembali kasus Munir kita paksa SBY.

Belajar dari Mugi, kita tidak terkecoh dengan hal ini, mengkritisi Caleg 2014 penting dan jangan terbuai dengan para jendral bermulut manis

SSR penting karena dalam kasus Munir penyadapan oleh BIN luar biasa, karena penyadapan warga terutama Pekerja HAM tidak dilarang, sementara kalau mereka disadap maka SBY kebakaran jenggot.

Mestinya ada aturan penyadapan oleh negara ada perintah dari pengadilan untuk mencegah impunitas atau menyurutkan impunitas.

Kita perlu revisi Undang - Undang Militer karena sampai sekarang undang-undang tersebut masih diatas angin.



**“Saya menyerukan
Pengadilan HAM untuk
kasus Penghilangan
Paksa dan Mei ‘98 serta
Ratifikasi Konvensi
Penghilangan Orang
Secara Paksa.”**

**“Jangan pernah
dikalahkan ketakutanmu
sendiri karena ketakutan
itu hanya membuatmu
menjadi pengecut.”**



REFLEKSI MAJELIS WARGA

Human Rights Defender

Dengar Kesaksian untuk Pejuang Hak Asasi Manusia

Kami Majelis Warga merasa bangga terhadap keberanian yang telah ditunjukkan oleh bapak-ibu untuk mengungkapkan kebenaran dari kekerasan yang telah menimpa diri para pembela HAM yang hingga saat ini belum dapat diungkapkan dalam durjana pembunuhnya ataupun belum ditemukan mayat atau kuburannya. Serta kami setuju bahwa sekaranglah saatnya untuk kita semua sebagai warga menuntut keadilan.

Pejuang HAM di Indonesia terutama pada masa Pemerintahan Orde Baru, posisinya sangat lemah, dan rentan. Begitu mudah rezim berkuasa mengambil nyawa para pejuang HAM.

Masyarakat, keluarga dan kolega selalu dalam posisi yang tidak berdaya, dan sangat tergantung kepada proses penegakkan hukum yang sama sekali tidak berpihak kepada keadilan bagi korban. Hukum hanya berpihak kepada penguasa bukan kepada korban dan masyarakat.

Pola kekerasan yang dialami para pejuang HAM, selalu ditandai dengan keterlibatan militer, yang terlihat sangat bengis dan tidak menghargai nyawa manusia.

Diawali dengan intimidasi, teror, pengambilan paksa, penculikan, dan berpuncak kepada pembunuhan. Ketika terjadi proses penegakan hukum, maka secara kasat mata polisi tunduk kepada militer,

pengadilan lumpuh tidak punya hati nurani. Maka sebahagian besar pelaku utama dipastikan bebas dari hukuman. Hingga detik ini belum ada satu pun kasus pembela HAM yang terungkap tuntas, dan pelaku utamanya mendapat hukuman yang setimpal.

Selain itu hal yang patut menjadi perhatian kita semua adalah dampak dari semua peristiwa ini kepada keluarga para pembela HAM dalam bentuk stigmatisasi, teror, intimidasi dari pihak yang berkuasa dan yang tidak kurang pedihnya adalah terjadinya pengabaian atas hak-hak keluarga untuk mendapatkan kebenaran mengenai status suami, kakak, adik, orang tua, anak para pembela HAM, hak atas kompensasi, rehabilitasi dan hak-hak lainnya.

Patut disyukuri bersama bahwa keluarga dan kolega dari pejuang HAM yang menjadi korban tetap bertahan dan terus berupaya mencari keadilan dan kebenaran. Mereka yang semula menjadi korban tidak langsung, sekarang ini telah menjelma menjadi pembela HAM itu sendiri. Meskipun fakta menunjukkan bahwa partisipasi warga sangat kecil, perhatian pemerintah yang berkuasa saat ini juga hampir tidak ada, sehingga seolah-olah mereka hanya berjuang sendirian.

Forum Dengar kesaksian dari para pembela atau pejuang HAM pada hari ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran dan kesadaran masyarakat, pentingnya kebersamaan dalam mendukung korban. Agar peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terulang kembali

apapun motifnya. Forum dengar kesaksian ini adalah ruang bagi korban bersama yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KKKPK untuk terus mengajak masyarakat bersama menuntut pertanggungjawaban negara terhadap korban, serta jaminan agar tidak terulangnya kebijakan negara yang tidak manusiawi dan praktik-praktik kehidupan bernegara yang mengedepankan kekerasan.

Selain itu forum dengar kesaksian yang menjadi bagian dari kegiatan tahun kebenaran Desember 2012 - Desember 2013 adalah bagian dari upaya pendidikan bagi publik bahwa ada sejarah bangsa yang kelam yang perlu diluruskan dan diterangi dengan cahaya-cahaya kebenaran. Upaya ini menurut kami majelis warga patut disikapi dan ditanggapi oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal, bahkan diharapkan sampai kepada kurikulum pendidikan.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada para bapak/ibu dan korban yang telah bersedia memberi kesaksian.

Jakarta, 29 November 2013
Tertanda Majelis Warga

1. Irawati Harsono
2. John Djongga
3. Miryam Nainggolan
4. Ichsan Malik
5. Elga Sarapung



REFLEKSI AKHIR

[Oleh : Saparinah Sadli]

*Hadirin yang terhormat
Selamat malam, Assalamualaikum wr.wb.*

Saya mewakili Majelis Warga yang selama 5 hari telah mendengarkan kesaksian para korban pelanggaran hak asasi manusia dan mereka yang mengalami kejahatan terhadap kemanusiaan. Saya ingin memulainya dengan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak para penyintas yang telah bersedia membagi pengalamannya yang pahit dan belum terselesaikan sampai saat ini.

Selama lima hari Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran [disingkat KKPK] membuka sebuah ruang untuk pengungkapan pengalaman pahit, kepedihan sekaligus harapan para korban dan para penyintas. Kita telah mendengar

bahwa para korban telah berjuang dalam kegelapan, kesendirian, dengan mengalami intimidasi dan teror. Yang mengagumkan mereka menghadapinya tanpa pernah menyerah karena dilandasi oleh kekuatan batin dan prinsip hidup yang luar biasa.

Selama lima hari ini kami, Majelis Warga, dan para hadirin telah mendengar kebengisan, kekejaman dan kekerasan yang tak terbayangkan yang terjadi ditanah air kita terhadap warga kita.

Apa yang telah diungkapkan oleh para warga yang memberi kesaksian adalah bagian pahit dari sejarah bangsa yang mengetuk hati nurani kita semua.

Lima hari ini kita mendengarkan kebengisan yang telah mereka alami sebagai korban tetapi mereka tetap mengharapakan keadilan.

Kita mengingat kembali ungkapan - ungkapan korban yang menunjukkan bagaimana mereka menghadapi ketidakadilan dan kekerasan :

Kita mendengar cerita dari perempuan-perempuan yang berani berhadapan dengan penguasa. Mereka yang mencari suami, ayah, ibu dan anak yang ditahan atau dihilangkan berani pergi markas-markas tentara untuk menuntut informasi tentang keberadaan keluarga mereka.

Kita mendengar juga cerita perempuan - perempuan yang berani menantang interogator ketika dipaksa memilih antara mengaku atau ditelanjangi.

Perempuan korban menyatakan dengan tegas, "Ini bukan pilihan."

Kita juga mendengarkan kesaksian seorang korban yang mengalami penyiksaan seksual ditangan aparat militer. Pada saat ia diejek oleh aparat, ia menyatakan dengan lantang, "Aku punya harga diri. Bapak harga dirinya nol."

Kita mendengar tentang anak-anak yang ikut mengalami siksaan dan penahanan, yang lahir di penjara atau ikut ditahan bersama orang tuanya. Juga anak-anak Timor Leste yang diambil paksa dari keluarganya untuk di "Indonesia-kan." Hanya kemudian untuk dilupakan, dicampakkan, dibiarkan menderita ditangan orang-orang yang mengeksploitasi mereka.

Kita mendengar tentang para korban yang, tanpa proses pengadilan, dimasukkan ke penjara, dibuang ke pulau pengasingan, dan kemudian sesudah dibebaskan tetap harus menjalani wajib lapor dan mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Ini menimbulkan pertanyaan "Kemanakah hati nurani penguasa?"

Kita mendengar bagaimana intoleransi pada perbedaan agama telah memecah belah warga kita. Mereka yang menganut agama atau keyakinan yang digolongkan minoritas, mempunyai ketabahan menghadapi kekerasan, diskriminasi -tanpa menggunakan kekerasan balik.

Para petani dan pemilik tanah adat, muda dan tua, perempuan dan laki-laki, yang mengalami kekerasan termasuk diancam dengan senjata, mereka tetap

teguh mempertahankan hak miliknya dengan menyatakan “tanah ku, warisan leluhur, yang ku sayang.”

Seorang lelaki tua mengatakan “Aku tak bisa lagi menyanyikan Indonesia Raya. Aku tak lagi memiliki tanah ataupun air. Aku menjadi patung, tidak bisa lagi menjadi pandu untuk lbuku.” Ini suatu contoh bagaimana ketidakadilan yang mereka rasakan telah melukai rasa kewarganegara-annya.

Kita juga mendengar tentang kekerasan dan ancaman yang dialami oleh para pembela hak asasi manusia: wartawan, aktivis buruh, penyair, pemantau HAM dan pekerja perdamaian. Mereka begitu yakin tentang pentingnya mencapai perdamaian dan penegakan keadilan dan untuk itu mereka telah mempertaruhkan jiwa raganya.

Mendengarkan ketabahan, kekuatan para korban dan survivor yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, merupakan modal kemanusiaan untuk terus menerus membangun kebangsaan yang lebih adil dan manusiawi, juga untuk bersama-sama mau melakukan perubahan demi kebenaran dan keadilan.

Untuk itu dukungan masyarakat sipil adalah penting tetapi proses reformasi sejati dan menyeluruh harus dilaksanakan mulai dari pimpinan negara di berbagai tingkatan termasuk oleh institusi keamanan.

Adalah tanggungjawab kita sebagai semua anggota masyarakat sipil untuk terus mendorong komitmen para penyelenggara negara untuk mengimplementasikan berbagai landasan-landasan hukum yang telah tersedia termasuk konstitusi Negara UUD 1945 agar setiap warga negara merasa terlindungi dan terpenuhi rasa aman dan kesejahteraannya.

Kami sebagai Majelis Warga yang merupakan bahagian dari KKKPK pada kesempatan ini mengajak sesama warga Indonesia untuk memulai menunjukkan kepeduliannya yang lebih nyata terhadap ketidakadilan yang dialami oleh sesama warga. Kita sebagai sebuah bangsa harus memperkuat landasan konstitusional kita yang menetapkan kita sebagai bangsa yang humanis, tolerans dan menghormati perbedaan demi tercapainya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa.

Akhirnya Majelis Warga ingin menyampaikan lima akar masalah yang muncul dari kesaksian. Kita harus mengajak semua warga Indonesia untuk peduli mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang telah dipetakan disini:

1. warisan militerisme dalam berbagai bentuk termasuk budaya militeristik, budaya premanisme dan budaya kekerasan yang hingga sekarang masih digunakan untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan.
2. Adanya upaya penyeragaman yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

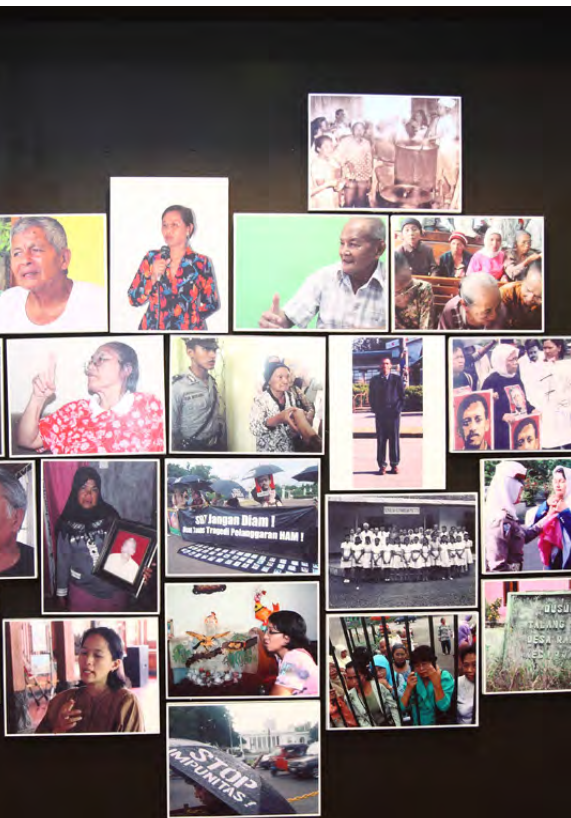
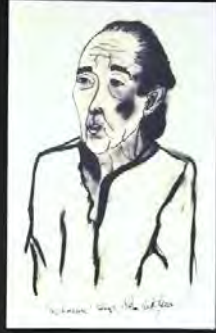


3. Keberlangsungan impunitas dan pelaksanaan hukum yang lemah sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM semakin menumpuk.
4. Bangunan kebijakan yang semata - mata menempatkan sumberdaya alam dan manusia sebagai komoditas dengan cara merampas tanah - tanah rakyat.
5. Adanya kontrol informasi, pendidikan dan penyangkalan kebenaran menumbuhkan berbagai masalah kemanusiaan.

Atas nama majelis warga, saya ingin mengucapkan sekali lagi penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada warga yang telah memberikan kesaksian dan telah berbagi seluruh kepedihan dan penderitaannya dengan cara yang menunjukkan ketabahan dan yang mengajak sesama warga untuk meningkatkan hati nurani kita masing - masing.

**“Marilah kita semua
bicara benar, karena
kebenaran adalah masa
depan kita bersama.”**

Terima kasih



PIDATO TERBUKA

Acara Forum Dengar Kesaksian
Tematis Koalisi Keadilan dan
Pengungkapan Kebenaran



Oleh : Dra. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum.

Menurut saya hampir tidak ada pola umum tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan fisik biasanya terjadi secara spontan ketika muncul sikap emosional yang memuncak saat terjadi konflik biasanya muncul ketika emosi lelaki sudah memuncak sehingga kehilangan kendali. Sementara kekerasan non fisik biasanya timbul justru di luar kesadaran para pelaku kekerasan, sehingga bisa terjadi dalam waktu yang lama. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, dengan latar belakang sosial dan pendidikan apa saja dan dengan sebab yang beragam, mulai sebab ekonomi sampai perselingkuhan dan lain sebagainya. Siklus kekerasan jenis ini akan naik ketika emosi naik, dan akan turun ketika emosi turun. Namun kekerasan psikhis akan tetap terjadi jika konflik tidak diselesaikan.

Benih konflik antar agama justru bukan berakar dari budaya kita. Dalam sejarahnya, hampir tidak ada konflik berdasarkan agama. Semua agama yang masuk di Nusantara berlangsung secara damai. Bahkan agama-agama yang mengalami konflik di daerah asalnya seperti

Sunny - Syiah - Ahmadiyah, Katholik - Protestan, Islam - Nasrani justru bisa hidup damai ketika masuk di Indonesia. Ini terjadi karena akar budaya kita menghargai spiritualitas yang bisa berdiri secara lintas agama. Konflik agama justru muncul belakangan, ketika terjadi gerakan puritanisasi dan radikalisasi agama, yang melindas akar-akar tradisi dan budaya Nusantara, yang bisa menjadi perajut keberagaman umat beragama. Inilah bahayanya kalau kita menghancurkan tradisi secara membabi buta, karena tradisi yang bernilai positif dan bisa menjadi perajut keberagaman justru ikut hancur, sehingga masing-masing agama kembali merujuk pada tradisi dari Negara asal masing-masing. Kalau sudah seperti ini, maka hampir dapat dipastikan terjadinya konflik tidak dapat dihindarkan.

Perebutan SDA terjadi karena adanya system yang tidak adil. Jadi sumber konflik itu menurut saya adalah ketidakadilan. Kalau SDA bisa dimanfaatkan secara adil, sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya maka konflik tidak terjadi. Pada masa Orba perebutan SDA bisa diredam karena Negara masih memiliki otoritas untuk men-

gelola, meskipun ada konflik tetapi tidak menghancurkan sendi kehidupan. Tetapi pada era reformasi, derajat ketidak-adilaaan menjadi semakin tinggi karena SDA tidak hanya dikuasai oleh Negara, tetapi oleh individu dan korporasi pemilik modal. Sementara Negara posisinya menjadi semakin lemah. Oleh karenanya sangat wajar jika konflik perebutan SDA menjadi semakin tinggi.

Penyebab terjadinya kekerasan atas nama keamanan, karena aparat hanya mengacu pada aturan legal formal yang kadang mengabaikan aspek keadilan. Aparat merasa memiliki legitimasi untuk bertindak kekerasan demi hukum dan aturan formal. Sementara rakyat merasa berani bertindak karena tuntutan rasa keadilan, karena merasa diperlakukan dhalim. Benturan inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan atas nama keamanan. Sikap seperti ini tidak hanya terjadi pada aparat Negara, tetapi juga kelompok mayoritas terhadap minoritas. Atas nama keamanan dan legalitas hukum, mereka tega bertindak kekerasan. Jadi menurut saya, semua ini terjadi karena hilangnya rasa keadilan dan empatik, sehingga mereka tega melakukan tindak kekerasan atasnama apapun.

Kita bisa memberikan perlindungan kepada pembela demokrasi dan HAM melalui tiga cara; pertama perlindungan hukum, dengan cara memberikan advokasi hukum kepada mereka. Kedua perlindungan fisik dengan cara memberikan perlindungan secara fisik dari berbagai ancaman dan tekanan kepada mereka. Hal ini pernah dilakukan Gus Dur terhadap beberapa aktivis yang mengalami

ancaman fisik. Mereka dititipkan di rumah kiai, di kawal anggota Banser dan Pagar Nusa. Ketiga perlindungan kultural dan teologis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun logika dan pemahaman teologis yang bisa dijadikan pijakan dan legitimasi teologis para pejuang demokrasi HAM, sehingga perjuangan mereka diterima, dan memasukkan para aktivis demokrasi HAM sebagai bagian dari kelompok mereka. Gus Dur juga melakukan hal ini, ketika banyak aktivis yang diburu dan dicap sebagai kaum liberal, Gus Dur justru melindungi mereka dengan memasukkan mereka sebagai bagian dari keluarga besar NU. Dengan cara ini, mereka tidak saja merasa nyaman karena mendapat perlindungan, tetapi juga membuat kelompok lain merasa jengah untuk terus memburu para aktivis Demokrasi dan HAM.

Jakarta, 25 November 2013

ORASI KEBUDAYAAN

Oleh: GKR Hemas

Yang terhormat:

- Ibu Prof Saparinah Sadli
- Ibu dan Bapak para Penyintas dari seluruh Indonesia
- Ibu dan Bapak para Majelis warga, saksi ahli dan panitia kegiatan KKP
- Teman-teman media dan hadirin sekalian

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan inisiasi kegiatan Forum Dengar Kesaksian Tematik dengan tema "Bicara Kebenaran, Memutus Lingkaran Kekerasan" yang diadakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran

Pertama karena ini merupakan "Agenda Reformasi" yang masih ditunda dan seolah ingin dilupakan selama 15 tahun ini. Kedua, kegiatan ini sangat kuat mencerminkan spirit reformasi ternyata masih bisa diambil alih oleh inisiasi dan peran penting gerakan masyarakat sipil, sebagaimana inisiasi reformasi 1998.

Melalui informasi dan beberapa video di website KKP, saya sudah menyaksikan sebagian kegiatan ini. Untuk itu saya juga menyampaikan rasa bangga, empati dan hormat pada seluruh ibu dan bapak penyintas yang sudah dengan keteguhan hati dan



keberaniannya mengungkap semua kebenaran. Ini sekaligus memberi teladan pada kita semua, bahwa para penyintas dengan kebesaran hatinya memberikan pengungkapan ini yang sarat dengan muatan maaf untuk memutus dendam dengan tetap mengupayakan keadilan agar tidak terjadi lagi korban dimasa depan.

Teladan ini menjadi karakter yang langka dari situasi bangsa kita sekarang yang masih terpaksa dan dipaksa hidup dalam budaya politik yang sarat bermuatan pencitraan, retorika dan KKN. Hal tersebut kian menjauhkan tujuan kita bersama untuk bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa ini dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberagaman yang bisa menjaga serta memelihara rasa hormat dan toleransi atas keberagaman budaya yang ada. Karena keberagaman budaya adalah realitas bangsa Indonesia yang dulu menjadi kekuatan jati diri bangsa kita. Oleh karenanya, paradigma mayoritas-minoritas tidak boleh lagi menjadi alasan negara untuk bisa memberikan tanggung jawab perlindungan dan rasa aman bagi siapa tanpa membedakan apapun latar belakangnya.

Saat ini kita akan menghadapi masa transisi politik 2014. Banyak pesimisme muncul karena merasa tidak banyak perubahan yang terjadi dalam nilai dan sistem politik yang justru semakin kuat menunjukkan inkonsistensi dan pencitraan yang berujung semu. Maka kita refleksikan pilihan kita, apakah kita memilih diam atau bangkit melawan?

KKPK adalah cermin pilihan kita bangkit melawan dari situasi ini dan meneruskan perjuangan refomasi gagal. Dan saya bangga bisa bersama dalam spirit itu dengan ibu bapak dan saudara-saudara semua yang hadir di ruangan ini.

Mari kita teruskan optimism perjuangan bangsa ini. 68 tahun kemerdekaan masih tidak seberapa dibandingkan ratusan tahun perjuangan nenek moyang dan pendahulu kita membebaskan diri dari kolonialisme asing. Rangkaian mengungkap kebenaran sudah membawa kita pada pilihan menetapkan tekad, semangat dan kerja keras untuk mewujudkan perjuangan ini.

- Mari kita juga menanamkan kembali kesadaran dan kemauan untuk mempraktekan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- Mari kita kembalikan semangat konsitusi sebagai payung untuk melahirkan kebijakan yang bisa menjamin peran dan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apapun latar belakang keberagaman yang ada dalam masyarakat kita
- Mari kita juga bersemangat mempraktekan semboyan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Jangan membiarkan siapapun bisa menelikungnya dan mengkhianatnya hanya untuk kepentingan sekelompok golongan saja

Dengan usaha itu, baru kita akan bisa menguatkan kembali makna Negara kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini kita bisa banyak belajar dari para penyintas, belajar dari kesalahan masa lalu dan jangan biarkan kegagalan nasionalisme ini memperburuk kondisi bangsa kita. Optimisme dan jiwa patriotik para penyintas dalam memperjuangkan keadilan adalah bentuk teladan kecintaan mereka akan mimpi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Kalau mereka begitu punya sikap patriotik sedemikian rupa, maka mari kita baur dengan usaha kita menumbuhkan budaya patriotik bagi diri kita dan generasi ke depan dalam memperjuangkan kembali tujuan dan cita-cita kemerdekaan negeri. Kita hadir di sini menjadi bukti bahwa amanat memegang estafet perjuangan itu harus kita jalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Mari kita teruskan budaya bangsa-bangsa nusantara yang dulu sangat tangguh, mari kita teruskan peran pendiri bangsa ini yang bisa menyatukan dunia. Mari kita jadikan semangat ini sebagai warisan paling berarti bagi generasi muda kita sekarang dan seterusnya

Semoga Tuhan melindungi bangsa ini dan terus menyemangati seluruh proses perjuangan kita ke depan. Terima kasih dan selamat berjuang!

Jakarta, 29 November 2013

MAJELIS



Ichsan Malik



Abdullah Faishol



Lies Marcus



Fien Jarangga



Hendrik Boenga



Agus Widjojo



Galuh Wandita



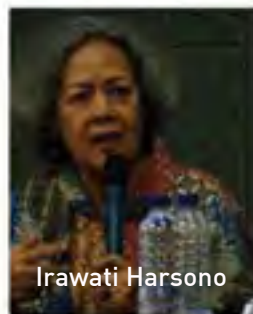
Dolorosa Sinaga



Jhoni Simanjuntak



Imam Aziz



Irawati Harsono



Lies Marantika



Septer Manufandu



Saparinah Sadli



Samsidar



Romo Leo Mali

WARGA



Ridha Saleh



Pendeta Paolina Bara Pa



Pater John Djongga



Noer Fauzi Rachman



Pendeta Yetty Leyloh



Vera Kartika Giantari



Tati Krisnawaty



Zumrotin KS



Tahmidy Lasahido



Miryam Nainggolan



Hj. Intje Mawar Abdullah



Elga Sarapung



Mohammad Zaelani Tamnaka



Nia Sjarifudin



Pendeta Mery Kolimon



Nani Nurrachman

UCAPAN TERIMA KASIH

Para pemberi kesaksian yang telah membuka diri untuk bercerita tentang penderitaan dan perjuangannya.

Mereka semua adalah pejuang penyintas yang tak lelah memperjuangkan kebenaran :

Dengar Kesaksian Solo

1. Budiarti
2. Sugeng Yulianto
3. Magdalena Katsinah
4. Sanusi
5. Sudiharjo
6. Djasmono Wongso Prawiro

Dengar Kesaksian Kupang

1. Bendelina Kola Raga
2. Ferderika Bessie Sinlae
3. Konrad Penlaana
4. Petrus Yohanes Neonleni
5. Rade Christian
6. Dorkas Nyake Wiwi
7. Filomena
8. Olandina da Silva Ximenes
9. Terezina Monteiro
10. Aleta Baun

Dengar Kesaksian Palu

1. Asman Yodjodolo
2. Mariyam Labonu
3. Arham Busura
4. Aminullah
5. Masrin Toana

Dengar Kesaksian Tertutup Aceh

1. Maimunah
2. Rukiah Ahmad
3. Saidah
4. Muharramah
5. Saudah
6. Juhari
7. Darni
8. Mariani
9. Lisa Fitria

Dengar Kesaksian Tematis Jakarta

Tema Kekerasan terhadap Perempuan

1. Migelina Anthonet Markus
2. Christina Sumarmiati
3. Maria de Fatima
4. Ainon Mardiah
5. Iin Tungka
6. Porman Boru Siagian
7. Tineke Rumkabu

Tema Operasi Militer

1. Murtala
2. Tika Mariah
3. Domingos Pinto de Araújo Moniz
4. Isabelinha Pinto
5. Christian Padwa

Tema Ideologi dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

1. Dewi Kanti
2. Mudji
3. Mujayin
4. Husain Safe
5. Azwar Kaili
6. Nazruddin Ahmadi

Tema Sumber Daya Alam dan Pembangunan

1. Neneng
2. H. Kardjana
3. Suhdin
4. Mursid Tenggara
5. Jaya
6. Nafian Faiz
7. Jardin Kololi

Tema Pembela HAM

1. Marsyiem
2. Marsini
3. Wahyu Susilo
4. Ferdinan Marisan
5. Baihajar Tualeka
6. Mugiyanto
7. Choirol Anam

Para majelis warga yang telah berpartisipasi dalam 10 kali acara dengar kesaksian:

Abdullah Faishol (Solo), Agus Widjojo (Jakarta), Dolorosa Sinaga (Jakarta), Elga Sarapung (Yogyakarta), Fien Jarangga (Jayapura), Galuh Wandita (Bali), Gomar Gultom (Jakarta), Hj. Ince Mawar Abdullah (Palu), Hendrik Boenga (Kupang), Ichsan Malik (Jakarta), Imam Aziz (Yogyakarta), Irawati Harsono (Jakarta), Jhoni Simanjuntak (Jakarta), Lies Marcoes (Jakarta), Lies Marantika (Ambon), Mohammad Zaelani Tammaka (Solo), Miryam Nainggolan (Jakarta), Nani Nurrachman (Jakarta), Nia Sjarifudin (Jakarta), Noer Fauzi Rachman (Bogor), Pater John Djongga (Papua), Pendeta Mery Kolimon (Kupang), Pendeta Paoina Bara Pa (Kupang), Pendeta Yetty Leyloh (Kupang), Ridha Saleh (Palu), Romo Leo Mali (Kupang), Saporinah Sadli (Jakarta), Samsidar (Aceh), Septer Manufandu (Jayapura), Tahmidy Lasahido (Palu), Tati Krisnawaty (Jakarta), Vera Kartika Giantari (Solo), Zumrotin KS (Jakarta)

Para Saksi Ahli dalam setiap acara kesaksian:

Pat Walsh, (Peneliti CAVR), Stanley Adiprasetyo, Pegiat HAM dan Anggota Dewan Pers Indonesia, Poengky Indarti (Direktur Imparsial), Asvi Warman Adam (Sejarahwan), Nia Sjarifudin (Sekjen ANBTI), Sjamsiah Achmad (Mantan Komisioner KKP Indonesia-Timor Leste), Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan), Pater John Mansford Prior, SVD (Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya Wairklau-Maumere, Desti Murdijana (Wakil Ketua

Komnas Perempuan), Masruchah (Wakil ketua Komnas Perempuan, Noer Fauzi Rahman (Direktur Sayogyo Institute), Mia Siscawati (Akademisi dan Aktivistis Rimbawan Muda Indonesia), Siti Maemunah (Pegiat Lingkungan).

Para relawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam mensukseskan pelaksanaan acara dengar kesaksian:

1. Tim Sekber '65 Solo
2. (Dengar Kesaksian Solo)
3. Tim Jaringan Perempuan Indonesia Timur/JPIT (Dengar Kesaksian Kupang)
4. Tim Koalisi NGO Aceh Aceh
5. (Dialog Publik Aceh)
6. Tim LBH APIK Aceh
7. (Dengar Kesaksian Tertutup Aceh)
8. Tim Elsham Papua & Fokker LSM Papua (Dengar Kesaksian Tertutup Papua)
9. Tim Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia/SKP-HAM dan Aliansi Jurnalis Indonesia Sulawesi Tengah (Dengar Kesaksian Palu)
10. Tim Panitia Dengar Kesaksian di Jakarta:

Rizka Argadianti Rachmah, Dian Purnama, Selviana Yolanda, Rini Pratsnawati, Christina Susanti, Kristin Manullang, Putri Kanesia, Anik Wusari, Nancy Sunarno, Soraya Ramli, Khalisah Khalid, Zico Mulia, Galih Andreatno, Zaenal Muttaqin, Wanmayetti, Elwi Elwi, Nova Damanik, Nurlaela Lamasitudju, Dodi Yuniar, Vitrial Azzarini, dr Miryam, Margareta Renita, Yenni Satriyadini, Moch Ainul Yaqin, Muhammad Berueh, Nelson Simamora, Eka Saputro, Moh. Syafari Firdaus (Video), SorgeMAz (film & live streaming), Robby (Fotografer).

Para individu dan kelompok seniman, perupa, penyanyi dan pembaca puisi yang mengisi acara dengar kesaksian:

Sanggar Seni Tampilangi, Neni Muhidin, Sanggar Seni Bolonggarui, Kelompok Seni Perempuan Banuata Pura, Kelompok Seni Pelajar SMPK St. Markus, Heriansyah Latief, Fajar Merah, Tim Penari Mahasiswa Asal Papua di Jakarta, Kelompok Seni Ibu Nani, Tim Paduan Suara Dialita, Kelompok Teater KIPPAS, Kiprah Perempuan Yogyakarta, Asfinawati, Putu Oka Sukanta, Murtala, Sanggar Akar

Institusi Negara dan Lembaga yang mendukung Pelaksanaan Dengar Kesaksian:

Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Solo, Komnas HAM Jakarta, Komnas Perempuan Jakarta, Kampus Teologia Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyelenggaraan dengar kesaksian dan penyusunan buku ini.

**KEPADA MEREKA
SEMUA KAMI UCAPKAN
TERIMA KASIH**

TIM PENYUSUN Narasi Kasus, Laporan Dengar Kesaksian dan Finalisasi Buku

Galuh Wandita	Rizka Argadianti Rachmah
Selviana Yolanda	Nurlaela AK Lamasitudju
Soraya Ramli	Nancy Sunarno
Putri Kanesia	Winarso
Rini Pratsanawati	Zico Mulia
Dodi Yuniar	Zandra Mambrasar
Sorang Saragih	Zaenal Mutaqqin.
Khalisah Khalid	Atikah Nuraini

TENTANG KKPK

KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) adalah aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM dengan cara mendorong pertanggungjawaban Negara untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. KKPK dibentuk tahun 2008, sebagai respon atas pembatalan UU KKR 27/2004 oleh Mahkamah Konstitusi.

KKPK menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak hanya berkaitan dengan pengakuan kebenaran, tetapi juga perlu mendorong berjalannya proses pengadilan, pemulihan/reparasi korban, dan memastikan agar pelanggaran tersebut tidak terulang.

Oleh karena itu, KKPK mendorong agar Negara menjalankan kewajibannya dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan memastikan korban memperoleh hak mereka atas Kebenaran, Keadilan dan Reparasi; berupaya meningkatkan pemahaman dan inisiatif masyarakat mengenai pelanggaran HAM yang berat, termasuk kebenaran dari pelanggaran tersebut; dan berusaha menciptakan kondisi dan mekanisme agar masyarakat dapat mengambil inisiatif dalam pemulihan korban. Informasi lebih lanjut tentang KKPK dapat dilihat di www.kkpk.org